PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG



SUMEDANG SIMPATI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

Bersama Membangun Sumedang



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh camat.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
18. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
21. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
25. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
33. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
34. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data Pembangunan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:

a. penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
b. pedoman dalam penyusunan Renstra;
c. pedoman dalam penyusunan RKPD; dan
d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup RPJMD meliputi :
   a. Visi dan Misi Bupati;
   b. Tujuan, Sasaran dan Strategi;
   c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
   d. Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:
   BAB I Pendahuluan;
   BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
   BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
   BAB V Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran;
   BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
   BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   BAB IX Penutup.

(3) Fungsi RPJMD sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6

(1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 7

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
    a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
    b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 8

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
    a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
    b. realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.
(4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
   b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
   a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
   b. program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024; dan
   c. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2023-2028 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupataen Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (5/49/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan teknokratik politik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom*-up). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 telah selesai kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan sumedang sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin.

BUPATI SUMEDANG,

H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.

DAFTAR ISI

Hal

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Maksud dan Tujuan..... I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan..... I-5
1.4 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8
1.5 Sistematika Penulisan..... I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... II-1
2.1.1.1 Letak Geografis..... II-1
2.1.1.2 Pembagian Wilayah Administratif..... II-2
2.1.1.3 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng..... II-3
2.1.1.4 Kondisi Curah Hujan, Suhu dan Kelembaban II-3
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi II-4
2.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana..... II-5
2.1.2 Demografi II-7
2.1.3 Potensi Sumber Daya II-10
2.1.3.1 Pola Ruang Kawasan Lindung II-10
2.1.3.2 Pola Ruang Kawasan Budidaya II-14
2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... II-19
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-22
2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Impact/makro) II-22
2.2.1.1.1 PDRB dan Pertumbuhannya II-22
2.2.1.1.2 Struktur Perekonomian II-23
2.2.1.1.3 Laju Pertumbuhan Perekonomian II-25
2.2.1.1.4 PDRB per Kapita II-27
2.2.1.1.5 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan II-27
2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-28
2.2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia II-28
2.2.1.2.2 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender II-30
2.2.1.2.3 Indikator Pendidikan II-30
2.2.1.2.4 Indikator Kesehatan II-33
2.2.1.2.5 Indikator Ketenagakerjaan II-35
2.2.2 Aspek Pelayanan Umum..... II-36
2.2.2.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-36
2.2.2.1.1 Urusan Pendidikan..... II-36
2.2.2.1.2 Urusan Kesehatan..... II-41
2.2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-72
2.2.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman II-76
2.2.2.1.5 Urusan Pertanahan II-78
2.2.2.1.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-80
2.2.2.1.7 Urusan Sosial..... II-82

2.2.2.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-83
2.2.2.2.1 Tenaga Kerja II-83
2.2.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-85
2.2.2.2.3 Urusan Pangan II-86
2.2.2.2.4 Urusan Lingkungan Hidup II-87
2.2.2.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-90
2.2.2.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-92
2.2.2.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-94
2.2.2.2.8 Urusan Perhubungan II-100
2.2.2.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika II-101
2.2.2.2.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-102
2.2.2.2.11 Urusan Penanaman Modal II-103
2.2.2.2.12 Urusan Kepemudaan dan Olahragal..... II-105
2.2.2.2.13 Urusan Statistik..... II-106
2.2.2.2.14 Urusan Persandian..... II-107
2.2.2.2.15 Urusan Kebudayaan..... II-107
2.2.2.2.16 Urusan Perpustakaan II-108
2.2.2.2.17 Urusan Kearsipan II-109
2.2.2.3 Fokus Urusan Pilihan..... II-110
2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang..... II-116
2.2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH..... II-126
2.2.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-127
2.2.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II-127
2.2.3.1.2 Nilai Tukar Petani..... II-128
2.2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-129
2.2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-130
2.2.3.3.1 Angka Kriminalitas..... II-132
2.2.3.3.2 Jumlah Demonstrasi II-132
2.2.3.3.3 Lama Proses Perizinan II-133
2.2.3.3.4. Jumlah Pajak dan Retribusi II-133
2.2.3.3.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha II-134
2.2.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia II-134
2.2.3.4.1 Rasio Ketergantungan II-134
2.2.3.4.2 Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3 dan Penduduk usia 15 tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan II-135
2.2.3.4.3. Jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan II-137
2.3 Rekapitulasi Interpretasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017 ..... II-139
2.4 Kinerja Pemerintahan Daerah Periode 2014-2018 ..... II-159
2.5 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) KLHS RPJMD 2019-2023 ..... II-161

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN..... III-1
3.1 Kinerja Keuangan masa lalu..... III-2
3.1.1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah..... III-3
3.1.1.1 Pendapatan Daerah..... III-3
3.1.1.2 Penerimaan Pembiayaan III-9

3.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah III-10
3.1.2.1 Realisasi Belanja Daerah III-10
3.1.2.2 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan III-14
3.1.2.3 Neraca Daerah III-16
3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-20
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-20
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-22
3.3 Kerangka Pendanaan III-27
3.3.1 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah III-27
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-40
3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya III-43

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
4.1.1 Idenfifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah IV-33
4.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan IV-32
4.3 Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ..... IV-66
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-3
5.3 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati V-6
5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah V-12
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah VI-2
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah VI-4
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR
TABEL DAN GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Tabel **Hal**

1.1. Keterkaitan RPJMD Sumedang 2019-2023 dengan RPJMN 2015-2019 ..... I-9
1.2 Fokus Perencanaan Pembangunan Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025 ..... I-10

Gambar

1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel

2.1 Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Luas Wilayah II-2
2.2 Suhu Udara Kabupaten Sumedang..... II-4
2.3 Kawasan Rawan Bencana II-6
2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang..... II-8
2.5 PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2012-2017 ..... II-22
2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2012-2017 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah..... II.23
2.7 Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2012-2017 (persen) Menurut Lapangan Usaha II-24
2.8 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2011-2017 ..... II-26
2.9 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Sumedang 2012-2017 ..... II-27
2.10 Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang II-28
2.11 IPM Kabupaten Sumedang dan Komponen Penyusunnya Tahun 2011-2016 ..... II-29
2.12 Capaian Indikator Gender Kabupaten Sumedang II-31
2.13 Indikator Makro Pendidikan Kabupaten Sumedang II-32
2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016 ..... II-34
2.15 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang..... II-36
2.16 Indikator Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata II-38
2.17 Indikator Sekolah Kondisi Bangunan Baik..... II-39
2.18 Indikator Persentase Guru yang Bersertifikasi II-43
2.19 Rasio Posyandu Per Satuan Balita II-43
2.20 Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk II-44
2.21 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk II-44
2.22 Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017 ..... II-46
2.23 Cluster Penanggulangan Krisis Kesehatan II-75
2.24 Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik II-77

2.25 Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk II-78
2.26 Rasio Jaringan Irigasi &Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik..... II-79
2.27 Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh II-70
2.28 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-86
2.29 Indikator Kinerja Urusan Sosial II-88
2.30 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja II-89
2.31 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-91
2.32 Indikator Kinerja Urusan Pangan II-92
2.33 Indikator Jumlah dan Kapasitas Tempat Pembuangan Sampah II-94
2.34 Indikator Pengawas Amdal dan UKL/UPL Penegakan Hukum II-95
2.35 Data Base Kependudukan Nasional berbasi NIK II-98
2.36 Indikator Kinerja Urusan Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa II-99
2.37 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-104
2.38 Indikator Kinerja Pelayanan Perhubungan II-106
2.39 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ... II-108
2.40 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-109
2.41 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal II-110
2.42 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-112
2.43 Indikator Kinerja Urusan Statistik II-112
2.44 Indikator Kinerja Urusan Persandian II-113
2.45 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan II-114
2.46 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan II-115
2.47 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan II-116
2.48 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata II-118
2.49 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan II-119
2.50 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan II-119
2.51 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian II-120
2.52 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi II-122
2.53 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan II-123
2.54 Indikator Kinerja Urusan Keuangan II-126
2.55 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan II-127
2.56 Indikator Kinerja Urusan Pengawasan II-128
2.57 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD II-129
2.58 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan II-131
2.59 Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ... II-133
2.60 Indikator Presentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total Desa II-134
2.61 Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi II-137
2.62 Rasio Ketergantungan II-141
2.63 Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 ..... II-142
2.64 Penduduk 15 Tahun ke atas berdasarkan pendidikan II-143
2.65 Jumlah PNS yang bekerja menurut pendidikan yang di

tamatkan II-144
2.66 Kinerja Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang II-145
2.67 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah per Misi Periode 2014-2018 ..... II-162
2.68 Tabel Korelasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2013 - 2017 dan Pencapaian Visi, Misi Pembangunan Periode Tahun 2013-2017 ..... II-163
2.69 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial II-165
2.70 Rekapitulasi Pencapaian Pilar Sosial sesuai dengan Kewenangan OPD..... II-183
2.71 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi II-184
Rekapitulasi Pencapaian Pilar Ekonomi sesuai dengan Kewenangan OPD II-187
2.72 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan II-188
2.73 Rekapitulasi Pencapaian Pilar Lingkungan sesuai dengan Kewenangan OPD II-194
2.74 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola II-194
2.7 Rekapitulasi Pencapaian Pilar Hukum dan Tata Kelola sesuai dengan Kewenangan OPD II-197

Gambar

2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang II-1
2.2 Grafik Curah hujan dan Suhu Kabupaten Sumedang berdasarkan Bulan II-4
2.3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang II-7
2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2017 .. II-9
2.5 Arsitektur Penyajian Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah..... II-21
2.6 Grafik Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2011-2016 ..... II-30
2.7 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah II-38
2.8 Grafik APK PAUD Sederajat II-40
2.9 Grafik Angka Putus Sekolah II-40
2.10 Grafik Angka Kelulusan II-41
2.11 Grafik Angka Melanjutkan II-42
2.12 Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II-42
2.13 Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani... II-47
2.14 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes yang Memiliki Kompetensi Kebidanan II-48
2.15 Grafik Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) II-48
2.16 Grafik Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan..... II-49
2.17 Distribusi Kasus DBD berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Sumedang..... II-50
2.18 Distribusi Kasus DBD berdasarkan Waktu di Kabupaten Sumedang Tahun 2018..... II-50
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin..... II-51
2.19 Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 ..... II-52
2.20 Grafik Cakupan Kunjungan Bayi II-54

2.21 Grafik Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu II-55
2.22 Grafik Presentase Ketersediaan Obat di Puskesmas II-55
2.23 Grafik Presentase Kualitas Posyandu II-56
2.24 Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Sumedang II-57
2.25 Kasus Penyakit Malaria II-58
2.26 Kasus Filariasis II-59
2.27 Jumlah Temuan Kasus TBC Tahun 2016 ..... II-60
2.28 Sebaran Penyakit Diare Tahun 2018 ..... II-61
2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada orang beresiko HIV di Kabupaten Sumedang II-62
2.30 Positif Rate HIV di Kabupaten Sumedang Tahun 2018..... II-63
Cakupan Pelayanan K1 dan K4 ..... II-65
2.31 Trend Cakupan Neonatus II-66
2.32 Cakupan KN1 per Kecamatan II-67
2.33 Cakupan KN lengkap per Kecamatan II-67
2.34 Cakupan Fe1 dan Fe2 ..... II-69
2.35 Berat Badan Bayi Lahir Rendah II-70
2.36 Asi Ekslusif II-70
2.37 Balita Bawah Garis Merah II-71
2.38 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut II-72
2.39 Rawat Jalan, Rawat Inap RSUD Sumedang II-73
2.40 Rawat Jalan, Rawat Inap RSU Pakuwon II-74
2.41 Rawat Jalan, Rawat Inap RSU Harapan Keluarga II-74
2.42 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota..... II-80
2.43 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih II-81
2.44 Grafik Rumah Tangga ber-Sanitasi II-81
2.45 Grafik Rumah Layak Huni II-82
2.46 Aset Tanah Pemerintah Kabupaten sumedang II-84
2.47 Kasus Pertanahan di Kabupaten Sumedang II-84
2.48 Grafik Penanganan Sampah Wilayah Perkotaan II-93
2.49 Grafik Penanganan Sampah Skala Kabupaten II-80
2.50 Grafik Rasio Penduduk ber KTP II-96
2.51 Grafik Rasio Bayi Berakte Kelahiran II-97
2.52 Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah II-97
2.53 Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk .. II-98
2.54 Grafik Pemasangan Rambu – Rambu II-107
2.55 Grafik Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan utama lokal lainnya per Hektar II-116
2.56 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB II-117
2.57 Grafik Penyaluran per Kapita Kabupaten Sumedang II-135
2.58 Nilai Tukar Petani II-136
2.59 Presentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih II-137

BAB III. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel

3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 s.d 2017 ..... III-4
3.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2017 ..... III-4

3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terkahir dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017..... III-7
3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017..... III-9
3.5 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir III-11
3.6 Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun 2015 s.d Tahun 2017 ..... III-12
3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015 s.d Tahun 2017..... III-13
3.8 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2017 ..... III-15
3.9 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017..... III-17
3.10 Realisasi Kebutuahn Belanja Aparatur Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun III-20
3.11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir III-21
3.12 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 ..... III-23
3.13 Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 ..... III-25
3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan total Penerimaan Daerah Kabupaten Sumedang III-32
3.15 Rata – Rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang .. III-35
3.16 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat..... III-39
3.17 Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah III-42

Bab IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel

4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... IV-2
4.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas IV-4
4.3 Alternatif dan Rekomendasi Skenario IV-34
4.4 Alternatif dan Rekomendasi Skenario terhadap data indikator TPB..... IV-57
4.5 Indikator SDGs bersifat Makro..... IV-60
4.6 Indikator SDGs bersifat Outcome Program..... IV-61

4.7 Indikator SDGs dalam Renstra IV-62

Gambar
4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 ..... IV-32
4.2 Hasil Analisa Isu-isu Strategis Berdasarkan kriteria Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ..... IV-65

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Tabel
5.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat V-15
5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang..... V-20
Gambar
5.1 Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang Tahun 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023 ..... V-11
5.2 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... V-12

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel
6.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah..... VI-5
6.2 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang..... VI-11
6.3 Rencana Proyek Strategis Kabupaten Sumedang..... VI-13
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan VI-33
6.5 Tema Tahunan dan Penjelasannya VI-36
6.6 Fokus Arah Kebijakan pada tema Tahunanan VI-38
6.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... VI-41
6.8 Tujuan, sasaran dan arah kebijakan VI-44
Gambar
6.1 Kawasan Strategis Kabupaten VI-11

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Tabel
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023..... VII-2
7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 ..... VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel
8.1 Penetapan Indikator Makro VIII-2
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023..... VIII-3
8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Sumedang VIII-4

8.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Daerah VIII-25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Dalam perspektif pembangunan, Kabupaten Sumedang yang terletak di Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya, untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat Sumedang, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Pada Tahun 2018, telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumedang yang menetapkan pasangan H. Dony Ahmad Munir, ST., MM sebagai Bupati dan H. Erwan Setiawan, SE sebagai Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2018-2023 dan telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 September 2018.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode Tahun 2018-2023.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten, mengarah pada percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Adapun pendekatan politik

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Lebih lanjut, secara substansi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan tematik holistik bermakna dilakukannya penanganan menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian program prioritas sehingga kegiatan yang dilaksanakan betul-betul ditujukan untuk terwujudnya misi. Pendekatan integratif bermakna adanya keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras antara organisasi perangkat daerah dalam mencapai prioritas daerah. Adapun pendekatan spasial bermakna kegiatan-kegiatan direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi: tahap perumusan kajian teknokratik, perumusan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD; pelaksanaan musrenbang RPJMD; perumusan rancangan akhir RPJMD; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan tahap Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang memuat target-target pembangunan periode Tahun 2018-2023. Dengan sasaran pokok pada RPJPD sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang bependidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan Industri;
3. Terwujudnya masyarakat daerah berahlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang semakin toleran sesuai dengan falsafah pancasila;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;

5. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia;

1.2. Maksud Dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud :

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018-2023;
2. Sebagai landasan penyusunan RKPD setiap Tahun pada periode RPJMD;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2018-2023;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah, agar RPJMD:

1. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Menjadi sumber instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
6. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
9. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun dengan berdasarkan atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

A. RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1
Keterkaitan RPJMD Sumedang Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

No	RPJMN	RPJMD
1	Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam konteks perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)	Meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, **Kab. Sumedang**), dalam rangka mempercepat perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan lingkungan
2	Lokasi prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa-Bali	**Kabupaten Sumedang** diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan pariwisata perkotaan (*urban tourism*)

No	RPJMN	RPJMD
3	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	1. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-**Sumedang**-Kertajati-Kadipaten-Cirebon; 2. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-**Sumedang**-Dawuan;

Sumber : RPJMN 2015-2019 Buku III

B. RPJPD Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahap Keempat dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD. Adapun fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

Tabel 1.2
Fokus Perencanaan Pembangunan
Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025

No	Fokus Perencanaan Pembangunan Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025
1.	Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan
2	Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi *supporting system* bagi aktivitas ekonomi kreatif
3	Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagamaan yang beragam dalam suasana penuh toleransi
4	Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi *customer satisfaction*
5	Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi *supporting system* bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah
6	Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma-norma konstitusi negara dan Pancasila
7	Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan
8	Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat
9	Meningkatkan kemandirian desa

No	Fokus Perencanaan Pembangunan Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025
10	Pemantapan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
11	Peningkatan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran
12	Pemantapan penanganan jaringan air kotor/limbah dan persampahan
13	Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman termasuk penanganan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan
14	Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi, dan nasional termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia
15	Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2050
16	Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat
17	Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan
18	Pemantapan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian
19	Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional
20	Pemantapan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah
21	Pemantapan realisasi rencana pembangunan strategis seperti jalan tol Cisumdawu dan waduk Jatigede
22	Pemantapan partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai

Sumber : RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

C. RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

D. RKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

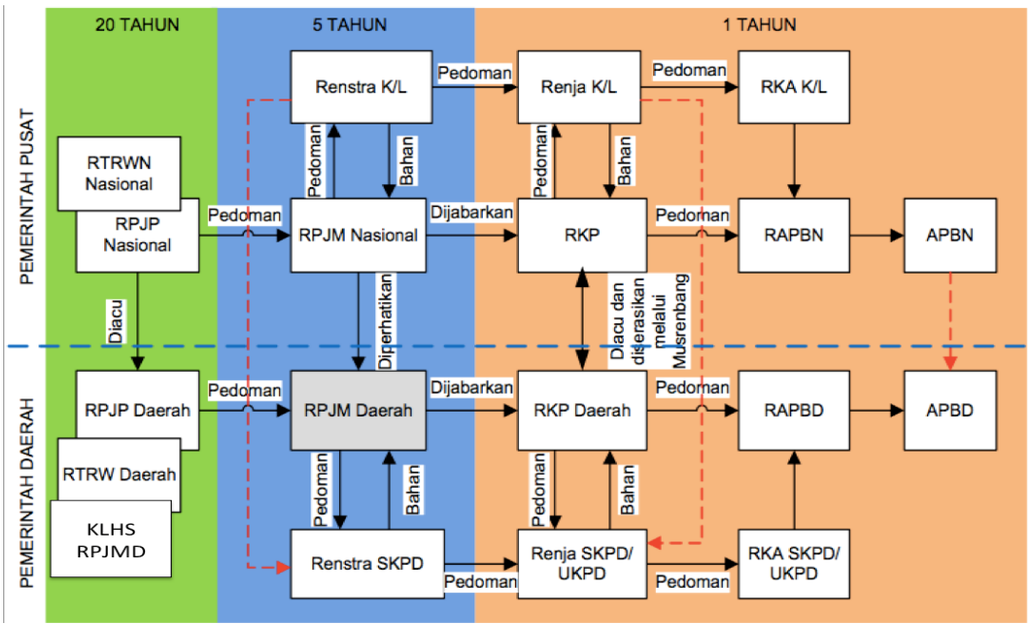
Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan

F. Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 terdiri dari 9 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kabupaten Sumedang serta gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2018-2023.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) Tahun ke depan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) Tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kebutuhan operasional.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menguraikan peran RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

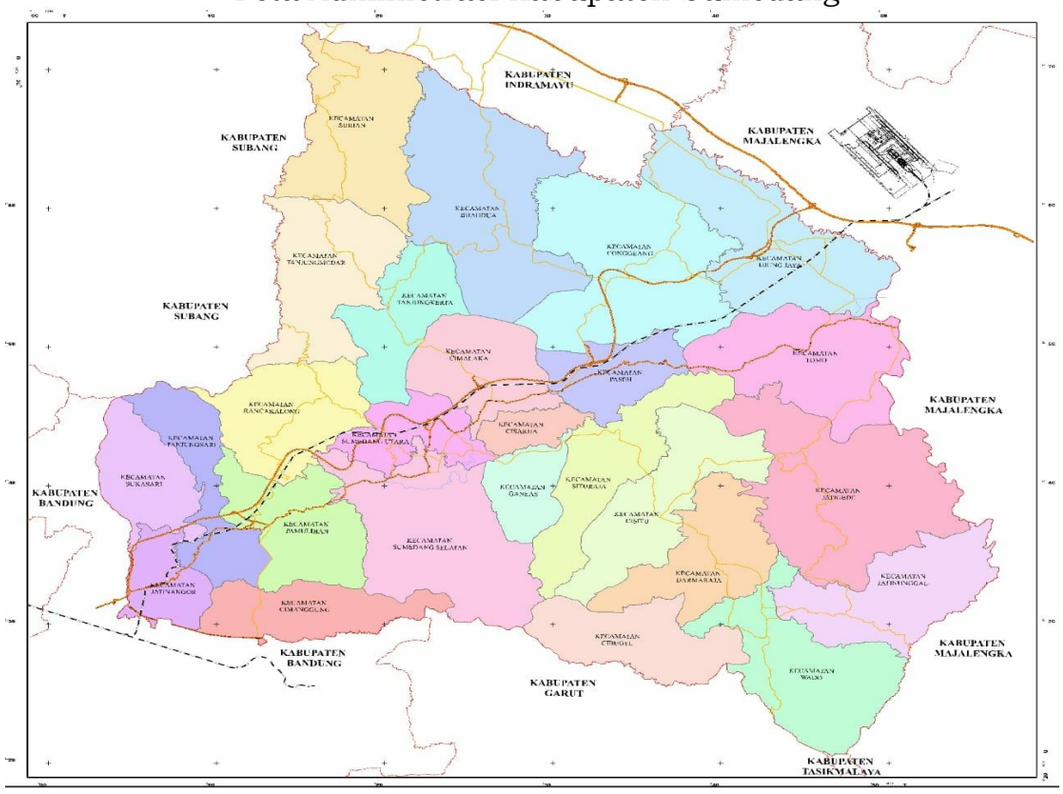
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06^{0}34’46,18”-7^{0}00’56,25” Lintang Selatan dan 107^{0}01’45,63”- 108^{0}12’59,04” Bujur Timur.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;
d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

2.1.1.2. Pembagian Wilayah Administratif

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.392 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.450 Ha.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Wado	7.334	10
2	Jatinunggal	6.311	9
3	Darmaraja	5.403	12
4	Cibugel	4.999	7
5	Cisitu	6.398	10
6	Situraja	5.666	15
7	Conggeang	11.220	12
8	Paseh	3.382	10
9	Surian	7.645	9
10	Buahdua	11.149	14
11	Tanjungsari	4.319	12
12	Sukasari	3.899	7
13	Pamulihan	5.367	11
14	Cimanggung	4.298	11
15	Jatinangor	2.562	12
16	Rancakalong	5.596	10
17	Sumedang Selatan	9.659	10/4
18	Sumedang Utara	3.132	10/3
19	Ganeas	2.525	8
20	Tanjungkerta	4.393	12
21	Tanjungmedar	6.688	9
22	Cimalaka	4.755	14
23	Cisarua	1.450	7
24	Tomo	7.592	9
25	Ujungjaya	8.738	9
26	Jatigede	11.392	11

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

2.1.1.3. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

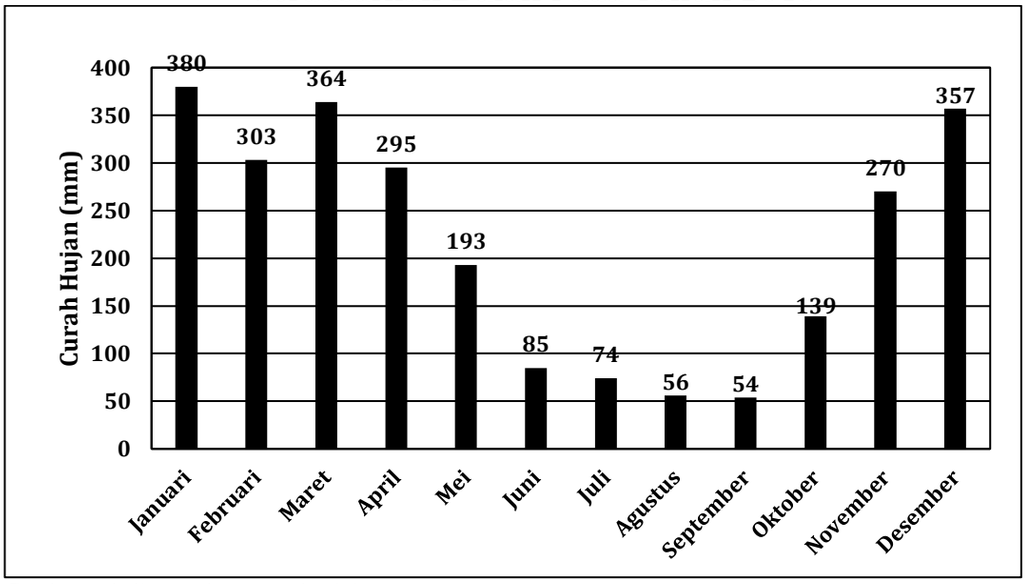
Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu:

1. 0–8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8–15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

2.1.1.4. Kondisi Curah Hujan, Suhu, dan Kelembaban

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 24,7^{0}C, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Berdasarkan data curah hujan pada Gambar 2.2, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Grafik Curah hujan Kabupaten Sumedang
berdasarkan Bulan Pada Tahun 2018



Sumber : id.climate-data.org, dioolah

Berdasarkan Tabel 2.2, bulan Oktober adalah bulan terhangat sepanjang tahun. Suhu di Oktober rata-rata 25.3 °C. Sedangkan pada bulan Juli, suhu rata-rata adalah 24.1 °C yang merupakan suhu rata-rata terendah sepanjang tahun.

Tabel 2.2
Suhu Udara Kabupaten Sumedang

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Rata-rata tahunan
Suhu rata-rata (°C)	24,5	24,5	24,6	24,9	24,9	24,4	24,1	24,3	24,8	25,3	25,1	24,8	24,7
Suhu maksimum rata-rata (°C)	20,5	20,3	20,3	20,4	20,3	19,3	18,9	18,7	19,1	19,8	20,3	20,4	19,9
Suhu minimum rata-rata (°C)	28,6	28,7	29,0	29,5	29,6	29,5	29,3	29,9	30,5	30,8	29,9	29,3	29,6

Sumber : id.climate-data.org, diolah

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;

3. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

2.1.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai- sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor.

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Kawasan Rawan Bencana

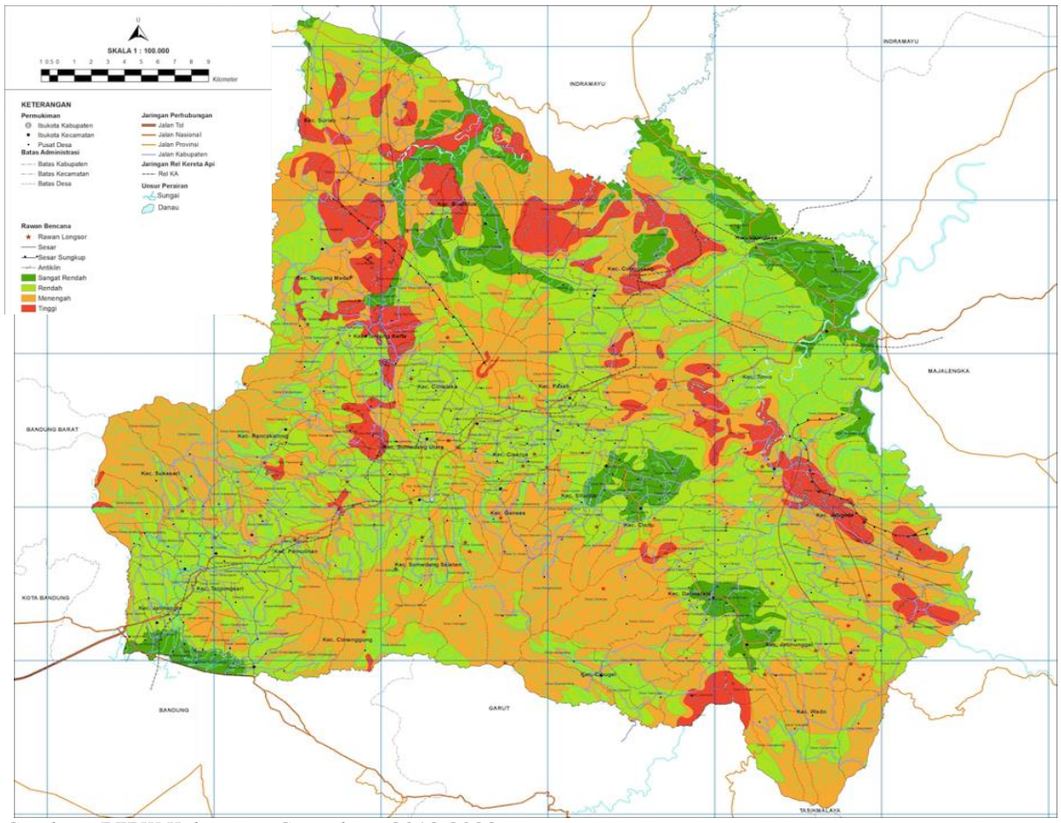
No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah kabupaten	Luas kurang lebih 21.612 Ha
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung;	-

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
		c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	-

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

2.1.2.Demografi

Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2018 sebanyak 1.148.198 jiwa yang terdiri atas 579.337 jiwa penduduk laki- laki dan 568.861 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2017, penduduk Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 2.049 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Tahun 2018 sebesar 99,29. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan angka fertilitas/kelahiran akan meningkat.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mencapai 737 jiwa/km^2. Kepadatan Penduduk di 26 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Sumedang Utara dengan kepadatan sebesar 3.186 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Surian sebesar 162 jiwa/Km^2.

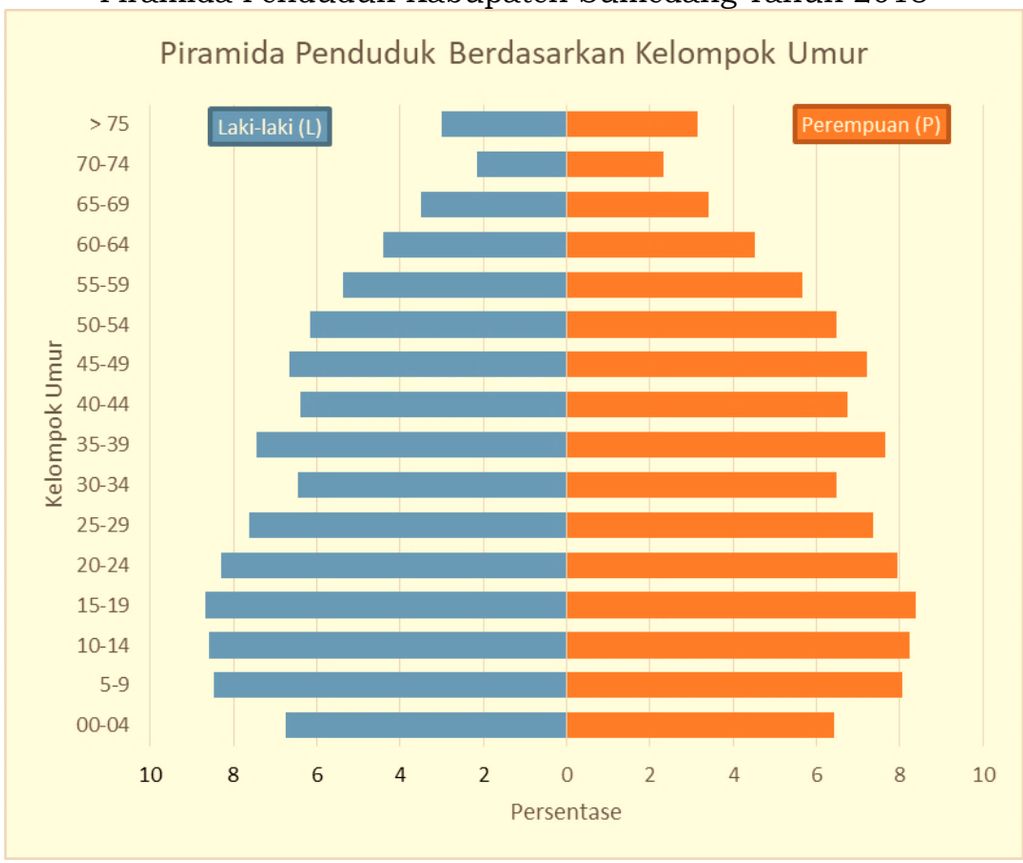
Tabel 2.4
Jumlah, Kepadatan, Pertumbuhan Penduduk dan Luas Wilayah
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (jiwa/Km^2)	Pertumbuhan (Jiwa)
1	2	3	4	5	6
1	WADO	43.685	84,27	518	143
2	JATINUNGGAL	45.324	72,12	628	(73)
3	DARMARAJA	37.057	49,38	750	132
4	CIBUGEL	24.533	59,52	412	25
5	CISITU	30.510	65,03	469	82
6	SITURAJA	42.023	43,23	972	257
7	CONGGEANG	29.201	106,98	273	(260)
8	PASEH	38.296	31,62	1,211	70
9	SURIAN	11.508	70,88	162	(253)
10	BUAHDUA	32.835	107,68	305	(123)
11	TANJUNGSARI	82.486	44,86	1,839	984
12	SUKASARI	32.180	41,82	769	(538)
13	PAMULIHAN	60.031	50,70	1,184	222
14	CIMANGGUNG	84.260	55,55	1,517	(17)
15	JATINANGOR	90.270	31,60	2,857	971
16	RANCAKALONG	40.271	55,07	731	33
17	SUMEDANG SELATAN	79.856	92,51	863	219
18	SUMEDANG UTARA	96.840	30,40	3,186	1,519
19	GANEAS	26.060	22,90	1,138	194
20	TANJUNGKERTA	34.667	43,72	793	(190)
21	TANJUNGMEDAR	26.248	60,67	433	(93)
22	CIMALAKA	61.659	43,29	1,424	217
23	CISARUA	20.773	17,71	1,173	28
24	TOMO	23.305	84,74	275	(203)
25	UJUNG JAYA	31.855	86,23	369	(811)
26	JATIGEDE	22.465	106,24	211	(486)
	TOTAL KABUPATEN	**1.148.198**	**1.558,72**	**737**	**2,049**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga menunjukkan penduduk Kabupaten Sumedang berstruktur umur muda. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 adalah sebesar 1.148.198 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 579.337 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 568.861 jiwa.

Dari 579.337 jiwa penduduk laki-laki, proporsi jumlah penduduk laki-laki usia 0-14 tahun adalah sebesar 23,83 %, usia 15-64 tahun sebesar 67,52 % dan usia di atas 65 tahun sebesar 8,65 %. Sedangkan dari 568.861 jiwa penduduk perempuan, proporsi jumlah penduduk perempuan usia 0-14 tahun adalah sebesar 22,69 %, usia 15-64 tahun sebesar 68,43 % dan usia di atas 65 tahun sebesar 8,87 %. Berdasarkan komposisi dimaksud, penduduk usia produktif (15-64 tahun) merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang, karena proporsi usia tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia non produktif.

Bonus demografi ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok usia produktif perlu mendapatkan perhatian dan

pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada Tahun 2018, ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 47 %. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 47 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.

2.1.3.Potensi Sumberdaya

2.1.3.1. Pola Ruang Kawasan Lindung

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Sumedang, memiliki luas kurang lebih 9.085 Ha yang meliputi :

a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Situraja; j. Kecamatan Cisitu; k. Kecamatan Darmaraja; l. Kecamatan Cibugel; m. Kecamatan Jatinunggal; n. Kecamatan Jatigede; o. Kecamatan Tomo; p. Kecamatan Conggeang; q. Kecamatan Paseh; r. Kecamatan Cimalaka; s. Kecamatan Tanjungkerta; t. Kecamatan Tanjungmedar; dan u. Kecamatan Buahdua.

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 20.017 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

C.1. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 2.318 Ha yang meliputi: a.Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Rancakalong; d.Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g.Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Cisarua; j.Kecamatan Cimalaka; k. Kecamatan Paseh; l. Kecamatan Tanjungkerta; m.Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Darmaraja; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Cibugel; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.

C.2. Kawasan Sempadan Waduk

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dengan ketentuan bentuk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas 1.255 Ha, meliputi : a. Kecamatan Situraja; b. Kecamatan Cisitu; c. Kecamatan Darmaraja; d. Kecamatan Cibugel; e. Kecamatan Wado; f. Kecamatan Jatinunggal; g.Kecamatan Jatigede; h.Kecamatan Ujungjaya; i.Kecamatan Conggeang; j. Kecamatan Paseh; k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.

C.3 Kawasan Danau

Kawasan danau dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Tomo; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungkerta; e. Kecamatan Tanjungmedar; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.

C.4 Kawasan Waduk

Kawasan waduk dengan luas kurang lebih 3.293 hektar meliputi: a. Kecamatan Cisitu; b. Kecamatan Darmaraja; c. Kecamatan Cibugel; d. Kecamatan Wado; e. Kecamatan Jatinunggal; f. Kecamatan Jatigede; g. Kecamatan Ujungjaya; h. Kecamatan Buahdua; i. Kecamatan Conggeang; dan j. Kecamatan Surian.

C.5 Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m.Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Cibugel; s. Kecamatan Wado; t. Kecamatan Jatinunggal; u. Kecamatan Jatigede; v. Kecamatan Tomo; w. Kecamatan Ujungjaya; x. Kecamatan Conggeang; y. Kecamatan Buahdua; dan z. Kecamatan Surian.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

D.1 Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam berupa Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 133 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinunggal; dan b. Kecamatan Jatigede.

D.2 Kawasan Taman Hutan Raya

Kawasan taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 34 Ha terletak di Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan meliputi: a. Gunung Palasari; dan b. Gunung Kunci.

D.3 Kawasan Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.074 Ha meliputi:a. Kecamatan Cimalaka; b. Kecamatan Conggeang; dan c. Kecamatan Buahdua.

D.4 Kawasan Lindung Geologi

D.4.1 Kawasan Cekungan Air Tanah meliputi:

a) cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
b) cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan

c) cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi: 1. Kecamatan Cimanggung; 2. Kecamatan Pamulihan; 3. Kecamatan Tanjungsari; 4. Kecamatan Sukasari; 5. Kecamatan Rancakalong; 6. Kecamatan Sumedang Utara; 7. Kecamatan Sumedang Selatan; 8. Kecamatan Ganeas; 9. Kecamatan Cisarua; 10. Kecamatan Cimalaka; 12. Kecamatan Paseh; 13. Kecamatan Tanjungkerta; 14. Kecamatan Situraja; 15. Kecamatan Cisitu; 16. Kecamatan Darmaraja; 17. Kecamatan Cibugel; 18. Kecamatan Wado; 19. Kecamatan Jatinunggal; 20. Kecamatan Tomo; 21. Kecamatan Ujungjaya; 22. Kecamatan Conggeang; 23. Kecamatan Buahdua; dan 24. Kecamatan Jatinangor.

D.4.2 Kawasan Sempadan Mata Air dengan luas 1.194 Ha meliputi : a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Jatigede; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Conggeang; f. Kecamatan Paseh; g. Kecamatan Cimalaka; h.Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; dan j. Kecamatan Buahdua.

D.5 Kawasan Lindung Lainnya

D.5.1 Kawasan Taman Buru berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 8.672 Ha meliputi :

a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.263 ha;
b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 876 ha;
c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 3.364 ha;
d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 76 ha;
e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 832 ha;
f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 881 ha;
g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 392 ha; dan
h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 988 ha.

D.5.2 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Situs dan Wisata Sejarah.

D.5.3 Kawasan RTH perkotaan dengan luas kurang lebih 2.774 ha yang ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan meliputi:

a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%; dan

b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 %.

2.1.3.2. Pola Ruang Kawasan Budidaya

A. Kawasan Hutan Produksi

A.1 Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a.Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d.Kecamatan Cisitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k.Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n.Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.

A.2 Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan memiliki luas kurang lebih 13.606 Ha, meliputi : a. Kecamatan Pamulihan; b.Kecamatan Sumedang Selatan; c. Kecamatan Wado; d. Kecamatan Jatigede; e.Kecamatan Tomo; f. Kecamatan Ujungjaya; g. Kecamatan Conggeang; h.Kecamatan Paseh; i. Kecamatan Cimalaka; j. Kecamatan Tanjungmedar; k.Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.

Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas 4.382 Ha.

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d. Kecamatan Cisitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.

Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas kurang lebih 1.180 Ha.

B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 4.734 Ha, meliputi : a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Sumedang Selatan; d. Kecamatan Ganeas; e. Kecamatan Cisarua; f. Kecamatan Cimalaka; g. Kecamatan Paseh; h. Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; j. Kecamatan Situraja; k. Kecamatan Cisitu; l. Kecamatan Darmaraja; m. Kecamatan Cibugel; n. Kecamatan Wado; o. Kecamatan Jatinunggal; p. Kecamatan Jatigede; q. Kecamatan Tomo; r. Kecamatan Ujungjaya; s. Kecamatan Conggeang; t. Kecamatan Buahdua; dan u. Kecamatan Surian.

C. Kawasan Pertanian

C.1 Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 30.069 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi: a. lahan beririgasi; dan b. lahan tidak beririgasi.

C.2 Kawasan Peruntukan Hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C.4 Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

a. kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong di luar kawasan nasional, dan kawasan ternak besar lainnya;
b. kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten; dan
c. Kawasan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pakan Tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C.5 Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 30.069 Ha.

D. Kawasan Perikanan

D.1 Kawasan Perikanan Budidaya Kolam

Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ, dan embung tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

D.2 Kawasan Perikanan Budidaya Waduk

Kawasan perikanan budidaya di Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas yang diarahkan sebagai kawasan minapolitan.

E. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan berdasarkan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Adapun kawasan wilayah usaha pertambangan meliputi : a. Kecamatan Tanjungsari; b. Kecamatan Pamulihan; c. Kecamatan Rancakalong; d. Kecamatan Sumedang Utara; e. Kecamatan Situraja; f. Kecamatan Cisitu; g. Kecamatan Darmaraja; h. Kecamatan Jatinunggal; i. Kecamatan Jatigede; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Paseh; n. Kecamatan Cimalaka; o. Kecamatan Cisarua; p. Kecamatan Tanjungkerta; q. Kecamatan Tanjungmedar; r. Kecamatan Buahdua; dan s. Kecamatan Surian.

E. Kawasan Pariwisata

E.1 Pariwisata Budaya

Pengembangan pariwisata budaya meliputi:

a. Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
b. Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
c. Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
d. Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
e. Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
f. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;
g. relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
    1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
    2. Situs Tajimalela di Kecamatan Cisitu; dan
    3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
h. Wisata *Geotheatre* di Kecamatan Rancakalong; dan
i. Wisata budaya lainnya.

E.2 Pariwisata Alam

Pengembangan pariwisata alam meliputi: a. Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor; b. Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari; c. Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka; d. Baru beureum di Kecamatan Sukasari; e. Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan; f. Curug Sindulang di Kecamatan Cimanggung; g. Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan; h. Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan; i. TWA Gunung Kunci di Kecamatan Sumedang Selatan; j. TWA Gunung Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan; k. Situ Sari di Kecamatan Tomo; l. Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua; m. Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua; n. Pangjugjugan di Kecamatan Pamulihan; o. Panenjoan di Kecamatan Rancakalong; p. Bumi Kahiyangan di Kecamatan Sukasari; q. Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan r. Wisata Alam lainnya.

E.3 Pariwisata Buatan

Pengembangan pariwisata buatan meliputi: a. pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede; b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede; c. Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan; d. Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede; e. Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede; f. Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan g. Wisata buatan lainnya.

E.4 Pariwisata Minat Khusus

Pengembangan pariwisata minat khusus meliputi: a. pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan; b. pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisitu; c. pengembangan objek wisata Klub Golf di Kecamatan Jatinangor; dan d. pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.

E.5 Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terletak di kawasan pariwisata jatigede.

F. Kawasan Industri

F.1 Kawasan Industri Besar

Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi:

a. optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha meliputi:
   1. Kecamatan Jatinangor; dan
   2. Kecamatan Cimanggung.
b. pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.517 Ha meliputi:
   1. Kecamatan Ujungjaya; dan
   2. Kecamatan Tomo.
c. pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.147 Ha di Kecamatan Buahdua.

F.2 Kawasan Industri Menengah

Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas:

a. pengembangan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
b. pengembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
c. pengembangan sentra-sentra IKM di area peristirahatan dan *interchange* jalan bebas hambatan dalam rangka antisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.

F.3 Kawasan Industri Kecil

Kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

G. Kawasan Permukiman

G.1 Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 9.246 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Cimalaka; i. Kecamatan Paseh; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Cisarua; dan n. Kecamatan Tanjungkerta.

G.2 Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 7.772 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

H. Kawasan Peruntukan Lainnya

H.1 Pusat Pemerintahan Kabupaten

Kawasan pusat pemerintahan kabupaten memiliki luas kurang lebih 32 Ha terletak di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

H.2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) di Kecamatan Cimalaka; b. komando distrik militer (KODIM) 0610 di Kecamatan Sumedang Selatan; c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) di Kecamatan Sumedang Selatan; d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara; dan e. Koramil, dan Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

H.3. Sarana prasarana Instalasi PLTA Parakan Kondang dan Instalasi lainnya

Sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang dan instalasi lainnya memiliki luas kurang kebih 278 Ha terletak di Kecamatan Jatigede. Instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

H.4 Kawasan Pendidikan Tinggi

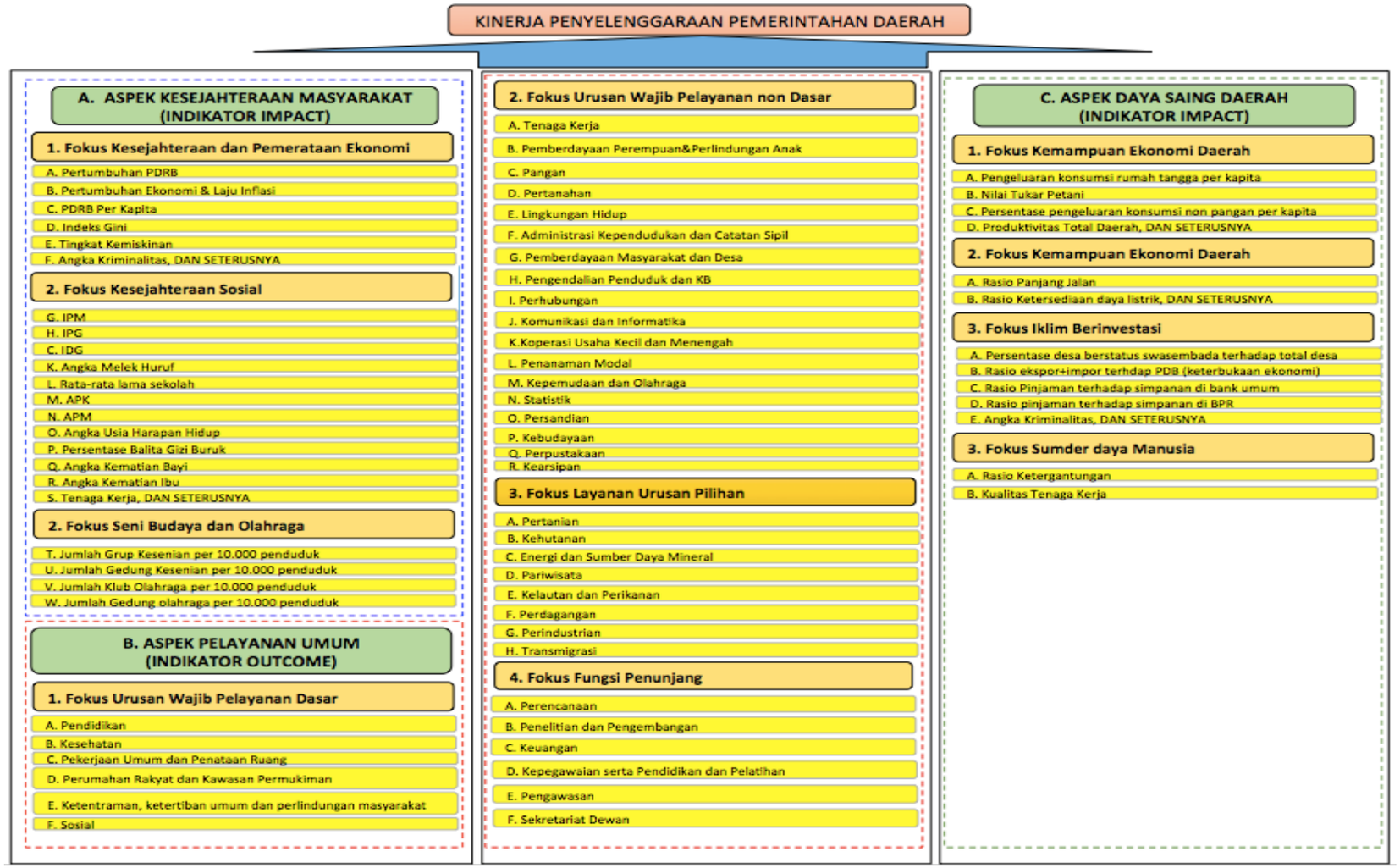
Kawasan pendidikan tinggi memiliki luas kurang lebih 371 Ha yang terletak di Kecamatan Jatinangor.

2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini dijabarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2018 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan format pembagian urusan sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa penyajian analisa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode lalu setidaknya mencakup indikator *impact* dan indikator *outcome* per urusan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.5.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan indikator kinerja pada bagian ini adalah pendekatan *Gap Analysis* yakni perbandingan realisasi capaian indikator terhadap target tahunan/SPM/target MDG's/Capaian Nasional-Provinsi/Kenaikan-Penurunan tren per tahun (pembanding dipilih salah satu per bahasan indikator, disesuaikan dengan ketersediaan data pembanding). Adapun penyajian indikator dan data tahun realisasi indikator disesuaikan dengan ketersediaan data yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Gambar 2.5
Arsitektur Penyajian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Sumber : Lampiran Permendagri 86/2017 (hal 236-253) (diolah ke dalam bentuk gambar)

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Impact/makro)

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sumedang.

2.2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhannya

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2017 mencapai Rp 29.638,7 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,72% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Tahun 2017 mencapai Rp 21.276,7 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dari tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2012 hingga tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
PDRB Kabupaten Sumedang
Tahun 2012-2017

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2012	18.140.278,72	9,63	16.400.809,40	6,56
2013	20.260.540,99	11,69	17.194.506,28	4,84
2014	22.345.409,88	10,29	18.004.693,62	4,71
2015	24.834.253,27	11,14	18.950.356,39	5,25
2016	27.012.007,15	8,77	20.029.716,74	5,70
2017	29.638.762,80	9,72	21.276.696,50	6,23
Rata-rata	23.705.208,80	10,21	18.642.796,49	5,55

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Dilihat tren pertumbuhannya, pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang ADHK sejak Tahun 2012 hingga Tahun mencapai 5,55%. Sedangkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang ADHB dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017 meningkat

sebesar Rp 11,498 miliar. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik.

2.2.1.1.2 Struktur Perekonomian

Tabel 2.6 menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama periode Tahun 2012 – Tahun 2017, struktur perekonomian Kabupaten Sumedang didominasi oleh empat sektor yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Konstruksi. Porsi keempat sektor tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.6.
PDRB Kabupaten Sumedang ADHK Tahun 2012-2017 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.533.519,70	3.634.473,44	3.661.487,41	3.490.454,57	3.616.036,20	3,861.664,90
B	Pertambangan dan Penggalian	18.192,13	18.710,61	19.114,76	19.279,14	19.204,70	19.237,90
C	Industri Pengolahan	2.980.120,89	3.112.392,49	3.252.259,75	3.429.719,17	3.642.698,54	3.835.282,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69.322,62	73.981,10	79.819,16	79.649,53	84.931,09	94.203,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.772,05	4.927,14	5.092,69	5.239,36	5.566,70	5.573,50
F	Konstruksi	1.555.929,57	1.655.183,62	1.719.211,70	1.985.043,22	2.112.007,84	2.277.296,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.019.753,93	3.149.820,28	3.297.770,97	3.418.762,11	3.563.420,14	3.739.524,00
H	Transportasi dan Pergudangan	749.664,39	789.511,33	831.702,33	899.562,21	953.278,40	1.007.035,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	706.859,50	741.942,44	791.918,12	833.909,64	896.450,13	950.607,80
J	Informasi dan Komunikasi	487.095,79	545.011,48	649.163,69	765.901,49	873.185,09	961.547,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	586.824,49	656.401,25	685.484,91	743.925,97	812.785,25	868.230,30
L	Real Estate	285.323,74	301.644,26	317.902,89	347.213,53	364.202,56	399.625,80
M,N	Jasa Perusahaan	12.287,64	13.118,29	13.884,40	14.886,85	15.901,83	17.257,00
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131.452,39	1.110.204,87	1.080.440,47	1.126.143,10	1.157.925,11	1.168.082,40
P	Jasa Pendidikan	822.518,80	917.029,61	1.060.575,93	1.197.361,62	1.279.456,94	1.384.193,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.933,08	173.116,93	210.596,52	233.313,52	250.784,75	272.858,80
R,S, T,U	Jasa Lainnya	276.238,67	297.037,14	328.267,92	359.991,36	381.881,45	414.476,50
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**16.400.809,40**	**17.194.506,28**	**18.004.693,62**	**18.950.356,39**	**20.029.716,74**	**21.276.696,5**

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor yang rata-rata mengalami peningkatan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan dengan peningkatan dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 sebesar Rp 245.628 juta. Walaupun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebesar Rp 125.582 juta.

Sektor yang mengalami rata-rata peningkatan terendah diantara 17 sektor yang menjadi perhitungan PDRB selama kurun waktu Tahun 2012-2017 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sektor tersebut hanya mengalami rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar Rp160 juta. Sementara sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang mengalami rata-rata peningkatan terendah berikutnya dibandingkan sektor lainnya dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar Rp 209 juta.

Tabel 2.7.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sumedang,
ADHB Tahun 2012 - 2017 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22.57	22.55	21.70	20.65	20.35	20.33
B	Pertambangan dan Penggalian	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09
C	Industri Pengolahan	18.42	18.27	18.88	18.49	18.63	18.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.33	0.28	0.31	0.32	0.36	0.42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
F	Konstruksi	9.31	9.25	9.30	10.16	10.08	10.19
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.68	17.63	17.08	16.45	16.07	15.90
H	Transportasi dan Pergudangan	4.24	4.52	4.72	5.25	5.33	5.29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.18	4.27	4.38	4.31	4.48	4.49
J	Informasi dan Komunikasi	2.67	2.65	2.77	2.91	3.06	3.13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.79	4.06	4.07	4.14	4.36	4.53
L	Real Estate	1.66	1.64	1.59	1.61	1.57	1.60
M,N	Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.65	7.11	6.81	6.84	6.65	6.35
P	Jasa Pendidikan	4.79	5.10	5.56	5.92	6.04	6.30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.92	0.89	1.02	1.08	1.10	1.12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.56	1.55	1.61	1.67	1.72	1.79
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Dilihat dari kontribusi pembentuk PDRB, pada Tahun 2017 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar diantara 17 sektor pembentuk PDRB

dengan kontribusi sebesar 20,33%. Sektor dengan kontribusi terbesar kedua pada Tahun 2017 adalah sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 18,36%.

Sektor dengan kontribusi terendah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan kontribusi sebesar 0,02%. Sektor lain dengan kontribusi terendah berikutnya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sumedang sebesar 0,09%.

Walaupun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki *share* terbesar terhadap PDRB dibandingkan dengan sektor lain, kontribusi sektor ini terus menurun dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017. Adapun sektor lain yang mengalami penurunan *share* terhadap PDRB dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017 diantaranya adalah: Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Real Estate; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Penurunan *share* dari sektor-sektor tersebut disebabkan oleh berkembangnya sektor-sektor lain yang mengalami peningkatan *share* PDRB dari Tahun 2012 ke Tahun 2017, diantaranya: Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya. Dari 9 sektor yang mengalami peningkatan *share* PDRB, sektor Jasa Pendidikan yang mengalami peningkatan terbesar yaitu 1,51 % dari Tahun 2012 ke Tahun 2017.

2.2.1.1.3 Laju Pertumbuhan Perekonomian

Berdasarkan Tabel 2.8. seluruh sektor mengalami pertumbuhan di Tahun 2017. Adapun sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Tahun 2017 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,92%. Sektor lain yang memiliki pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan listrik, gas, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Sumedang sedang mengalami perbaikan dan memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas. Sektor lain yang

mengalami pertumbuhan tinggi di Tahun 2017 adalah sektor *Real Estate*. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumedang terjadi pembangunan permukiman yang cukup masif.

Tabel 2.8.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2011-2017

Kategori	Uraian	Tahun							Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,53	0,62	2,86	0,74	(4,67)	3,60	6,79	1,50
B	Pertambangan dan Penggalian	2,82	2,79	2,85	2,16	0,86	(0,39)	0,17	1,61
C	Industri Pengolahan	3,57	2,40	4,44	4,49	5,46	6,21	5,29	4,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,43	8,20	6,72	7,89	(0,21)	6,63	10,92	6,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0,97)	2,12	3,25	3,36	2,88	6,25	0,12	2,43
F	Konstruksi	8,61	25,12	6,38	3,87	15,46	6,40	7,83	10,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,82	7,10	4,31	4,70	3,67	4,23	4,94	5,11
H	Transportasi dan Pergudangan	8,16	6,21	5,32	5,34	8,16	5,97	5,64	6,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,98	5,69	4,96	6,74	5,30	7,50	6,04	6,17
J	Informasi dan Komunikasi	13,75	12,19	11,89	19,11	17,98	14,01	10,12	14,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,55	7,53	11,86	4,43	8,53	9,26	6,82	8,00
L	Real Estate	7,58	6,03	5,72	5,39	9,22	4,89	9,73	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	10,84	6,33	6,76	5,84	7,22	6,82	8,52	7,48
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,20)	4,72	(1,88)	(2,68)	4,23	2,82	0,88	0,98
P	Jasa Pendidikan	10,74	18,25	11,49	15,65	12,90	6,86	8,19	12,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,54	7,53	7,57	21,65	10,79	7,49	8,80	10,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13,56	6,85	7,53	10,51	9,66	6,08	8,54	8,96
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**4,79**	**6,56**	**4,84**	**4,71**	**5,25**	**5,70**	**6,23**	**5,44**

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Dalam rentang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan secara signifikan, salah satu sektor tersebut adalah Informasi dan Komunikasi yang rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 sebesar 14,15%. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor konstruksi dengan rata-rata pertumbuhan pada periode yang sama sebesar 10,52%.

2.2.1.1.4. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan pada rentang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 tercatat sebesar Rp 25,85 juta meningkat sebesar 9,31% dari tahun sebelumnya. Secara rata-rata dari Tahun 2012 ke Tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Sumedang naik sebesar 9,76 %.

Tabel 2.9
PDRB Per Kapita Kabupaten Sumedang dan pertumbuhannya
Tahun 2012- 2017

Uraian	Tahun						Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PDRB ADHB (Rp juta)	18.140.278,00	20.260.540,00	22.345.409,00	24.834.253,00	27.012.007,00	29.638.762,80	23.705.208,30
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.282.988	1.307.645	1.092.719	1.110.841	1.132.459	1.139.564	1.177.702,67
PDRB Per Kapita (Rp /th)	14.139.086	15.493.915	20.449.364	22.356.263	23.852.525	26.008.862	20.383.336
Pertumbuhan (%)	9,32	11,36	9,67	10,58	8,31	9,31	9,76
PDRB Per Kapita (Rp /bln)	1.343.575	1.291.157	1.645.684	1.819.722	1.970.936	2.154.415	1.704.248,20

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

2.2.1.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Dalam kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami tren penurunan meskipun tidak signifikan (hanya menurun 2,72%). Pada Tahun 2011 tercatat 12,48% penduduk miskin, kemudian menurun menjadi 9,76% di Tahun 2018.

Tabel 2.10.
Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)	
2011	239,009	139,4	12,48	0,33
2012	249,315	132,9	11,87	0,37
2013	260,160	127,4	11,31	0,37
2014	265,495	122	10,78	0,33
2015	281,649	129,03	11,36	0,35
2016	295,009	120,60	10,57	0,37
2017	307,394	120,63	10,53	0,38
2018	n/a	112,14	9,76	0,42

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Sumedang menunjukkan kenaikan 0,5 poin dari 0,37 di Tahun 2016 menjadi 0,42 di Tahun 2018. Hal ini bermakna terjadi peningkatan ketimpangan

pendapatan di Kabupaten Sumedang, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Sumedang masih dibawah capaian Provinsi Jawa Barat (0,40 pada Tahun 2018) dan capaian nasional (0,38 pada Tahun 2018).

2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak Tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang dan komponennya dari Tahun 2011 hingga Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.11. Dapat diketahui selama kurun waktu tujuh tahun angka IPM Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 tercatat 66,16,

meningkat menjadi 70,07 di Tahun 2017. Dengan demikian IPM Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori tinggi.

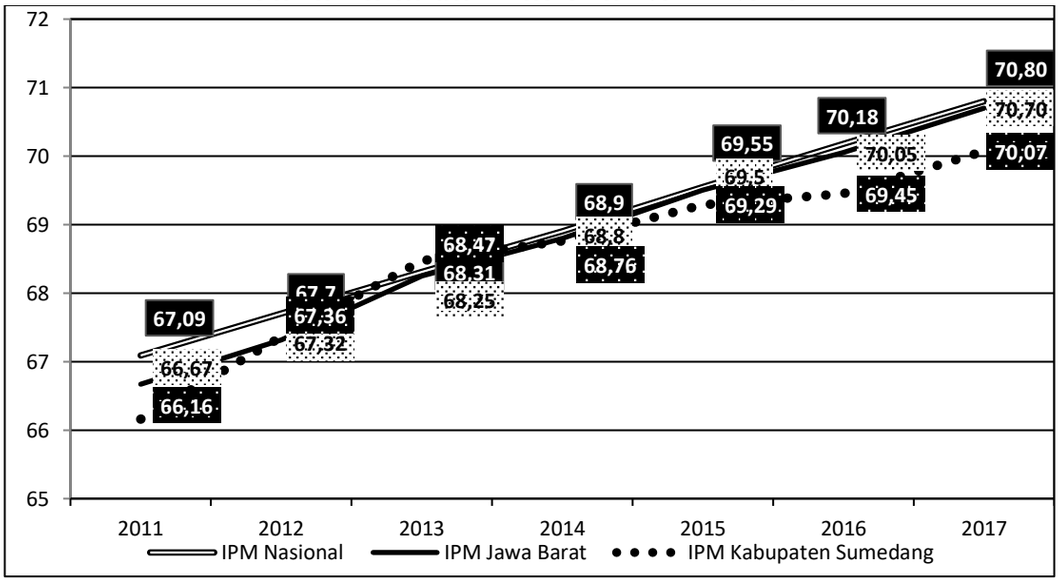
Tabel 2.11.
IPM Kabupaten Sumedang dan Komponen Penyusunnya
Tahun 2011-2017

No.	IPM dan Komponennya	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,16	67,36	68,47	68,76	69,29	69,45	70,07
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,74	71,8	71,86	71,89	71,91	71,96	72,00
3	Harapan Lama Sekolah (EYS)	10,93	11,95	12,83	12,89	12,9	12,91	12,93
4	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	7,51	7,51	7,51	7,66	7,66	7,72	7,98
5	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	8652.78	8698.75	8828.26	8844.21	9279.32	9339.00	9569.00

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat, rata-rata pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Hanya pada Tahun 2013 capaian IPM Kabupaten Sumedang lebih tinggi dari capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.6
Grafik Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2011-2016



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

2.2.1.2.2. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal pengarusutamaan gender adalah Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IPG terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) , Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. Pembangunan perempuan dalam suatu pembangunan yang diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015, IPG Kabupaten Sumedang mengalami tren peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.12.
Indikator Gender Kabupaten Sumedang Capaian

No.	Indikator Gender	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,24	67,47	83,77	94,36	94,37
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,14	62,91	64,82	72,32	68,69

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Sedangkan IDG terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2011-Tahun 2015 mengalami tren fluktuatif, pada Tahun 2011 tercatat 65,14, kemudian meningkat menjadi 72,32 di Tahun 2014, dan pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 68,69.

2.2.1.2.3. Indikator Pendidikan

Indikator Pendidikan Makro yang bersifat *impact* di Kabupaten Sumedang ditinjau dari lima aspek, yaitu:

1. Angka Melek Huruf, yaitu angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang sudah bisa membaca;

2. Rata-rata Lama Sekolah, yaitu angka yang menunjukkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan;
3. Angka Partisipasi Murni, persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan;
4. Angka Partisipasi Kasar, merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut;
5. Angka Partisipasi Sekolah, menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Lebih lanjut, perkembangan indikator-indikator makro di bidang pendidikan di Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Indikator Makro Pendidikan Kabupaten Sumedang
Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017

URAIAN	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. Angka Melek Huruf (%)	98,23	-	98,01	93,21	98,06
B. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,51	7,66	7,66	7,72	7,98
C. Angka Partisipasi Murni (%)					
- 7 s/d 12	97,77	98,36	99,75	98,04	101,35
- 13 s/d 15	84,41	87,85	79,53	89,65	97,73
D. Angka Partisipasi Kasar (%)					
- 7 s/d 12	108,80	106,11	109,96	102,45	101,73
- 13 s/d 15	89,61	93,22	86,54	89,23	98,09
E. Angka Partisipasi Sekolah (%)					
- 7 s/d 12	98,75	99,00	99,80	100	-
- 13 s/d 15	92,77	93,34	94,47	93,73	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Sumedang

A. Berdasarkan tabel di atas, Angka Melek Huruf di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 tercatat sebesar 98,06% atau dengan kata lain hanya 1,77% masyarakat Kabupaten Sumedang yang buta huruf, namun demikian angka ini masih dibawah rata-rata capaian nasional yakni >99%. Sehingga perlu terus

diupayakan peningkatan angka melek huruf hingga tidak ada seorangpun warga Kabupaten Sumedang yang buta huruf;

B. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,98 pada Tahun 2017 artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Sumedang hanya bersekolah sampai kelas 8 (kelas 2 SMP). Jika dibandingkan dengan SPM Kemendiknas yaitu 12 tahun (kelas 3 SMA), maka capaian di Kabupaten Sumedang belum mencapai target SPM.

C. Angka Partisipasi Murni :
   1. Angka Partisipasi Murni SD/MI (usia 7-12 tahun) pada Tahun 2017 sebesar 101,35%, dengan kata lain terdapat 1,35% murid usia 7-12 tahun dari luar daerah tertentu yang bersekolah di Kabupaten sumedang;
   2. Angka Partisipasi Murni SLTP/MTs (usia 13-15 tahun) pada Tahun 2017 sebesar 97,73% artinya masih terdapat 2,27% anak usia 13-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SLTP/MTs tepat waktu sesuai umurnya.

D. Angka Partisipasi Kasar
   1. Tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar usia 7-12 tahun sebesar 101,73%, kondisi ini bermakna terdapat 1,73% murid SD/MI yang tidak berusia 7-12 tahun. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan pada jenjang pendidikan SD/MI, dan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang dapat menampung penduduk usia sekolah SD dari kapasitas yang sesungguhnya;
   2. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar usia 13-15 tahun pada Tahun 2017 sebesar 98,09%. Hal ini bermakna terdapat 1,91% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SLTP/MTs.

E. Angka Partisipasi Sekolah
   1. Selama Tahun 2013 hingga Tahun 2015 angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun secara bertahap mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga pada Tahun 2016 Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun mencapai 100%. Hal ini bermakna seluruh penduduk usia 7-12 tahun bertartisipasi dalam jenjang pendidikan SD;

2. Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 mengalami tren fluktuatif. Pada Tahun 2013 tercatat 92,77% kemudian meningkat selama Tahun 2014-2015 menjadi masing-masing 93,34% dan 94,47%, namun pada Tahun 2016 menurun menjadi 93,73%. Hal ini bermakna pada Tahun 2016 masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah.

2.2.1.2.4. Indikator Kesehatan

Indikator Kesehatan Makro Kabupaten Sumedang dijelaskan melalui Angka Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Desa Siaga Akif, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14.
Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup	71,8	71,86	71,89	71,91	71,96	72,00	72.07
Balita Gizi Buruk (%)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Desa Siaga Aktif	69	71	71	69	69	69	100
Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	-	205	202	181	120	146	155
Jumlah Kematian Ibu (Jiwa))	-	52	38	84	111	22	16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Sumedang dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pelan, tapi pasti. Dari angka 71,8 tahun pada Tahun 2010, meningkat menjadi 72,07 pada Tahun 2018. Lambatnya kenaikan angka harapan hidup ini menggambarkan bahwa tidak mudah meningkatkan angka harapan hidup dalam jangka waktu satu tahun, karena harapan hidup seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal yang kompleks, antara lain kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga perlu upaya keras di bidang

pelayanan kesehatan, dan pelayanan lainnya yang terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selanjutnya persentase balita gizi buruk selama Tahun 2013-2018 berada dibawah 1%, jika dibandingkan dengan target MDGs yakni 3,60% maka dengan demikian pencapaian indikator balita gizi buruk selama lima tahun di Kabupaten Sumedang tergolong berhasil.

Indikator desa siaga aktif, Kementerian Kesehatan menetapkan SPM desa siaga aktif sebesar 80%. Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase desa siaga aktif pada Tahun 2018 telah terealisasi 100%, sehingga telah mencapai SPM yang ditetapkan.

Adapun Jumlah Kematian Bayi mengalami tren penurunan selama Tahun 2013-2018. Pada Tahun 2013 tercatat 205 bayi yang mati, kemudian menurun di Tahun 2015 menjadi 181 bayi, kembali mengalami peningkatan di Tahun 2017 menjadi 146 bayi, dan di Tahun 2018 meningkat menjadi 155 bayi. Meskipun secara tren mengalami penurunan, namun angka tersebut perlu terus dikurangi hingga angka kematian bayi menjadi 0 kejadian.

Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan) menurut SPM Kementerian Kesehatan ditetapkan 0 kasus, namun demikian di Kabupaten Sumedang kelahiran belum mencapai 100.000 sehingga indikator yang digunakan adalah Jumlah Kematian Ibu (Jiwa). Jika mengacu pada SPM kematian ibu ditargetkan 0 kasus, sehingga Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang belum mencapai SPM. Pada Tahun 2013 tercatat 52 kematian ibu, kemudian menurun di Tahun 2014 sebesar 38 kematian dan kembali meningkat di Tahun 2015 menjadi 84 kematian. Pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 111 kematian, dan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 menurun signifikan masing-masing menjadi 22 kematian dan 16 kematian.

Kenaikan pada Tahun 2016 dikarenakan adanya ibu hamil dengan komplikasi kebidanan dari puskesmas/bidan yang dirujuk ke rumah sakit, namun terdapat jeda waktu antara rujukan dari puskesmas/bidan ke rumah sakit yang mengakibatkan ibu hamil tersebut mengalami kematian. Selain itu penyebab kematian Ibu lainnya adalah Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), pendarahan, Infeksi dan Eklampsi. Tahun 2017 kematian ibu disebabkan karena

penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif. Kasus ibu hamil dengan penyakit tidak menular kebanyakan tidak terdeteksi dari awal yang disebabkan masih rendahnya kemampuan tenaga kesehatan dalam penggalian riwayat penyakit dan pengendalian penyakit tidak menular yang diderita ibu hamil. Dalam perspektif kedepan sistem pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu melahirkan perlu disempurnakan sehingga dapat melayani pasien ibu melahirkan dengan cepat, akurat, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu.

2.2.1.2.5. Indikator Ketenagakerjaan

Berdasarkan Tabel 2.15, dapat diketahui bahwa pada periode Tahun 2012-2017 terdapat penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Pada Tahun 2012 tercatat 63,13% kemudian menurun menjadi 62,06% di Tahun 2017, atau dengan kata lain dari 100 orang usia produktif (15-54 tahun) terdapat 62 orang memasuki pasar lapangan kerja di Tahun 2017. Kemudian tingkat pengangguran terbuka dari Tahun 2012 sebesar 7,48%, meningkat menjadi 9,00% di Tahun 2015, kemudian menurun menjadi 7,15 di Tahun 2017.

Tabel 2.15.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 – Tahun 2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,13	61,08	65,23	-	61,21	62,06
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,48	6,50	7,51	9,00	8,07	7,15
3	Persentase Bekerja Sektor Pertanian	36,40	32,78	27,79	-	-	-
4	Persentase Bekerja Sektor Industri	12,22	12,06	13,99	-	-	-
5	Persentase Bekerja Sektor Jasa & Lainnya	51,38	55,15	58,22	-	-	-

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sumedang 2015 dan BPS, 2018

Tenaga kerja di Kabupaten Sumedang didominasi sektor Jasa & Lainnya, kedua terbesar di sektor Pertanian dan yang terkecil adalah yang bekerja di sektor Industri. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adanya pergeseran tenaga kerja, pada Tahun 2012

terdapat 36,40% tenaga kerja di sektor pertanian, kemudian menurun 8,61% di Tahun 2014 menjadi 27,79%. Sementara itu tenaga kerja di sektor industri mengalami peningkatan dari Tahun 2012 sebesar 12,22% menjadi 13,99% di Tahun 2014. Begitupula dengan tenaga kerja di sektor Jasa mengalami peningkatan sebesar 6,84% dari Tahun 2012 (51,38%) menjadi 58,22% di Tahun 2014. Jika dilihat dari angka penurunan tenaga kerja di sektor Pertanian yang disertai peningkatan tenaga kerja di sektor Industri dan sektor Jasa, dapat dikatakan telah terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan Jasa di Kabupaten Sumedang.

2.2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

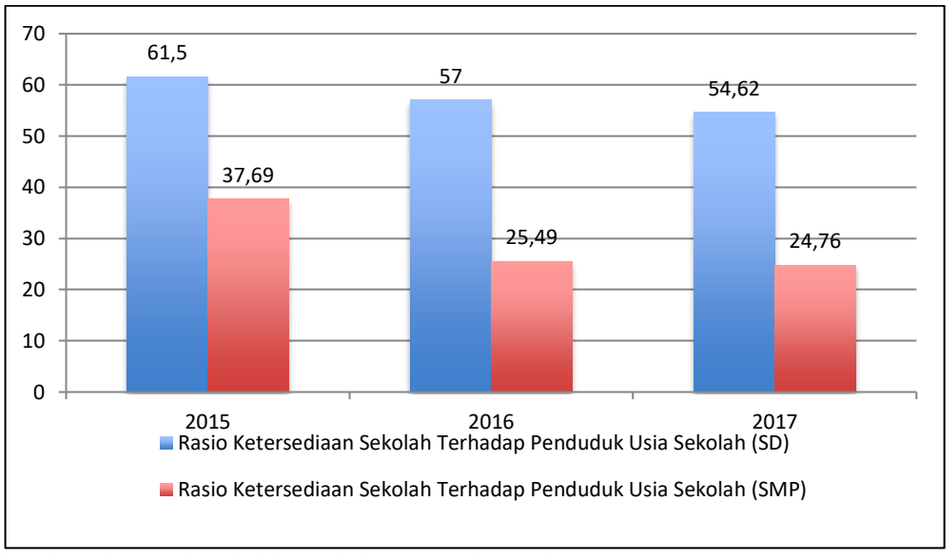
2.2.2.1.1. Urusan Pendidikan

A. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan penduduk usia pendidikan menengah pertama.

Secara umum, tren rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2015-Tahun 2017 mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD tercatat 61,5 per 10.000 penduduk usia SD, dan mengalami penurunan menjadi 54,62 per 10.000 penduduk usia SD di Tahun 2017. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP di Tahun 2015 tercatat 37,69 per 10.000 penduduk usia SMP kemudian menurun menjadi 24,76 per 10.000 penduduk usia SMP di Tahun 2017. Kondisi demikian bermakna masih kurangnya ketersediaan sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sumedang. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.7
Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

B. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio Guru terhadap murid idealnya 500 orang guru untuk 10.000 murid atau 1 (satu) orang guru untuk 20 murid. Jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan angka rasio ideal sudah melampaui. Pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang SD sebesar 1 (satu) guru untuk 16 murid, sedangkan pada jenjang SMP di tahun yang sama 1 (satu) guru untuk 18 murid. Hal ini menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Sumedang sudah mencukupi. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Indikator Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

No	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	SD	1:16	1:16	1:16
2	SMP	1:18	1:18	1:18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

C. Sekolah Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Sumedang pada jenjang SD dan SMP mengalami tren peningkatan, meskipun tidak signifikan. Pada jenjang SD di Tahun 2014 tercatat 435 bangunan sekolah dalam kondisi baik, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 583 bangunan sekolah dalam kondisi baik.

Sedangkan untuk jenjang SMP di Tahun 2014 tercatat 170 bangunan sekolah dalam kondisi baik, kemudian dalam tiga tahun meningkat menjadi 248 bangunan sekolah dalam kondisi baik di Tahun 2017.

Tabel 2.17
Indikator Sekolah Kondisi Bangunan Baik

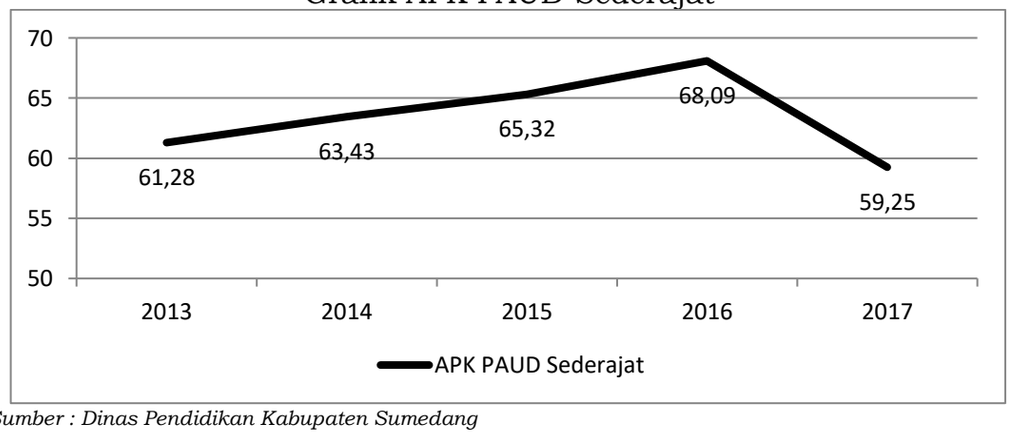
No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	SD	435	461	557	583
2	SMP	170	196	222	248

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

D. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) Sederajat

Pada jenjang pendidikan pra sekolah, perkembangan APK PAUD di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2013-2016 mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 terdapat 61,28% anak usia dini yang mengikuti PAUD, kemudian pada Tahun 2017 menurun menjadi 59,25%. Lebih lanjut angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77,02% di Tahun 2019. Kondisi tersebut dapat diakibatkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam sekolah PAUD dan masih rendahnya jumlah sekolah PAUD sehingga tidak menjangkau seluruh anak usia dini di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.8
Grafik APK PAUD Sederajat



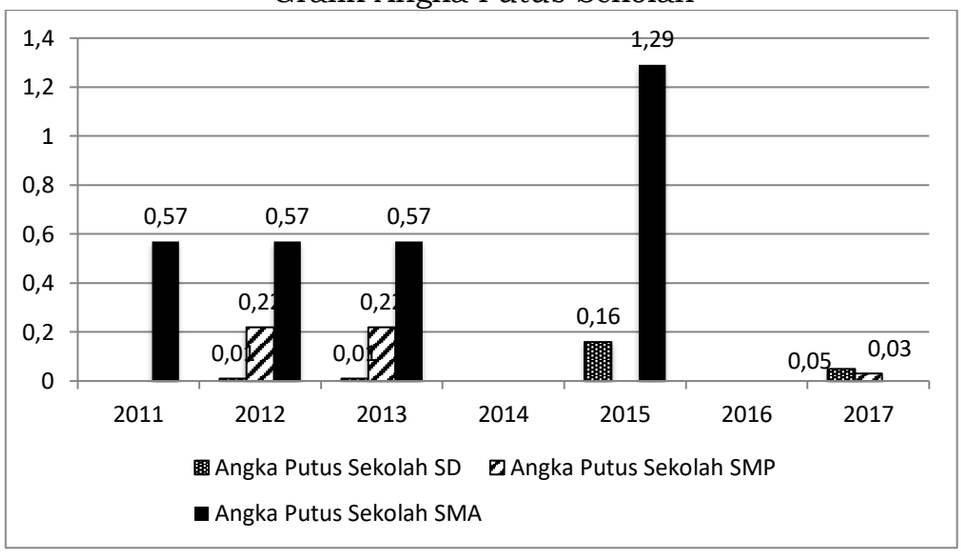
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

E. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Kabupaten Sumedang untuk jenjang pendidikan dasar (SD) mengalami peningkatan, pada Tahun 2012 tercatat 0,01, kemudian menjadi 0,05 di Tahun 2017. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah (SMP) pada Tahun 2012

sebesar 0,01 kemudian meningkat menjadi 0,03 di Tahun 2017. Pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) di Tahun 2011 tercatat 0,57 kemudian meningkat menjadi 1,29 di Tahun 2015.

Gambar 2.9
Grafik Angka Putus Sekolah

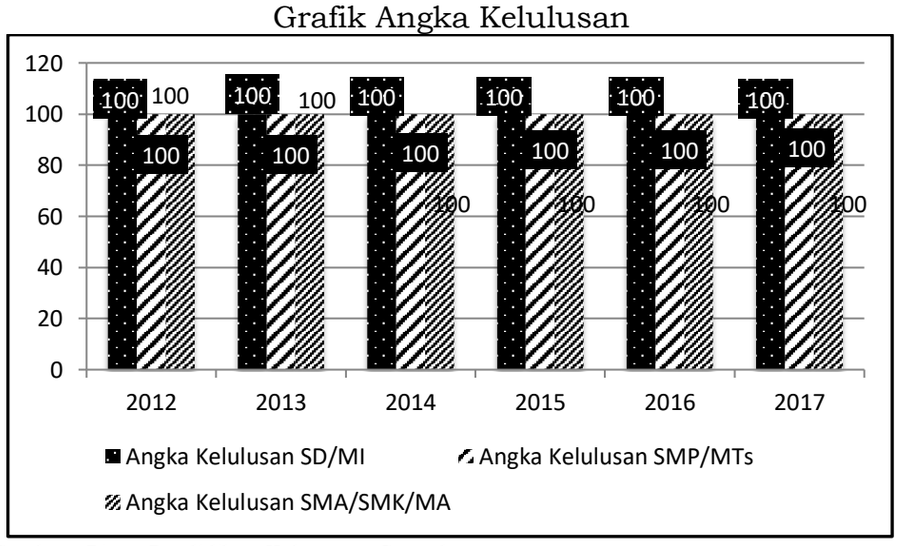


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

F. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2012-2017 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan capaian yang positif dan telah mencapai target nasional sebesar 100%. Lebih lanjut disampaikan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.10
Grafik Angka Kelulusan

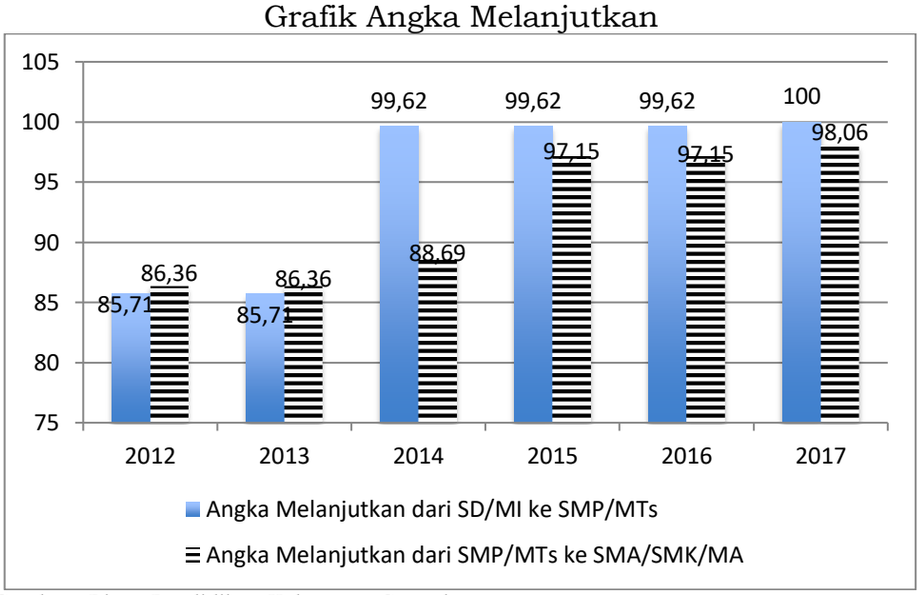


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

G. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs selama enam tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 tercatat sebesar 85,71% murid SD/MI yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, kemudian meningkat menjadi 100% di Tahun 2017, hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Sumedang untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi. Kemudian untuk angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama enam tahun mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2012 sebesar 86,36% murid SMP/MTs yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA, kemudian meningkat menjadi 98,06% di Tahun 2017.

Gambar 2.11
Grafik Angka Melanjutkan



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

H. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Berdasarkan data pada Tabel 2.18, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV di Kabupaten Sumedang cenderung meningkat.

Tabel 2.18
Indikator Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Tahun 2015-2018

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	89,00	92,95	n/a	93,06

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

I. Persentase Guru yang Bersertifikasi

Persentase guru yang bersertifikasi dapat menjadi indikasi kualitas dan kesejahteraan guru. Merujuk pada data dalam tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa persentase guru yang bersertifikasi secara tren mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2014 tercatat 83,64% kemudian dalam dua tahun meningkat menjadi 84,40% di Tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 83,58% pada Tahun 2017. Dalam perspektif kedepan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mendorong agar seluruh guru mendapatkan sertifikasi, sehingga kesejahteraan guru dan kualitasnya dapat meningkat.

Tabel 2.19
Indikator Persentase Guru yang Bersertifikasi
Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Persentase Guru yang Bersertifikasi (%)	83,64	85,77	84,40	83,58

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

2.2.2.1.2. Urusan Kesehatan

A. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Berdasarkan Tabel 2.20 dapat diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 adalah 1:58 atau dengan kata lain satu posyandu digunakan untuk melayani 58 balita. Kondisi tersebut telah melampaui rasio ideal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni satu posyandu untuk melayani 100 balita (1:100).

Tabel 2.20
Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Tahun	Jumlah Posyandu (Aktif)	Jumlah Balita (0-4 Tahun)	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
2013	946	83.743	1: 88
2014	1014	118.592	1:116
2015	1644	86.901	1:52
2016	1635	85.504	1:52
2017	1636	96.072	1:58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

B. Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas per 30.000 penduduk. Perkembangan rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2013-2018 mengalami tren negatif. Pada Tahun 2013 tercatat satu puskesmas untuk melayani 36.298 penduduk, kemudian di Tahun 2017 dan 2018 satu puskesmas untuk melayani 32.755 penduduk. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Kesehatan yakni satu puskesmas untuk 30.000 penduduk, maka pada Tahun 2017 dan 2018 puskesmas di Kabupaten Sumedang overload atau kelebihnan beban 2.755 penduduk. Sehingga penambahan puskesmas menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan optimal kepada penduduk.

Tabel 2.21
Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Puskesmas Per satuan penduduk	1:36.298	1:37.060	1:35.539	1:32.631	1:32.755	1: 32.755

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

C. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Sampai pada Tahun 2013, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sumedang sebesar 1:580.765 penduduk (Tabel 2.22). Jika dibandingkan dengan rasio ideal rumah sakit, yakni 1:100.000 penduduk, maka ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori belum mencukupi, namun demikian kondisi tersebut diimbangi oleh adanya pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu.

Tabel 2.22
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1:580.765	1:592.961	1:568.636	1:571.048	1:382.145

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

D. Rasio Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, pada Tahun 2014 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 48 per 100.000 penduduk, dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per 100.000 penduduk, sanitarian 15 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 24 per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 yang ada di Kabupaten Sumedang maka target tersebut belum tercapai.

Hingga Tahun 2017 ketersediaan dokter spesialis hanya 46 orang, sementara idealnya perlu 137 dokter spesialis, untuk ketersediaan dokter umum hanya 29 dokter sementara idealnya perlu 550 dokter umum, selanjutnya ketersediaan dokter gigi hanya 13 dokter sementara idealnya perlu 126 dokter gigi, adapun ketersediaan bidan hanya 348 bidan sementara idealnya perlu 860 bidan. Kemudian ketersediaan sanitarian pada Tahun 2017 hanya 20 orang, sementara idealnya 172 orang sanitarian, selanjutnya untuk ketersediaan ahli gizi saat ini hanya 19 orang, sementara idealnya perlu 275 orang ahli gizi.

Dengan demikian untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai target Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, idealnya Kabupaten Sumedang masih perlu menambah 91 dokter spesialis, 521 dokter umum, 113 dokter gigi, 512 bidan, 152 sanitarian dan 256 ahli gizi. Kondisi realisasi ketersediaan tenaga kesehatan lebih lanjut disampaikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017

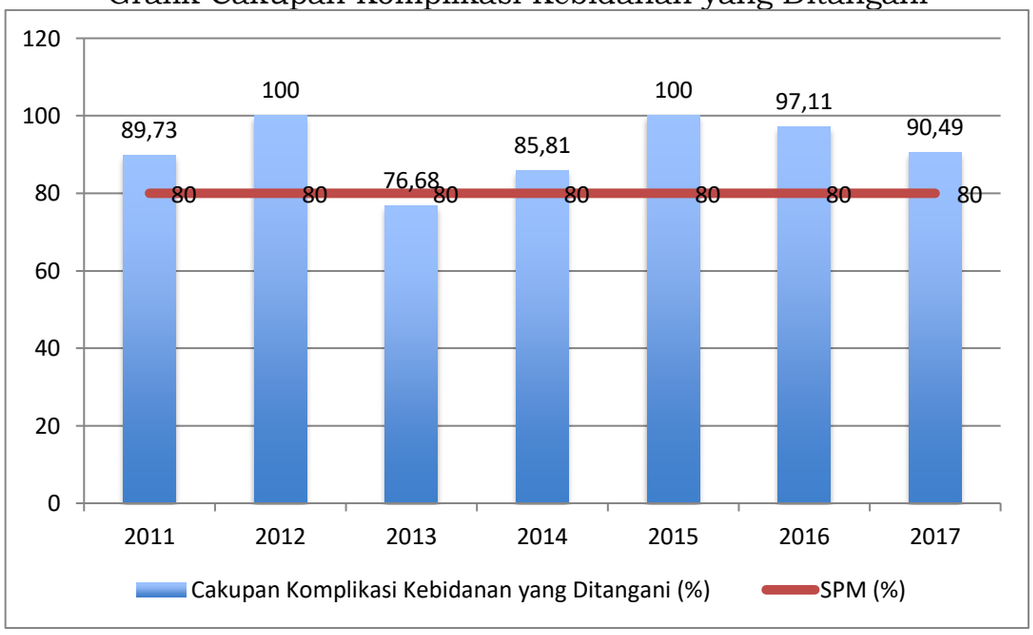
No	Tahun 2013				Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
	JENIS NAKES	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO
1	Dokter Umum	23	1.125.125	48.918	23	1.131.516	49.196	31	1.137.273	36.686	29	1.142.097	39.382	29	1.146.811	39.545
2	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	21.870	46	1.142.097	24.828	71	1.146.811	24.836
3	Dokter Gigi	14	1.125.125	80.366	12	1.131.516	94.293	14	1.137.273	81.233	14	1.142.097	81.578	13	1.146.811	88.216
4	Perawat	230	1.125.125	4.892	222	1.131.516	5.097	227	1.137.273	5.010	227	1.142.097	5.031	229	1.146.811	5.008
5	Perawat Gigi	28	1.125.125	40.183	28	1.131.516	40.411	28	1.137.273	40.617	28	1.142.097	40.789	27	1.146.811	42.474
6	Bidan	256	1.125.125	4.395	253	1.131.516	4.472	249	1.137.273	4.567	249	1.142.097	4.587	348	1.146.811	3.295
7	Nutrisionis	19	1.125.125	59.217	19	1.131.516	59.553	19	1.137.273	59.856	19	1.142.097	60.110	19	1.146.811	60.358
8	Sanitarian	21	1.125.125	53.577	21	1.131.516	53.881	22	1.137.273	51.694	22	1.142.097	51.913	20	1.146.811	57.340
9	Penyuluh Kesehatan	14	1.125.125	80.366	14	1.131.516	80.822	14	1.137.273	81.233	14	1.142.097	81.578	13	1.146.811	88.216
10	Pranata Laboratorium	16	1.125.125	70.320	15	1.131.516	75.434	15	1.137.273	75.818	15	1.142.097	76.140	14	1.146.811	81.915
11	Epidemiologi Kes	3	1.125.125	375.041	3	1.131.516	377.172	3	1.137.273	379.091	3	1.142.097	380.699	3	1.146.811	382.270
12	Apoteker	2	1.125.125	562.563	2	1.131.516	565.758	2	1.137.273	568.636	2	1.142.097	571.048	2	1.146.811	573.405
13	Asisten Apoteker	17	1.125.125	66.183	17	1.131.516	66.560	17	1.137.273	66.898	17	1.142.097	67.182	17	1.146.811	67.459

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (diolah)

E. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Sumedang dari periode Tahun 2016-2017 belum mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan belum tertangani seluruhnya (Gambar 2.13). Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga kebidanan. Meskipun demikian capaian tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni sebesar 80%.

Gambar 2.12
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

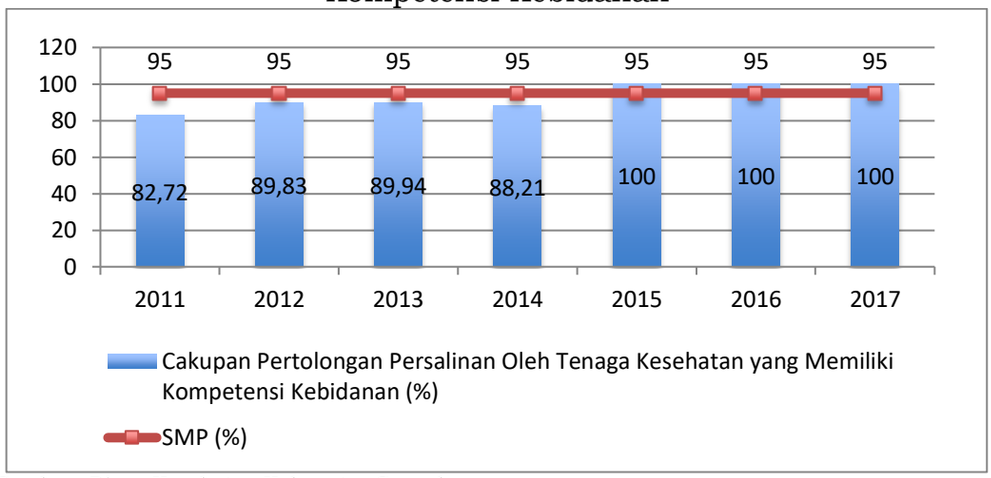


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

F. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari periode Tahun 2015-2017 telah mencapai 100% (Gambar 2.14), artinya bahwa proses persalinan di Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sudah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 95%.

Gambar 2.13
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

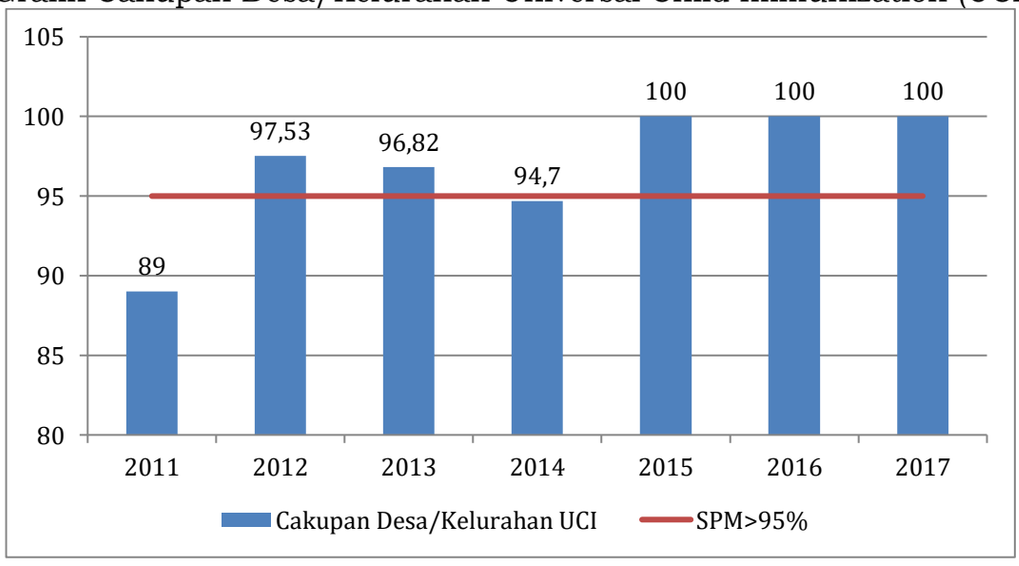


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

G. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2011-2017 menunjukkan tren penurunan, hanya di Tahun 2015-2016 mencapai 100% dan mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi 96%. Hal ini berarti masih terdapat bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap kelurahan dalam waktu satu tahun, meskipun demikian capaian Tahun 2017 tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%.

Gambar 2.14
Grafik Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

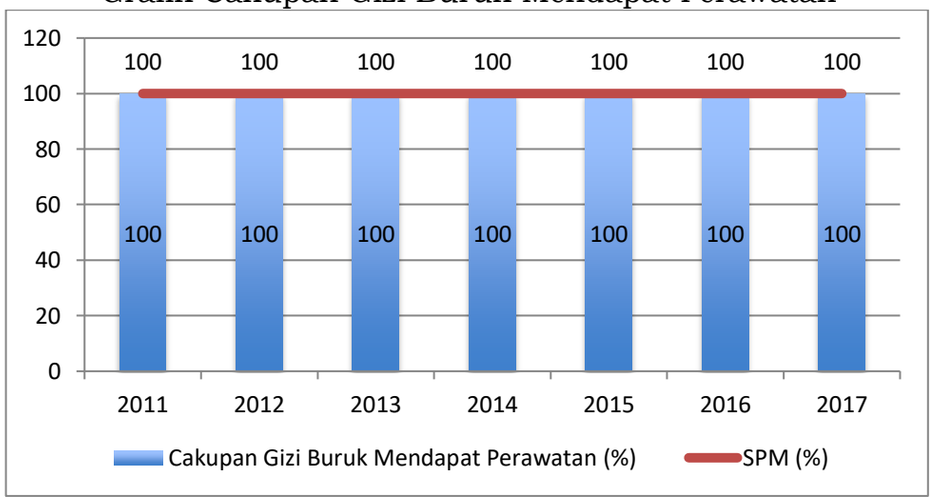


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

H. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Sumedang selama periode 2011-2017 sudah mencapai 100% (Gambar 2.15). Hal ini menunjukan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk di Tahun 2011-3017 telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).

Gambar 2.15
Grafik Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan

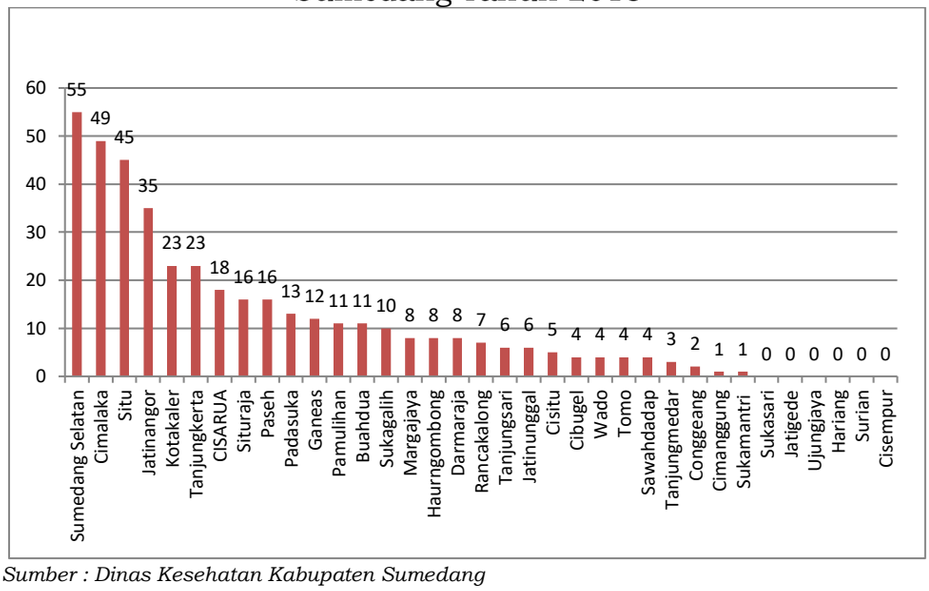


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

I. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)

Distribusi Kasus DBD di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

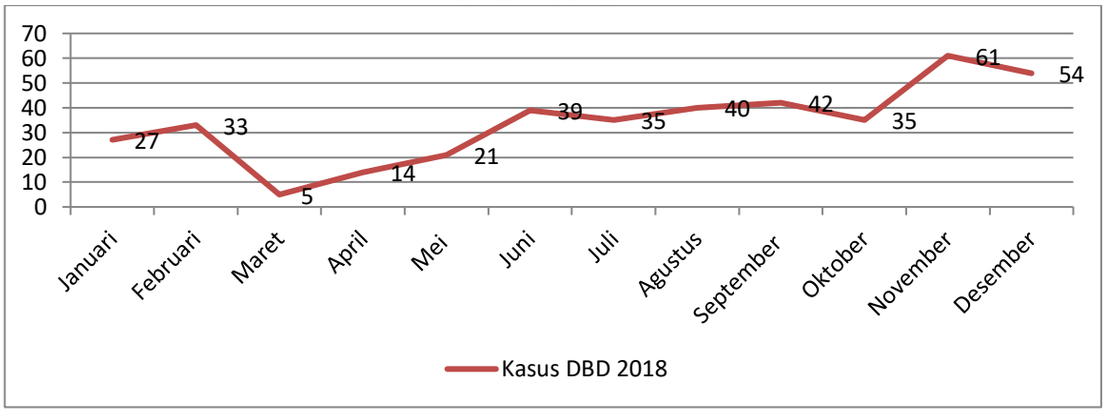
Grafik 2.16
Distribusi Kasus DBD Berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan gambar diatas, kasus DBD di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 ditemukan sebanyak 408 kasus dengan Insiden Rate 35/100.000 penduduk (Target ≤ 48/100.000 Penduduk). Sebaran Kasus DBD tertinggi ada di Puskesmas Sumedang Selatan, Cimalaka dan Situ. Hal ini diduga banyaknya tempat tempat umum yang kebersihan lingkungannya tidak terjaga sehingga memungkinkan menjadi sarang nyamuk penular virus Dengue.

Grafik 2.17
Distribusi Kasus DBD berdasarkan Waktu di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018



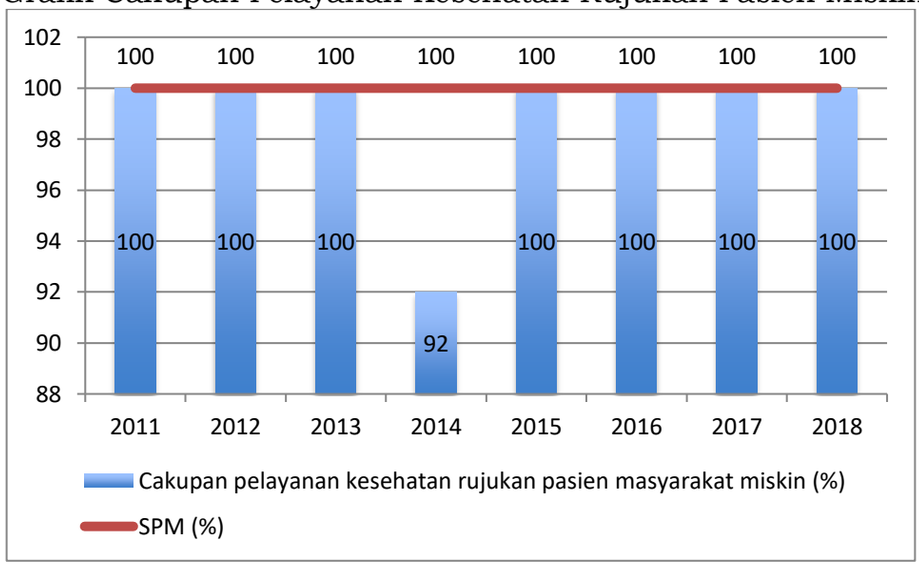
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan grafik di atas, Peningkatan kasus DBD terjadi pada Bulan November, hal ini diduga karena mulai meningkatnya curah hujan yang menyebabkan banyaknya genangan air yang dapat dijadikan sebagai tempat tempat perindukan nyamuk penular DBD.

J. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)

Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada grafik di bawah maka terlihat bahwa sampai pada Tahun 2018 Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Gambar 2.18
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin



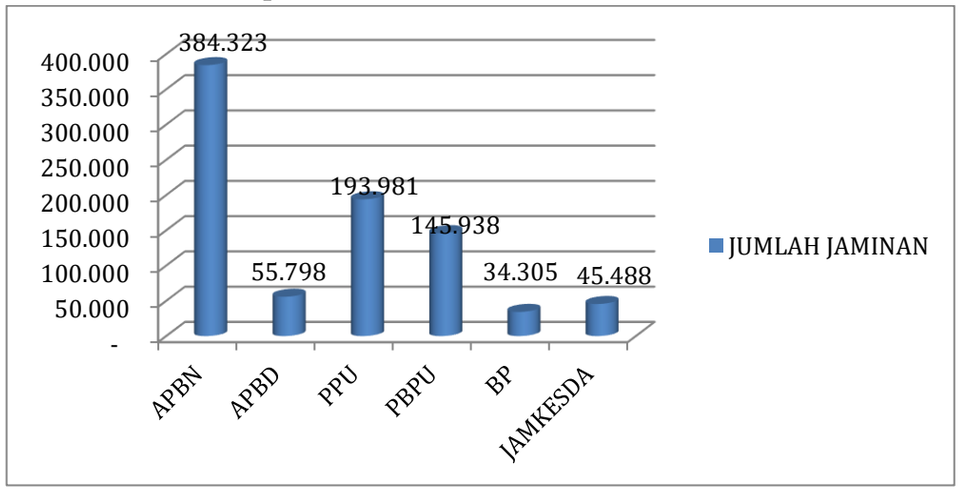
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Cakupan jaminan kesehatan pada tahun 2018 mencapai sebesar 74,89% dari jumlah penduduk 1.148.198, dengan rincian jumlah kepesertaan sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN : 384.323 orang
2. Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD : 55.798 orang
3. Pekerja Penerima Upah (PPU) : 193.981 orang
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) : 145.938 orang
5. Bukan Pekerja (BP) : 34.305 orang
6. Jaminan Kesehatan Daerah :45.488 orang

Visualisasi mengenai kepesertaan jaminan kesehatan pada Tahun 2018 ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.19
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2016



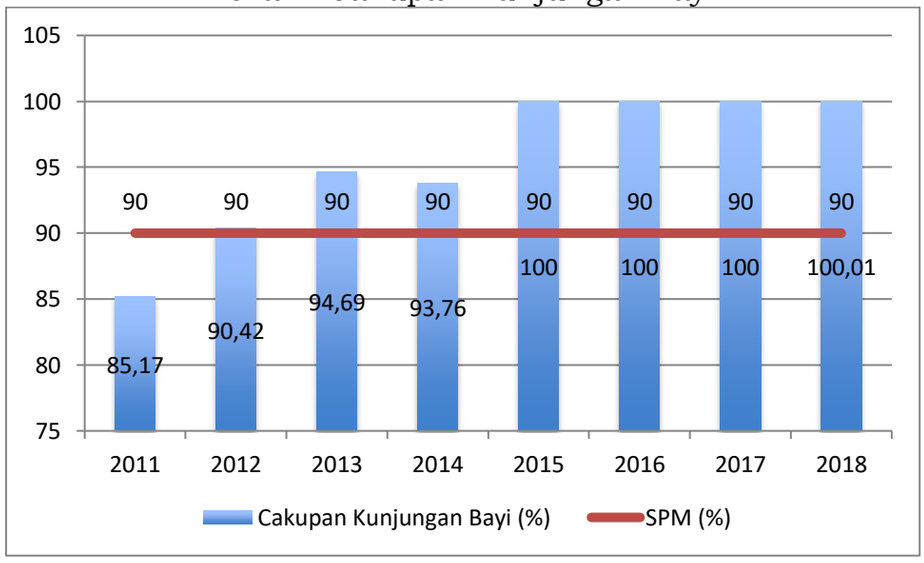
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sumedang

K. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan kunjungan bayi ditetapkan sebesar 90%.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan tren sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2018. Pada Tahun 2011 angka cakupan kunjungan bayi sebesar 85,17%, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 100% bahkan pada akhir Tahun 2018 menjadi 100,01%. Dengan demikian, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2012-2018 telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan.

Gambar 2.20
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi



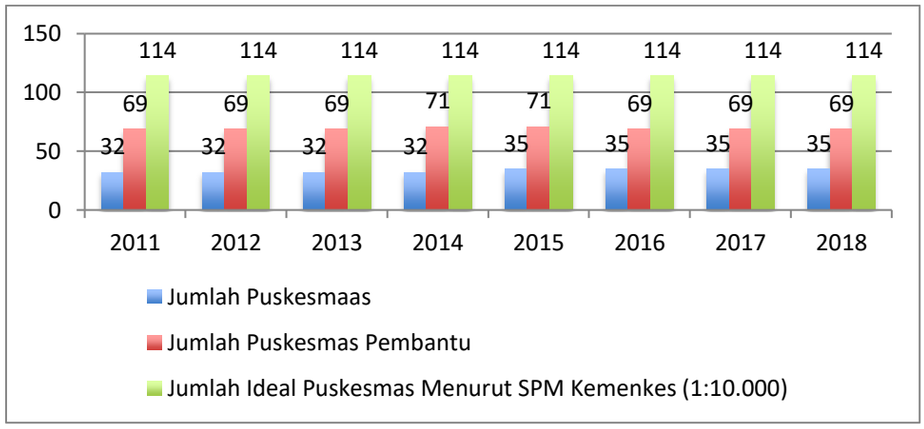
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

K. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas

Berdasarkan Gambar 2.21 dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas selama periode Tahun 2011-2014 sejumlah 32 puskesmas, kemudian pada Tahun 2015 meningkat menjadi 35 puskesmas hingga Tahun 2018 tidak mengalami peningkatan jumlah. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan

Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 pukesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), Buahdua (2 puskesmas). Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Kesehatan (1 Puskesmas untuk 10.000 penduduk) maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang, idealnya Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 memiliki 115 puskesmas untuk jumlah penduduk sebesar 1.148.198 jiwa.

Gambar 2.21
Grafik Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

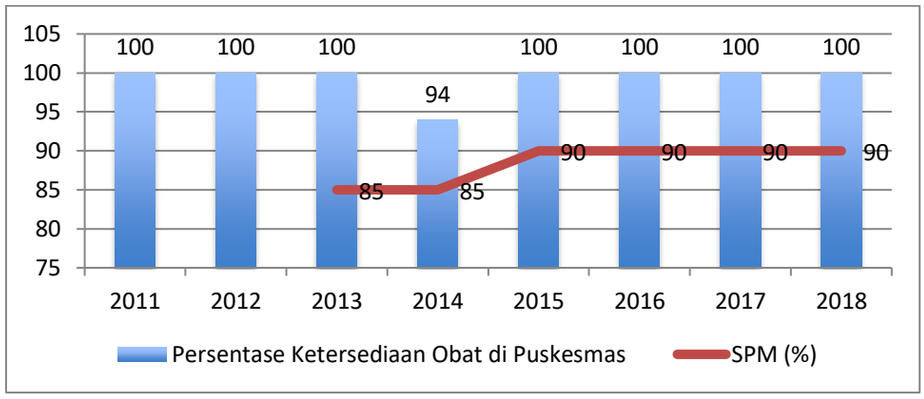


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Untuk membantu melengkapi pelayanan kesehatan, Kabupaten Sumedang memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 69 pada Tahun 2017. Puskesmas pembantu ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Sementara itu, untuk mengukur kualitas puskesmas salah satunya dilihat dari indikator persentase ketersediaan obat di puskesmas. Pada Gambar 2.22 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu pada Tahun 2011-2018 tren persentase ketersediaan obat di puskesmas telah mencapai 100% atau dengan kata lain telah mencapai target SPM sebesar 100%.

Gambar 2.22

Grafik Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas



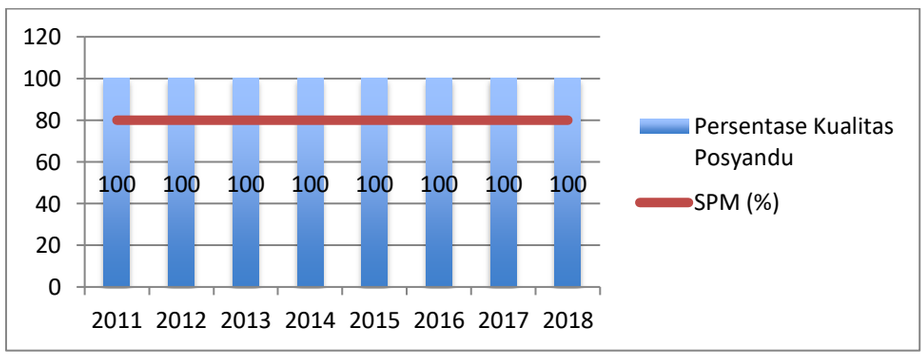
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

L. Persentase Kualitas Posyandu

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan dan peningkatan status gizi masyarakat. Posyandu membutuhkan adanya kader-kader posyandu terlatih yang mengetahui prosedur pelayanan kesehatan di posyandu dan tempat yang memadai sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Salah satu tugas kader posyandu adalah melakukan kegiatan bulanan posyandu yakni menimbang balita dan pengisian hasil timbangan kedalam Kartu Menuju Sehat balita (KMS). Untuk mendapatkan data penimbangan yang baik dan berkualitas perlu memahami prosedur pengukuran data antropometri serta memperhatikan akurasi pengukuran.

Gambar 2.23

Grafik Persentase Kualitas Posyandu



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

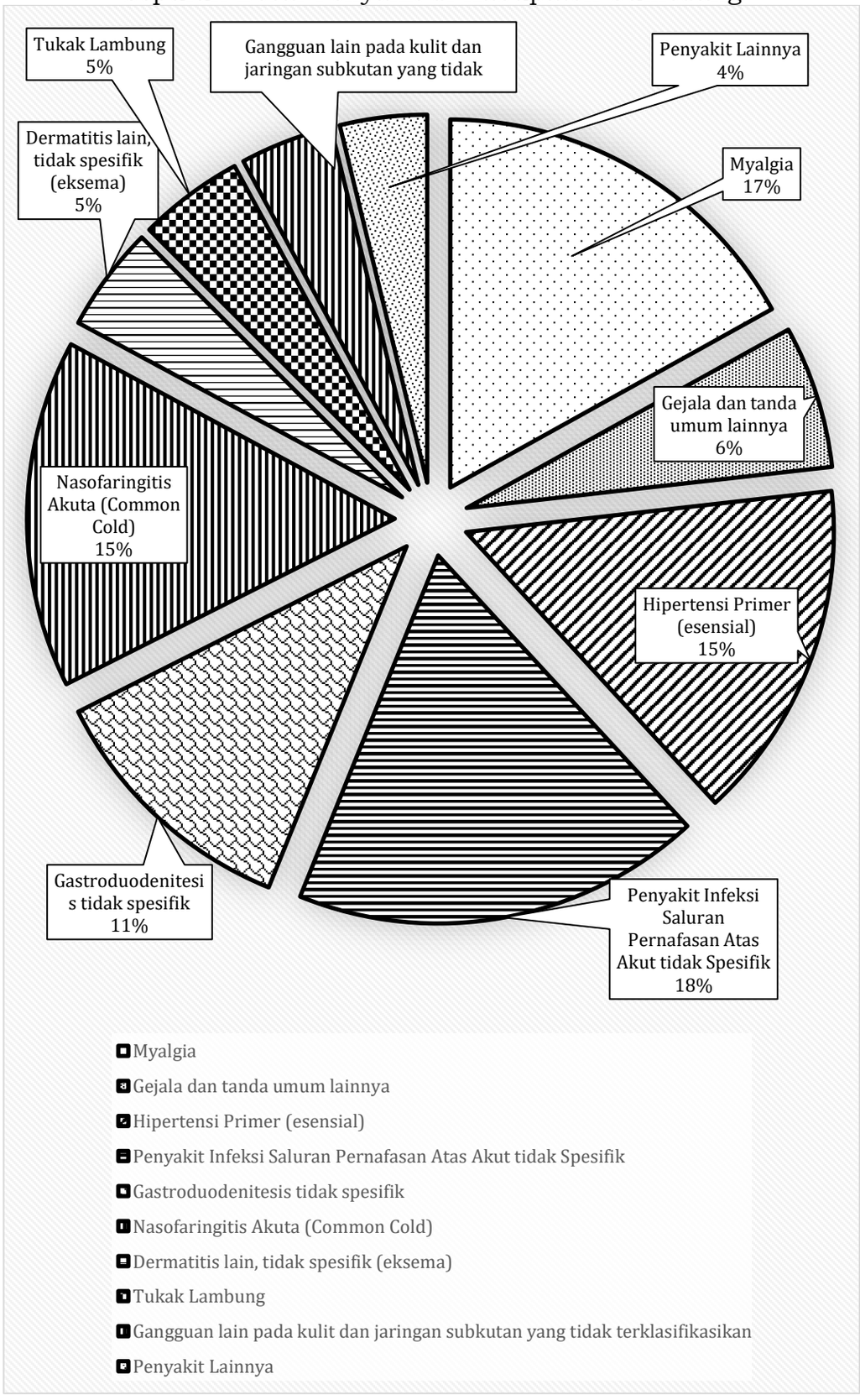
Posyandu berkualitas di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2011-2018 telah mencapai 100%. Kondisi tersebut telah

memenuhi SPM Kementerian Kesehatan yakni 80% pada Tahun 2018.

M. Morbiditas (Kesakitan)

Perubahan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya digambarkan dengan perubahan ”Pola Penyakit dan Jumlah kasus penyakit” yang dicatat dan diamati di fasilitas-fasilitas kesehatan dalam bentuk angka dan data. Sebagai gambaran umum angka kesakitan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 dapat melalui data sepuluh besar penyakit berdasarkan total kunjungan pasien yang datang ke 35 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari sumber data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dapat diketahui bahwa sepuluh besar penyakit yang ada di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2.24
Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Sumedang



Sumber : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

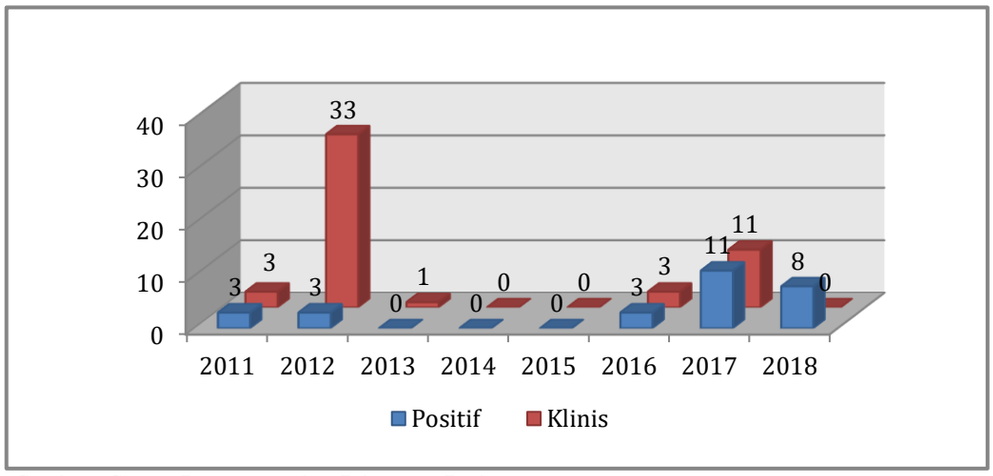
Berdasarkan grafik di atas bahwa penyakit ISPA merupakan prosentasi terbesar sebanyak 18,18% dari 10 besar penyakit yang

ada. ISPA merupakan penyakit yang berada pada sepuluh besar penyakit di Kabupaten Sumedang berdasarkan laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP3). Upaya dalam rangka pemberantasan penyakit infeksi saluran pernapasan akut lebih difokuskan pada upaya penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita yang ditemukan. ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernafasan manusia, keadaan ini dapat disebakan oleh virus, bakteri dan organisme lain. Langkah preventif dalam mewaspadai ISPA adalah dengan melakukan pola hidup yang higienis. Pencegahan ISPA secara umum adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan cukup istirahat, makan amakana bergizi, dan minuman yang cukup. Membiasakan diri mencuci tanagan adalah salah satu cara meminimalkan kontak dengan virus penyebab ISPA.

N. Penyakit Malaria

Pada Tahun 2017 ditemukan kasus malaria sebanyak 11 (Sebelas) kasus yang merupakan kasus impor karena mobilitas penduduk Kabupaten Sumedang yang cukup tinggi yaitu pasien bekerja di tempat endemis malaria seperti di Papua. Sedangkan pada Tahun 2018 ditemukan suspek malaria sebanyak 8 kasus. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja yang sedang dan telah selesai bertugas di daerah endemis tinggi (Diagnosis Dini), pengobatan cepat dan tepat, surveilans dan pengendalian vektor yang kesemuanya ditujukan untuk memutus mata rantai penularan malaria. Kasus Malaria di Kabupaten Sumedang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.25
Kasus Penyakit Malaria

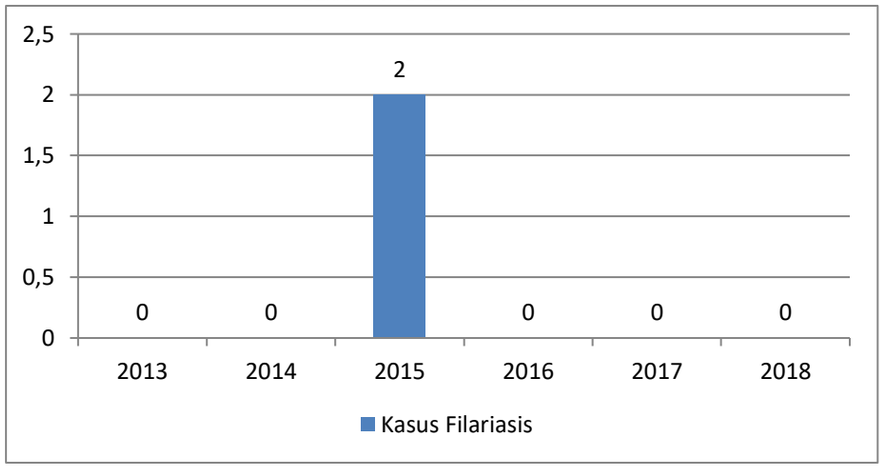


Sumber : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

O. Filariasis

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, *glandula mammae*, dan *scrotum,* menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh jenis nyamuk ini dapat berdampak pada penurunan produktifitas kerja penderita, beban keluarga, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyakit ini, tetapi faktor penyebab terbesar adalah cacing filaria. Berdasarkan Gambar 2.26 diketahui bahwa di Kabupaten Sumedang terjadi penemuan kasus filariasis hanya pada Tahun 2015.

Gambar 2.26
Kasus Filariasis

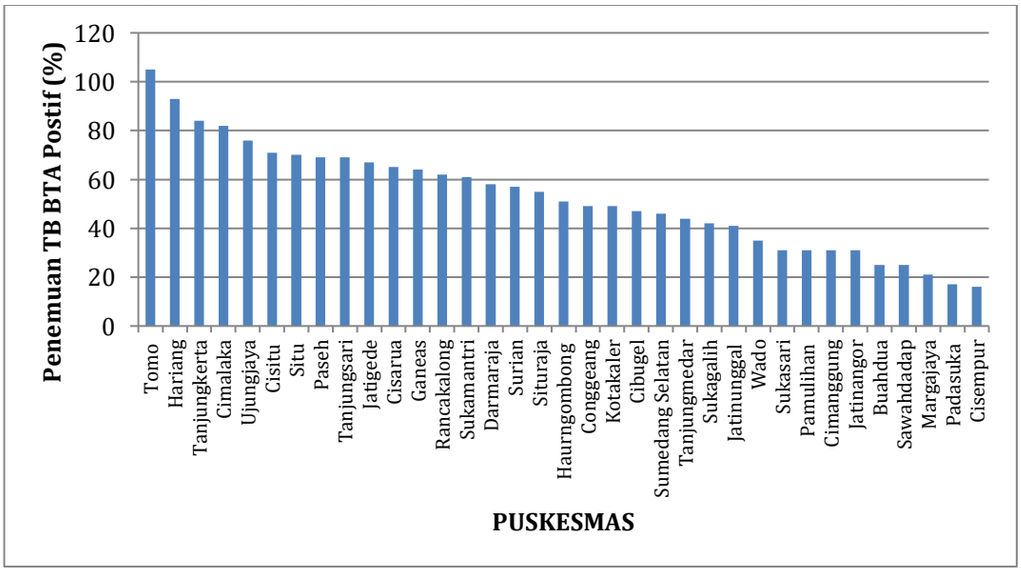


Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

P. Penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TB BTA) Positif

Berdasarkan gambar 2.27 diketahui pada Tahun 2018 bahwa angka penemuan kasus TB BTA Positif tertinggi berada di Tomo, sedangkan angka penemuan kasus TB BTA Positif terendah berada di Puskesmas Cisempur. Semakin rendah penemuan Kasus TB BTA Positif menunjukan bahwa resiko penularan TB Paru di masyarakat masih tinggi karena masih banyak penderita TB BTA Positif yang belum ditemukan. Capaian yang rendah diduga karena upaya penemuan kasus suspek TB secara aktif masih belum maksimal, dan belum semua Puskesmas memiliki tenaga analis kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan BTA.

Gambar 2.27
Jumlah Penemuan Kasus TB BTA Positif Tahun 2018

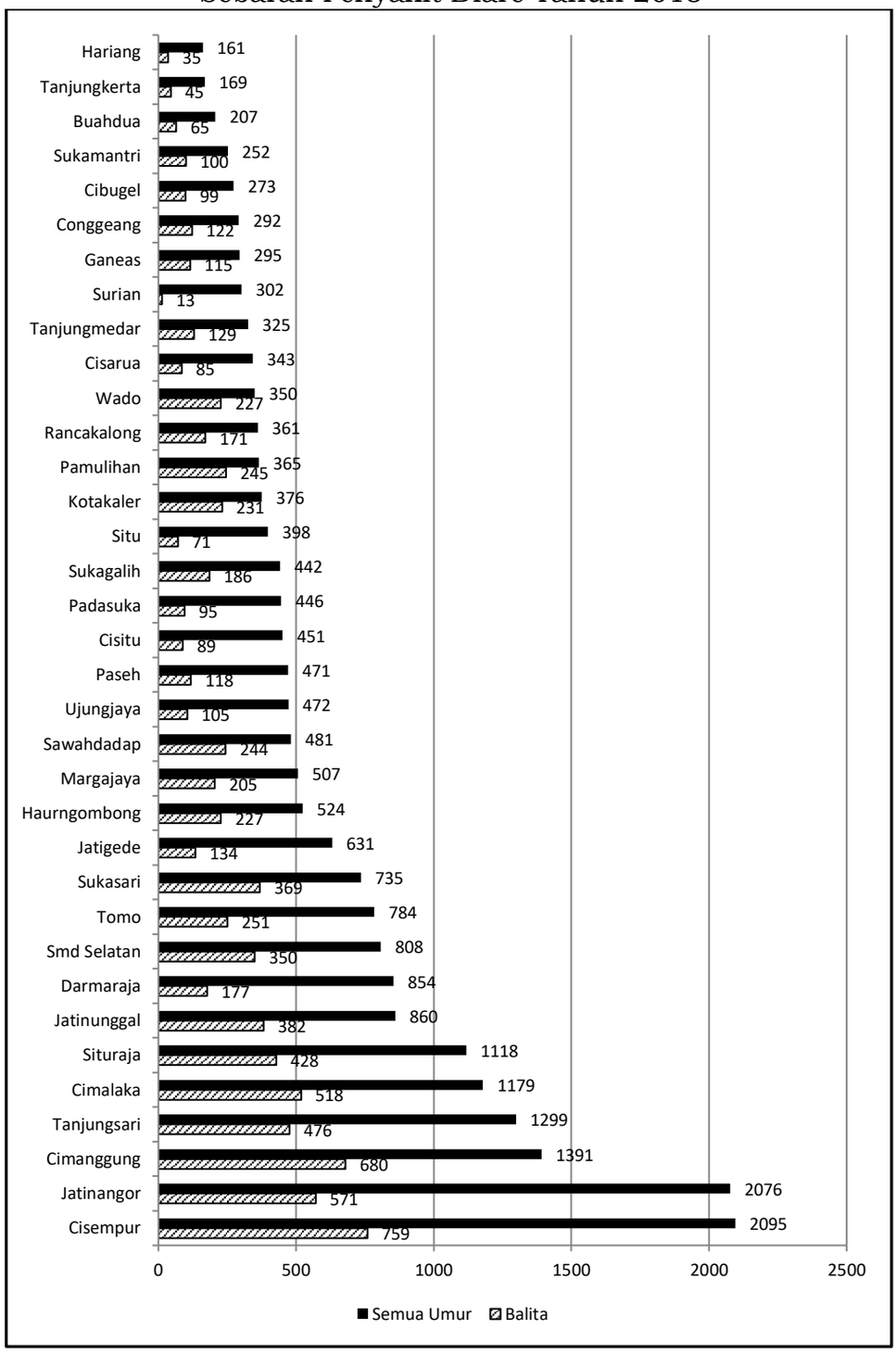


Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Q. Penyakit Diare

Diare adalah penyakit yang berhubungan erat dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan perilaku masyarakat. Untuk itu perlu upaya mereduksi kasus melalui promosi PHBS di masyarakat. Gambaran sebaran kasus diare di Kabupaten Sumedang per puskesmas disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.28
Sebaran Penyakit Diare Tahun 2018



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2016

Berdasarkan Grafik di atas, penemuan kasus diare tertinggi di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 terdapat di Puskesmas Cisempur yaitu sebanyak 2.095 kasus pada semua umur dan 759 kasus pada usia balita. Capaian penemuan terendah terdapat di Puskesmas Hariang yaitu sebesar 161 kasus diare pada semua umur dan 35 kasus diare pada balita. Kasus diare yang terjadi selama Tahun 2018, 100% ditangani dan tidak ada kematian yang disebabkan Diare.

R. Penyakit Kusta

Penyakit Kusta dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita. Masalah ini diperberat dengan masih tingginya stigma di kalangan masyarakat dan sebagian petugas. Akibat dari kondisi ini, sebagian penderita dan mantan penderita dikucilkan sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta pekerjaan yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan.

Berdasarkan data diketahui jumlah penemuan cacat tingkat II Kusta di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 yaitu 15 kasus. Hal ini dikarenakan penemuan pasien terlambat, sehingga pasien ditemukan dan diobati sudah dalam keadaan cacat tingkat II. Kemudian rendahnya penemuan kasus diduga karena kurangnya kemampuan petugas dalam mendeteksi dan mendiagnosis kusta secara dini. Dalam perspektif kedepan petugas puskesmas diharapkan dapat menemukan pasien Kusta lebih dini, melalui kegiatan pencarian kontak/*rapid village survey*/*school survey*.

S. HIV AIDS

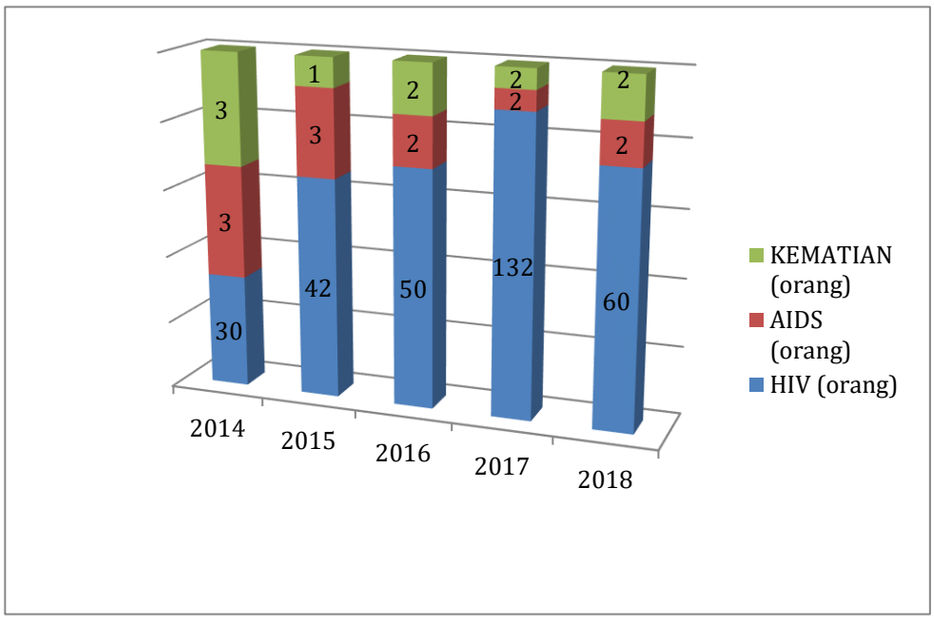
Epidemi HIV di Kabupaten Sumedang telah terjadi perubahan dari "*low level epidemic*" menjadi "*concentrate level epidemic*" dimana HIV telah menyebar dengan cepat dalam suatu sub-populasi tertentu namun belum menyebar di populasi umum. Tingkat epidemic ini menunjukkan tingkat perilaku berisiko yang cukup aktif menularkan di dalam sub populasi tersebut. Perjalanan epidemic ditentukan oleh jumlah dan sifat hubungan antara kelompok beresiko tinggi dengan populasi umum.

Dampak penyebaran infeksi HIV/AIDS dan tingginya prevalensi di Kabupaten Sumedang dalam beberapa tahun terakhir ini, menganggap masalah HIV/AIDS bukan hanya masalah medis dari

penyakit menular saja tetapi sudah menjadi aspek kehidupan manusia baik dari segi kesehatan, psikologi, sosial dan budaya.

Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dari pada kenyataan di lapangan. Tetapi dengan semakin giatnya usaha petugas dalam penemuan kasus HIV/AIDS maka semakin banyak pula kasus yang ditemukan sehingga semakin tinggi pula upaya dalam pengendaliannya. Trend jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

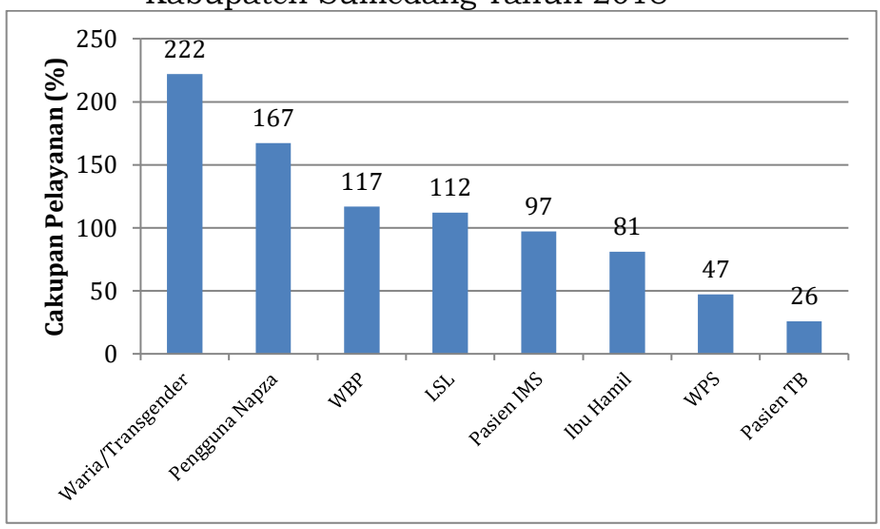
Gambar 2.29
Data Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 – 2018



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Cakupan pelayanan kesehatan pada orang berisiko HIV di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.30
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko HIV di Kabupaten Sumedang Tahun 2018



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Keterangan :
WBP = Warga Binaan Pemasyarakatan
LSL = Lelaki seks dengan lelaki
IMS = Infeksi Menular Seksual
WPS = Wanita Pekerja Seks
TB = Tuberculosis

Berdasarkan grafik diatas, cakupan pelayanan kesehatan pada orang berisiko HIV di Kabupaten Sumedang sebanyak 75%, di dominasi oleh populasi kunci, namun untuk populasi berisiko lainnya seperti bumil dan pasien TB capaiannya masih rendah. Hal ini diduga karena masih adanya stigma buruk HIV di masyarakat umum sehingga masyarakat umum merasa enggan untuk melakukan skrining HIV.

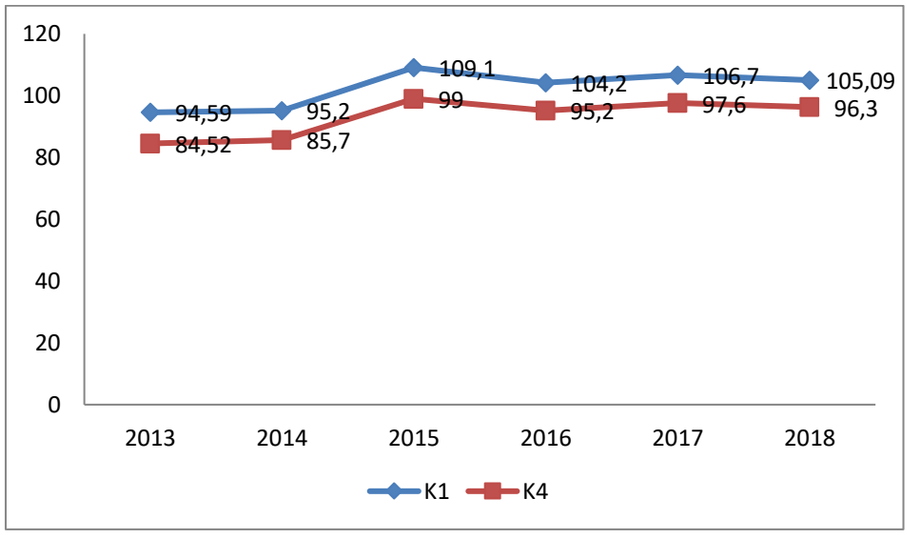
T. Cakupan Pelayanan K1 dan K4

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk Ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Pelayanan Antenatal sesuai dengan standar dalam penerapannya terdiri dari 10T.

Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali dengan distribusi 1 kali pada trimester ke- 1 dan 1 kali pada trimester ke- 2 serta 2 kali pada trimester ke 3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2018 dengan total sasaran ibu hamil sebanyak 19.631 orang, cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.31
Cakupan Pelayanan K1 dan K4



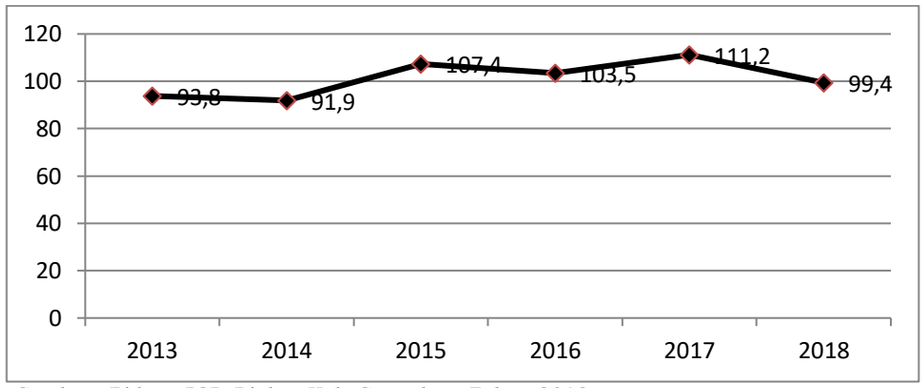
Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 2.30, diketahui bahwa cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terdapat *miss opportunity* K4 yang menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar terhadap K1 (>5%). Hal ini menunjukkan, banyak sasaran ibu hamil yang *default*/ mangkir untuk diperiksa setelah kunjungan pertama kali, adanya kejadian abortus, dan masih tingginya jumlah K1 Akses.

U. Cakupan Kunjungan Neonatus

Cakupan kunjungan neonatal (KN) adalah cakupan neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3- hari ke 7, dan 1 kali pada hari ke 8- hari ke 28 setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektifitas dan pelayanan kesehatan neonatal. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Sumedang adalah 19.819, kunjungan neonatus 1 kali yang ditolong tenaga kesehatan yaitu 20.082 (100%), sedangkan kunjungan neonatus lengkap (KN3) adalah 19.547 (100%). KN1 pada Tahun 2017 mencapai 111,2%, kemudian capaian KN1 pada Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 99,4%. Tren Cakupan KN 1 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

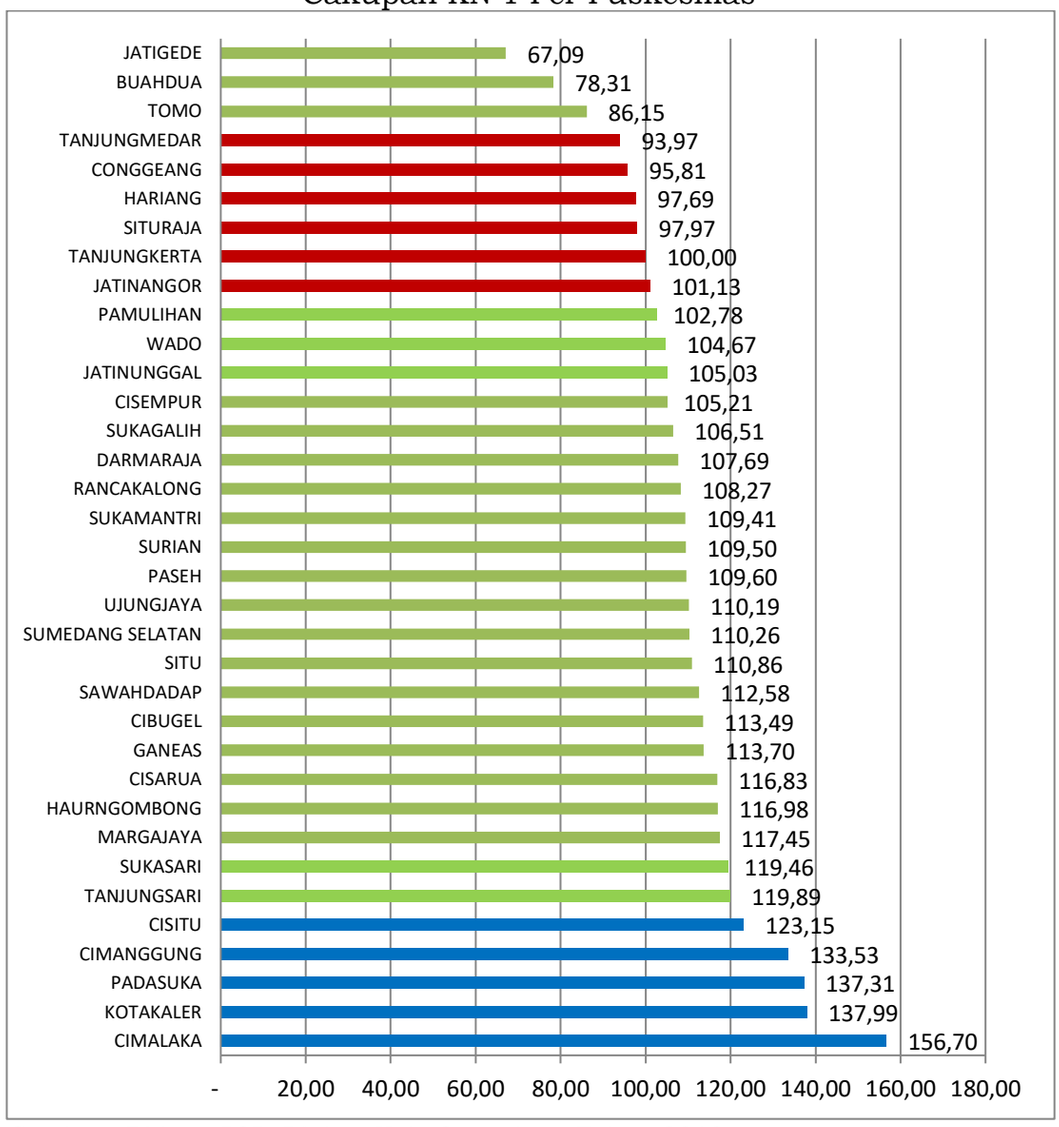
Gambar 2.32
Tren Cakupan Neonatus



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Adapun sebaran Cakupan KN 1 dan KN3 di Puskesmas cukup bervariasi pada Tahun 2018 dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

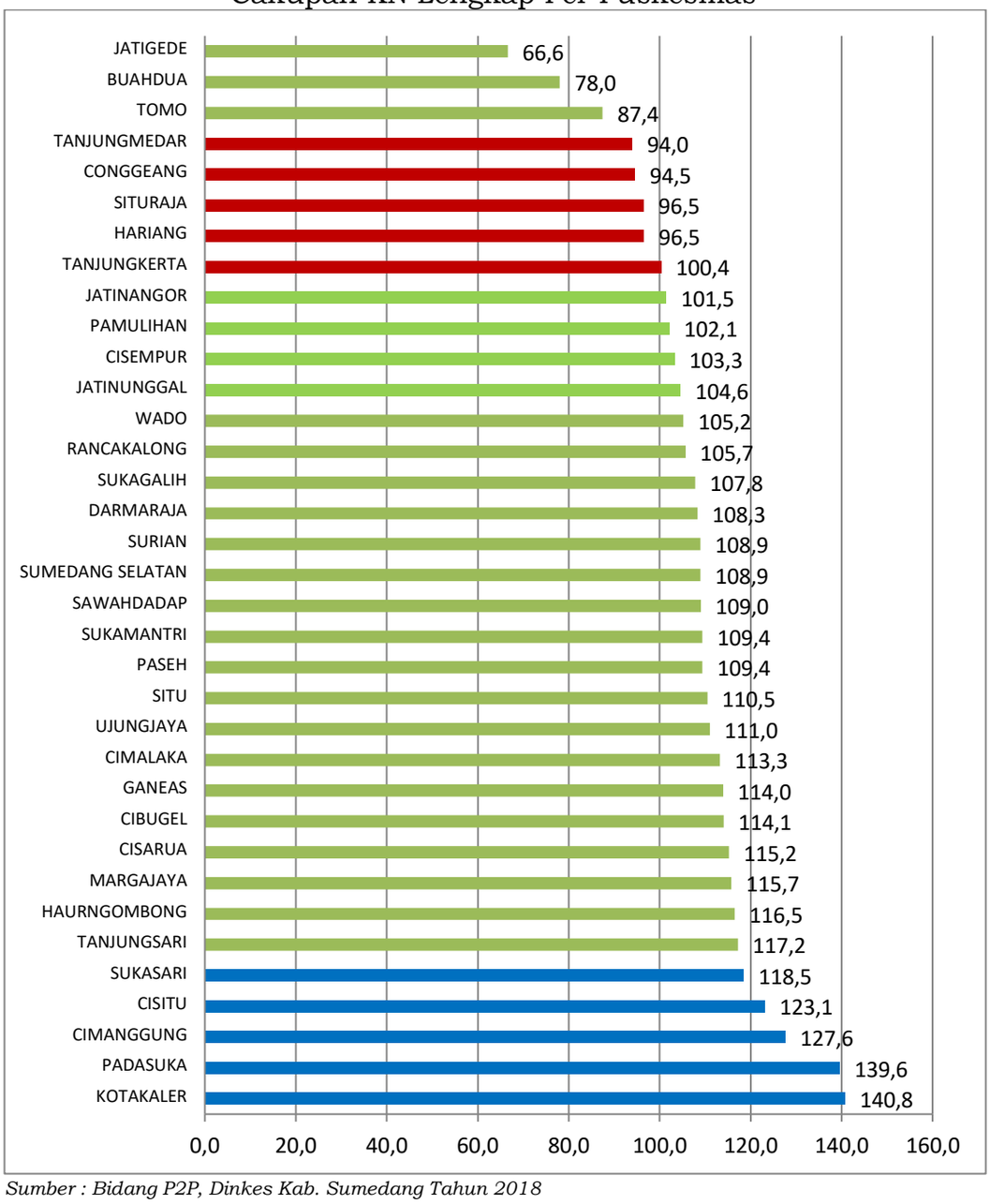
Gambar 2.33
Cakupan KN 1 Per Puskesmas



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas hampir semua Puskesmas cakupannya lebih dari 80% kecuali Puskesmas Buahdua (78,31%) dan Puskesmas Jatigede (67,09%). Hasil analisa ketidak tercapainya cakupan disebabkan mobilisasi penduduk ke luar wilayah akibat perendaman desa sebagian wilayah Jatigede sedangkan di Puskesmas Buahdua dikarenakan tingginya cakupan KB Aktif .

Gambar 2.34
Cakupan KN Lengkap Per Puskesmas



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Cakupan KN1 20.082 (100%) dan cakupan KN lengkap 19.547 (100%) Tahun 2017, semua puskesmas cakupannya telah lebih dari 80% hal ini dikarenakan meningkatnya kinerja tenaga kesehatan

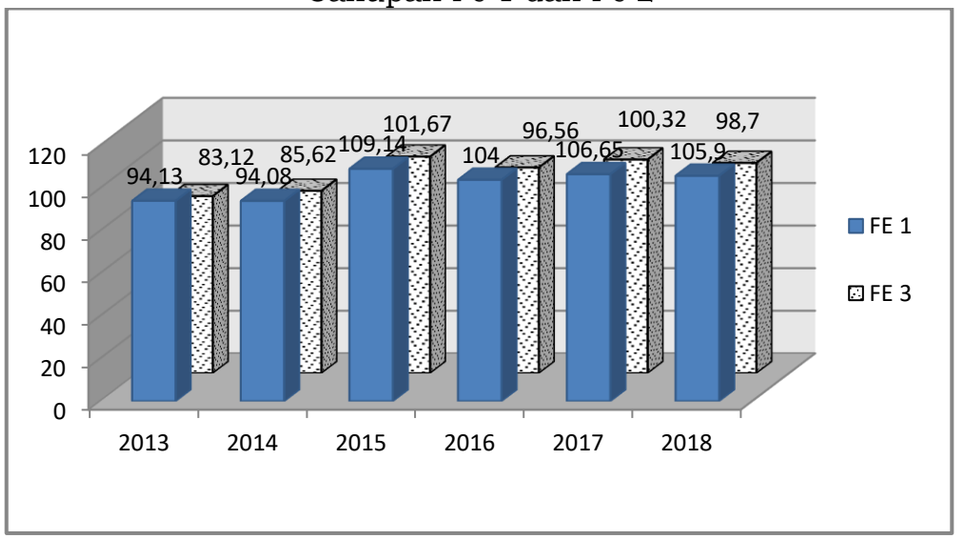
khususnya bidan di Kabupaten Sumedang. Seperti diketahui bahwa kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan/masalah kesehatan pada neonatus. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya. Sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Pelayanan Kesehatan Neonatal dasar dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan Bayi baru Lahir dan pemeriksaan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat.

V. Pelayanan Gizi Ibu Hamil (Cakupan Fe 1 dan Fe 3)

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil diberikan sejak triwulan I bahkan sejak pertama kali ibu tersebut dinyatakan hamil. Pertama kali ibu mendapatkan tablet Fe sebanyak 30 tablet. Pelayanan gizi tersebut dinyatakan sebagai cakupan Fe 1. Pada tahun 2018 cakupan Fe 1 di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 105,93%. Data ini menunjukkan bahwa seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada trimester I telah mendapatkan pelayanan gizi berupa pemberian TTD.

Cakupan ibu hamil mendapat TTD 90 tablet (Fe3) di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 mencapai 98,72%, menurun dibandingkan Tahun 2017.

Gambar 2.35
Cakupan Fe 1 dan Fe 2

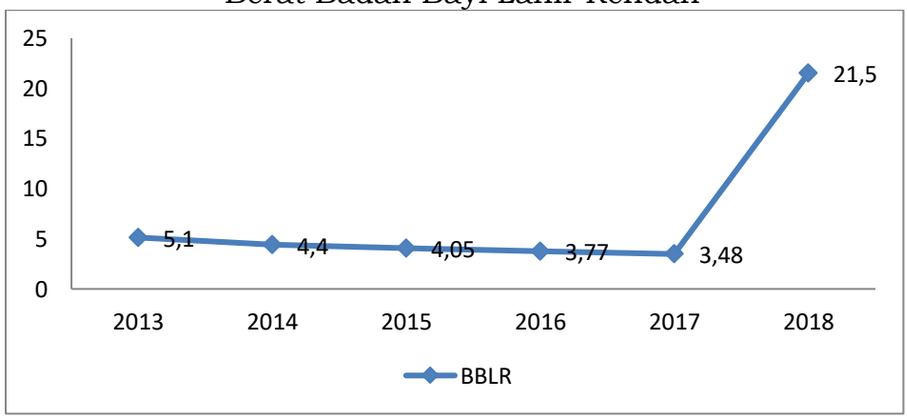


Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

W. Bayi Berat Badan Lahir Rendah

Bayi baru lahir hidup di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sebanyak 19.819 bayi, sebagian besar adalah bayi berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 10.184 bayi. Bayi-bayi yang lahir hidup tersebut kemudian seluruhnya mendapatkan pelayanan gizi berupa penimbangan berat badan. Bayi dengan berat badan lahir < 2500 gram dinyatakan sebagai bayi dengan berat badan lahir rendah. Pada Tahun 2017 persentase BBLR di Kabupaten Sumedang menurun dan terkendali di bawah target 5% dibandingkan dengan Tahun 2016. Secara absolut jumlah BBLR Tahun 2016 adalah 757 bayi sedangkan Tahun 2017 sebanyak 690 bayi. Namun demikian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan menjadi 21,5% dari 3,48% pada Tahun 2017. Peningkatan angka kelahiran BBLR tidak terlepas dari kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan konseling dan peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai zat besi.

Gambar 2.36
Berat Badan Bayi Lahir Rendah

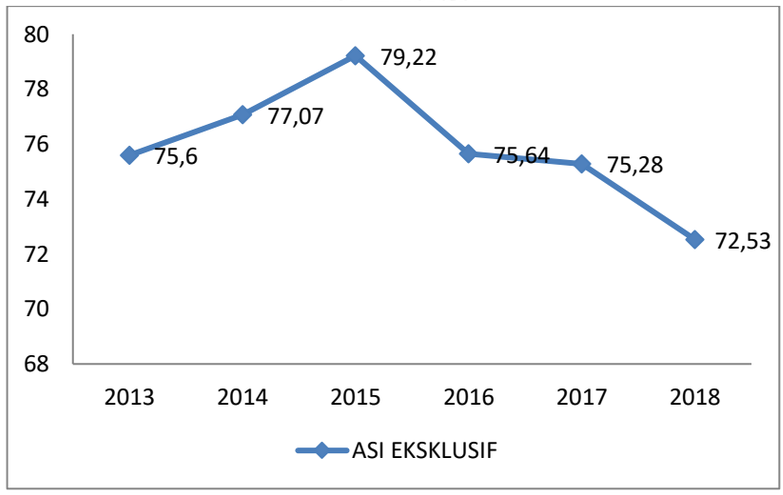


Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

X. Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi kurang dari 6 bulan

Proses untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 bulan dilaksanakan selama rentang usia bayi 0 sampai 5 bulan cakupannya sebesar 75,28%. Gambar 2.37 menunjukkan bahwa proses tersebut pada Tahun 2017 memberikan hasil yang menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Demikian pula Tahun 2018 hanya mencapai 72,53% Dengan kata lain jumlah bayi ASI eksklusif yang gugur sebelum usia 6 bulan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.37
ASI Ekslusif

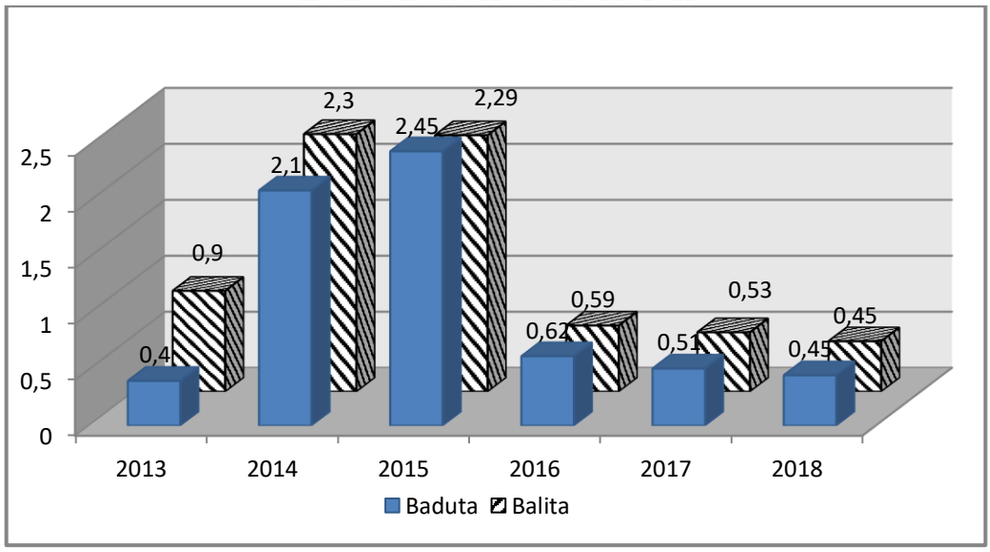


Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2018

Y. Deteksi Bawah Garis Merah (BGM)

Balita dengan hasil plotting berat badan di bawah garis merah pada kurva KMS adalah balita dengan berat badan sangat kurang. Hal tersebut dapat mengindikasikan masalah pertumbuhan lainnya seperti kurus dan pendek. Dengan demikian, BGM merupakan deteksi awal bagi kejadian masalah gizi balita. Persentase balita BGM di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 menurun baik itu pada katagori baduta (0-23 bulan) ataupun kategori balita (0-59 bulan) jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dan terkendali tetap di bawah batas target yang ditetapkan <5%, pada Tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 0,45%.

Gambar 2.38
Balita Bawah Garis Merah

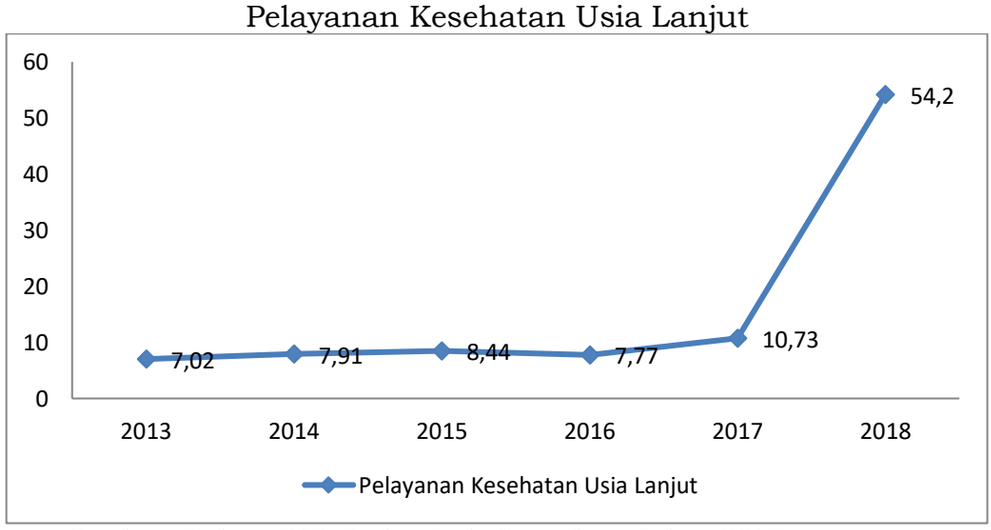


Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2017

Z. Cakupan Pelayanan Usia Lanjut

Pengertian dari usia lanjut adalah umur 60 tahun ke atas. Cakupan pelayanan lansia merupakan kegiatan pelayanan kesehatan lansia yang dilaksanakan di dalam gedung puskesmas, posbindu lansia dan kunjungan rumah. Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dilaksanakan di 35 puskesmas di Kabupaten Sumedang, dengan perkembangan tren yang meningkat selama Tahun 2013 (7,02%) hingga Tahun 2017 (10,73%). Pada Tahun 2018 cakupan pelayanan usia lanjut meningkat menjadi 54,2%. Hal ini didukung oleh program DAK non Fisik (Biaya Operasional Kesehatan) Puskesmas sehingga layanan usia lanjut dan beberapa program dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.39
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut



Sumber : Bidang P2P, Dinkes Kab. Sumedang Tahun 2017

AA. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sistem pelayanan kesehatan rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horiontal. Pada hakikatnya sistem rujukan mengatur darimana dan harus kemana seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya. Sistem rujukan tersebut diatur dan dirumuskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Pelaksanaan sistem rujukan di indonesia telah diatur

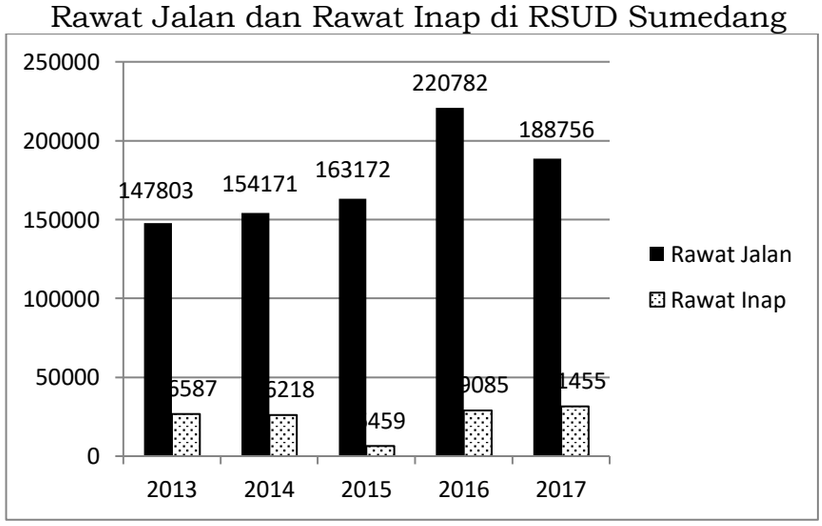
dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, dimana dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan di atasnya, demikian seterusnya. Apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi, transportasi) terpenuhi maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat yang membutuhkan akan segera tertangani dengan tepat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang mewakili 35 Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten Sumedang membuat perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan Rumah Sakit yang ada di wilayah kabupaten Sumedang. Perjanjian kerjasama dengan Rumah sakit lintas daerah sedang dalam proses karena melibatkan bagian kerjasama pemerintah kabupaten Sumedang. Jumlah Rumah sakit Umum di Kabupaten Sumedang ada 3 (tiga) yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang
2. Rumah Sakit Umum Pakuwon.
3. Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga

Berikut adalah jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit tersebut :

Gambar 2.40
Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD Sumedang

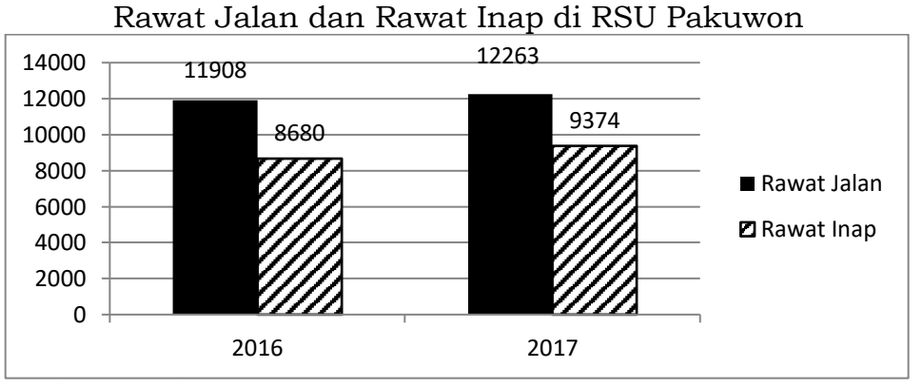


Sumber : RSUD Sumedang

Berdasarkan gambar di atas menunjukan bahwa trend kasus rujukan rawat jalan meningkat dari Tahun 2013 sampai dengan

Tahun 2016, tetapi pada Tahun 2017 ada penurunan dan jumlah kasus rawat inap di RSUD Sumedang meningkat. Hal ini karena mekanisme sistem rujukan berjenjang dan mapping rujukan FKTP yang ada di kabupaten Sumedang sudah lebih baik. Kondisi ini didukung dengan adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana rujukan di Kabupaten Sumedang dengan bertambahnya satu Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit Harapan Keluarga.

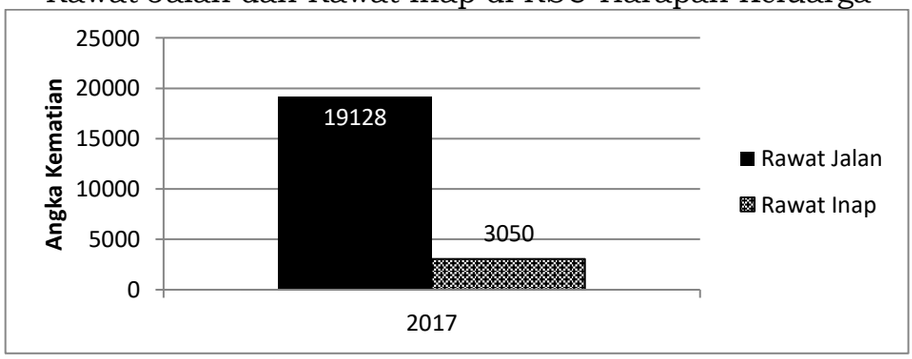
Gambar 2.41
Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSU Pakuwon



Sumber : RSU Pakuwon

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Pakuwon meningkat. Hal ini menunjukan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah melaksanakan sistem rujukan berjenjang dengan baik.

Gambar 2.42
Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSU Harapan Keluarga



Sumber : RSU Harapan Keluarga

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus rawat jalan lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus rawat inap di Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga. Hal ini menunjukan bahwa kasus-kasus yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga masih ditangani dengan rawat jalan. Hal ini didukung dengan data bahwa nilai angka kematian di Rumah Sakit Harapan Keluarga 0%. Untuk lebih meningkatkan sistem rujukan yang ada di Kabupaten

Sumedang, pada akhir Tahun 2018 telah digulirkan program Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui layanan rawat layad *Public Safety Center* (PSC 119).

BB. Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana dan KLB

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui kesiapsiagaan sumber daya kesehatan. Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan mengikuti siklus penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pascakrisis kesehatan dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian Krisis Kesehatan yang lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Kesiapan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana telah terbagi dalam klaster kesehatan seperti tertuang dalam tabel di bawah ini Pengorganisasian klaster dan subklaster kesehatan

Tabel 2.24
Klaster Penanggulangan Krisis Kesehatan

Tugas Klaster	Pelaksana Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan	Sub Klaster Pelayanan Kesehatan
Pengendalian Penyakit	Sub Klaster Pengendalian Penyakit
Penyehatan Lingkungan	Sub Klaster Penyehatan Lingkungan & Penyiapan Air Bersih
Penyiapan Air Bersih & Sanitasi yang berkualitas	
Pelayanan Kesehatan Gizi	Sub Klaster Pelayanan Gizi
Pengelolaan Obat Bencana	Sub Klaster Logistik Kesehatan
Penyiapan Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana	Sub Klaster KIA & Reproduksi
Penanganan Kesehatan Jiwa	Sub Klaster Kesehatan Jiwa
Penatalaksanaan Korban Meninggal	Sub Klaster DVI
Pengelolaan Informasi Kesehatan	Sub Klaster Informasi Kesehatan

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sumedang

Penguatan Tupoksi tersebut tertuang dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor 800/1502/SK/Ka.Dinkes/P2P/VI/2017, Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) dan Satuan Tugas

(Satgas) Penanggulangan dan Pemulihan Krisis Kesehatan Akibat KLB/Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Adapun Kawasan rawan bencana di Kabupaten Sumedang yaitu :

1) Kawasan rawan bencana alam gunung merapi
2) Kawasan rawan gempa bumi, terdiri dari kawasan gempa bumi dan kawasan rawan gerakan tanah seperti di Kawasan Cadas Pangeran, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Situraja, Ganeas, Sumedang Selatan, Rancakalong dan Pamulihan.
3) Kawasan rawan banjir, seperti Ujungjaya, Tomo, Cimanggung dan Jatinangor.

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam situasi Bencana dengan menyiapkan Tim khusus apabila terjadi bencana tersebut diatas, terutama disiapkan di daerah rawan bencana. Sedangkan untuk penanganan Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 di Kabupaten Sumedang terjadi 5 kejadian KLB yaitu 3 (tiga) kasus keracunan pangan dan 2 (dua) kasus suspek difteri dengan hasil kultur BLK Provinsi Negatif, berkat kesigapan petugas kesehatan dan penanganan kurang dari 24 jam maka seluruh kejadian KLB dapat direspon dan ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 jam.

2.2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.2.1.3.1. Pekerjaan Umum

A. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan, semula sepanjang 796,056 Km di Tahun 2015-2016, kemudian menurun menjadi 774,606 di Tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan akibat genangan Waduk Jatigede dan pengurangan akibat pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Selanjutnya persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%),

sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan (Tabel 2.25). Pada Tahun 2015 tercatat 239,75 Km, kemudian meningkat menjadi 345,28 Km di Tahun 2016 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 424,70 Km di Tahun 2017. Dengan demikian pada Tahun 2017 hanya terdapat 54% jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang dari total panjang jalan sebesar 774,61 Km.

Tabel 2.25
Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Total Panjang Jalan (Km)	796,06	796,06	774,61
2	Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	239,75	345,28	424,70
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	30,12	43,37	54,83

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang

B. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 Jiwa)

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2015-2017 rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 7 km/10.000 jiwa (Tabel 2.26).

Tabel 2.26
Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Total Panjang Jalan (Km)	796,06	796,06	774,61
2	Jumlah Penduduk	1.110.841	1.132.459	1.139.564
3	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (Km/jiwa)	0,00072	0,00070	0,00070

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang

Jika mengacu pada Lampiran II Permen PU No.14/2010, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk 500 ≤ KP < 1000 jiwa/km^2 (kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang, yakni 737 jiwa/km^2), maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 5 Km/10.000 jiwa. Mengacu pada tabel diatas rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang telah memenuhi target SPM yaitu mencapai 0,00070 atau 7 km /10.000 jiwa.

C. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Selama Tahun 2013 hingga Tahun 2017 persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2013 tercatat 37%, kemudian selama tiga Tahun meningkat menjadi 41% di Tahun 2017. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Sementara itu rasio jaringan irigasi mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 4,31 dari semula 6,46 di Tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan panjang saluran irigasi yang baik dari semula 203.070 meter di Tahun 2016 menjadi 135.450 meter di Tahun 2017. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang perlu terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian.

Tabel 2.27
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

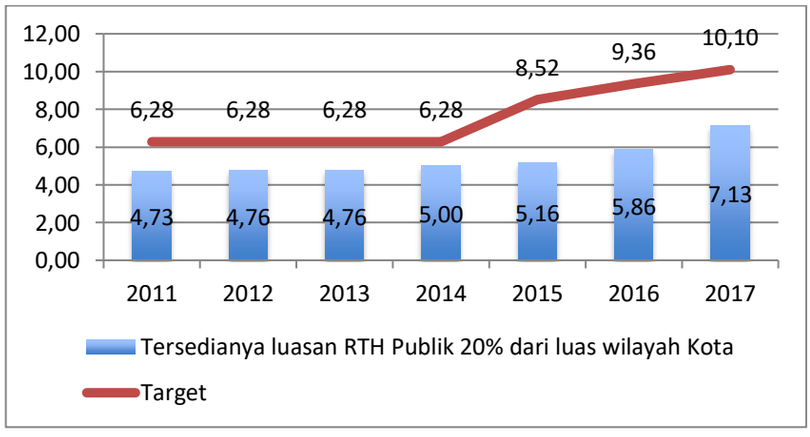
No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	37	38	32	38	41
a	Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)	17.077	17.461	18.420	21.619	23.333
b	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	46.147	46.147	56.993	56.993	56.993
2	Rasio Jaringan Irigasi	1,81	1,90	2,97	6,46	4,31
a	Panjang Saluran Irigasi Yang Baik (m)	57.000	59.640	93.240	203.070	135.450
b	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	31.417	31.417	31.417	31.417	31.417

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang

2.2.2.1.3.2. Penataan Ruang

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem Ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Gambar 2.43
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota



Sumber : DLHK Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Gambar 2.43 dapat diketahui bahwa realisasi RTH di Kabupaten Sumedang belum mencapai target yang ditentukan. Lebih lanjut, besaran target RTH tersebut belum sesuai dengan amanah undang-undang, yakni 30%. Dalam perspektif pembangunan

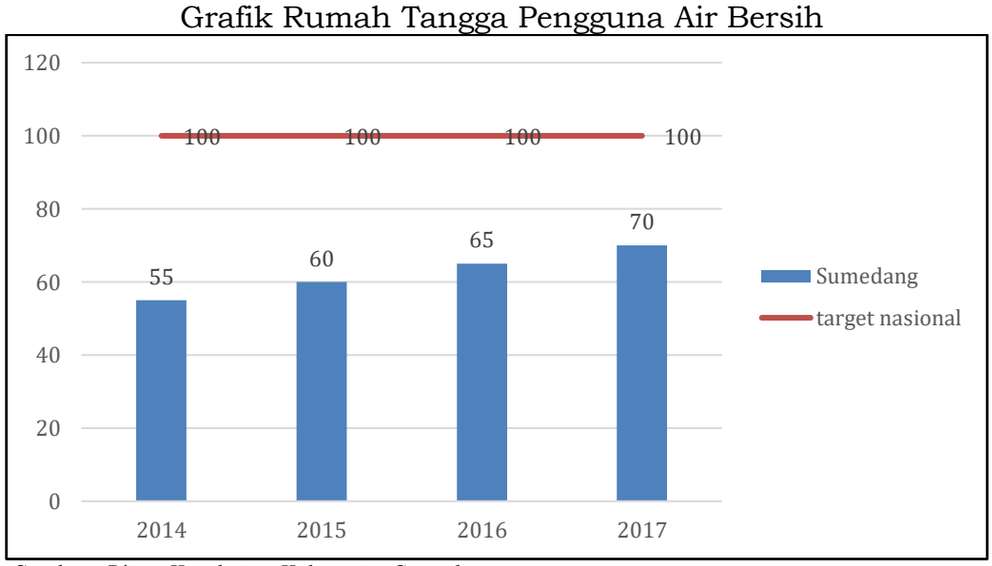
Kabupaten Sumedang periode Tahun 2019-2023 penetapan target RTH perlu ditingkatkan.

2.2.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan grafik di bawah ini, rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2017 di Kabupaten Sumedang tercatat 70%. Kondisi tersebut masih jauh di bawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih.

Gambar 2.44
Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

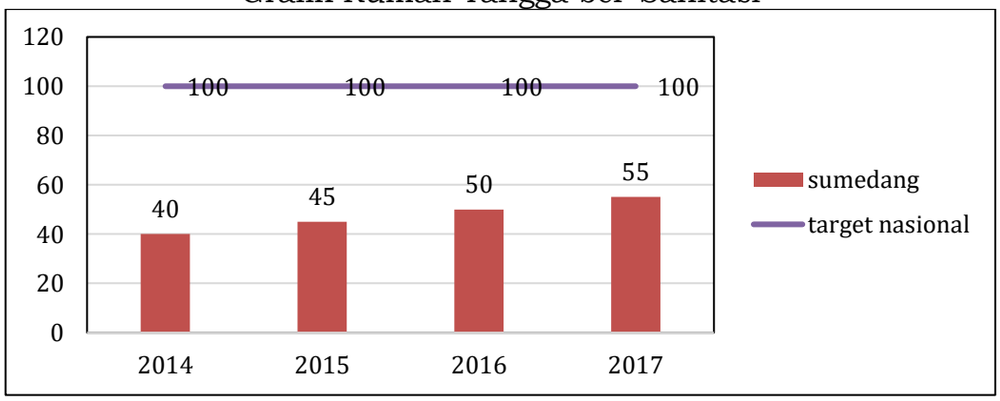


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

B. Rumah Tangga ber-Sanitasi (Kepemilikan WC dan Akses Sanitasi Layak)

Target RPJMN Tahun 2015-2019 menetapkan target pada akhir Tahun 2019 rumah tangga yang memiliki sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2014-2017 belum mencapai target.

Gambar 2.45
Grafik Rumah Tangga ber-Sanitasi



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

C. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Target MDGs untuk lingkungan kumuh perkotaan pada Tahun 2015-2017 adalah 6%. Mengacu kepada Tabel 2.28 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2017 masih terdapat 58 Ha kawasan pemukiman kumuh dari total 9.246 Ha kawasan pemukiman, dengan demikian target MDGs belum tercapai.

Tabel 2.28
Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh

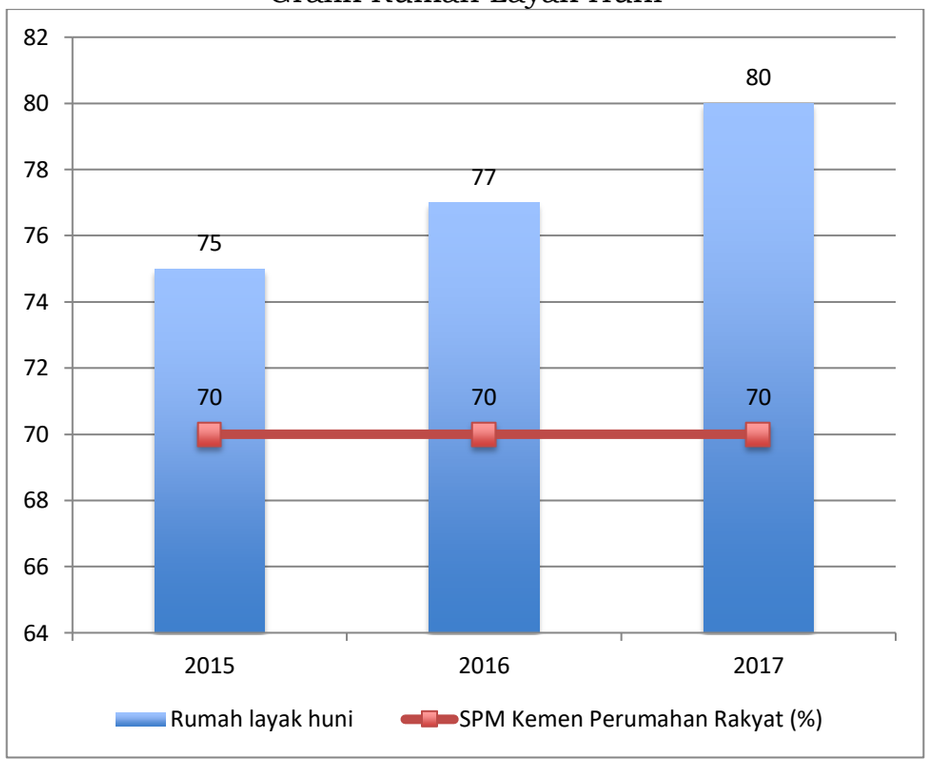
No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Pengurangan luasan Lingkungan Pemukiman Kumuh (Ha)	2,27	2,28	0,75
2	Luas Total Pemukiman Kumuh (Ha)	53,04	50,76	50,01

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumedang

D. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 tercatat 80%. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumedang telah mencapai target.

Gambar 2.46
Grafik Rumah Layak Huni



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

E. Rumah Tangga Pengguna Listrik

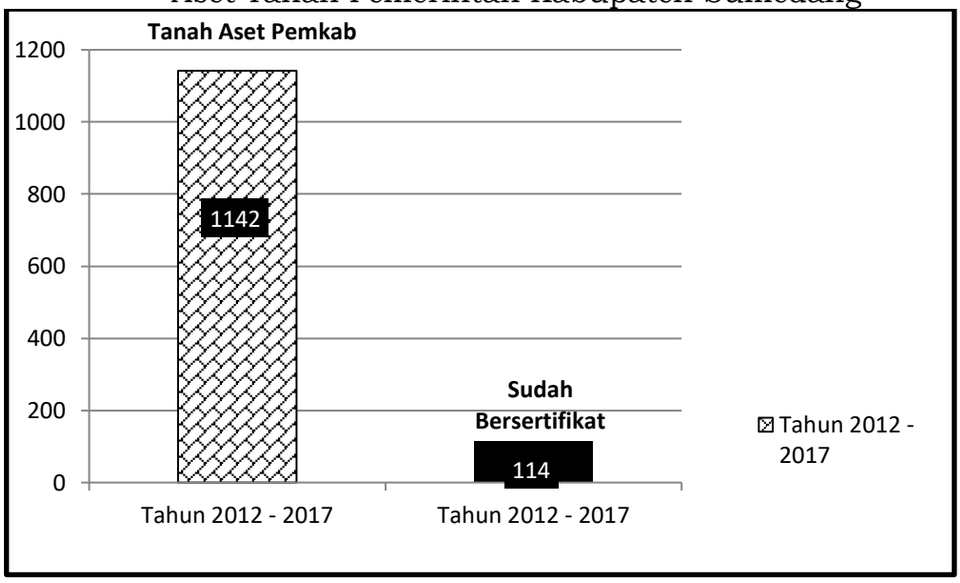
Berdasarkan data Survey Potensi Desa Kabupaten Sumedang, pada Tahun 2018 masih terdapat 615 rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian besar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN di Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong.

2.2.2.1.5 Urusan Pertanahan

A. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang

Hasil Verifikasi Administrasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 1.142 Bidang Tanah, sedangkan yang telah bersertifikat saat ini sebanyak 114 sertifikat atau sekitar 9,98%.

Gambar 2.47
Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang



Sumber : Bidang Aset BPKA Kabupaten Sumedang

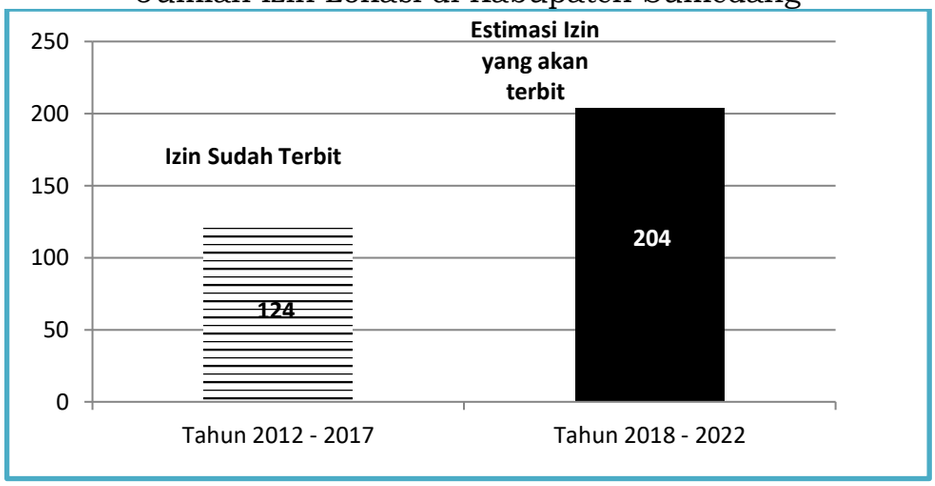
B. Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sejak 5 (lima) tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik horisontal (Diantara Pemilik Lahan).sejak tahun 2012-2017 jumlah penyelesaian kasus pertanahan oleh pemerintah kabupaten sumedang sebanyak 10 kasus.

C. Izin Lokasi

Proses pembuatan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait, yang leading sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap izin lokasi di Kabupaten Sumedang yang saat ini dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.48
Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang



Sumber : Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang

2.2.2.1.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dengan mengacu pada Tabel 2.29 dapat diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat (standar 1 RT, 1 orang Linmas) pada Tahun 2017 tercatat hanya 69,23% dari total seluruh RT yang memiliki 1 orang Linmas, sehingga indikator ini belum mencapai standar.

Cakupan penegakan perda Kabupaten Sumedang selama Tahun 2013 hingga Tahun 2017 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran perda telah ditindaklanjuti, adapun jumlah pelanggaran perda terbanyak pada Tahun 2016 sebanyak 168 kasus.

Sedangkan untuk cakupan patroli petugas Satpol PP selama Tahun 2013 hingga Tahun 2017 mengalami peningkatan, pada Tahun 2013 tercatat 11,53% di Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 69,23%. Selanjutnya indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2013-2017 mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan.

Adapun indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi mengalami tren penurunan, pada Tahun 2013 tercatat 20,73% selama empat tahun kemudian menurun menjadi 18,30 Tahun 2017. Untuk indikator jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada wilayah

manajemen kebakaran selama Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yakni 19,23%.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten selama Tahun 2013 hingga Tahun 2017 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 32,04%, atau dengan kata lain masih terdapat 68% wilayah yang tidak terjangkau pelayanan bencana kebakaran, jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 80%, maka realisasi indikator ini belum mencapai target. Lebih lanjut, frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (*response time*) di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri No. 69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (*respon rate*) sebesar 75%, sementara itu sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 waktu tanggap di Kabupaten Sumedang telah mencapai lebih dari 80%. Secara numerik penjelasan lebih lanjut mengenai data kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (1 RT, 1 orang Linmas)	59,70	59,70	57,39	46,15	69,23
2	Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	11.53	11.53	15.38	46.15	69.23
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	20,73	20,73	20,73	20,73	18,30
6	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 lt pada wilayah manajemen kebakaran	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	32,04	32,04	32.04	32.04	32.04
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	80	80	85.71	80	87.50

Sumber : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang

2.2.2.1.7 Urusan Sosial

2.2.2.1.7 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan Kesejahteraan Sosial.

Pada Tahun 2014 hingga Tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan, di Tahun 2015 tercatat 100,79% kemudian menurun menjadi 99,91% di Tahun 2017. Panti jompo yang aktif, di Kabupaten Sumedang hanya memiliki 1 panti selama periode Tahun 2013-2017, sementara untuk panti asuhan pada Tahun 2017 tercatat sejumlah 16 panti, adapun Kabupaten Sumedang belum memiliki panti rehabilitasi.

Jumlah penghuni panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya belum mencapai target, pada Tahun 2017 sejumlah 119 orang sementara target tahun tersebut sebesar 860 orang. Selanjutnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada belum mencapai target, pada Tahun 2017 tercatat 286 orang sementara target tahun tersebut sejumlah 301 orang. Untuk persentase panti sosial yang sarana pelayanan sosial menyediakan prasarana kesehatan telah mencapai 100% di Tahun 2017, sedangkan Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan prasarana kesejahteraan sosial selama periode Tahun 2013-2017 telah mencapai 100%. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		90,07	100,79	99,34	99,75
2	Jumlah Panti Jompo	2	2	2	2	2
3	Jumlah Panti Rehabilitasi	0	0	0	0	0
4	Jumlah Panti asuhan	20	18	18	18	19
5	Jumlah penghuni panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	60	35	59	119
6	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	301	326	87	286
7	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menyediakan prasarana kesehatan	104,76	95,24	95,24	95,24	100
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan prasarana kesejahteraan sosial yang sarana pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.2.2.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.2.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial).

Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Realisasi Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	12,04	13,13	29,54	15,32	12,04	na
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	8	36	54	73	24	100
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar	25	27	20	15	16	20

No	Indikator	Realisasi Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	yang ditempatkan (%)						
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	19,37	19,15	20,46	21,33	-	-
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	34	23	47	59	64	86,5
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	59	66	53	44	81	85,93

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan tren penurunan, pada Tahun 2015-2017 mengalami penurunan masing-masing menjadi 29,54% di Tahun 2015 dan 12,04% di Tahun 2017. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi kepada pengusaha maupun pekerja tentang pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing telah berhasil mengurangi angka sengketa pengusaha-pekerja.

Selanjutnya untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2013 tercatat 8 kasus, kemudian dalam tiga Tahun yakni Tahun 2014 menjadi 36 kasus, Tahun 2015 menjadi 54 kasus, Tahun 2016 menjadi 73 kasus, dan meningkat signifikan menjadi 100 kasus di Tahun 2018.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan mengalami penurunan tren selama Tahun 2013-2018. Pada Tahun 2013 tercatat 25 orang, kemudian dalam empat tahun menurun menjadi 20 orang di Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan kartu kuning (yang sudah bekerja tidak melapor kembali ke Disnaker). Sehingga dalam perspektif kedepan perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan kartu kuning.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di

Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2016 hanya tercatat 21,33% perusahaan yang menerapkan K3, sehingga perlu sosialisasi lebih intensif kepada 79% perusahaan yang belum menerapkan K3.

Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan angka 100% selama Tahun 2013-2018. Hal ini bermakna seluruh perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah telah diselesaikan.

Adapun indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi mengalami tren peningkatan pada Tahun 2013-2018. Pada Tahun 2013 tercatat 34% kemudian pada Tahun 2018 menjadi 86,5%.

Untuk indikator besaran tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan mengalami fluktuatif, pada Tahun 2013 tercatat 59%, kemudian meningkat menjadi 66% di Tahun 2014, kembali menurun di Tahun 2015 menjadi 53% dan di Tahun 2016 menjadi 44%, namun pada Tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan menjadi 81% dan semakin meningkat di Tahun 2018 menjadi 85,93%.

2.2.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel 2.32 dapat diketahui bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Pada Tahun 2016 terdapat 14,55% perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah, kemudian meningkat menjadi 15,82% di Tahun 2017. Selanjutnya untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta pada Tahun 2016 sejumlah 33,91% dan mengalami penurunan menjadi 32,10% di Tahun 2017. Angka partisipasi tersebut menggambarkan bahwa terdapat perbedaan peluang dan tingkat partisipasi yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam berkarir pada lingkungan pekerjaan, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.

Indikator rasio KDRT mengalami tren peningkatan, pada Tahun 2013 tercatat 29,58%, kemudian menurun menjadi 26,47% di Tahun 2015, namun mengalami peningkatan pada Tahun 2017 menjadi 30,91%. Adapun indikator penyelesaian pengadilan perlindungan

perempuan dan anak dari tingkat kekerasan mengalami tren penurunan, pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 125 aduan yang diselesaikan, kemudian menjadi 55 aduan yang diselesaikan di Tahun 2017. Selanjutnya realisasi indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mengalami penurunan, pada Tahun 2016 tercatat 125 kasus yang mendapatkan penanganan, kemudian menurun menjadi 55 kasus di Tahun 2017.

Dalam perspektif kedepan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga diharapkan dapat ditangani secara cepat dan pelaku tindak kekerasa dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n/a	n/a	n/a	14,55	15,82
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	n/a	n/a	n/a	33,91	32,10
3	Rasio KDRT	29,58	29,09	26,47	16	30,91
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	n/a	n/a	n/a	n/a	32,12
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	71	55	68	125	55
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	71	55	68	125	55

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.3 Urusan Pangan

Berdasarkan Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa realisasi indikator urusan pangan di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan arah yang positif. Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2017 sudah terdapat regulasi ketahanan pangan. Selanjutnya ketersediaan pangan utama (kg/1.000) mengalami tren peningkatan sejak Tahun 2013 hingga

Tahun 2017. Pada Tahun 2013 tercatat 854.25 kemudian meningkat menjadi 921.66 di Tahun 2017.

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Ketersediaan pangan utama (Kg/jiwa/tahun)	951.44	2,900.48	854.25	836.04	777.45	806.14	921.66

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang (diolah)

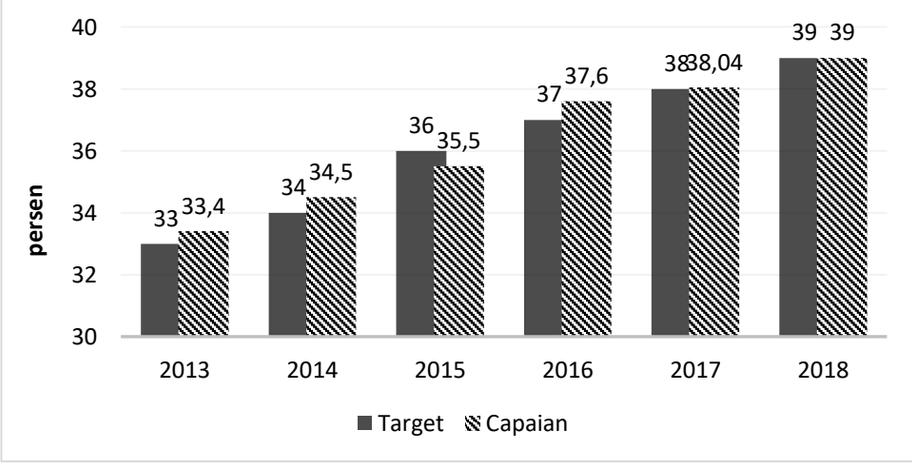
2.2.2.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

A. Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang pada periode Tahun 2013-2018 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh melalui penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2018 mencapai 39 % atau ± 169,86 ton/hari sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dari total timbulan sampah ± 436 ton/hari. Sampah terangkut ke TPAS dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area pelayanan persampahan. Pengurangan sampah mencapai ± 18,65 % atau ± 81 ton/hari sampah dikelola di sumber sampah melalui aktifitas 3 R (*Ruduce, Reuse, Recycle*) oleh 9 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 13 Bank Sampah, 12 pelaku sektor informal, dan pemilahan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Sisanya ± 42,35 % atau ± 185,14 ton/hari dikelola secara tradisonal oleh masyarakat di pedesaan. Meskipun demikian jika dilihat dari perbandingan target dengan realisasi selama kurun waktu Tahun 2013-2018 telah tercapai Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.49. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara

optimal kepada masyarakat sebagaimana Kebijakan Startegi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang diantaranya adalah TPAS yang selama ini dipergunakan sudah melebihi daya tampung (*over load*) dan pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai antisipasi kedepan saat ini sedang dibangun TPAS di Cijeruk melalui kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR dengan skema kewajiban Kementrian PUPR membangun fisik TPAS dan pemerintah Kabupaten Sumedang membangun jalan akses menuju TPAS. Sampai dengan saat ini pembangunan fisik TPAS dimaksud baru pada tahap komponen utama.

Gambar 2.49
Grafik Persentase Target dan Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

B. Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3 R, Timbulan Sampah dan Volume Sampah terangkut (M³/Hari)

Jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2013 tidak mengalami perubahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan ritasi pengangkutan sampah ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dan pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan Pengolahan Sampah secara 3 R, Walaupun kondisi eksisting di lapangan KSM dimaksud belum optimal dan masih sangat memerlukan pembinaan dan pendampingan. Berikut disajikan kondisi jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan sampah dan

Volume sampah terangkut di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2013-2018.

Tabel 2.34
Indikator Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah, dan Volume Sampah yang terangkut

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah TPSS/Transfer Depo	5	5	5	5	5	5
2	Jumlah TPS 3 R	1	2	5	8	8	9
3	Kapasitas Daya Tampung TPSS/TransperDepo (M^3)	60	60	60	60	60	60
4	Kapasitas Daya Tampung TPS 3 R (M^3)	150	155	170	200	230	245
5	Timbulan Sampah (Ton/hari)	413	423	432	434	432	436
6	Volume Sampah yang terangkut ke TPAS (ton/hari)	138,06	145,82	153,42	163,18	164,27	169,86

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

B. Pengawasan Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan

Realisasi indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan atau UKL/UPL di Kabupaten Sumedang pada periode Tahun 2013-2018 telah mencapai target yang ditentukan. Pada Tahun 2013 tercatat 65%, kemudian meningkat mencapai 90 % pada Tahun 2018. Namun demikian capaian Tahun 2018 tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat usaha/kegiatan Wajib AMDAL dan atau UKL/UPL akan meningkat pula seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.35
Indikator Pengawasan AMDAL dan atau UKL/UPL dan Penegakan Hukum Lingkungan

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengawasan AMDAL (%)	65	70	75	80	85	90
2	Penegakan Hukum Lingkungan	7	11	8	13	7	13

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

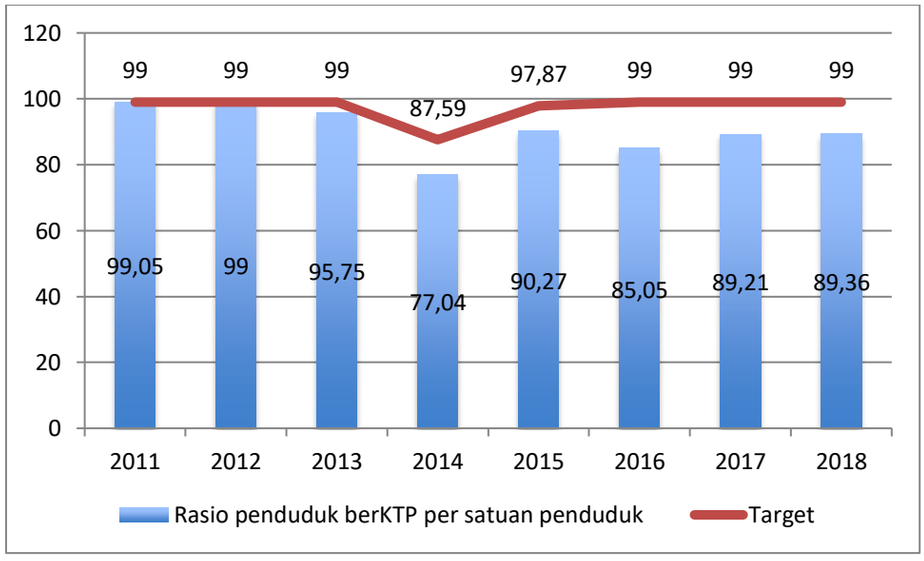
Sedangkan indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada Tahun 2013 tercatat 7 penegakan, kemudian penegakan

tertinggi di Tahun 2016 dan 2018 sebanyak 13 penegakan. Banyaknya jumlah pelanggaran mengindikasikan masih perlunya pemahaman bagi stakeholder (pengusaha dan masyarakat) tentang peraturan terkait hukum lingkungan, namun bermakna pula meningkatnya kesadaran kritis di masyarakat sekitar usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan sehingga mereka berani melakukan pengaduan. Kondisi tersebut pada perspektif pembangunan periode Tahun 2018-2023 perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran lingkungan bagi semua pihak.

2.2.2.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase kepemilikan KTP, berdasarkan Gambar 2.50 tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai. Pada Tahun 2011 tercatat 99,05% kemudian menurun di Tahun 2018 menjadi 89,36%. Kondisi tersebut dapat terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang memasuki usia 17 tahun lebih cepat dan tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Gambar 2.50
Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP

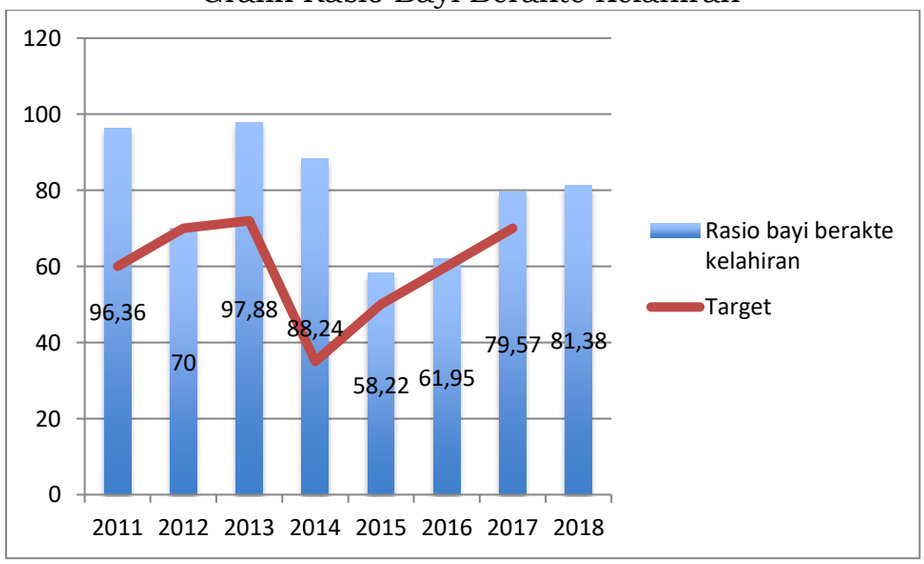


Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang

Sedangkan indikator rasio bayi berakte kelahiran secara tren menunjukkan penurunan, pada Tahun 2011 adalah 96,36% bayi lahir memiliki akte kelahiran, kemudian pada Tahun 2018 hanya

81,38% bayi yang memiliki akte kelahiran (Gambar 2.51). Jika dibandingkan dengan target tahunan, indikator rasio bayi berakte kelahiran belum menunjukkan hasil yang optimal.

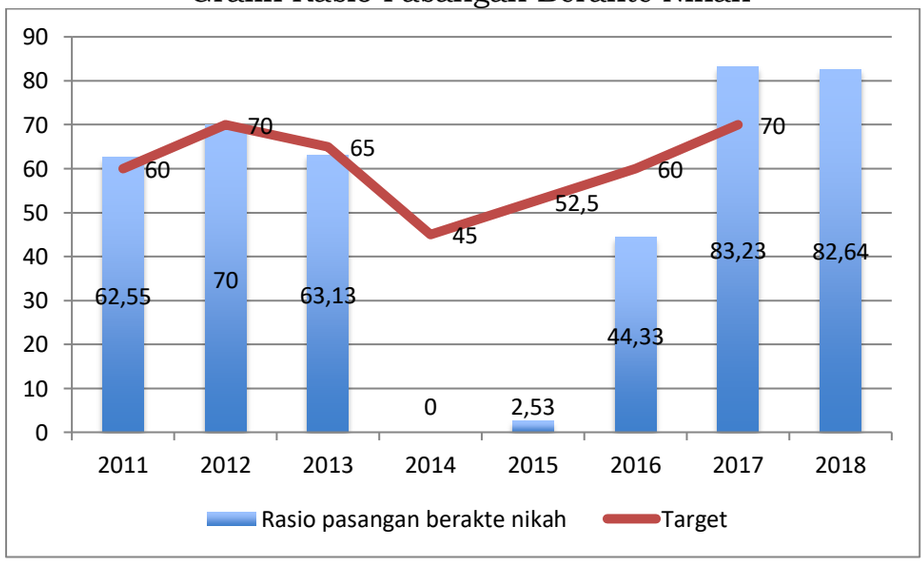
Gambar 2.51
Grafik Rasio Bayi Berakte Kelahiran



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang

Pada indikator rasio pasangan berakte nikah (Gambar 2.52), Tahun 2011 hanya tercatat 62,55%, kemudian pada Tahun 2018 tercatat 82,64% pasangan yang memiliki akte nikah atau dengan kata lain pada Tahun 2018 terdapat 17,36% pasangan menikah yang tidak memiliki akte nikah.

Gambar 2.52
Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah

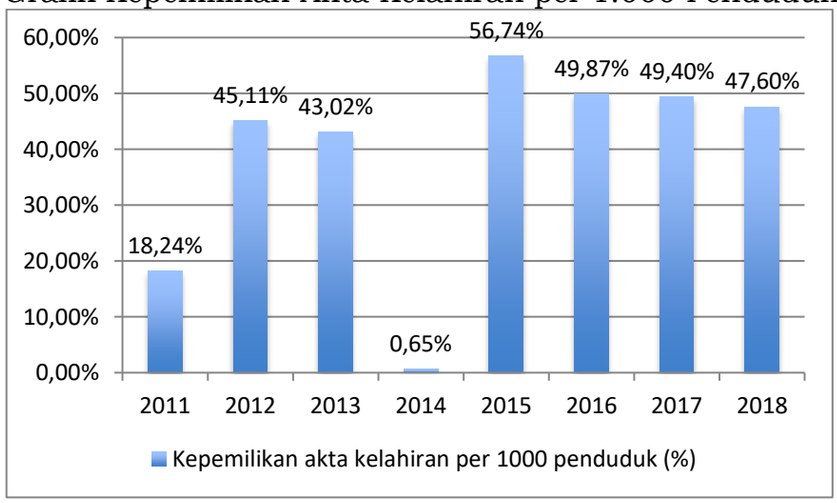


Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sumedang baru mencapai **47,60% pada Tahun 2018** atau dengan kata lain hanya terdapat **476** penduduk yang memiliki akta

kelahiran dari 1.000 penduduk. Pencapaian ini masih belum mencapai SPM yakni sebesar 100%. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir secara administrasi kependudukan dan adanya warga masyarakat berusia lanjut yang tidak memiliki akta lahir diduga menjadi penyebab masih adanya penduduk yang tidak memiliki akta lahir.

Gambar 2.53
Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang

Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi telah terpenuhi selama Tahun 2011 hingga Tahun 2018 (Tabel 2.36).

Tabel 2.36
Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK

No	Indikator	Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	283	283	277	277	277
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	309	309	303	303	303
3	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
4	Posyandu aktif	1.637	1.661	1.641	1.641	1.641
5	Cakupan pembinaan lembaga Adat	0	0	1	1	1
6	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	15%	18%	22%	25%	30 %
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (kecamatan)	24	24	24	24	24
8	Cakupan pembinaan lembaga BUMDesa	17	37	77	141	183
9	Jumlah desa yang memiliki administrasi Pemdes sesuai aturan	276	276	270	270	270
10	Rata -rata Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	833	794	1.036	971	633
11	Jumlah desa yang menerapkan siskudes	0	0	72	204	270

Sumber : DPMPD Kabupaten Sumedang

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK serta Jumlah desa yang memiliki administrasi Pemdes sesuai aturan mengalami penurunan tren dalam dua tahun terakhir disebabkan karena ada penghapusan desa di wilayah Genangan Waduk Jatigede sebanyak 6 Desa.

Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan tren, meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2014 tercatat 1.637 kemudian meningkat menjadi 1.641 di Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan jumlah balita, maka rasio posyandu per

satuan balita pada Tahun 2018 mencapai 1: 56 atau dengan kata lain satu posyandu dapat melayani 56 balita, angka tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 1:100.

Jumlah lembaga adat yang dibina sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 adalah masing-masing sebanyak 1 lembaga adat pertahun.

Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan siginifikan dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018, tercatat Tahun 2014 sebesar 15% menjadi 30% di Tahun 2018. Adapun indikator pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat menunjukkan angka stagnan sejak 2014 hingga 2018 tercatat 24 kecamatan.

Realisasi Indikator pembinaan lembaga ekonomi BUMDesa dalam pembentukan BUMDesa mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun sebagian besar dalam perkembangannya masih jalan ditempat, pada Tahun 2014 baru sebanyak 17 Desa yang membentuk BUMDesa dan pada Tahun 2018 telah terbentuk sebanyak 183 BUMDesa.

Kemudian Aparatur Pemerintah Desa yang dibina pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan alokasi anggaran mengalami penurunan.

Sementara jumlah Desa yang menerapkan Siskudes mengalami perkembangan yang positif, Tahun 2017 sebanyak 73 Desa dan pada Tahun 2018 sebanyak 270 menerapkan Siskudes .

2.2.2.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Tabel 2.38 dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai realiasi yang baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya.

Indikator Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) selama Tahun 2014-2018 telah menunjukkan realisasi yang baik, hal ini ditandai dengan tercapainya target tahunan selama lima

tahun. Data Tahun 2018 menunjukkan terdapat 806 PUS yang menggunakan KB per 1.000 PUS.

Indikator cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM cakupan peserta KB Aktif ditetapkan sebesar 65% dari total pasangan usia subur. Sehingga realisasi cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018 sudah berhasil melampaui target SPM. Pencapaian ini berindikasi positif terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang.

Realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sejak Tahun 2014-2018 telah mencapai target, namun demikian jika dilihat secara tren pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 79,76% dari 88,6% di Tahun 2014. Kemudian memasuki Tahun 2016 hingga Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 81,57% dan Tahun 2018 mengalami lagi penurunan menjadi 80,87% walaupun pencapaian tersebut melebihi target .

Sementara itu untuk indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun, secara ideal perempuan sebaiknya menikah sesuai dengan program BKKBN yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP) wanita menikah umur 20 tahun Sedangkan untuk laki-laki umur 25 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Selain itu, secara psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang dari 20 tahun. Pada tahun 2018 tercatat 1,73% ini menunjukkan pencapaian realisasi yang baik dikarenakan terjadinya penurunan dari target yang telah ditentukan.

Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Sumedang telah mencapai realisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional

BKKBN Tahun 2018 (8,55%). Namun demikian perlu terus diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan usia subur dapat terpenuhi program KB.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2014-2018 telah mencapai target tahunan yang ditentukan. Meskipun demikian, realisasi tahunan bersifat fluktuatif, pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 96,60% kemudian mengalami penurunan selama tiga tahun menjadi 93,50% di Tahun 2017. Namun pada Tahun 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar 95,62%. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan perbaikan penetapan target tahunan sehingga tidak terlalu pesimis dan statis dalam menetapkan target tahunannya.

Selanjutnya indikator Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai target setiap tahunnya, sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018 realisasi telah mencapai 100%.

Indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama Tahun 2014-2015 telah mencapai target tahunan, sementara Tahun 2016-2018 realisasi indikator tersebut tidak mencapai target tahunan. Pada Tahun 2016 ditargetkan 94,4 sementara realisasi hanya 92,74%, untuk Tahun 2017 ditargetkan 94,29% sementara realisasi hanya mencapai 93,83%, Tahun 2018 ditargetkan 94,54% dan realisasi 94,21. Pecapaian dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak tercapai dikarenakan anggota UPPKS yang PUS ingin anak segera, sehingga tidak ber-KB. Untuk realisasi Indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan selama Tahun 2014-2016 telah mencapai target tahunan. Namun realisasi pada Tahun 2017 (48,41%) tidak mencapai target (50,79%), untuk Tahun 2018 dari target 53,61% terealisasi 100%.

Indikator Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat telah mencapai realisasi 100% selama lima tahun. Hal ini bermakna alat dan obat kontrasepsi selalu tersedia untuk diakses oleh masyarakat.

Kemudian indikator Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa juga telah mencapai realisasi 100% selama lima tahun.

Tabel 2.38
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	INDIKATOR	TAHUN																	
		2013			2014			2015			2016			2017			2018		
		TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS
1.	Rasio akseptor KB	71,23	80,25	n/a	69,11	88,6	n/a	70,92	79,76	n/a	72,73	81,64	-	73,51	81,57	n/a	74,28	80,87	
2.	Cakupan peserta KB aktif %	n/a	80,25	70	n/a	88,6	70	n/a	79,76	70	n/a	81,64	70	n/a	81,57	70	74,28	80,87	
3.	JML Keluarga Pra Sejahtera	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14,970	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14,446	n/a	n/a	4,12	
4.	JML Keluarga Sejahtera I	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	258,422	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	103,073	n/a	n/a	67,03	
5.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	71,23	80,25	n/a	69,11	88,6	88,6	70,92	79,76	79,76	72,73	81,64	81,64	73,51	81,57	81,57	74,28	80,87	
6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3,45	3,27	n/a	3,25	2,21	2,21	2,97	2,59	2,59	2,75	4,00	4,00	2,65	2,32	2,32	2,5	1,73	
7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	8,45	12,80	17,5 (Nasional)	6	9,36	17,5 (Nasional)	5,80	8,25	17,5 (Nasional)	5,50	8,48	17,5 (Nasional)	5,00	8,23	17,5 (Nasional)	4,5	8,55	17,5 (Nasional)
8.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	90,19	93,5	n/a	90,29	96,60	96,60	91,04	93,15	93,15	91,79	93,62	93,62	92,54	93,50	93,5	93,29	95,62	
9.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	85	85	n/a	49,90	100	100	62,50	100	100	75,10	100	100	87,70	100	100	100	100	
10.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	90,56	91,73	n/a	93,54	93,9	93,9	93,79	94,41	94,41	94,4	92,74	92,74	94,29	93,83	93,83	94,54	94,21	
11.	Rasio petugas	42,50	44,57	n/a	42,33	44,42	44,42	45,15	59,34	59,34	47,97	48,7	48,7	50,79	48,41	48,41	53.61	100	

No	INDIKATOR	TAHUN																
		2013			2014			2015			2016			2017			2018		
		TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS	TARGET	REALISASI	SPM/NAS
	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan																		
12.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	n/a	30.00	100	100	30.00	100	100	30.00	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.8 Urusan Perhubungan

Pada periode Tahun 2011-2018 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 tercatat 21.441 penumpang, kemudian meningkat menjadi 47.800 penumpang di Tahun 2018. Sementara itu rasio ijin trayek mengalami tren yang fluktuatif dari semula 23 di Tahun 2013, meningkat menjadi 31,84 di Tahun 2018.

Kemudian indikator jumlah uji KIR angkutan umum secara tren mengalami penurunan, pada Tahun 2011 tercatat 3.497 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian meningkat di Tahun 2013 menjadi 4.288 uji KIR dan di Tahun 2014 sebesar 4.202 uji KIR, pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3.413 serta pada akhir RJPM Tahun 2018 meningkat sebanyak 3,893 uji KIR. Penurunan jumlah uji KIR tersebut dapat bermakna melemahnya pengawasan terhadap ketertiban administrasi kendaraan yang wajib KIR, atau terjadi pengurangan jenis moda transportasi yang wajib KIR. Untuk durasi pelayanan uji KIR selama tiga tahun tidak mengalami perubahan yakni 15 menit per satu kendaraan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Pelayanan Perhubungan

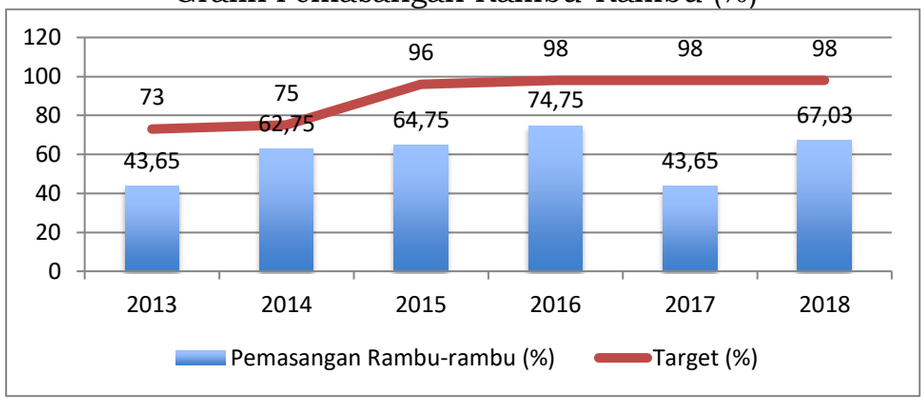
No	Indikator	Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	21,441	34,899	34,899	35,207	35,218	35,850	45,500	47,800
2	Rasio Ijin Trayek	n/a	n/a	23	19,5	21,88	25,4	26,2	31,84
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3,497	3,011	4,288	4,202	3,088	2,211	3,413	3,893
4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

Selanjutnya untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, data pada Gambar 2.54 menunjukkan target setiap tahun belum tercapai. Pada Tahun 2017 target sebesar 98% namun realisasi hanya sebesar 43,65% dan pada akhir RJPMD Tahun 2018 dari target 100% dengan realisasi 67,03%. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 pemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih

tinggi lagi, karena hal ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan.

Gambar 2.54
Grafik Pemasangan Rambu-Rambu (%)



Sumber : Dishub Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime).* Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Pada Tahun 2017 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan hanya mencapai 18%, artinya belum seluruh kecamatan mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet

di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sumedang belum mencapai target, pada Tahun 2017 hanya sebesar 52%, dengan demikian masih terdapat 48% rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	8	10	18
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	25	27	30	41	52

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2013-2017 mengalami penurunan, pada Tahun 2013 tercatat sebesar 82,36% koperasi aktif, kemudian menurun menjadi 71,67% di Tahun 2017. Kondisi tersebut menggambarkan keaktifan koperasi di Kabupaten Sumedang masih rendah, hal ini dapat bermakna menurunnya sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tren, di Tahun 2013 tercatat terdapat 8.944 usaha mikro dan kecil, meningkatn menjadi

20.760 usaha mikro dan kecil di Tahun 2017. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase koperasi aktif	82.36	82,03	71,03	71,63	71,67
2	Jumlah usaha mikro dan kecil	8.944	9.432	15.149	15.400	20.760

Sumber : Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.11 Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing, jumlahnya hampir sama. Namun dilihat dari total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastis sejak Tahun 2013 dengan jumlah investor yang hanya mencapai 13 naik tajam di Tahun 2017 dengan jumlah investor mencapai 106. Dilihat dari total nilai yang dikeluarakan investor terlihat adanya pergeseran dari PMA ke PMDN. Pada Tahun 2013 jumlah PMA jauh lebih besar dibandingkan PMDN. Namun sejak Tahun 2014 jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan dengan PMA. Pada Tahun 2016 tercatat perbandingan PMDN dengan PMA mencapai 9.996 : 18.

Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak Tahun 2014, tenaga kerja yang terserap melalui PMDN jauh melebihi tenaga kerja yang terserap oleh PMA. Pada Tahun 2014 terlihat ketimpangan serapan tenaga kerja dari PMDN dibandingkan dengan tenaga kerja dari PMA mencapai 17.142 : 70. Sementara serapan tenaga kerja dari PMDN dan PMA pada Tahun 2016 mencapai 44 : 6.

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13	24	33	56	106
	Jumlah PMDN	5	13	15	26	49
	Jumlah PMA	8	11	18	30	57
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	723.374.880.000	1.343.691.183.872	1.564.607.334.819	4.642.207.668.416	9.966.078.815.581
	PMDN (Rp)	9.415.000.000	695.911.081.348	1.564.607.334.819	4.642.207.668.416	9.966.078.815.581
	PMA (Rp)	713.959.880.000	647.780.102.524	28.333.300	26.133.063	18.138.200
c.	Rasio daya serap tenaga kerja	15.620	17.212	24.934	33.697	51.415
	PMDN	2,299	17.142	22.030	30.293	44.561
	PMA	13,321	70	2.904	3.404	6.854
	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	5,404	4.406	5,088	6,224	4.790
d	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	59.37	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga secara tren menunjukkan realisasi yang positif. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun awal 2013 tercatat 155 organisasi pemuda, dua tahun kemudian menjadi 194 organisasi pemuda di Tahun 2016, kemudian meningkat kembali menjadi 213 organisasi pemudai di Tahun 2017. Hal ini bermakna bahwa pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki penambahan tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga kemudian dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan. Selanjutnya persentase wirausaha muda sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2017 mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 tercatat 30% peningkatan wirausaha muda, meningkat menjadi 50% di Tahun 2017.

Cakupan pembinaan olahraga selama Tahun 2013 hingga Tahun 2017 setiap tahunnya dibina 4 cabang olahraga secara bergantian. Adapun pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi di Tahun 2013 sejumlah 30 pelatih, kemudian di Tahun 2017 meningkat menjadi 55 pelatih, dalam perpektif kedepan jumlah pelatih yang bersertifikasi perlu terus ditingkatkan terutama pada cabang olahraga populer. Lebih lanjut cakupan pembinaan atlet muda pada Tahun 2013-2014 sejumlah 50 orang atlet muda dibina setiap tahunnya, pada Tahun 2015-2016 meningkat menjadi 76 orang atlet muda yang dibina setiap tahunnya, pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 100 orang atlet muda yang dibina. Dalam konteks urusan olahraga, perlu menjadi perhatian bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga ditargetkan adanya peningkatan prestasi dari cabang olahraga atau atlit olahraga. Sehingga dalam perspektif kedepan akan terus diupayakan agar atlet dan cabor yang telah dibina dapat menghasilkan prestasi untuk memajukan Kabupaten Sumedang dalam dunia olahraga. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olaharaga

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	155	171	189	194	213
2	Persentase wirausaha muda	-	30	35	50	50
3	Cakupan Pembinaan olahraga	4	4	4	4	4
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	30	40	45	50	55
5	Cakupan pembinaan atlet muda	50	50	75	75	100

Sumedang Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

2.2.2.2.13 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Adapun Buku Kabupaten Sumedang Dalam Angka selama periode Tahun 2011-2017 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Sumedang yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Sumedang selama periode 2011-2017 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku ”kabupaten/kota dalam angka”	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku ”PDRB kabupaten/kota”	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.14 Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Tabel 2.45 dapat diketahui bahwa selama lima tahun hanya terdapat 6 Perangkat Daerah yang setiap tahunnya menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Urusan Persandian

Indikator	Realisasi Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.15 Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2.45 dapat diketahui bahwa hingga Tahun 2015 terdapat 94 grup kesenian. Kemudian di Tahun 2015 terdapat 2 (dua) gedung kesenian dan 1 (satu) museum. Hingga Tahun 2017 Kabupaten Sumedang hanya memiliki satu pusat kebudayaan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya dan satu museum. Lebih lanjut, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sumedang selama lima tahun hanya dilaksanakan pada Tahun 2017 sebanyak 5 acara. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 perlu adanya agenda penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahun, karena adanya grup kesenian dan gedung kesenian menjadi tidak bermakna jika penyelenggaraan festival di tingkat Kabupaten Sumedang tidak memiliki agenda tahunan. Dengan adanya penyelenggaraan festival bukan hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal. Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya hanya dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 22 lokasi. Lebih lanjut indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Group kesenian	55	94	56	60	72
2	Jumlah Gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Museum	1	1	1	1	1
4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n/a	n/a	n/a	n/a	5
5	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1
6	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	0	0	0	22

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.16 Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren data series empat indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel 2.46 selama periode Tahun 2014-2017 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Dapat dilihat bahwa target tahunan dari keempat indikator didominasi realisasi yang mencapai target, adapun yang tidak mencapai target yakni jumlah perpustakaan pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 494 perpustakaan sementara realisasi hanya 490 perpustakaan, kemudian pengunjung perpustakaan per tahun di Tahun 2014 ditargetkan 26.852 pengunjung sementara realisasi hanya 11.188 pengunjung, selanjutnya koleksi buku pada Tahun 2016 ditargetkan 298.200 sementara realisasi hanya mencapai 179.353 buku. Dalam konteks ini jumlah perpustakaan adalah jumlah perpustakaan di seluruh Kabupaten Sumedang (mencakup perpustakaan SD-SMP-Perpus di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya, begitu pula jumlah pengunjung merupakan jumlah pengunjung seluruh perpustakaan di Kabupaten Sumedang.

Adapun Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat belum tersedia sehingga strategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan sarpras perpustakaan, hingga strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Sumedang. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator	2014		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Perpustakaan	494	490	501	674	511	695	526	834
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	26.852	11.188	28.320	30.150	30.552	30.632	33.552	33.552
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	272.200	267.500	28.352	344.250	298.200	179.353	316.200	316.200
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang

2.2.2.2.17 Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2013-2017 dapat digambarkan oleh indikator pada Tabel 2.48 Indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan capaian, pada Tahun 2013 tercatat sejumlah 15% OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 40% OPD, hal ini bermakna terdapat 12 OPD yang telah mengelola arsip secara baku pada Tahun 2017. Kemudian untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami penurunan, pada Tahun 2013 terdapat 250 arsiparis yang mengikuti pelatihan peningkatan pengelolaan kearsipan, kemudian pada Tahun 2017 terdapat 20 arsiparis, kondisi penurunan ini adanya skala prioritas untuk peningkatan tenaga fungsional arsiparis yang jumlahnya belum memadai karena kurangnya minat ASN untuk menjadi arsiparis.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	15	20	25	35	40
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	250	250	130	130	20

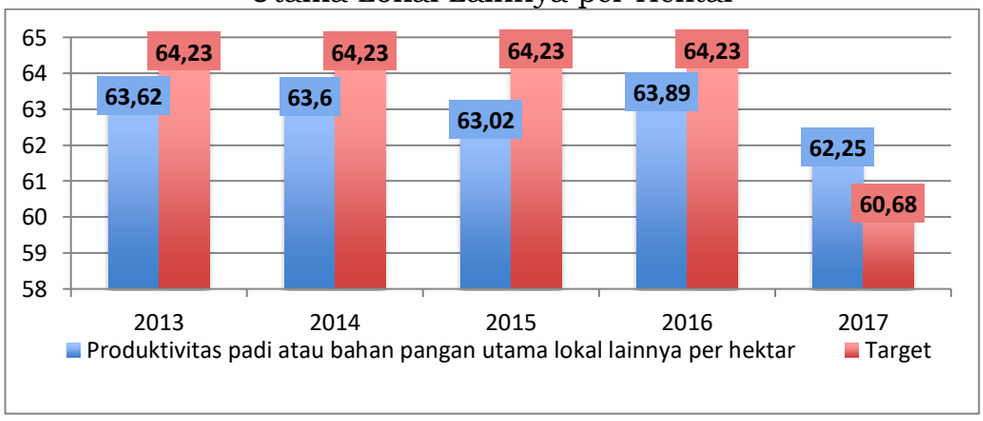
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang

2.2.2.3. Fokus Urusan Pilihan

A. Urusan Pertanian

Berdasarkan data Tahun 2017 diketahui terdapat 121.138 penduduk Kabupaten Sumedang yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan, atau sekitar 9% dari total jumlah penduduk bekerja di sektor ini. Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Sumedang adalah beras, secara umum, tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan Tahun 2013-2017 dan tidak mencapai target tahunannya di Tahun 2013-2016. Namun target pada Tahun 2017 diturunkan sehingga realisasi pada tahun tersebut melampaui target, meskipun tetap secara tren mengalami penurunan.

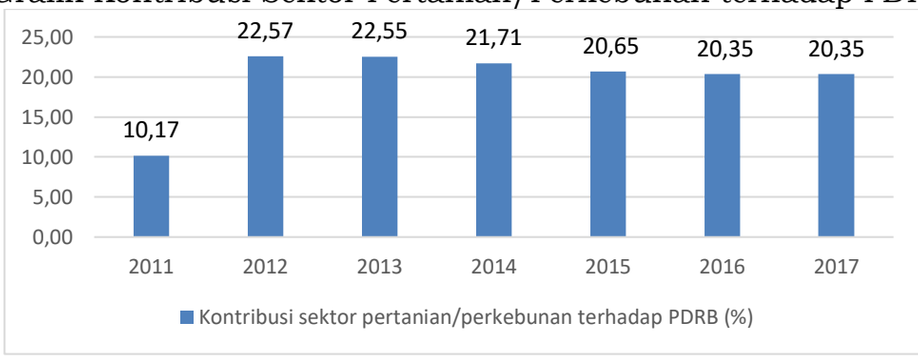
Gambar 2.55.
Grafik Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang

Sementara itu, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB juga mengalami penurunan, pada Tahun 2013 tercatat 22,55%, kemudian menurun menjadi 20,35% pada Tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Gambar 2.56
Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang

B. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adapun daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam, informasi mengenai hal ini telah diuraikan pada pembahasan pola ruang kawasan budidaya dalam sub bab kawasan pariwisata.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang masih didominasi wisata berskala lokal dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya, selain itu juga belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata yakni warung makan (kuliner) dan penginapan serta akses transportasi yang memadai. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan keterampilan (skill) SDM Kepariwisataan	0	0	0	1	0
2	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta pengembangan destinasi wisata	0	0	4	0	1
3	Terlaksananya promosi dalam	3	3	3	3	3

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	dan luar negeri					
4	Tersedianya RIPDA kepariwisataan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator peningkatan skill SDM kepariwisataan Tahun 2013-217 hanya dilakukan satu kali pada Tahun 2016. Selanjutnya peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta pengembangan destinasi wisata hanya dilakukan pada Tahun 2015 sebanyak 4 destinasi dan Tahun 2017 sebanyak 1 destinasi. Dalam upaya mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Sumedang, telah dilakukan promosi wisata sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017 baik promosi dalam dan luar negeri. Untuk menyusun langkah konkret pengembangan pariwisata, Kabupaten Sumedang telah memiliki acuan yakni dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang disusun pada Tahun 2013, oleh karena itu dalam perspektif kedepan dokumen tersebut perlu direalisasikan.

C. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada Tahun 2013 tercatat 5.987 ton, kemudian meningkat menjadi 8.146 ton di Tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren peningkatan jumlah rumah tangga perikanan selama periode yang sama. Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Sumedang per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada Tahun 2013-2017 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi perikanan (ton)	5.987	6.301	6.673	8.026	8.146
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	15,20	13,17	15,04	16,36	16,40
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB					
	A. Atas dasar harga berlaku (%)	n/a	0.68	0.67	0.67	n/a
	B. Atas dasar harga konstan (%)	n/a	0.65	0.65	0.63	n/a
4	Jumlah Rumah Tangga	19.160	19.160	21.131	22.096	22.097

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Perikanan (RT)					

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

D. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor kehutanan perikanan dan sektor industri pengolahan. Pada Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumedang tercatat 16,07%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat 305 pedagang/usaha informal kemudian meningkat menjadi 665 pedagang/usaha informal pada Tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	Realisasi Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	n/a	n/a	305	600	665

Sumber : Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumedang

E. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian dan perikanan, pada Tahun 2016 tercatat 18,63%. Dalam konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri sekala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2013 tercatat 303 bina kelompok pengrajin, kemudian meningkat menjadi 321 bina kelompok pengrajin pada Tahun 2017. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan pembinaan kepada

kelompok pengrajin di Kabupaten Sumedang agar lebih produktif. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	Realisasi Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan bina kelompok pengrajin	303	303	303	315	321

Sumber : Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumedang

F. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan Provinsi-Kabupaten-Kota daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Selama periode Tahun 2013-2017 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 52 KK, yaitu masing-masing 10 KK pada Tahun 2013, 16 KK pada Tahun 2015, 21 KK pada Tahun 2016, dan 5KK pada Tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi

Uraian/ Indikator	2013			2014	2015			2016			2017			2018
	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi		Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah KK
Jumlah Peserta Transmigran Umum	10 Kk	38 Jiwa	Upt Tinauka Kab. Donggala Prov. Sulawesi Selatan	Tidak Ada	5 Kk	18 Jiwa	Upt Kancu'u Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah	6 Kk	21 Jiwa	Upt Malakoni Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu	5 Kk	18 Jiwa	Upt Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara	Tidak Ada Penempatan Dikarnakan tidak ada kouta
					6 Kk	21 Jiwa	Upt Malakoni Bengkulu Utara Prov. Bengkulu	10 Kk	51 Jiwa	Upt Parudongka Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara				
					5 Kk	15 Jiwa	Upt Laeya Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara	5 Kk	16 Jiwa	Upt Jud Nganti Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan				

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang

A. Urusan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2013-2016 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi.

RPJMD Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2014-2018 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Selain itu, selama periode Tahun 2014-2018 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012.

Secara lebih lengkap, gambaran indikator kinerja urusan perencanaan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan

No	Indikator	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

B. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukkan untuk menciptakan inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip :

a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada periode Tahun 2013-2017 urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sumedang belum dapat dimaknai pelaksanaanya dikarenakan keterbatasan data dan informasi yang dapat merepresentasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Adapun kendala yang terjadi secara umum adalah

masih lemahnya pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif kedepan Kabupaten Sumedang akan terus menstimulasi proses penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Urusan Keuangan

Berdasarkan pada tabel 2.55 di bawah, secara keseluruhan kinerja urusan penunjang keuangan dapat dikatakan cukup baik. Beberapa indikator telah memenuhi target dan sebagian yang lain belum tercapai. Namun demikian, pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah baik dengan dapat dipertahankannya opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 4 tahun berturut-turut. Indikator lainnya yang telah baik adalah kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengalokasikan Belanja untuk Bidang Pendidikan (37,34%) dan Kesehatan (15,64%) yang telah melampaui apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan juga sangat baik dengan tidak ada satupun program pembangunan daerah yang tidak dilaksanakan (0%) sehingga terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yaitu RPJMD. Serta, sangat sedikitnya kegiatan pembangunan daerah yang tidak terlaksana (pada Tahun 2017 hanya 0,1%).

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketepatan waktu penetapan APBD baru terjadi pada tahun anggaran 2017, terjadinya penuruan realisasi SILPA terhadap penerimaan dan Belanja Daerah yang berkemungkinan adanya indikasi tekanan keuangan (*financial distress*), dan realisasi Belanja Tidak Langsung yang masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung. Fenomena adanya penurunan SILPA dan kebijakan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta bagaimana perkembangan kinerja realisasinya akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Urusan Keuangan

No	Indikator	Realisasi Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja)	5.81%	6.00%	6.65%	6.22%	0.86%	4.06%
3	Persentase SILPA terhadap Total Penerimaan Daerah	5.38%	5.57%	6.23%	6.12%	0.84%	3.97%
4	Persentase program yang tidak terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	0,01%	0,10%	0,02%	0,02%	0,1%	0,3%
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	45,04	42,60	39,70	38,93	37,34	40.32
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	11,92	12,90	13,30	14,59	15,64	14.56
8	Persentase Belanja Langsung	36.83%	42.04%	48.53%	38.96%	42.22%	40.16%
9	Persentase Belanja tidak langsung	63.17%	57.96%	51.47%	61.04%	57.78%	59.84%
10	Persentase belanja bagi hasil ke desa	0.32%	0.27%	0.24%	0.22%	0.54%	0.68%
11	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

D. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel 2.55 dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan diklat selama periode Tahun 2013-2017 telah sesuai dengan standar, kemudian untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami tren peningkatan selama periode Tahun 2013-2017, hal ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural secara tren mengalami penurunan selama periode Tahun 2013-2017, hal ini terjadi karena adanya pembagian

skala prioritas untuk pelaksanaan diklat struktural. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 jp/hari	10 jp/hari	10 jp/hari	10 jp/hari	10 jp/hari
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,92	3,03	4,72	1,11	4,08
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8.99	8.18	0.78	1.99	1.21
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	34	30	30	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1069	1140	1128	1128	1042
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	11872	11496	11799	10497	10269

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumedang

E. Urusan Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP pada LKPD Kabupaten Sumedang oleh BPK RI selama 4 tahun terakhir, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di bidang keuangan, yang cukup baik dan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan OPD terkait yang mencapai hampir 80%, meski terjadi penurunan pada Tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya kualitas dan kuantitas yang memadai dari tenaga auditor dan sarana penunjang tugasnya.

Namun demikian, jika dilihat dari kecenderungan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat tren yang meningkat, bahkan pada Tahun 2016 terdapat jumlah temuan yang bertambah drastis. Hal ini perlu adanya perhatian terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor fungsional serta peningkatan sarana penunjang perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase tindak lanjut temuan	n/a	81,98	75,89	80,96	44,3
2	Persentase pelanggaran pegawai	n/a	n/a	0,07	0,15	0,06
3	Jumlah temuan BPK	33	25	28	41	n/a

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang

F. Urusan Sekretariat Dewan

Kinerja urusan sekretariat dewan jika ditinjau dari realisasi indikator pada Tabel 2.58 menunjukkan kinerja yang positif. Untuk indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Sumedang sejak Tahun 2013 hingga 2018 telah mencapai target, karena rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang disusun setiap tahun.

Kemudian indikator tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) juga tercapai dengan adanya dokumen RKPD setiap tahun.

Adapun indikator terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD setiap tahunnya telah tercapai.

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Sumedang (ada/tidak)	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak)	ada	tidak (RPJM), ada (RKPD)	tidak (RPJM), ada (RKPD)	tidak (RPJM), ada (RKPD)	tidak (RPJM), ada (RKPD)
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak)	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Dewan Kabupaten Sumedang

G. Urusan Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Tabel 2.59 dapat diketahui indikator kinerja urusan administrasi pemerintahan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2013-2017. Indikator Tersedianya LPPD tepat waktu menunjukkan bahwa hanya Tahun 2014 dan Tahun 2017 yang penetapannya diatas tanggal 4 Maret, selebihnya penetapan LPPD dilakukan pada tanggal 4 Maret. Sementara itu nilai LPPD menunjukkan tren

peningkatan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, hanya pada tahun pada Tahun 2014 mengalami penurunan, adapun untuk Tahun 2016 nilai LPPD tidak diumumkan.

Indikator persentase desa sadar hukum selama periode Tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada Tahun 2013 tercatat hanya 5% desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum, kemudian selama empat tahun meningkat menjadi 58,40% di Tahun 2017.

Indikator persentase perkara yang ditangani mengalami penurunan selama lima tahun, pada Tahun 2013 tercatat 16 perkara, kemudian menurun setiap tahunnya sehingga menjadi 8 perkara di Tahun 2017. Jumlah perkara yang ditangani cenderung menurun karena (1) tidak adanya gugatan perdata/ TUN yang harus ditangani; (2) adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat; dan (3) menunjukkan keberhasilan penyuluhan taat hukum. Selama periode Tahun 2013-2017 Kabupaten Sumedang menetapkan perda sebanyak 58, sementara perbup sebanyak 365. Perda terbanyak dihasilkan pada Tahun 2014, sementara perbup terbanyak dihasilkan pada Tahun 2017.

Untuk nilai LAKIP selama lima tahun mengalami peningkatan secara bertahap, pada Tahun 2013 tercatat nilai Lakip sebesar 41,45 kemudian meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 48,58 pada Tahun 2017.

Kemudian untuk ketersediaan dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) pada Tahun 2013 hingga Tahun 2016 tersedia dokumen laporan akhir penyusunan Anjab dan ABK dengan mengacu pada SOTK Tahun 2011. Sementara pada Tahun 2017 sudah terdapat kebutuhan penyusunan Anjab dan ABK baru berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang SOTK. Namun pada Tahun 2017 perubahan Anjab dan ABK baru dilakukan pada unit PTSP.

Indikator persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga selama periode Tahun 2013-2017 telah menghasilkan 98 MoU dan 147 PKS, dimana MoU terbanyak dihasilkan pada Tahun 2015 (27 MoU) dan PKS terbanyak dihasilkan pada Tahun 2016 (109 PKS).

Indikator peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan data kontribusi PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi Rp 154.372.922 pada Tahun 2017 dari sebesar Rp 22.277.732 pada Tahun 2016. Selain itu PDAM pun berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penggantian hibah Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, penggantian kepada PDAM terus meningkat kecuali pada Tahun 2016. Berdasarkan data pada Tahun 2017 nilai penggantian ini mencapai Rp 4.629.000.000.

Kontribusi BPR Sumedang terhadap Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Pada Tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah dari BPR Sumedang sebesar Rp 517.148.891 hingga pada Tahun 2017 mencapai Rp 4.055.397.862.

Indikator cakupan penerima bantuan sosial mengalami penurunan yang signifikan selama kurun waktu Tahun 2013-2017, pada Tahun 2013 tercatat 300 penerima bansos, kemudian menurun menjadi 23 penerima bansos di Tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya persyaratan penerima bantuan harus berbadan hukum minimal 3 tahun setelah di daftarkan, kemudian untuk bantuan sosial mesjid terdapat regulasi baru dari Kementerian Agama yang mengharuskan mesjid penerima bantuan terdaftar di Kementerian Agama.

Indikator ASN yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mengalami peningkatan, pada Tahun 2013 tercatat hanya 222 ASN yang bersertifikat PBJ, kemudian meningkat 13 ASN pada Tahun 2017 menjadi total 235 ASN yang bersertifikat PBJ. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	LPPD Tahun 2012	LPPD Tahun 2013	LPPD Tahun 2014	LPPD Tahun 2015	LPPD Tahun 2016
		4 Maret 2013	27 Maret 2014	4 Maret 2015	4 Maret 2016	29 Maret 2017
2	Meningkatnya Nilai LPPD	155/2,4028	329/1,4839	116/2,9783	(N/A)	34/3,519
3	Persentase Desa Sadar	5%	15.80%	36.80%	54.80%	58.40%

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Hukum					
4	Persentase perkara yang ditangani	16	14	12	10	8
5	Perda dan Perbup yang dihasilkan	- Perda : 8 - Perbup: 72	- Perda : 18 - Perbup: 58	- Perda : 11 - Perbup: 88	- Perda : 13 - Perbup: 40	- Perda : 8 - Perbup: 107
6	Meningkatnya nilai LAKIP daerah	41,45	43,57	46,52	48,50	48,58
7	Tersedianya dokumen perubahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan SOTK 2011	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan SOTK 2011	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan SOTK 2011	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan SOTK 2011	Sudah ada perubahan walaupun hanya untuk PTSP
8	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga	33 naskah (16 MoU;10 PKS)	24 naskah (14 MoU;10 PKS)	35 naskah (27 MoU;8 PKS)	134 naskah (25 MoU;109 PKS)	33 naskah (16 MoU;10 PKS)
10	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah					
1	**PDAM**					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	n/a	n/a	n/a	22.277.732	154.372.922
1.2	Pengantian dari Hibah Program MBR	n/a	2.000.000.000	2.259.000.000	1.398.000.000	4.629.000.000
2	**BPR Sumedang**					
2.1	Pendapatan Asli Daerah	517.148.891	729.510.218	1.461.570.740	3.592.978.332	4.055.397.862
11	Cakupan penerima Bantuan Sosial	300	63	45	13	23
12	Jumlah ASN bersertifikat PBJ	222	223	232	235	235
13	Persentase aset bermasalah yang terselesaikan					
A	Penjualan dan penghapusan Aset Bergerak :					
B	Kendaraan Kategori Rusak Berat	n/a	n/a	34 Unit Roda Dua	14 Unit Roda Empat	63 Unit Roda Dua
C	Kendaraan Kategori Limbah Padat *(Scrap)*	n/a	n/a	63 Unit Roda Tiga	6 Unit Roda Empat; 7 Unit Bak Container; 100 buah Grobak Tarik Sampah	7 unit Alat Berat
D	Rehabilitasi dan Penghapusan Aset Tidak Bergerak (Bangunan) :	n/a	n/a	5 (lima) Unit Bangunan (rehabilitasi)	3 (tiga) Unit Bagunan (penghapusan)	n/a
E	Pengamanan Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) :	n/a	n/a	Pemasangan 46 Plang dan 260 Tanda Batas (Patok)	n/a	n/a
F	Hibah Barang Milik Daerah :	n/a	n/a	n/a	n/a	2 (dua) Unit Kendraraan

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

H. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Scara umum kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik selama periode Tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya konflik antar suku dan konflik antar umat beragama/keyakinan di Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah LSM, Ormas, dan OKP selama periode Tahun 2013-2017 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2013 sejumlah 70 LSM/Ormas/OKP meningkat menjadi 257 LSM/Ormas/OKP di Tahun 2017. Kemudian untuk jumlah organisasi politik daerah selama periode Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yakni 12 organisasi politik daerah.

Dalam perspektif kedepan, pembinaan terhadap ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan ormas, serta kewaspadaan daerah perlu terus ditingkatkan dalam membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dalam lingkup kehidupan majemuk yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Frekwensi Konflik Antar Suku	0	0	0	0	0
2	Frekuensi Konflik Antar Umat Beragama/Keyakinan	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM, Ormas, dan OKP	70	50	60	517	257
4	Jumlah Organisasi Politik Daerah	12	12	12	12	12

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Sumedang

2.2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan

dan percepatan pertumbuhan status desa dari *Desa Swadaya* (desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya) dan dari *Desa Swakarsa* (desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana) menjadi *Desa Swasembada*.

Berdasarkan Tabel 2.61 tren persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menurun dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Pada Tahun 2013 tercatat 24,4% desa swasembada, kemudian menurun 11% menjadi 13% di Tahun 2017. Hal ini perlu menjadi perhatian karena ketahanan desa diperlukan dalam menopang ketahanan wilayah, sehingga pada periode Tahun 2017-2023 perlu adanya strategi peningkatan desa swasembada.

Tabel 2.61
Indikator Persentase Desa Berstatus Swasembada
Terhadap Total Desa

Indikator	Realisasi Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	24,4	23,7	21	21	13

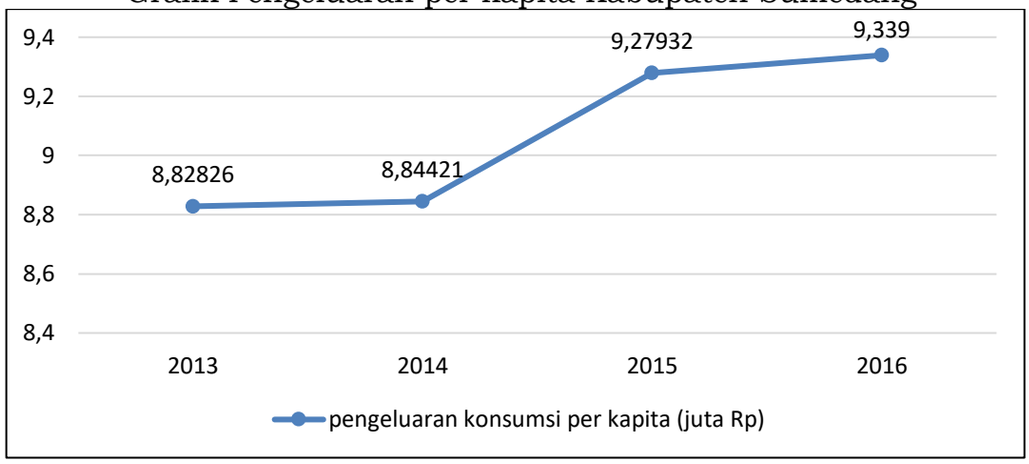
Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang

2.2.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang mengalami peningkatan yang signifikan sejak Tahun 2014. Pada Tahun 2014, pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp 8,84 juta naik menjadi Rp 9,27 juta pada Tahun 2015 dan kembali naik pada Tahun 2016 menjadi Rp 9,33 juta. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat Sumedang. Secara rata-rata peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang dari Tahun 2013 hingga Tahun 2016 mencapai 1,91 %.

Gambar 2.57
Grafik Pengeluaran per kapita Kabupaten Sumedang



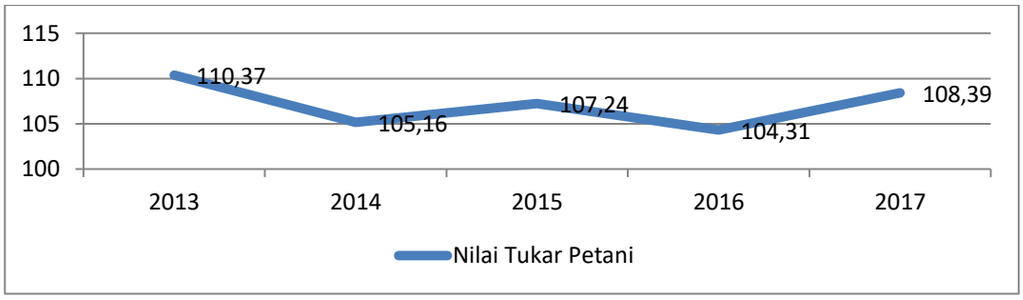
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

2.2.3.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Gambar 2.58
Nilai Tukar Petani



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang

Mengacu pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa NTP di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2013-2017 tidak pernah mengalami defisit, adapun surpulus tertingi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 110.37 dan surplus terendah pada Tahun 2016 yakni sebesar 104.31. Pada Tahun 2017 NTP mengalami surplus kenaikan 4,08 dari Tahun 2016 menjadi 108,39.

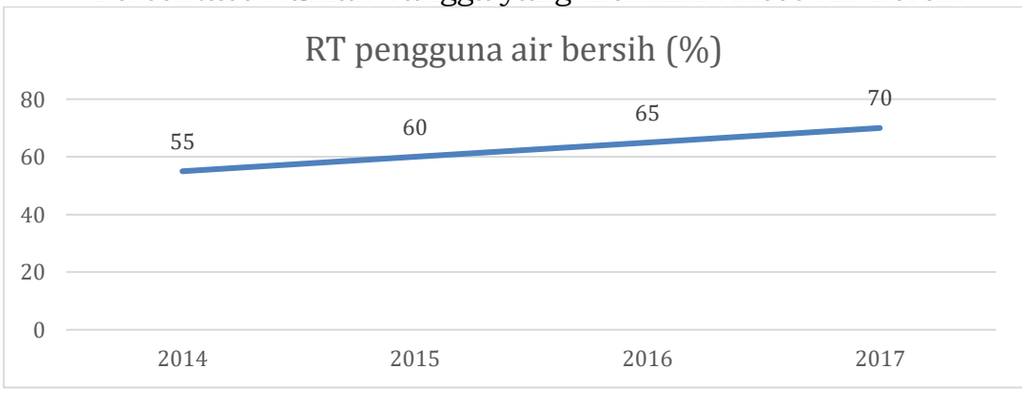
2.2.3.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

2.2.3.2.2. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedang masih berada pada angka 70 % masyarakat yang dapat mengakses air bersih pada Tahun 2017. Capaian ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 yang baru mencapai angka 55%.

Untuk mencapai target nasional sebesar 100 % penduduk yang memiliki akses air bersih di Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sumedang masih harus terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal penyediaan air di wilayah-wilayah yang memiliki akses sulit terhadap sumber air bersih.

Gambar 2.59
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumedang

2.2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah (1) angka kriminalitas; (2) jumlah demonstrasi; (3) lama proses perizinan; (4) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (5) jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
I	Angka Kriminalitas	-	0	28	23	19
II	Jumlah Demonstrasi					
	1. Demonstrasi bidang politik (kali)	2	7	5	4	-
	2. Demonstrasi bidang ekonomi (kali)	0	2	3	5	-
	3. Demonstrasi lainnya (kali)	4	3	5	8	5
II	Lama Proses Perizinan (Hari kerja)	14	14	14	14	14
IV	Jumlah dan macam pajak retribusi daerah					
	1.Pajak Daerah	72.483.509.426,00	105.290.620.111,00	124.772.329.005,00	120.609.781.305,00	157.256.500.230,00
	1.1. Pajak Hotel (Rp)	1.373.629.612,00	1.823.911.359,00	1.691.028.489,00	2.143.734.450,00	2.678.358.915,00
	1.2. Pajak Restoran (Rp)	5.349.268.195,00	6.470.905.758,00	7.598.750.711,00	10.094.447.046,00	12.769.921.883,00
	1.3. Pajak Hiburan (Rp)	958.067.262,00	990.958.521,00	1.529.483.918,00	2.026.501.981,00	2.496.723.953,00
	1.4. Pajak Reklame (Rp)	2.136.686.225,00	2.379.394.000,00	2.380.625.825,00	2.388.430.683,00	2.610.249.092,00
	1.5. Pajak Penerangan Jalan (Rp)	42.984.113.200,00	51.535.653.269,00	60.230.681.661,00	59.704.959.877,00	66.200.009.344,00
	1.6. Pajak Parkir (Rp)	289.475.900,00	299.399.050,00	351.047.025,00	374.326.650,00	498.544.402,00
	1.7. Pajak Air Tanah (Rp)	2.300.489.874,00	2.225.434.250,00	1.980.576.762,00	2.004.658.159,00	2.292.119.855,00
	1.8. Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	4.050.000,00	2.350.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	1.9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Rp)	2.192.415.225,00	2.778.134.175,00	3.750.883.041,00	2.308.423.017,00	2.999.729.200,00
	1.10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Rp)	14.895.313.933,00	14.469.997.998,00	21.830.168.875,00	15.495.005.401,00	35.541.701.182,00
	1.11. Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	-	22.314.481.731,00	23.426.832.698,00	24.066.894.041,00	29.166.742.404,00
	2.Retribusi Daerah	18.020.947.876,00	28.537.414.661,00	12.886.553.881,00	14.283.756.947,00	11.985.080.540,00
	2.1. Retribusi Jasa Umum (Rp)	13.044.103.525,00	23.447.409.063,00	6.087.699.926,00	7.138.449.127,00	2.855.179.300,00
	2.2. Retribusi Jasa Usaha (Rp)	960.448.041,00	1.036.138.700,00	1.097.124.315,00	1.202.190.143,00	1.060.306.519,00
	2.3. Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	4.016.396.310,00	4.053.866.898,00	5.701.729.640,00	5.943.117.677,00	8.069.594.721,00
V	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda No.11 Tahun 2019	Perda No.11 Tahun 2019	Perda No.11 Tahun 2019	Perda No.11 Tahun 2019	Perda No.11 Tahun 2019

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

2.2.3.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, berpotensi terjadi. Angka kriminalitas yang tercatat selama periode Tahun 2015-2017 mengalami penurunan, pada Tahun 2015 sejumlah 28 kasus, kemudian Tahun 2016 menurun menjadi 23 kasus, kembali mengalami penurunan menjadi 19 kasus di Tahun 2017 (Tabel 2.62). Dengan masih adanya jumlah kejahatan, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

2.2.3.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demontrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Sumedang relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak sistemik. Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Sumedang

periode Tahun 2013–2016 mengalami kenaikan dan menunjukkan penurunan pada Tahun 2017 (Tabel 2.62).

2.2.3.3.3 Lama Proses Perizinan

Indikator prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017 lama perizinan mencapai 14 hari kerja (Tabel 2.62). Selain itu, upaya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Pelayanan Perizinan Terpadu bertujuan untuk mempermudah perizinan dan penyebaran informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

2.2.3.3.4. Jumlah Pajak dan Retribusi

Berdasarkan Tabel 2.62, jumlah pajak di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2013 terdiri 10 jenis pajak kemudian bertambah menjadi 12 jenis pajak pada Tahun 2014 hingga Tahun 2017 dengan ditambahkannya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah Capaian seluruh jenis pajak daerah meningkat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 kecuali jenis pajak sarang burung walet yang mulai mengalami penurunan pada Tahun 2014.

Sedangkan jumlah retribusi daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari 3 jenis retribusi. Total retribusi daerah di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 cenderung semakin menurun. Hal ini disebabkan terdapat beberapa jenis pelayanan umum dan usaha yang sudah tidak diberlakukan biaya retribusinya.

Jika melihat data pada Tabel 2.62 di atas maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mensinergikan antara kegiatan peningkatan investasi dan peningkatan PAD, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Pertumbuhan investasi harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah.

2.2.3.3.5. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Sejak Tahun 2009, hanya terdapat satu Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Sumedang yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang.

2.2.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) rasio ketergantungan; (2) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3) jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

2.2.3.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Pada Tahun 2017, angka ketergantungan Kabupaten Sumedang sebesar 48,87 hampir sama dengan angka ketergantungan nasional yakni 48,1. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk

mendongkrak pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Rasio Ketergantungan

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	304.118	189.725	256.688	256.140	259.870
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	110.946	83.394	94.584	100.345	95.447
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 tahun + usia >64 tahun)	415.064	273.119	351.272	356.485	355.317
Penduduk Usia 15-64	892.584	827.457	759.569	775.974	784.247
Rasio ketergantungan	46,50	33,01	46,25	45,94	48,87

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

2.2.3.4.2. Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3 dan Penduduk usia 15 tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator rasio pencari kerja lulusan S1/S2/S3 dan indikator jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dikategorikan berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan Tabel 2.64 dapat diketahui bahwa pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S1/S2 di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2013 pencari kerja lulusan S1 yang terdaftar tercatat 199 orang, sementara pencari kerja lulusan S2 yang terdaftar hanya sebesar 21 orang. Kemudian lima tahun kemudian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.576 orang untuk pencari kerja lulusan S1 dan 12 orang untuk pencari kerja lulusan S2. Kondisi demikian menunjukkan kualitas sumber daya manusia pencari kerja di

Kabupaten Sumedang masih rendah, namun data tersebut hanya dalam lingkup pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, ada pula beberapa pencari kerja dengan pendidikan S1/S2 yang tidak mendaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 2.64
Rasio Lulusan S1/S2/S3

No	Indikator	Realisasi Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S1	199	129	960	108	143	1.576
B	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S2	21	9	4	5	7	12
C	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S3	0	0	0	0	0	0
D	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	220	138	964	113	150	-
E	Jumlah Penduduk	1.125.125	1.131.516	1.137.273	1.142.097	1.146.435	1,148,198
F	Rasio Lulusan S1/S2/S3	1,96	1,22	8,48	1,0	1,31	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Selanjutnya jika berdasarkan indikator jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan yang tertera pada Tabel 2.65 dapat diketahui bahwa angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Sumedang didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Kondisi demikian menggambarkan bahwa lapangan pekerjaan sektor informal lebih banyak daripada lapangan kerja sektor formal. Sedangkan angkatan kerja yang menganggur didominasi oleh angkatan kerja lulusan SMP, SMA, SD dan SMK. Adapun lulusan diploma dan universitas yang menganggur sebanyak 2.066 dan 2.350 orang. Untuk kategori bukan angkatan kerja didominasi oleh yang berpendidikan SD ke bawah, SMP dan SMK, hal ini menggambarkan jumlah siswa yang masih belajar di jenjang SD, SMP dan SMK lebih besar, dan juga menggambarkan warga yang sudah tidak produktif didominasi lulusan SD, SMP dan SMK.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Sumedang. Jika melihat data pada pembahasan indikator ketenagakerjaan, Tahun 2014 terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, hal ini bermakna sektor industri akan mendominasi lapangan kerja di Kabupaten Sumedang, sehingga jenjang pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Tabel 2.65
Penduduk >15 tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Tahun 2016
1	**Angkatan kerja Bekerja**	
a	SD ke bawah	254.040
b	SMP	104.859
c	SMA	55.542
d	SMAK	41.653
e	Diploma	9.498
f	Universitas	15.437
2	**Angkatan kerja Pengangguran Terbuka**	
a	SD ke bawah	8.471
b	SMP	17.619
c	SMA	11.488
d	SMAK	5.598
e	Diploma	2.066
f	Universitas	2.350
3	**Bukan Angkatan Kerja**	
a	SD ke bawah	179.860
b	SMP	102.322
c	SMA	31.876
d	SMAK	15.648
e	Diploma	2.977
f	Universitas	2.271

Sumber : Sumedang Dalam Angka (BPS) Kabupaten Sumedang

2.2.3.4.3. Jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif; (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar); (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah; (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami; (5) kemampuan sintesis dalam berfikir; dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Namun demikian dalam perspektif kedepan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada jenjang S2 dan S3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang

terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan

Uraian	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PNS di Pemko	13.935	13.451	12.972	12.670	12.957	11.656	11.344
PNS Lulusan SMA ke Bawah	-	2.333	-	1.967	-	2.054	-
PNS Lulusan S1	4.919	7.228	7.339	6.985	7.228	6.450	6.305
PNS Lulusan S2	443	547	602	570	567	574	552
PNS Lulusan S3	5	10	13	14	12	10	9

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang dan Sumedang Dalam Angka (BPS)

2.3 Rekapitulasi Interpretasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017

Tabel 2.67.
Kinerja Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (INDIKATOR *IMPACT*)				
1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	Tren meningkat	mencapai	
2	Pertumbuhan PDRB ADHB	Tren menurun	belum mencapai	pertumbuhan melambat
3	PDRB per Kapita	Tren meningkat	mencapai	
4	Indeks Gini	Tren menurun	mencapai	
5	Kemiskinan (%)	Tren menurun	mencapai	
2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL				
6	IPM	Tren meningkat	mencapai	
7	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Tren meningkat	mencapai	
8	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Tren menurun	belum mencapai	
9	Angka Melek Huruf	Tren meningkat	mencapai	
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tren meningkat	mencapai	
11	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	APK SD	Tren menurun	belum mencapai	
	APK SMP	Tren meningkat	mencapai	
12	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	APM SD	Tren meningkat	mencapai	
	APM SMP	Tren meningkat	mencapai	
13	Angka Usia Harapan Hidup	Tren meningkat	mencapai	
14	Persentase Balita Gizi Buruk	-	mencapai	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
15	Angka Kematian Bayi (Jumlah)	Tren meningkat	belum mencapai	
16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan)	Tren meningkat	belum mencapai	
17	Desa Siaga Aktif (%)	Tren menurun	belum mencapai	
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tren menurun	belum mencapai	
19	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Tren meningkat	mencapai	
20	Opini BPK	Tren meningkat	mencapai	
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH (INDIKATOR *IMPACT*)				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Tren meningkat	-	
2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Tren menurun	-	
3	Rasio Ketergantungan	Tren meningkat	-	
C. ASPEK PELAYANAN UMUM				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1. URUSAN PENDIDIKAN				
1	Angka Partisipasi Sekolah			
	SD	Tren meningkat	mencapai	
	SMP	Tren menurun	belum mencapai	
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah			
	SD	Tren menurun	-	
	SMP	Tren menurun	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
3	Rasio Guru Terhadap Murid per kelas rata-rata			
	SD	konstan	-	
	SMP	konstan	-	
4	Sekolah Kondisi Bangunan Baik (%)			
	SD	Tren meningkat	-	
	SMP	Tren meningkat	-	
5	APK PAUD Sederajat	Tren menurun	belum mencapai	
6	Angka Putus Sekolah			
	SD	tren menurun	mencapai	
	SMP	tren menurun	mencapai	
7	Angka Kelulusan			
	SD	100%	mencapai	
	SMP	100%	mencapai	
9	Angka Melanjutkan			
	SD ke SMP	Tren meningkat	mencapai	
	SMP ke SMA	Tren meningkat	mencapai	
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Tren menurun	belum mencapai	
11	Persentase Guru yang Bersertifikasi	Tren menurun	-	
2. URUSAN KESEHATAN				
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Tren menurun	mencapai	
2	Rasio Puskesmas Per Satuan penduduk	Tren menurun	belum mencapai	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
3	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Tren menurun	belum mencapai	
4	Rasio Dokter per 10.000 penduduk			
	Dokter Umum	Tren menurun	belum mencapai	
	Dokter Spesialis	Tren meningkat	belum mencapai	
	Dokter Gigi	Tren menurun	belum mencapai	
	Sanitarian	Tren menurun	belum mencapai	
	Ahli Gizi	Tren menurun	belum mencapai	
5	Rasio Bidan per 10.000 penduduk	Tren meningkat	belum mencapai	
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Tren meningkat	mencapai	
7	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Tren meningkat	mencapai	
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	Tren menurun	mencapai	
9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	mencapai	
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	mencapai	
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100%	mencapai	
12	Cakupan Kunjungan Bayi	100%	mencapai	
13	Jumlah Puskesmas	Tren meningkat	belum mencapai	
14	Jumlah Puskesmas Pembantu	Tren menurun	belum mencapai	
15	Persentase ketersediaan obat di	100%	mencapai	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
	puskesmas			
16	Persentase Kualitas Posyandu	100%	mencapai	
3. URUSAN PUPR				
1	Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	Tren meningkat	-	
2	Ruas Jalan yang dibangun/ditingkatkan (km)			
	Total Panjang Jalan	Tren menurun	-	
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	Tren meningkat	-	
4	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	Tren menurun	-	
5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	
6	Rasio Bangunan ber-IMB	Tren menurun	-	
7	Tersedianya luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah	Tren meningkat	belum mencapai	
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Rumah tangga pengguna air bersih	-	mencapai	
2	Rumah tangga bersanitasi	Tren meningkat	belum mencapai	
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (1 RT, 1 orang Linmas)	Tren meningkat	mencapai	
2	Penegakan PERDA (%)	100%	mencapai	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	Tren meningkat	belum mencapai	
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	100%	mencapai	
5	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Tren menurun	-	
6	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 lt pada wilayah manajemen kebakaran	Tetap	-	
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	Tetap	belum mencapai	
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	Tren meningkat	mencapai	
6. URUSAN SOSIAL				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Tren meningkat	mencapai	
2	Jumlah Panti Jompo	Tetap	mencapai	
3	Jumlah Panti Rehabilitasi	-	-	
4	Jumlah Panti asuhan	Tren menurun	mencapai	
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Tren meningkat	belum mencapai	
6	Persentase penyandang cacat fisik dan	Tren menurun	belum mencapai	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
	mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
7	Persentase panti sosial yang sarana pelayanan sosial menyediakan prasarana kesehatan	Tren menurun	mencapai	
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan prasarana kesejahteraan sosial	100%	mencapai	
URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR				
1. URUSAN TENAGA KERJA				
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	Tren menurun	-	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Tren menurun	-	
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Tren menurun	-	
A	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S1	Tren menurun	-	
B	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S2	Tren menurun	-	
C	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S3	-	-	
D	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Tren menurun	-	
E	Jumlah Penduduk	Tren Meningkat	-	
F	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Tren menurun	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	Tren Meningkat	-	
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	Tetap	-	100%
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	Tren Meningkat	-	
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	Tren Meningkat	-	
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tren Meningkat	-	
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Tren Meningkat	Mencapai	
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Tren Menurun	Belum Mencapai	
3	Rasio KDRT	Tren Meningkat	Belum Mencapai	
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Tren Menurun	Mencapai	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Tren Menurun	Mencapai	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
3. PANGAN				
1	Regulasi ketahanan pangan	sesuai	mencapai	
2	Ketersediaan pangan utama Kg/1000	tren meningkat	mencapai	
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	tren menurun	belum mencapai	
4	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	tren menurun	belum mencapai	
4. LINGKUNGAN HIDUP				
1	Persentase penanganan sampah	tren meningkat	mencapai	
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	tren meningkat	mencapai	
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	tren meningkat	mencapai	
4	Penegakan hukum lingkungan	Tren menurun	Mencapai	
5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Tren Menurun	Belum Mencapai	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Tren Menurun	Mencapai	
3	Rasio pasangan berakte nikah	Tren Meningkat	Mencapai	
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	Tren Meningkat	Belum Mencapai	
5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tetap	Mencapai	Tersedia

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Tetap	Mencapai	Sudah Diterapkan
6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Tren Menurun	-	
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tren Menurun	-	
3	LPM Berprestasi	-	-	
4	Posyandu aktif	Tren Menurun	-	
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Tren Meningkat	-	
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Tetap	-	
7	Cakupan pembinaan lembaga Bumdes	Tren Meningkat	-	
8	Cakupan pembinaan lembaga Adat	Tren Meningkat	-	
9	Jumlah pemasyarakatan TTG	-	-	
10	Jumlah pengelola SDA desa	Tren Meningkat	-	
11	Jumlah desa yang memiliki administrasi Pemdes sesuai aturan	Tren Menurun	-	
13	Jumlah aparatur pemerintah Desa yang menerapkan Siskudes	Tren Meningkat	-	
14	Jumlah desa yang menerapkan siskudes	Tren Meningkat	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Cakupan Peserta KB Aktif	Tren Meningkat	Mencapai	
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	-	
3	Keluarga Pra Sejahtera	Tren Menurun	-	
4	Keluarga Sejahtera I	Tren Menurun	-	
5	Rasio Akseptor KB (%)	Tren Meningkat	-	
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Tren Meningkat	-	
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Tren Menurun	-	
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Tren Menurun	-	
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Tren Menurun	-	
10	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Tren Meningkat	-	
11	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Tren Meningkat	-	
12	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Tren Meningkat	-	
13	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk	Tetap	-	100%

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
	memenuhi permintaan masyarakat			
14	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Tetap	-	100%
8. PERHUBUNGAN				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (per hari)	Tren Meningkat	Mencapai	
2	Rasio Ijin Trayek	Tren Meningkat	Mencapai	
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Tren Menurun	Belum Mencapai	
4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Tetap	Mencapai	
5	Pemasangan Rambu-rambu (%)	Tren Menurun	Belum Mencapai	
9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Tren Meningkat	Belum Mencapai	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	Tren Meningkat	Belum Mencapai	
10. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Persentase koperasi aktif	Tren Menurun	-	
2	Persentase usaha mikro dan kecil	Tren Meningkat	-	
11. PENANAMAN MODAL				

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Tren Meningkat	-	
2	Jumlah PMDN	Tren Meningkat	-	
3	Jumlah PMA	Tren Meningkat	-	
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	Tren Meningkat	-	
5	PMDN (Rp)	Tren Meningkat	-	
6	PMA (Rp)	Tren Menurun	-	
7	Rasio daya serap tenaga kerja	Tren Meningkat	Mencapai	
8	Jumlah tenaga kerja yang terserap PMDN	Tren Meningkat	-	
9	Jumlah tenaga kerja yang terserap PMA	Tren Menurun	-	
10	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	Tren Menurun	-	
11	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	-	-	
12. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Tren Meningkat	-	
2	Persentase wirausaha muda	Tren Meningkat	-	
3	Cakupan pembinaan olahraga	Tetap	-	
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Tren Meningkat	-	
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Tren Meningkat	-	
13. STATISTIK				
1	Buku ”kabupaten/kota dalam angka”	Tetap	Mencapai	Tersedia

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
2	Buku ”PDRB kabupaten/kota”	Tetap	Mencapai	Tersedia
14. PERSANDIAN				
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Tetap	-	
15. KEBUDAYAAN				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Tren Meningkat	-	
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Tren Menurun	-	
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Tren Meningkat	-	
4	Jumlah grup kesenian	Tren Meningkat	-	
5	Jumlah gedung kesedian	Tren Menurun	-	
16. PERPUSTAKAAN				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Tren Meningkat	-	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Tren Meningkat	-	
3	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Tren Meningkat	-	
17. KEARSIPAN				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Tren Meningkat	-	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Tren Menurun	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
URUSAN PILIHAN				
1. PARIWISATA				
1	Peningkatan keterampilan (skill) SDM Kepariwisataan	Tren menurun	-	
2	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta pengembangan destinasi wisata	Tren menurun	-	
3	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	Tetap	-	
4	Tersedianya RIPDA kepariwisataan	Tersedia	-	
2. KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Produksi perikanan (ton)	Tren Meningkat	-	
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	Tren Meningkat	-	
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			
	A. Atas dasar harga berlaku (%)	Tren Menurun	-	
	B. Atas dasar harga konstan (%)	Tren Menurun	-	
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT)	Tren Meningkat	-	
3. PERDAGANGAN				
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Tren Meningkat	-	
4. PERINDUSTRIAN				
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Tren Meningkat	-	
FOKUS FUNGSI PENUNJANG				

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
1. PERENCANAAN				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	Tetap	-	Tersedia
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak)	Tetap	-	Tersedia
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak)	Tetap	-	Tersedia
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	Tetap	-	Tersedia
2. KEUANGAN				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Tren Meningkat	-	
2	Persentase SILPA	Tren Menurun	-	
3	Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja)	Tren Menurun	-	
4	Persentase SILPA terhadap Total Penerimaan Daerah	Tren Menurun	-	
5	Persentase program yang tidak terlaksana	Tetap	-	100%
6	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	Tren Meningkat	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
7	Persentase belanja pendidikan (20%)	Tren Menurun	-	
8	Persentase belanja kesehatan (10%)	Tren Meningkat	-	
9	Persentase Belanja Langsung	Tren Meningkat	-	
10	Persentase Belanja tidak langsung	Tren Menurun	-	
11	Persentase belanja bagi hasil ke desa	Tren Meningkat	-	
12	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tren Meningkat	-	
3. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN				
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tetap	Mencapai	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Tren Meningkat	Belum Mencapai	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Tren Menurun	Belum Mencapai	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Tren Menurun	Mencapai	
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Tren Menurun	Belum Mencapai	
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Tren Menurun	-	
4. PENGAWASAN				
1	Persentase B	Tren Menurun		
2	Persentase pelanggaran pegawai	Tren Menurun		
3	Jumlah temuan BPK	Tren Meningkat		

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
5. SEKRETARIAT DEWAN				
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak)	Tetap	Mencapai	Tersedia
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak)	Tetap	Mencapai	Tersedia
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak)	Tetap	Mencapai	Tersedia
6. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	Tren Menurun	-	
2	Meningkatnya Nilai LPPD	Tren Menurun	-	
3	Persentase Desa Sadar Hukum	Tren Meningkat	-	
4	Persentase perkara yang ditangani	Tren Menurun	-	
5	Perda dan Perbup yang dihasilkan	Tren Meningkat	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
6	Meningkatnya nilai LAKIP daerah		Belum Mencapai	Kategori C (Kurang)
7	Tersedianya dokumen perubahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Tetap	-	
8	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga	Tren Meningkat	-	
9	Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah			
	1.1 PDAM			
	1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tren Meningkat	-	
	1.1.2 Pengantian dari Hibah Program MBR	Tren Meningkat	-	
	1.2 BPR Sumedang			
	1.2.1 Pendapatan Asli Daerah	Tren Meningkat	-	
10	Cakupan penerima Bantuan Sosial	Tren Menurun	-	
11	Persentase peningkatan ASN bersertifikat PBJ	Tren Meningkat	-	
12	Persentase aset bermasalah yang terselesaikan			
	Penjualan dan penghapusan Aset Bergerak :			
	Kendaraan Kategori Rusak Berat	Tren Meningkat	-	
	Kendaraan Kategori Limbah Padat *(Scrap)*	Tren Menurun	-	
	Rehabilitasi dan Penghapusan Aset Tidak Bergerak (Bangunan) :	Tren Menurun	-	

NO	INDIKATOR	ANALISA BERDASARKAN TREN	ANALISA BERDASARKAN TARGET (SPM/TARGET TAHUNAN)	KETERANGAN
	Pengamanan Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) :	-	-	
	Hibah Barang Milik Daerah :	Tren Menurun	-	
7. KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI				
1	Jumlah LSM, Ormas, dan OKP	meningkat	mencapai	
2	Jumlah Organisasi Politik Daerah	tetap	mencapai	

2.4 Kinerja Pemerintahan Daerah Periode 2014-2018

Rekapitulasi rata-rata capaian indikator kinerja pemerintahan daerah per Misi pada periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Rata-rata capaian indikator kinerja pemerintahan daerah per misi periode 2014-2018

No	Misi	Jumlah Indikator	Rata Rata Capaian Indikator
1	Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi	82 indikator yang terkait dengan misi	84,9%
2	Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.	79 indikator yang terkait dengan misi	87,37%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	36 indikator yang terkait dengan misi	81,37%
4	Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan perekonomian dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil menengah	58 indikator yang terkait dengan misi	109,29%
5	Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dengan dilandasi nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan	18 indikator yang terkait dengan misi	82,59%

Sumber : Evaluasi RPJMD Periode 2014-2018

Rata-rata capaian indikator kinerja pemerintahan daerah periode 2014-2018 pada tabel di atas masih terdapat *gap*/masalah yang belum terselesaikan. Adapun indikator yang masih terdapat *gap*/masalah disampaikan pada tabel 2.69. Dengan demikian beberapa indikator yang masih terdapat *gap*/masalah tersebut seyogyanya dilaksanakan pada periode Tahun 2019-2023.

‘

Tabel 2.69
Tabel Korelasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2013-2017 dengan Pencapaian Visi Misi Pembangunan Periode 2013-2017

Visi	Misi	Indikator Permendagri 86/2017 yang menggambarkan Capaian Misi
PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS (Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri, dan Agamis)	Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.	Jumlah temuan BPK meningkat, pada Tahun 2015 sejumlah 28 temuan, meningkat menjadi 41 temuan di Tahun 2016.
		Selama Tahun 2013-2017 nilai lakip daerah dibawah 50 (kategori C yang berarti KURANG atau perlu banyak perbaikan atau perubahan yang mendasar).
	Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Rata-rata lama sekolah Tahun 2017 masih 7,98, artinya rata-rata lama sekolah baru mencapai jenjang SMP, jika dibandingkan dengan target nasional 12 tahun, maka rata rata di Kab.Sumedang belum tercapai (Sumedang jaraknya tidak jauh dari ibukota negara)
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD-SMP) masih sangat kurang.
		Tahun 2016, 37% **angkatan kerja pengangguran terbuka** adalah lulusan SMP, 17,7% lulusan SD, 24% lulusan SMA dan 11,7% lulusan SMAK, sisa nya 9,27% lulusan diploma-universitas.
		Tahun 2016, 52,8% **angkatan kerja bekerja** adalah lulusan SD, 21,7% lulusan SMP, 11,5% lulusan SMA, 8,6% lulusan SMAK dan 5,1% lulusan diploma-universitas.
		Jumlah lulusan S1-S2-S3 menurun Tahun 2013 terdapat 220 orang lulusan S1-S2-S3, Tahun 2017 menurun menjadi 150 orang.
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	1. Tahun 2017 hanya 54,83% jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)
		2. Persentase pemasangan lampu lalu lintas menurun
		3. Terminal angkutan kota dan angkutan antar daerah masih kurang (hanya satu)
		4. Jumlah tempat pembuangan sampah perlu penambahan seiring peningkatan produksi sampah
		5. Jaringan irigasi perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan keperluan lahan pertanian
	Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah	Peningkatan ketimpangan pendapatan (Indeks gini meningkat 0,2 poin, Tahun 2015 sebesar 0,35 menjadi 0,37 di Tahun 2016).
		1. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan;
		2. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan namun Tingkat Partisipasi

Visi	Misi	Indikator Permendagri 86/2017 yang menggambarkan Capaian Misi
		Angkatan Kerja mengalami penurunan.
	Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan	1. Data indikator yang menggambarkan urusan lingkungan sangat minim
		2. Ragam dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan promosi budaya serta menghidupkan perekonomian daerah masih kurang.
		3. Benda, situs sejarah dan kawasan cagar budaya masih belum seluruhnya dilakukan pelestarian.
		4. Sarana prasarana pengembangan kesenian dan budaya tidak memadai (belum ada gedung kesenian, sarana penyelenggaraan festival budaya tidak ada).

Sumber : Hasil analisis

2.5 *Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG'S)* KLHS RPJMD 2019-2023

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, Kabupaten Sumedang melakukan pemetaan terhadap ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai capaian Indikator TPB dapat dilihat di bawah ini.

Pilar sosial sesuai dengan target nasional terdiri dari 5 TPB dengan 111 indikator. TPB sebagaimana dimaksud yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan; TPB 2 Tanpa Kelaparan; TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; TPB 4 Pendidikan Berkualitas; dan TPB 5 Kesetaraan Gender. Namun demikian, indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang hanya sebanyak 89 indikator dengan 9 OPD yang menjadi penanggung jawab atas capaian kinerjanya, sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.70.
Capaian Indikator TPB Pilar Sosial

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umurnua	7.0-8.0	10,53	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kana	Bappppeda
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95	63,10	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerja-an.	100; 10/ 34.4 Juta	-	Tidak Ada Data	Dinsos P3A
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0,57	-	Tidak Ada Data	Dinsos P3A
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Pro-gram Keluarga Harapan.	10 Juta	26,632 KPM	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A
1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70	51,24	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Dalduk & KB

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63	-	Tidak Ada Data	Dinas Dalduk & KB
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	66	71,80	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Dalduk & KB
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100	84,78	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Perkimtan
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100	-	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0	-	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/seder ajat.	94,78	100	Sudah Tercapai Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/se-derajat.	82,02	100	Sudah Tercapai Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	85	85,94	Sudah Dilaksana-kan, Sudah Tercapai	Dinas Kependu-dukan Dan Catatan Sipil

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	NA	9/100.000	Sudah Tercapai Sudah Dilaksana-kan	BPBD
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39	11 Kecamatan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	BPBD
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	3.800	-	Tidak Ada Data	Dinsos P3A
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	450	-	Tidak Ada Data	Dinas Pendidikan, BPBD
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	118,6	2,36	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	BPBD
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	NA	-	Tidak Ada Data	BPBD
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	NA	-	Tidak Ada Data	BPBD
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberanta-san kemiskinan.	NA	-	Tidak Ada Data	BAPPPPEDA

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	NA	Disdik 35,70 % Dinkes 26,80 % Dinsos 15%	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	BAPPPPEDA
2.1. Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernurish-ment)*	NA	34,65	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan
	2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada anak balita.	17,0	13,1	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.	NA	0,42	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan
	2.2.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/ hari.	8,5	9%	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan
2.2. Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang	2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita .	NA	28.1	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta.	28,0		Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ *(berat badan/tinggi badan)* anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	9,5	5,0	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28,0	8,5	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI ekslusif.	50,0	75,28	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan tingkat konsumsi ikan	92,5	85	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
2.3 Pada Tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	NA	102.5	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306	22	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di-tolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	NA	89,78	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85	79,5	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	NA	12/19.819= 0.61	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	16,28	103/19.819 =0.96	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	24	145/19.819 =7,32	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,5%	0,048%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	344	177	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	NA	0,7	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	NA	6	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5,4	22,36	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	23,4	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15,4	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
	3.4.2*	Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri.	NA	0	Tidak Ada Data	Dinsos P3A
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Kemenkes: 9000: BNN: 9500	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan BNNK
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	22000	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan BNNK
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahguna-an NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	210	3	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahguna-an NAPZA yang telah dikembangkan /dibantu.	85	-	Tidak Ada Data	Dinsos P3A
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahguna-an narkoba.	NA	-	Tidak Ada Data	Dinsos P3A
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA	-	Tidak Ada Data	Dinsos P3A

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	61,3	82,5	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dalduk & KB
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	66	82,58	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dalduk & KB
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23,5	19.85	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dalduk& KB
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate* /ASFR).	38	29,65	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A Dinas Kesehatan, Dalduk & KB
	3.7.2.(a)	*Total Fertility Rate* (TFR).	2,28	2.09	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dalduk & KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan	3.8.1.(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	1	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	-	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95	63,10%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
3.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	NA	-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA	24,83	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health,* yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		-	Tidak Ada Data	Dinas Kesehatan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
4.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	NA	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84,2	62,71	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81	56,52	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	114,09	120,95	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	106, 94	108,14	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,8	8,9	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
4.2 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77,23	94,5	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
4.4 Pada Tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	NA	69,7	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
4.5 Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi.	NA	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Rasio APM SD/MI/sederajat	100	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
		Rasio APM SMP/MTs/sederajat	100	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Pendidikan
4.6 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96,1	99,32	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Pendidikan
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	NA	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Pendidikan
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	NA	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Pendidikan
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	98	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	NA	99	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Pendidikan

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	NA	99,67	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	NA	67,11	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	NA	1,50	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	NA	-	Tidak Ada Data	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	NA	-	Tdak Ada Data	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	NA	52,09	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	NA	-	Tidak Ada Data	Dinas Pendidikan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
4.c Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	77,20	99	Suah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	100	99	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.	100	99	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	100	99	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinas Pendidikan
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempu-an dewasa dan anak perempu-an (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	NA	9 (anak Perempuan)	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	NA	Menurun	Sudah Tercapai, sudah dilaksana-kan	Dinsos P3A

Tujuan/ Target	Kode Indika-tor	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	NA	9 (anak Perempuan)	Belum Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksana-kan	Dinsos P3A
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	-	35,60	Sudah Tercapai, Sudah dilaksana-kan	Dinsos P3A
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21	21	Tidak Ada Data	Dalduk & KB
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate* /ASFR).	38	4	Sudah Tercapai, Sudah dilaksana-kan	Dalduk & KB

Sumber : KLHS RPJMD 2019-2023

Dari uraian capaian pilar sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator capaian Dinas Pendidikan sebanyak 16; Dinas Kesehatan sebanyak 28; Dinas Dukcapil sebanyak 1; Bappppeda sebanyak 3; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 9; Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebanyak 3; BPBD sebanyak 5; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebanyak 17; dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 5. Adapun rincian dari 4 klasifikasi capaian indikator kinerja, adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.71.
Pencapaian Pilar Sosial sesuai dengan kewenangan OPD

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung Jawab	Belum Tercapai, Belum dilaksanakan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Tidak ada data	Jumlah
PILAR SOSIAL	Dinas Pendidikan	0	2	13	1	16
	Dinas Kesehatan	0	16	3	9	28
	Bappppeda	0	1	1	1	3
	Dinas Dukcapil	0	0	1	0	1
	Dinas Dalduk & KB	0	2	6	1	9
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	0	1	0	2	3
	BPBD	0	3	0	2	5
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	6	4	6	17
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1	4	0	5
Jumlah		1	32	32	22	87

Sumber : KLHS RPJMD 2018-2023

Selanjutnya, pilar ekonomi sesuai dengan target nasional terdiri dari 3 TPB dengan 91 indikator. TPB sebagaimana dimaksud yaitu TPB 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi; TPB 9 Industri, Inovasi, & Infrastruktur; dan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan. Namun demikian, indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang hanya sebanyak 25 indikator dengan 5 OPD yang menjadi penanggung jawab atas capaian kinerjanya, sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.72.
Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	NA	5,82	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Bappppeda
	8.1.1.(a)	PDB per kapita	72,7	18,56 jt	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Bappppeda
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	NA	-	Tidak ada data	Bappppeda
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	43,75b Laki-laki: 39,18 Perem-puan: 50,29	Laki-laki: 190 Perempuan: 95	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	51	61,21	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Bappppeda
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	89,59b Laki-laki: 86,72 Perempu-an: 94,36	-	Tidak ada Data	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25	-	Tidak ada Data	Dinas Koperasi, UKM, Perdangan dan Perindustri an

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
8.5 Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	14.194	-	Tidak ada Data	Dinas Koperasi, UKM, Perdangan dan Perindustri an
	8.5.2*	Tingkat pengang-guran terbuka berdasar kan jenis kelamin dan kelompok umur	4,0-5,0	9,4-9,89	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	7,21	-	Tidak Ada Data	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Parbud Pora
8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	23,38b	6,01	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Parbud Pora Dinas Perhubungan Diskipas
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	500	200	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8	-	Tidak Ada Data	Bappppeda Dinas Parbud Pora
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	20	-	Tidak Ada Data	Dinas Parbud Pora
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	275	-	Tidak Ada Data	Dinas Parbud Pora

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	260	-	Tidak Ada Data	Dinas Parbud Pora
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	17,04	8,2	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Parbud Pora Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.b Pada Tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan *the Global Jobs Pact of the International Labour Organization* .	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagaker-jaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB	NA	-	Tidak Ada Data	Bapppeda
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	98	62,80%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas PUPR
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	21,1	-	Tidak Ada Data	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	5,6	5.29	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufak-tur.	13,9	84,7	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	3.966.275	-	Tidak Ada Data	DinasKoperasi , UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.						
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,36	0,38	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Bappppeda
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,0-8,0	10.53	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Bappppeda

Sumber : KLHS RPJMD 2018-2023

Dari uraian capaian pilar ekonomi di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator capaian Bappppeda sebanyak 8, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3, Dinas KUKM dan Perindag sebanyak 9, Dinas Pariwisata, Budaya dan Pemuda Olahraga sebanyak 4, dan Dinas PUPR sebanyak 1. Adapun rincian dari 4 klasifikasi capaian indikator kinerja tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pilar ekonomi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.73.
Rekapitulasi Pencapaian Pilar Ekonomi sesuai dengan kewenangan OPD

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung Jawab	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Tidak Ada Data	Jumlah
PILAR EKONOMI	Bappppeda	0	4	1	3	8
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	0	1	3
	Dinas KUKM dan Perindag	0	2	2	5	9
	Dinas Pariwisata, Budaya dan Pemuda Olahraga	0	1	0	3	4
	Dinas PUPR	0	1	0	0	1
Jumlah		1	9	3	12	25

Sumber : KLHS RPJMD 2019-2023

Adapun pilar lingkungan sesuai dengan target nasional dari 4 TPB dengan 83 indikator. TPB sebagaimana dimaksud yaitu TPB 6 Air Bersih & Sanitasi Layak; TPB 11: Kota & Permukiman yang Berkelanjutan; TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; dan TPB 15: Kehidupan/Ekosistem di Daratan. Namun demikian, indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang hanya sebanyak 25 indikator dengan 8 OPD yang menjadi penanggung jawab atas capaian kinerjanya, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2.74.
Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Disperkimtan
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118.6/ 67	-	Tidak Ada Data	Disperkimtan
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100	92,20%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Disperkimtan
6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	100	63.55%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Kesehatan
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga	100	93,95%	Belum Tercapai, Sudah	Disperkimtan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			Dilaksanakan	
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45.000	277 (jumlah desa dan kelurahan se-Sumedang)	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Disperkimtan
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	NA	156	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Disperkimtan
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	100	-	Tidak Ada Data	Disperkimtan
6.3 Pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	80	0	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Disperkimtan
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	NA	0	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Disperkimtan
6.4. Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	NA	-	Tidak Ada Data	DLHK
	6.4.1.(b)	Insentif	NA	-	Tidak Ada	DLHK

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.		penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.			Data	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
6.5 Pada Tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	NA	-	Tidak Ada Data	Dinas PUPR
11.2 Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak,	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	32	-	Tidak Ada Data	Dinas Perhubungan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
penyandang difabilitas dan orang tua.						
11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	PM	0.17	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	BPBD
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	30	62	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	BPBD
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	NA	-	Tidak Ada Data	BPBD
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	NA	-	Tidak Ada Data	BPBD
11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80	38	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DLHK
11.7 Pada Tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	100	13,96	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Sosial P3A Satpol PP
12.4 Pada Tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	NA	11	Sudah Tercapai Sudah Dilaksanakan	DLHK
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan	NA	100	Sudah Tercapai Sudah	DLHK

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			Dilaksanakan	
12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	61,5	2,2	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DLHK
12.8 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	-	Tidak Ada Data	Bapppeda

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	62	30,49	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	DLHK

Sumber : KLHS RPJMD 2018-2023

Dari uraian capaian pilar lingkungan di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator capaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebanyak 9, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 7, Dinas Kesehatan sebanyak 1, Dinas PUPR sebanyak 1, Dinas Perhubungan sebanyak 1, BPBD sebanyak 4, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebanyak 1 dan Bappppeda sebanyak 1. Adapun rincian dari 4 klasifikasi capaian indikator kinerja tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pilar ekonomi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.75.
Rekapitulasi Pencapaian Pilar Lingkungan sesuai dengan kewenangan OPD

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung Jawab	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Tidak Ada Data	Jumlah
PILAR LINGKUNGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	3	2	2	2	10
	Dinas Kesehatan	0	1	0	0	1
	Dinas Lingkungan dan Kehutanan	0	3	2	2	7
	Dinas Perhubungan	0	0	0	1	1
	BPBD	0	2	0	2	4

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung Jawab	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Tidak Ada Data	Jumlah
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	0	0	1
	Dinas PUPR	0	0	0	1	1
	Bappppeda	0	0	0	1	1
Jumlah		**3**	**9**	**4**	**9**	**25**

Sumber : KLHS RPJMD 2018-2023

Kemudian, pilar hukum dan tata kelola sesuai dengan target nasional dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 34 indikator. TPB sebagaimana dimaksud yaitu TPB16 Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Namun demikian, indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang hanya sebanyak 15 indikator dengan 5 OPD yang menjadi penanggung jawab atas capaian kinerjanya, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2.76.
Capaian indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki- laki dan anak perempuan.	NA	-	Tidak Ada Data	Dinsos dan P3A
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	20%	37,34%	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	BPKAD
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan	WTP	WTP	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	BPKAD

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
		Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).				
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B	C	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Setda (Bagian Organisasi)
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	100%	100%	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	SETDA (Bagian ULP)
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	B	BB	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	SETDA (Bagian Organisasi)
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	NA	-	Tidak Ada Data	SETDA (Bagian Organisasi)
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	20%	18%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinsos P3A
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		0,04%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	BKPSDM
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	100	78,12	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Dukcapil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk	100	85,94	Belum Tercapai,	Dinas Dukcapil

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi	Perangkat Daerah
pencatatan kelahiran.		40% berpendapatan bawah.			Sudah Dilaksanakan	
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	100	88,89	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Dinas Dukcapil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	NA	Sudah Dibentuk	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	SETDA
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	NA	-	Tidak Ada Data	SETDA
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	NA	Masing-masing OPD sudah dilatih 1 orang menjadi PPID	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	SETDA

Sumber : KLHS RPJMD 2018-2023

Dari uraian capaian pilar hukum dan tata kelola di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator capaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 2, BPKAD sebanyak 2, Sekretariat Daerah sebanyak 7, BKPSDM sebanyak 1, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 3. Adapun rincian dari 4 klasifikasi capaian indikator kinerja tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pilar ekonomi sesuai dengan kewenangan OPD adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.77.
Rekapitulasi Pencapaian Pilar Hukum dan Tata Kelola sesuai dengan kewenangan OPD

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung Jawab	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Tidak Ada Data	Jumlah
Pilar hukum dan tata	Dinas Sosial, Pemberdayaan	0	1	0	1	2

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	OPD Penanggung Jawab	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	Tidak Ada Data	Jumlah
kelola	Perempuan dan Perlindungan Anak					
	BPKAD	0	0	2	0	2
	SETDA	0	3	2	2	7
	BKPSDM	0	1	0	0	1
	Dinas Dukcapil	0	3	0	0	3
JUMLAH		0	8	4	3	15

Sumber : KLHS RPJMD 2018-2023

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumedang dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2017. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Khusus, untuk proyeksi Tahun 2018 menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2018 karena pada saat RPJMD ini disusun, sudah berjalan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

3.1.1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan membandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2019 s.d tahun 2023).

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
dari Tahun 2013 s.d 2017
(Rupiah)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+/(-)
1	2	3	4	5	6
1	2013	1.693.437.294.982,40	1.715.190.458.848,53	101,28%	21.753.163.866,13
2	2014	2.069.304.340.061,76	2.087.159.777.352,30	100,86%	17.855.437.290,54
3	2015	2.422.651.891.199,66	2.357.057.542.810,11	97,29%	(65.594.348.389,55)
4	2016	2.456.781.204.564,55	2.393.284.649.759,39	97,42%	(63.496.554.805,16)
5	2017	2.728.997.402.083,07	2.658.969.231.750,18	97,43%	(70.028.170.332,89)

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang
dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017
(Rupiah)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	**Pendapatan Daerah Tahun 2013**			
	a. PAD	170.748.718.708,50	189.612.071.919,53	111,05%
	b. Dana Perimbangan	1.415.438.067.582,40	1.423.049.021.101,00	100,54%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	107.250.508.691,50	102.529.365.828,00	95,60%
	Jumlah	**1.693.437.294.982,40**	**1.715.190.458.848,53**	**101,28%**
2.	**Pendapatan Daerah Tahun 2014**			
	a. PAD	260.719.911.434,66	301.800.842.760,30	115,76%
	b. Dana Perimbangan	1.534.742.814.840,00	1.543.460.191.373,00	100,57%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	273.841.613.787,10	241.898.743.219,00	88,34%
	Jumlah	**2.069.304.340.061,76**	**2.087.159.777.352,30**	**100,86%**
3.	**Pendapatan Daerah Tahun 2015**			
	a. PAD	318.552.026.399,66	327.369.262.021,11	102,77%
	b. Dana Perimbangan	1.312.916.320.326,00	1.269.358.454.244,00	96,68%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	791.183.544.474,00	760.329.826.545,00	96,10%
	Jumlah	**2.422.651.891.199,66**	**2.357.057.542.810,11**	**97,29%**
4.	**Pendapatan Daerah Tahun 2016**			
	a. PAD	340.660.537.990,55	345.783.041.953,39	101,50%
	b. Dana Perimbangan	1.668.033.854.411,00	1.611.298.154.638,00	96,60%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	448.086.812.163,00	436.203.453.168,00	97,35%
	Jumlah	**2.456.781.204.564,55**	**2.393.284.649.759,39**	**97,42%**
5	**Pendapatan Daerah Tahun 2017**			
	a. PAD	523.547.667.603,07	553.283.177.791,18	105,68%
	b. Dana Perimbangan	1.683.414.964.628,00	1.594.548.731.778,00	94,72%

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	522.034.769.852,00	511.137.322.181,00	97,91%
	Jumlah	**2.728.997.402.083,07**	**2.658.969.231.750,18**	**97,43%**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Dari data di atas menggambarkan secara umum, kinerja pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama Tahun Anggaran 2013 hingga Tahun Anggaran 2017. Dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 kinerja pendapatan masih di bawah target meski ada kecenderungan meningkat, dan hanya Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang kinerjanya di atas target. Jadi secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Sumedang mengalami kecenderungan menurun karena hanya 2 tahun awal yang kinerjanya melampaui target.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kabupaten Sumedang terjadi pada Tahun Anggaran 2013, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,28% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang masing-masing di atas target, yaitu sebesar 111,05% dan 100,54%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di bawah target yatu sebesar 95,60%.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua Kabupaten Sumedang terjadi pada Tahun Anggaran 2014, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,54% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang masing-masing di atas target, yaitu sebesar 115,76% dan 100,57%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di bawah target, yaitu sebesar 88,34%. Sedangkan, kinerja pendapatan daerah terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2015 dengan pencapaian hanya 97,29% dari yang ditargetkan. Rendahnya kinerja realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja Dana Perimbangan. Kinerja realisasi PAD masih di atas target yaitu

sebesar 102,77%, sedangkan Dana Perimbangan hanya mencapai 96,68% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 96,10%.

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terkahir dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017
(Rupiah)

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN							
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**189.612.071.920,00**	**301.800.842.760,00**	**327.369.262.021,00**	**345.783.041.953,00**	**553.283.177.791,00**	**33.32%**
	Pajak Daerah	72.483.509.426,00	105.290.620.111,00	124.772.329.005,00	120.609.781.305,00	157.256.500.230,00	22.70%
	Retribusi Daerah	18.020.947.876,00	28.537.414.661,00	12.886.553.881,00	14.283.756.947,00	11.985.080.540,00	(0.43%)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.599.772.202,00	4.179.437.549,00	4.026.882.393,00	5.802.145.037,00	7.846.040.130,00	22.94%
	Lain - Lain PAD yang Sah	95.507.842.416,00	163.793.370.439,00	185.683.496.742,00	205.087.358.664,00	376.195.556.891,00	44.69%
2	**Dana Perimbangan**	**1.423.049.021.101,00**	**1.543.460.191.373,00**	**1.269.358.454.244,00**	**1.611.298.154.638,00**	**1.594.548.731.778,00**	**4.15%**
	Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak	92.333.833.101,00	88.232.871.373,00	71.391.592.244,00	94.023.930.389,00	95.607.165.916,00	2.46%
	Dana Alokasi Umum	1.036.263.413.000,00	1.104.417.363.000,00	1.118.845.812.000,00	1.138.929.785.000,00	1.119.198.604.000,00	1.99%
	Dana Alokasi Khusus	81.900.500.000,00	91.292.060.000,00	79.121.050.000,00	378.344.439.249,00	379.742.961.862,00	94.17%
	Dana Tunjangan Profesi	212.551.275.000,00	259.517.897.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**102.529.365.828,00**	**241.898.743.219,00**	**760.329.826.545,00**	**436.203.453.168,00**	**511.137.322.181,00**	**81.20%**
	Hibah	0,00	2.000.000.000,00	2.259.000.000,00	12.656.108.102,00	34.473.960.000,00	215.20%
	Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Darah Lainnya	60.419.493.393,00	94.219.556.067,00	119.155.952.280,00	113.033.738.140,00	122.309.363.299,00	21.37%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.721.600.000,00	-	409.203.357.000,00	-	-	

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dana Desa	-	-	77.442.881.000,00	169.408.490.000,00	217.268.983.000,00	73.50%
	Bantuan Keuangan Provinsi	33.388.272.435,00	145.679.187.152,00	152.268.636.265,00	141.105.116.926,00	137.085.015.882,00	82.67%
	JUMLAH	**1.715.190.458.849,00**	**2.087.159.777.352,00**	**2.357.057.542.810,00**	**2.393.284.649.759,00**	**2.658.969.231.750,00**	**11.81%**

Sumber : Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data selama Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang, dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan hampir di seluruh komponen pendapatan daerah khususnya peningkatan yang cukup signifikan pada proyeksi Dana Alokasi Khusus, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, bahwa proyeksi pendapatan Dana Tunjungan Profesi Guru dialokasikan pada Dana Alokasi Khusus.

3.1.1.2. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA saja. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah,
Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah
Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terakhir
dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Total Pendapatan Daerah	1.715.190.458.849,00	2.087.159.777.352,00	2.357.057.542.810,00	2.393.284.649.759,00	2.658.969.231.750,00	11.81%
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	103.947.021.573,00	123.533.836.979,00	156.543.702.544,00	156.099.506.859,00	22.520.418.347,00	(10.07%)
	Penggunaan SiLPA	97.947.021.573,00	123.042.141.185,00	156.543.702.544,00	156.099.506.859,00	22.520.418.347,00	(8.25%)
	Pencairan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	491.695.794,00	0	0	0	0.00%

	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0.00%
	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0.00%
	Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	0	0.00%
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0.00%
	Total Penerimaan Daerah	1.819.137.480.421,00	2.210.693.614.331,00	2.513.601.245.354,00	2.549.384.156.619,00	2.681.489.650.097,00	10.46%

Sumber : Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kabupaten Sumedang

3.1.2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA). SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 tahun mendatang.

3.1.2.1. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupeten/Kota. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada Tahun Anggaran 2015 realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar Rp 2.352.851.738.495,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp 2.510.877.751.388,00 di Tahun Anggaran 2016, kemudian pada Tahun Anggaran 2017 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2.622.529.787.508,00 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 8,64%. Selain itu dari sisi Belanja Langsung rata-rata pertumbuhan realisasinya 10,44% per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditopang dari rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu mencapai 22,59%, diikuti dengan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,80%. Sedangkan, belanja pegawai pada Belanja Langsung justru cenderung menurun dengan pertumbuhan negatif sebesar (16,67%). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian dan investasi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel 3.5 dan tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3.5.
Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Tidak Langsung	90,65%	98,23%	95,95%
	Belanja Pegawai	89,71%	98,07%	94,65%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	92,77%	98,62%	99,62%
	Belanja Bantuan Sosial	91,72%	100,00%	87,24%
	Belanja Bantuan Keuangan	99,17%	98,85%	100,00%
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	99,93%	100,00%	100,00%
	Belanja Tidak Terduga	58,01%	85,85%	0,00%
2	Belanja Langsung	92,25%	94,67%	95,20%
	Belanja Pegawai	94,49%	96,30%	95,08%

No	Uraian	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa	91,11%	96,45%	95,88%
	Belanja Modal	92,95%	92,80%	94,51%
	TOTAL BELANJA DAERAH	91,42%	96,81%	95,63%

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tabel 3.5 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90%. Kinerja Belanja Langsung juga mengalami kecenderungan membaik dari 92,25% di Tahun Anggaran 2015 meningkat menjadi 95,20% di Tahun 2017, yang didukung dengan kinerja penyerapan belanja modal di atas 92%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang cukup perhatian dalam merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu juga, pada komponen Belanja Tidak Langsung, penyerapan anggaran belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa relatif baik dengan tingkat penyerapan hampir atau mencapai 100%. Untuk melihat gambaran kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 3.6.
Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun 2015 s.d Tahun Anggaran 2017

No	**Uraian**	**2015**	**2016**	**2017**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	BELANJA DAERAH			
1	**Belanja Tidak Langsung**	**51,47%**	**61,04%**	**57,78%**
	Belanja Pegawai	45,47%	48,45%	42,64%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	0,54%	0,71%	1,34%
	Belanja Bantuan Sosial	0,07%	0,06%	0,06%
	Belanja Bantuan Keuangan	5,14%	11,59%	13,20%
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	0,24%	0,22%	0,54%
	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,01%	0,00%
2	**Belanja Langsung**	**48,53%**	**38,96%**	**42,22%**

No	Uraian	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
	Belanja Pegawai	3,65%	2,56%	3,01%
	Belanja Barang dan Jasa	21,20%	17,87%	20,18%
	Belanja Modal	23,68%	18,53%	19,02%
	TOTAL BELANJA DAERAH	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih besar dibanding jenis belanja lainnya, selain belanja pegawai pada belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan). Meskipun, porsinya cenderung menurun seiring dengan perubahan proporsi dalam Belanja Daerah. Hal ini terlihat jelas pada menurunnya persentase proporsi realisasi kedua belanja selama 3 tahun terakhir meskipun pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 3 tahun terakhir, sesuai yang diminta dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Selama 3 Tahun Terakhir
dari Tahun Anggaran 2015 s.d Tahun Anggaran 2017
(Rupiah)

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH				
1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.210.951.375.087,00**	**1.532.719.773.343,00**	**1.515.408.909.024,00**	**9.11%**
	Belanja Pegawai	1.069.922.592.323,00	1.216.525.889.648,00	1.118.190.996.924,00	0.69%
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0.00%
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0.00%
	Belanja Hibah	12.751.800.000,00	17.893.600.000,00	35.249.088.900,00	42.50%
	Belanja Bantuan Sosial	1.702.274.450,00	1.514.317.000,00	1.491.098.000,00	(27.31%)
	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	120.876.298.187,00	290.967.589.695,00	346.248.239.700,00	94.87%
	Belanja Bagi Hasil Kepada	5.620.871.300,00	5.538.073.000,00	14.229.485.500,00	51.80%

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
	Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa				
	Belanja Tidak Terduga	77.538.827,00	280.304.000,00	0,00	0.00%
2	**Belanja Langsung**	**1.141.900.363.408,00**	**978.157.978.045,00**	**1.107.120.878.484,00**	**10.44%**
	Belanja Pegawai	85.803.580.171,00	64.190.953.986,00	79.017.359.422,00	(16.67%)
	Belanja Barang dan Jasa	498.873.057.981,00	448.605.416.157,00	529.353.267.345,00	22.59%
	Belanja Modal	557.223.725.256,00	465.361.607.902,00	498.750.251.717,00	11.80%
	JUMLAH	**2.352.851.738.495,00**	**2.510.877.751.388,00**	**2.622.529.787.508,00**	**8.64%**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa selama periode Tahun Angggaran 2015 sampai dengan Tahun Angggaran 2017 untuk realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 9,11%. Demikian juga untuk Belanja Langsung setiap tahunnya juga mengalami kenaikan lebih besar rata-rata per tahunnya yaitu sebesar 10,44%. Khusus belanja bantuan sosial dan belanja pegawai pada Belanja Langsung mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan. Sedangkan, sebaliknya belanja barang dan jasa, dan belanja modal sama-sama tumbuh dengan rata-rata masing-masing sebesar 22,59% dan 11,80%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan kedua belanja tersebut, menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja baik dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung, nilai rata-rata pertumbuhannya relatif terlalu tinggi.

3.1.2.2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan Belanja Daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 3.8.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017
(Rupiah)

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	4.650.000.000,00	16.256.108.102,00	9.223.306.332,00	76,23%
- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.650.000.000,00	15.456.108.102,00	7.623.306.332,00	82,59%
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	800.000.000,00	1.600.000.000,00	(1,22%)
- Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sangat besar terjadi pada realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 82,59%. Meskipun pada Tahun Anggran 2017 nilai realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap BUMD relatif berkurang, dan peningkatan secara drastis hanya terjadi pada Tahun Anggaran 2016. Peningkatan drastis tersebut, karena pada Tahun 2016 terdapat Penyertaan Modal Non Kas Kepada PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp.800.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi Di Kabupaten Sumedang dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-83/KR.022/2016 Hal: Penyelesaian Kewajiban Dana Talangan Pemerintah.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan pemerintah daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.9.

Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	**Rasio Likuiditas**					
	Aset Lancar	161.632.454.975,52	210.329.889.003,13	205.518.272.139,87	112.568.711.893,05	113.747.163.575,75
	Persediaan	16.758.383.565,67	18351813351,45	20.182.906.634,97	17.019.457.672,66	22.541.407.993,99
	Kewajiban Jangka Pendek	53.930.882.685,71	58.974.153.537,40	83.570.661.118,41	138.016.018.915,40	126.813.331.098,40
1	Rasio Lancar	3,00	3,57	2,46	0,82	0,90
2	Rasio Quick	2,69	3,26	2,22	0,69	0,72
B	**Rasio Solvabilitas**					
	Total Aset	2.586.424.359.513,79	3.107.278.004.406,45	2.228.850.997.710,41	2.489.847.478.601,45	2.401.866.601.548,11
	Total Hutang	54.274.632.685,71	59.130.403.537,40	85.081.992.639,41	138.016.018.915,40	126.813.331.098,40
	Total Ekuitas	2.532.149.726.828,08	3.048.147.600.869,05	2.143.769.005.071,00	2.351.831.459.686,05	2.275.053.270.449,71
1	DAR	0,0210	0,0190	0,0382	0,0554	0,0528
2	DER	0,0214	0,0194	0,0397	0,0587	0,0557
C	**Rasio Aktivitas**					
	Pendapatan Daerah	1.715.190.458.848,53	2.087.159.777.352,30	2.357.057.542.810,11	2.393.284.649.759,39	2.658.969.231.750,18
	Saldo Awal Piutang	15.822.068.563,00	21.670.605.224,80	35.406.039.774,00	53.039.467.223,00	86.482.147.771,33
	Saldo Akhir Piutang	21.670.605.224,80	35.406.039.774,00	53.039.467.223,00	86.482.147.771,33	62.312.826.198,33
1	Rata-rata Umur Piutang	3,9893	4,9907	6,8481	10,6392	10,2126

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)			481.961.478.189,90	42.781.380.521,00	481.961.478.189,90
	Saldo Awal Persediaan	12.937.113.081,80	16.758.383.565,67	18.351.813.351,45	20.182.906.634,97	17.019.457.672,66
	Saldo Akhir Persediaan	16.758.383.565,67	18.351.813.351,45	20.182.906.634,97	17.019.457.672,66	22.541.407.993,99
2	Rata-rata Umur Persediaan	NA	NA	14,5916	158,7006	14,9802

Sumber : Diolah dari Neraca Daerah dan CaLK Pemerintah Kabupaten Sumedang

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Sumedang cenderung menurun meski masih positif. Mulai Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 kedua rasio tersebut sudah berada di bawah nilai 1. Rasio lancar pada Tahun Anggran 2016 dan Tahun Anggran 2017 hanya sebesar 0,82 dan 0,90, sedangkan rasio cepat (*quick ratio*) pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 hanya sebesar 0,69 dan 0,72. Hal ini menggambarkan kondisi yang perlu diperhatikan karena munculnya kewajiban lancar yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dikhawartirkan akan membebani kas daerah di masa mendatang. Menurunnya kedua rasio dan di bawah nilai 1 menunjukkan adanya tekanan keuangan (*financial distress*) yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan utnuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai jauh di bawah 1%, bahkan di bawah 1 per 1000, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

3.2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1.Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir.

Tabel 3.10.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017
(Rupiah)

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	APBD 2017 (Rp)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.069.922.592.323,00**	**1.216.525.889.648,00**	**1.118.190.996.924,00**
	Belanja Pegawai	1.069.922.592.323,00	1.216.525.889.648,00	1.118.190.996.924,00
B	**Belanja Langsung**	**157.747.579.128,00**	**138.615.574.984,00**	**196.894.641.151,00**
	Honorarium PNS	44.086.932.170,00	35.691.657.500,00	36.604.514.500,00
	Uang Lembur PNS	1.713.296.150,00	1.969.916.500,00	2.009.192.500,00
	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan rumah tangga	53.280.000,00	4.500.000,00	15.660.000,00
	Belanja Premi Asuransi	166.611.912,00	6.253.602.000,00	6.147.334.500,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.230.937.909,00	4.453.969.853,00	4.018.700.845,00
	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Dinas	108.100.000,00	119.200.000,00	166.100.000,00
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.710.891.300,00	80.700.000,00	3.814.650.625,00
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.624.378.372,00	5.893.219.575,00	3.850.973.825,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.664.407.155,00	12.060.836.125,00	13.291.363.235,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	647.384.000,00	1.004.080.300,00	266.084.000,00
	Belanja Pakaian Kerja	1.590.691.023,00	2.166.771.490,00	1.871.951.650,00
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.480.080.450,00	2.597.567.100,00	1.729.700.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.701.129,00	29.754.803.209,00	33.020.703.352,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	419.845.000,00	15.000.000,00	173.750.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.164.502.025,00	241.062.130,00	3.431.477.375,00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	172.388.080,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	6.429.180.850,00	8.856.973.325,00	9.242.222.140,00
	Belanja Jasa Perijinan Kendaraan Dinas	462.888.000,00	560.513.390,00	597.219.600,00

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	APBD 2017 (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas	11.906.134.659,00	1.400.450.000,00	21.575.000,00
	Belanja Modal Peralatan Kantor	436.287.000,00	1.995.941.925,00	3.525.029.400,00
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	5.122.256.595,00	5.864.273.943,00	7.810.143.960,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.998.971.865,00	6.366.059.875,00	58.739.896.898,00
	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.668.567.484,00	417.016.000,00	518.017.036,00
	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor	2.690.979.000,00	10.847.460.744,00	6.028.380.210,00
	Belanja Modal Pengadaan Rumah Dinas	247.887.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.227.670.171.451,00**	**1.355.141.464.632,00**	**1.315.085.638.075,00**

Sumber : Diolah dari LRA, APBD, dan LKPJ Bupati Pemerintah Kabupaten Sumedang

Jika dilihat dari tabel 3.10 di atas, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2015 realisasi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar Rp1.227.670.171.451,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp1.355.141.464.632,00 pada Tahun Anggaran 2016, atau meningkat sebesar 10,38% per tahun. Namun demikian, pada Tahun Anggran 2017, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar (2,96%)menjadi sebesar Rp 1.315.085.638.075,- meski masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2015.

Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.11.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017
(Rupiah)

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	2	3	4	5
A	**Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**	**1.227.670.171.451,00**	**1.355.141.464.632,00**	**1.315.085.638.075,00**
B	**Total Pengeluaran**	**2.357.501.738.495,00**	**2.527.133.859.490,00**	**2.631.753.093.840,00**
1	Total Realisasi Belanja	2.352.851.738.495,00	2.510.877.751.388,00	2.622.529.787.508,00
2	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	4.650.000.000,00	16.256.108.102,00	9.223.306.332,00
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apratur Terhadap Total Pengeluaran (%)	**52,08%**	**53,62%**	**49,97%**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada Tahun Anggaran 2015, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 52,08% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya naik sedikit pada Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar 53,62% dan menurun pada tahun selanjutnya menjadi hanya sebesar 49,97% di Tahun Anggaran 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang mampu melakukan efisiensi realisasi belanja pegawai (belanja langsung), belanja honorarium PNS, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas, maka berkemungkinan besar proporsi realisasi belanja untuk pemenuhan aparatur akan lebih kecil daripada proporsi yang terjadi di tahun 2015 dan 2016, dan tahun 2017.

3.2.2.Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang berasal dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Sumedang adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dan rata-rata pertumbuhan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.9. Sedangkan, perhitungan proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.5 dan tabel 3.13 di atas. Jika dilihat dari tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (lihat tabel 3.5). Namun, pada Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan realisasi, meskipun dimungkinkan akan kembali naik realisasinya pada Tahun Anggaran 2017. Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan dipengaruhi oleh kewajiban penambahan penyertaan modal ke BUMD dan Bank Jabarbanten, dan pembayaran pokok utang dalam negeri. Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 3.12.
Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017

No	Uraian	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
1	2	3	4	5
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**2.357.057.542.810,11**	**2.393.284.649.759,39**	**2.658.969.231.750,18**
	Dikurangi realisasi:			

No	Uraian	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
1	2	3	4	5
2	**Belanja Daerah**	**2.352.851.738.495,00**	**2.510.877.751.388,00**	**2.622.529.787.508,00**
3	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**4.650.000.000,00**	**16.256.108.102,00**	**9.223.306.332,00**
A	**Surplus (Defisit) Riil**	**(444.195.684,89)**	**(133.849.209.730,61)**	**27.216.137.910,18**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan			
	- Penggunaan SiLPA	156.543.702.544,35	156.099.506.859,46	22.520.418.346,85
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan**	**156.543.702.544,35**	**156.099.506.859,46**	**22.520.418.346,85**
A+B	**SILPA**	**156.099.506.859,46**	**22.250.297.128,85**	**49.736.556.257,03**

Sumber : Diolah dari LRA, APBD, dan LKPJ Bupati Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 terjadi surplus riil realisasi anggaran. Meskipun terjadi defisit riil pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Sedangkan, pada Tahun Anggaran 2017 meski terjadi surplus riil realisasi anggaran, saldo penggunaan SiLPA relatif cukup kecil karena dampak adanya defisit riil yang cukup besar pada 2 tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2015 defisit riil sebesar (Rp 444.195.684,89) ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp 156.543.702.544,35 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 156.099.506.856,46. Pada Tahun Anggaran 2016 defisit riil yang terjadi justru bertambah signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2015 yang mencapai sebesar (Rp 133.849.209.730,61) ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp 156.543.702.544,35 sehingga SILPA menjadi hanya tinggal sebesar Rp 22.250.297.128,85 jauh lebih kecil dibandingkan Tahun Anggaran 2015. Terakhir, pada Tahun Anggaran 2017 terjadi realisasi surplus riil sebesar Rp

27.216.137.910,18, sehingga SILPA diperkirakan menjadi naik kembali sebesar Rp 49.736.556.257,03.

Jika dilihat dari komponen dalam Penggunaan SiLPA sebagian besar pembentuk SiLPA adalah hasil sisa belanja tunjangan profesi dan tambahan penghasilan Guru PNSD kecuali pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada realisasinya. Pembentuk SiLPA yang selalu ada realisasinya adalah dari Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Sisa Penghematan Belanja atau yang lainnya. Pelampauan Peneriman Lain-lain sebagian besar berasal dari sisa pengelolaan keuangan dan anggaran entitas BLUD.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disajikan tabel analisis sisa lebih riil perhitungan anggaran tahun berjalan sebagai berikut. Perhitungan sisa lebih riil anggaran diperoleh dari sisa kas daerah pada akhir tahun anggaran dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan. Untuk itu akan diperoleh data sisa anggaran sebenarnya yang dapat digunakan untuk memproyeksi sisa anggaran riil (secara kas) yang dapat digunakan untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah. Perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran dilakukan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017. Untuk menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran tetap mempergunakan angka hasil perhitungan pada Tahun Anggaran 2017. Berikut disajikan perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran.

Tabel 3.13.
Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sumedang dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp
1	Saldo Kas Neraca Daerah	156.171.960.312,46	22.521.812.431,85	47.918.553.075,03
	Kas di Kasda	142.622.877.861,46	8.311.025.640,85	33.626.825.874,03
	Kas di Bendahara Pengeluaran	26.577.619,00	16.753.629,00	38.251.704,00
	Kas di BLUD	3.007.812.975,00	1.277.750.725,00	2.483.965.907,00
	Kas Lainnya	10.514.691.857,00	12.916.282.437,00	11.769.509.590,00
	Dikurangi:			

2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga s.d Akhir Tahun belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00
3	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00
1–(2+3)	**Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran**	**156.171.960.312,46**	**22.521.812.431,85**	**47.918.553.075,03**

Sumber : Diolah dari LRA, Neraca, dan LKPJ Bupati Pemerintah Kabupaten Sumedang

Data pada tabel 3.13 di atas, menunjukkan bahwa saldo kas dalam Neraca Daerah per 31 Desember tidak mencerminkan posisi kas di kasda yang sebenarnya. Jika dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) saldo kas dalam Neraca Daerah terdiri dari kas di kas daerah (kasda), kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLUD, dan kas lainnya. Posisi seharusnya pada akhir tahun, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, tidak ada kas yang ada pada Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran kecuali terkait dengan pengelolaan dana FKTP yang belum disetor. Namun demikian, pada 3 tahun terakhir terlihat bahwa ada sejumlah dana yang masih ada di kas Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran.

Sementara itu, jika dilihat dari data komposisi penggunaan SiLPA tidak ada keterangan yang jelas terkait dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Untuk itu, seluruh saldo kas dalam Neraca Daerah dianggap sebagai sisa kas riil yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung proyeksi kemampuan riil keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan data realisasi SILPA riil sebagaimana pada tabel 3.12 di atas dengan hasil perhitungan sisa lebih riil perhitungan anggaran pada tabel 3.13, maka terdapat selisih, meski cukup kecil, antara SILPA dengan sisa kas riil perhitungan anggaran. Selain itu juga, nilai SILPA tidak berbanding lurus dengan nilai sisa lebih kas riil perhitungan anggaran. Hal ini perlu dilakukan analisis lebih mendalam lagi untuk mencari penyebab dan kejadian transaksi yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat akan menentukan proyeksi sisa lebih

(riil) perhitungan anggaran yang tidak mampu diakomodasi oleh format tabel dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai pengurang dari sisa kas, yaitu adanya sisa kas yang digunakan untuk pemenuhan tunjangan profesi Guru dan tunjangan PNSD lainnya, kas di BLUD, dan kas yang diperuntukkan untuk memenuhi target kegiatan dari DAK tahun sebelumnya. Fenomena tersebut terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga sisa kas yang disajikan dalam Neraca tidak mencerminkan sisa kas yang benar-benar dapat digunakan untuk menunjang program pembangunan di tahun selanjutnya. Oleh karena itu, dengan berdasar pada asas konservatif, maka sisa lebih (kas) riil perhitungan anggaran disepakati dan ditetapkan sebesar Rp0,- selama 5 tahun mendatang.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1.Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 33,32% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Dana Perimbangan relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,15%, meski tingkat pertumbuhan DAK dinilai terlalu optimistik, yaitu rata-rata naik 94,17% per tahun. Begitu juga, pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pertumbuhan pada pos Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Desa perlu mendapatkan perhatian. Rata-rata pertumbuhan pendapatan bagi hasil dari pajak Pemerintah Provinsi sebesar 21,37% dinilai terlalu optimistik. Pertumbuhan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar 82,67% juga terlalu tinggi, apalagi pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan realisasi (negatif) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pos Dana Desa juga meski memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 73,50%, namun pada Tahun Anggran

2017 diperkirakan mengalami peningkatan hanya sebesar 28,25% dari Tahun Anggaran 2016. Implementasi pemberian dana desa masih 3 tahun anggaran, yaitu dimulai Tahun Anggaran 2015 sehingga angka peningkatan tersebut tidak dapat dijadikan patokan yang pasti pada tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan beberapa kali FGD dengan OPD terkait agar angka pertumbuhan yang akan menentukan proyeksi pendapatan mendapat pertimbangan yang mendalam dan komprehensif, sehingga proyeksi yang dihasilkan dapat lebih mendekati dengan fakta di lapangan. Sebagai bahan pertimbangan awal, penyesuaian yang dilakukan dengan mengakui angka rata-rata pertumbuhan jauh di bawah hasil perhitungan pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas, yaitu ditetapkan sebesar 10% dari pertumbuhan yang ada. Proyeksi setiap obyek pendapatan dapat juga tidak mengikuti angka pertumbuhan yang ditetapkan, melainkan juga dapat berupa angka proyeksi tertentu hasil dari pembahasan dan kesepakatan dengan OPD terkait tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam FGD akan dibahas dan dikaji secara mendalam sehingga penentuan proyeksi akan lebih rasional dan logis.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tahun dasar menggunakan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017. Pada beberapa pos pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp0,- meskipun jika dilihat perkembangannya dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi penerimaan pada pos-pos tersebut. Pos-pos tersebut antara lain: dana penyesuaian dan pendapatan hibah. Pada saat RPJMD ini disusun telah berjalan anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan APBD

Tahun Anggaran 2019 telah tersusun, yang merupakan bagian dari tahun proyeksi dalam kerangka pendanaan RPJMD ini.

Oleh karena itu, khusus untuk proyeksi Tahun Anggaran 2018 perlu mempertimbangkan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Untuk menentukan proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2018, tidak dengan mengkalikan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, angka target pendapatan daerah yang ada dalam APBD Perubahan TA. 2018 menjadi angka proyeksi realisasi pendapatan daerah di Tahun Anggaran 2018. Alasannya, adalah pada saat penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 informasi terkait dengan realisasi setiap objek pendapatan daerah dapat diidentifikasi dan diperkirakan.

Proyeksi target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 dicantumkan dengan angka target pendapatan daerah yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan proyeksi sebelumnya, angka target pendapatan daerah yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2019 masih cukup konservatif, sehingga masih relevan untuk dijadikan dasar dalam menyusun proyeksi realisasi pendapatan daerah di Tahun Anggaran 2019. Namun demikian, beberapa obyek pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian sesuai dengan data historis dan kondisi yang mempengaruhi realisasinya. Baru kemudian, pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan.

Sedangkan sesuai dengan hasil FGD dengan OPD terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, seperti Bapppeda, BPKAD, Inspektorat, dan Badan Pendapatan Daerah, diperoleh kesepakatan bahwa perlu adanya penentuan angka pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mendatang yang lebih optimistik. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan akan adanya sejumlah potensi dan peluang yang dapat diidentifikasi dapat meningkatkan realisasi

penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk menunjang program pembangunan daerah. Misalnya, adanya proyek pembangunan tol di wilayah Kabupaten Sumedang dan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, rencana kenaikan NJOP yang akan berdampak pada peningkatan realisasi PBB Perkotaan dan Pedesaaan serta BPHTB, dan sejumlah potensi realisasi PAD dari sektor parkir, rumah makan, dan perhotelan, serta akan adanya perubahan tarif.

Keputusan untuk menetapkan angka pertumbuhan pajak dan retribusi daerah yang lebih optimistik harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan dan masuk dalam isu strategis daerah agar upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat tercapai. Angka pertumbuhan yang ditetapkan untuk realisasi pajak daerah adalah sebesar 15% per tahun, dan retribusi daerah sebesar 6% per tahun. Begitu juga dengan pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain - Lain PAD yang Sah ditetapkan tumbuh sebesar 3% dan 5%.

Pada Dana Perimbangan, hanya pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan cukup konservatif, yaitu sebesar 0,25%. Sedangkan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus lebih optimistik yaitu sebesar 1,5% dan 9,42%. Penetapan tersebut didasarkan pada perkembangan terakhir bahwa Dana Alokasi Umum diperkirakan akan ada kenaikan karena adanya kebijakan peningkatan Dana Kelurahan dan kenaikan Belanja Pegawai pada BTL. Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pada beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperoleh alokasi DAK yang cukup besar.

Pendapatan Hibah ditentukan berdasarkan alokasi perolehan hibah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang telah dituangkan dalam kebijakan penyertaan modal kepada PDAM, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM. Dana Desa juga ditetapkan sama dengan alokasi Dana Desa dalam Rancangan APBD Tahun 2019 sebesar Rp218.940.543.000 sampai dengan tahun 2023 dikarenakan saat ini setiap desa sudah

mendapatkan Dana Desa rata-rata Rp 1 Miliyar. Untuk itu, diperkirakan Dana Desa sangat kecil penambahannya. Perbedaan dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah ditetapkannya anggaran untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi yang selama 5 tahun terakhir paling sedikit menerima sebesar Rp 32 Miliyar dan paling tinggi sebesar Rp 132 Miliyar, sehingga pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 50 Miliyar per tahun sampai dengan tahun 2023. Tambahan target pendapatan daerah adalah dengan ditetapkannya target Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat berupa DID sebesar Rp 49.222.417.000,- di Tahun Anggaran 2019 dan akan dialokasikan sebesar Rp 25 Milyar setiap tahunnya mulai dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Target DID tersebut diperoleh sebagai hasil dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mencapai opini WTP dan APBD tepat waktu selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah daerah disajikan dalam tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3.14.

Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Sumedang selama 6 Tahun Mendatang dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2017)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
			2018 (Rp)	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENDAPATAN								
Pendapatan Asli Daerah	**553.283.177.791,18**	**12,34**	**464.589.060.592,00**	**535.215.807.457,00**	**582.556.794.774,78**	**654.249.377.891,68**	**736.219.205.213,03**	**830.107.806.365,81**
Pajak Daerah	157.256.500.230,00	18,00%	181.875.296.261,00	235.250.400.000,00	253.243.162.513,82	298.826.931.766,30	352.615.779.484,24	416.086.619.791,40
Retribusi Daerah	11.985.080.540,00	7,00%	11.984.717.897,00	12.427.169.157,00	13.721.303.520,28	14.681.794.766,69	15.709.520.400,36	16.809.186.828,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.846.040.130,00	7,00%	8.652.605.578,00	9.977.870.000,00	9.906.368.126,25	10.599.813.895,09	11.341.800.867,75	12.135.726.928,49
Lain - Lain PAD yang Sah	376.195.556.891,18	8,00%	262.076.440.856,00	277.560.368.300,00	305.685.960.614,44	330.140.837.463,59	356.552.104.460,68	385.076.272.817,54
Dana Perimbangan	**1.594.548.731.778,00**	**3,68**	**1.681.019.771.000,00**	**1.801.479.081.220,00**	**1.861.683.682.032,01**	**1.926.463.438.514,74**	**1.996.238.258.932,20**	**2.071.467.485.812,91**
Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak	95.607.165.916,00	1,00%	139.674.914.000,00	126.398.316.220,00	127.662.299.382,20	128.938.922.376,02	130.228.311.599,78	131.530.594.715,78
Dana Alokasi Umum	1.119.198.604.000,00	1,00%	1.125.798.410.000,00	1.173.848.992.000,00	1.185.587.481.920,00	1.197.443.356.739,20	1.209.417.790.306,59	1.221.511.968.209,66
Dana Alokasi Khusus	379.742.961.862,00	9,42%	415.546.447.000,00	501.231.773.000,00	548.433.900.729,81	600.081.159.399,52	656.592.157.025,83	718.424.922.887,47
Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	**511.137.322.181,00**	**6,05**	**454.106.992.091,00**	**805.651.395.460,00**	**834.076.148.512,64**	**864.126.013.801,38**	**895.906.559.558,91**	**929.530.606.008,05**

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2017)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
			2018 (Rp)	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hibah	34.473.960.000,00	21,52%	-	116.508.779.315,00	116.508.779.315,00	116.508.779.315,00	116.508.779.315,00	116.508.779.315,00
Dana Darurat	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Darah Lainnya	122.309.363.299,00	5,00%	136.612.935.891,00	130.418.436.645,00	136.939.358.477,25	143.786.326.401,11	150.975.642.721,17	158.524.424.857,23
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Dana Desa	217.268.983.000,00	7,35%	192.462.069.000,00	218.940.543.000,00	235.033.149.830,39	252.308.598.317,46	270.853.829.899,58	290.762.176.400,21
Bantuan Keuangan Provinsi	137.085.015.882,00	8,27%	100.031.987.200,00	290.561.219.500,00	296.372.443.890,00	302.299.892.767,80	308.345.890.623,16	314.512.808.435,62
Bantuan Keuangan Pusat	0	0,00%	25.000.000.000,00	49.222.417.000,00	49.222.417.000,00	49.222.417.000,00	49.222.417.000,00	49.222.417.000,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**2.658.969.231.750,18**		**2.599.715.823.683,00**	**3.142.346.284.137,00**	**3.278.316.625.319,43**	**3.444.838.830.207,80**	**3.628.364.023.704,14**	**3.831.105.898.186,77**
Penerimaan Pembiayaan								
- Penggunaan SiLPA	22.520.418.346,85	(0,83%)	49.736.556.257,03	60.578.116.171,00	130.563.210.085	25.147.209.618		
- Pencairan Dana Cadangan	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
- Pinjaman Dalam Negeri	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
- Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
- Penerimaan Piutang Daerah	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2017)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
			2018 (Rp)	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**22.520.418.346,85**		**49.736.556.257,03**	**60.578.116.171,00**	**130.563.210.085,21**	**25.147.209.618,20**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	**2.681.489.650.097,03**		**2.649.452.379.940,03**	**3.202.924.400.308,00**	**3.408.879.835.404,65**	**3.469.986.039.826,00**	**3.628.364.023.704,14**	**3.831.105.898.186,77**

Sumber : Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasai pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

Tabel 3.15.
Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
A	Total Belanja Tidak Langsung	1.210.951.375.087,00	1.532.719.773.343,00	1.515.408.909.024,00	9,11%
B	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	4.650.000.000,00	16.256.108.102,00	9.223.306.332,00	76,23%
	Jumlah	**1.215.601.375.087,00**	**1.548.975.881.445,00**	**1.524.632.215.356,00**	**9,27%**

Sumber : Diolah dari LRA Bupati Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.15 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap

tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran maka, data yang ada menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar tiap tahunnya. Misalnya, pertumbuhan belanja tidak langsung dipengaruhi oleh belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Selain belanja hibah, dua belanja lainnya relatif menunjukkan grafik peningkatan (lihat tabel 3.7 di atas). Sama halnya tinggi pertumbuhan per tahun pengeluaran pembiayaan disebabkan karena adanya penyertaan modal kepada BUMD yang terbesar terjadi pada Tahun Anggaran 2016 dan pembayaran pokok utang dalam negeri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi Tahun 2018 perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung Tahun 2018, tidak dengan mengkalikan realisasi belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2017 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, ditentukan dengan cara mencari proyeksi realisasi belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2018 dengan mengkalikan rata-rata persentase realisasi per pos belanja tidak langsung selama 3 tahun terakhir dengan anggaran belanja tidak langsung yang ada dalam APBD Perubahan TA. 2018. Sama halnya dengan proyeksi pada pendapatan daerah, untuk proyeksi Tahun Anggaran 2019 menggunakan apa yang telah ditetapkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi dan belum diakomodir dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, misalnya peningkatan Belanja Pegawai pada BTL dampak adanya penerimaan CPNS Tahun 2018 ini, serta adanya penyertaan modal yang belum dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun 2019 namun sudah ada dalam Perda penyertaan modal.

Baru kemudian, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Sedangkan, proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan

yang terdiri dari penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang, dianggarkan berdasarkan kewajiban penyertaan modal daerah sesuai dengan Perda penyertaan modal yang berlaku. Untuk pembayaran pokok utang dianggarkan terakhir pada tahun 2019 dan selanjutnya sudah tidak ada.

Sedangkan, beberapa pos pengeluaran seperti Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah, memiliki kebijakan dan arah penentuan yang khusus sehingga tidak mengikuti asumsi angka petumbuhan yang telah ditentukan. Misalnya, untuk realisasi Belanja Hibah ditetapkan sebesar Rp 55.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2018 dan kemudian hanya Rp 12.974.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2019. Pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 16.000.000.000,00 dengan peningkatan selanjutnya sebesar angka pertumbuhan. Namun pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, besaran anggaran belanja hibah sama dengan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 karena alokasi Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 banyak ditujukan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada.

Begitu juga dengan kebijakan alokasi Belanja Bantuan Sosial disepakati sama dengan proyeksi anggaran Tahun Anggaran 2019 karena diharapkan sudah tidak ada peningkatan alokasi lagi untuk Belanja Bantuan Sosial ini. Selain itu juga, alokasi Belanja Bagi Hasil untuk Pemerintah Desa diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah di masa mendatang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu sebesar 15%. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa dana ADD juga diperkirakan meningkat seiring peningkatan DAU akibat adanya dana anggaran untuk kelurahan. Belanja Tidak Terduga juga dianggarkan sama dengan Tahun Anggaran 2019 karena ada kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana taktis bencana alam dan pengembalian atas sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.16 di bawah.

Tabel 3.16.

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2023

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2017)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
			2018 (Rp)	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Tidak Langsung	**1.515.408.909.024,00**		**1.573.757.685.620,57**	**1.755.219.631.997,40**	**1.794.447.312.510,65**	**1.828.190.263.405,00**	**1.954.296.314.565,14**	**2.138.459.160.211,42**
Belanja Pegawai	1.118.190.996.924,00	0,69%	1.177.003.176.168,89	1.338.422.488.394,40	1.347.657.603.564,32	1.356.956.441.028,92	1.417.154.267.194,59	1.530.345.764.244,24
Belanja Bunga	0	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	35.249.088.900,00	4,25%	55.342.917.385,32	33.398.800.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.491.098.000,00	-2,73%	2.236.647.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	346.248.239.700,00	9,49%	320.859.891.211,35	355.359.689.603,00	389.083.324.146,33	412.926.160.616,08	452.112.853.258,55	495.018.363.032,78
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	14.229.485.500,00	20,00%	18.315.053.855,01	23.338.654.000,00	28.006.384.800,00	33.607.661.760,00	40.329.194.112,00	48.395.032.934,40
Belanja Tidak Terduga	0	0,00%	0	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
Total Pengeluaran Pembiayaan	**9.223.306.332,00**		**11.677.554.781,40**	**54.356.739.318,60**	**23.548.486.381,00**	**15.668.513.097,00**	**11.334.222.026,00**	**10.496.506.353,35**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.623.306.332,00	8,26%	10.946.739.610,00	10.215.924.438,60	23.548.486.381,00	15.668.513.097,00	11.334.222.026,00	10.496.506.353,35

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2017)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
			2018 (Rp)	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembay aran Pokok Hutang	1.600.000.000,00	-1,22%	730.815.171,40	44.140.814.880,00	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	**1.524.632.215.356,00**		**1.585.435.240.401,97**	**1.809.576.371.316,00**	**1.817.995.798.891,65**	**1.843.858.776.502,00**	**1.965.630.536.591,14**	**2.148.955.666.564,77**

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang

Dari tabel 3.16 di atas, penyesuaian angka pertumbuhan yang digunakan dilakukan dengan mengkalikan angka rata-rata pertumbuhan pada tabel 3.7 dan tabel 3.8. Sedangkan, untuk belanja tidak terduga diasumsikan tetap dianggarkan dengan pertumbuhan 0%. Hasil perhitungan proyeksi di atas menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp 1.585.435.240.401,97 dan cenderung meningkat terus sampai dengan Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 2.148.955.666.564,77.

3.3.2.Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir Tahun 2023, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel 3.5 di atas ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel 3.15 di atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 6 tahun mendatang, termasuk proyeksi Tahun Anggaran 2018 sebagai tahun berjalan penyusunan RPJMD diluar tahun perencanaan.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.17 berikuts

Tabel 3.17

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

No	Uraian					
		2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	3.142.346.284.137,00	3.278.316.625.319,43	3.444.838.830.207,80	3.628.364.023.704,14	3.831.105.898.186,77
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	60.578.116.171,00	130.563.210.085,21	25.147.209.618,20	-	-
	Total Penerimaan	**3.202.924.400.308,00**	**3.408.879.835.404,65**	**3.469.986.039.826,00**	**3.628.364.023.704,14**	**3.831.105.898.186,77**
	Dikurangi:					
1	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.809.576.371.316,00	1.817.995.798.891,65	1.843.858.776.502,00	1.965.630.536.591,14	2.148.955.666.564,77
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.393.348.028.992,00**	**1.590.884.036.513,00**	**1.626.127.263.324,00**	**1.662.733.487.113,00**	**1.682.150.231.622,00**

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tabel diatas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumedang meski cukup tinggi tapi jika dibandingkan dengan kapasitas riil Tahun Anggaran 2017 tidak lebih baik karena baru bisa menyamai pada Tahun Anggaran 2023. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumedang selama 5 tahun ke depan pada kisaran Rp 1.393 Milyar sampai dengan Rp 1.682 Miliar. Hal ini akan terwujud apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang mampu menjaga efisiensi penganggaran daerah dan menjaga ketercapaian pendapatan daerah. Perbaikan tata kelola keuangan menjadi hal yang wajib harus dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian keuangan dengan munculnya kewajiban-kewajiban dan perkiraan keuangan dan anggaran di kemudian hari. Peningkatan pendapatan daerah selama 5 tahun mendatang ternyata diikuti dengan kenaikan Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat yang cukup signifikan dengan adanya kenaikan pada alokasi Belanja Pegawai (BTL), Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Penyertaan Modal. Kenaikan tersebut menyebabkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tidak lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu.

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatangkan yang akan dirumuskan dalam RPJMD ini. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat;
b. Prioritas II adalah untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir

c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, APBDes, Pinjaman Bank, KPBU/PPP, Swasta.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Sumedang selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/Kota.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Kabupaten Sumedang selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi Jawa barat diarahkan untuk pendanaan infrastruktur serta program prioritas lainya yang selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan dari APBD Propinsi Jawa Barat, dapat dilaksanakan melalui Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang tempatnya di kabupaten/kota dan mendukung pencapaian Visi Misi Bupati/Walikota.

c. Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pendanaan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan daerah yang bersinergi dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Program Pembangunan dimaksud meliputi bidang :

1. Sosial
2. Lingkungan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Ekonomi
6. Infrastuktur dan Sanitasi Lingkungan
7. Sarana dan Prasarana Keagamaan
8. Program Pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

d. Sinergitas APBDes

Keterbatasan Sumber Pendanaan dan Pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sumdang dalam pelaksanaan dapat disinergikan melalui pembiayaan dari APBDes sehingga diperlukan sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten dapat bersinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Desa sehingga antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

e. Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan

Dalam pelaksanaan pembangunan pinjaman bank berupa pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, bahwa Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi prasarana dan atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah.

f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka

waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.

5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri atas:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa Keuntungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*).
2. Menjamin kualitas pelayanan karena *performance* diperjanjikan dalam kontrak.
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability*

Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU Ekonomi maupun Sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri **kelompok pertama** 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), **kelompok kedua** 7 (tujuh) jesnis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan **kelompok ketiga** 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan

budaya, kawasan/*technopark*, kesehatan).

g. Kerjasama Pemerintah dengan Perguruan Tinggi/Akademisi

Pada konsep pembangunan model Pentahelix akademisi berperan sebagai konseptor. Pembangunan Kabupaten Sumedang memerlukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan teknologi. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dinamika perkembangan zaman. Kabupaten Sumedang

Melalui keberadaan beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang, diharapkan lebih memudahkan kolaborasi pembagunan antara Pemerintah Daerah dan Institusi Perguruan Tinggi. Penerapan tridharma perguruan tinggi terutama Penelitian dan Pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat diharapkan lebih banyak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. dan pada berbagai urusan daerah.

h. Kerjasama Pemerintah dengan Media

Jenis hubungan antara Pemerintah Daerah dan media adalah dalam kerangka koordinasi. Melalui saling berbagi sumber daya yang minimal namun hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan media tetap bersifat resmi dengan komitmen waktu sedang. Salah satu peran media pada pembangunan daerah adalah publikasi dengan memberikan informasi program kepala daerah, capaian pembangunan, kendala dan tantangan pembangunan.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II tentang kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap capaian kinerja pelayanan pemerintah di seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan, dapat diketahui masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi pada pembangunan periode Tahun 2018-2023

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/*gap* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Untuk itu, dari data yang sudah digambarkan pada Bab II akan dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang yang dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada urusan penyelenggaran pemerintah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan. Adapun masing-masing identifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan adalah pada sebagai berikut :

4.1.1. Idenfifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan maupun masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terkendala minimnya kualitas pelayanan dasar baik pelayanannya, infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dan SDM-nya. Rendahnya pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini diakibatkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran	• Angka kemiskinan 9,76% pada Tahun 2018 masih sangat tinggi dibandingkan dengan target SDG's (0%); • Indeks Gini menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi selama 5 Tahun terakhir (Tahun 2013 sebesar 0,37 meningkat menjadi 0,42 di Tahun 2018); • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurun.	• Akses pelayanan dasar (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) masih terbatas dan belum merata; • Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam; • Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah; • Kebijakan yang belum menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*; • Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha, bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan).
2	Kualitas Infrastruktur Dasar	• Kualitas jalan dan jembatan masih rendah; • Kualitas infrastruktur perhubungan masih rendah; • Kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukungnya masih rendah.	• Penentuan prioritas kebutuhan layanan infrastruktur dasar tidak memadai (data dan informasi sebagai landasan pembuatan kebijakan sangat kurang); • Perencanaan kurang terkoordinasi.
3.	Indeks Pembangunan Manusia	• Capaian IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat;	• Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan dasar;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		• Angka Harapan Hidup masih dibawah capaian provinsi; • Rata-rata lama sekolah masih masih dibawah capaian provinsi; • Harapan Lama sekolah masih dibawah standar UNDP; • Pengeluaran per kapita masih dapat ditingkatkan seiring dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi;	• Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; • Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas.
3.	Struktur Perekonomian	• Masih Rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB; • Kontribusi sektor swasta masih rendah (minat investasi rendah); • Pertumbuhan sektor industri belum berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat. • Capaian PDRB Kabupaten Sumedang masih rendah (peringkat 16 dari total 27 kabupaten kota di Jabar Tahun 2015);	• Belum ada sistem yang menyediakan akses permodalan dan pemasaran produk lokal; • Pemanfaatan SDA lokal belum optimal; • Belum terdorongnya produk-produk unggulan sebagai penciptaan peningkatan ekonomi rakyat masyarakat Kabupaten Sumedang. • Pertumbuhan nilai tambah pada sektor pertanian masih rendah.
4.	Rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah	• Manajemen pemerintahan yang kurang baik; • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah (survei Unpad 2015).	• Profesionalisme aparatur masih rendah dengan beban yang ada; • Prosedur kerja sesuai standar pelayanan yang baik masih belum tersedia; • Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai.

Sumber : FGD RPJMD

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Tabel 4.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1. Kesadaran warga didik akan pentingnya mengenyam pendidikan masih rendah di jenjang SMP; 2. Ada peserta didik yang bersekolah di luar Kabupaten Sumedang;	Melakukan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan pengawasan dan bantuan terhadap peserta didik yang berpotensi rawan tidak sekolah;
		Rasio Guru Terhadap Murid	1. Pemerataan guru Khususnya PNS masih belum merata; 2. Masih terdapat guru PNS yang belum memiliki ijazah S1;	1. Perlu adanya penyebaran guru honorer maupun PNS ke titik yang masih kekurangan guru; 2. Melakukan bantuan pendidikan lanjutan untuk guru SD-SMP
		Sekolah Kondisi Bangunan Baik (%)	1. Belum meratanya ruang Lab IPA di jenjang SD-SMP; 2. Belum meratanya Lab Komputer di jenjang SD-SMP	Membangun Lab IPA dan Lab Komputer di jenjang SD-SMP;

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		APK PAUD Sederajat	1. Masih kurangnya standar pelayanan pendidikan tingkat Usia Dini; 2.Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan tingkat usia dini;	1. Melakukan pembinaan standar pendidikan pada jenjang PAUD; 2. Melakukan sosialisasi pendidikan jenjang PAUD untuk wilayah (kecamatan) yang APK dan APM Paud nya rendah;
		Angka Kelulusan	Syarat ujian menggunakan komputer saat ini (UNBK) menimbulkan masalah karena sebagian besar sekolah belum memiliki perangkat komputer untuk mendukung penyelenggaraan UNBK	Penyediaan perangkat komputer untuk menunjang penyelenggaraan UNBK
		Angka Melanjutkan	1. Masih terdapat persoalan ekonomi di masyarakat yang mengakibatkan lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dan memilih bekerja; 2. Adanya pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif sehingga mempengaruhi para lulusan SMP untuk memilih tidak melanjutkan sekolah.	1. Melakukan langkah persuasif kepada peserta didik dan orangtua untuk mengurangi siswa-siswi yang tidak melanjutkan; 2. Mengoptimalkan pembinaan kepada peserta didik dengan menyertakan unsur polisi, tokoh agama dan orangtua.
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/DIV	Melakukan bantuan pendidikan lanjutan untuk guru baik dari Pemerintah

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Persentase Guru yang Bersertifikasi	Masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1 berdampak pada kurangnya jumlah guru yang bersertifikat pendidik;	maupun Swasta (CSR);
2	Kesehatan	Rumah Sakit	1. Jumlah Nakes di RS Kurang; 2. Jumlah Sarpras (alkes) masih kurang untuk meningkatkan status RS Tipe B ke RS Tipe B Pendidikan; 3. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM Nakes;	1. Penambahan tenaga kesehatan ; 2. Pengajuan kenaikan status RS Tipe B ke Tipe B Pendidikan;
		Persentase Balita Gizi Buruk	Kurangnya pendamping makanan tambahan ASI	Tersedianya bantuan MP ASI;
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan)	1. Belum adanya sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu sehingga adanya keterlambatan penanganan pasien 2. Masih terdapat Kasus Komplikasi yang lahir di rumah sakit sumedang dari penduduk diluar kabupaten sumedang yang terlaporkan; 3. 3. Penanganan ibu hamil dan	Pelatihan penanganan Kegawatdaruratan neonatal (Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus)

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			melahirkan di puskesmas belum sesuai standar karena SDM belum terlatih penanganan kegawatdaruratan neonatal;	
		Desa Siaga Aktif (%)	Desa siaga sudah terbentuk, namun belum melakukan pertemuan rutin 3 bulanan;	1. Aktifasi kelompok kerja operasional desa siaga tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan; 2. Pendampingan, implementasi desa siaga aktif melalui bok puskesmas dan dana desa;
		Rasio Puskesmas Per Satuan penduduk	Kurangnya jumlah puskesmas;	Peningkatan status puseksmas pembantu menjadi puskesmas
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Kurangnya jumlah rumah sakit;	1. Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan dan mampu PONED; 2. Seleksi calon investor rumah sakit pratama
		1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Rasio Bidan per 10.000 penduduk	1. Tidak ada pengangkatan PNS Nakes, PTT Nakes, maupun TKD Nakes; 2. Kurang diminatinya praktek dokter di Sumedang	1. Mengadakan perekrutan Nakes dengan pola PPKBLUD; 2. Pengajuan PNS Nakes dan PTT ke Pusat dan Provinsi
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Adanya kehamilan di usia muda (dibawah umur) sehingga terjadi peningkatan komplikasi kebidanan	Optimalisasi kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan (Pembinaan Kesehatan Remaja)

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Masih terdapat wilayah endemis DBD yang berpotensi Kejadian Luar Biasa;	Pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin oleh jumantik;
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	Belum adanya sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu sehingga adanya keterlambatan penanganan pasien	1. Dibuat MoU dengan seluruh rumah sakit di dalam maupun perbatasan untuk melaksanakan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); 2. Pengadaan sistem aplikasi SPGDT; 3. Pengadaan Sarana Prasarana pendukung;
		Jumlah Puskesmas	Belum adanya dukungan regulasi untuk peningkatan pustu menjadi puskesmas;	Penyusunan regulasi peningkatan status puskesmas
		Jumlah Puskesmas Pembantu	Masih kekurangan tenaga nakes dan dukungan alkes untuk memperluas jangkauan pelayanan pustu	1. Mengadakan perekrutan Nakes dengan pola PPKBLUD; 2. Pengajuan PNS Nakes dan PTT ke Pusat dan Provinsi

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 2. Ruas Jalan yang dibangun/ditingkatkan 3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) 4. Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	Permasalahan bidang Bina Marga: 1. Masih rendahnya kondisi jalan yang baik; 2. Masih rendahnya standar jalan yang dibangun oleh Pemerintah; 3. Adanya dampak pembangunan proyek Waduk dan Tol yang mengurangi ruas jalan dan jembatan yang ada di sekitarnya; 4. Banyaknya lebar jembatan yang masih di bawah standar;	1. Peningkatan kualitas jalan dengan kondisi rusak; 2. Peningkatan kualitas lebar dan jenis perkerasan jalan; 3. Penambahan ruas jalan dan jembatan di sekitar wilayah terdampak proyek pembangunan Waduk dan Tol; 4. Peningkatan lebar jembatan sesuai dengan standar kebinamargaan;
		Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Permasalahan bidang Sumber Daya Air 1. Adanya perubahan kebijakan tata ruang yang akan berdampak pada perubahan kebutuhan jaringan irigasi; 2. Masih banyaknya bantaran sungai yang belum direhabilitasi; 3. Belum adanya GIS irigasi di setiap kecamatan	1. Peningkatan pembangunan jaringan irigasi; 2. Peningkatan rehabilitas bantaran sungai; 3. Penyusunan GIS irigasi di setiap kecamatan;

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR	Permasalahan bidang Tata Ruang 1. Cakupan RTH belum terpenuhi 2. Adanya dampak pembangunan proyek Waduk dan Tol sehingga menuntut adanya perubahan fungsi lahan; 3. Belum adanya perda yang membagi wilayah perkotaan dan perdesaan; 4. Masih minimnya data penunjang penyusunan RDTR;	1. Peningkatan jumlah RTH dalam kota; 2. Perubahan regulasi tata ruang; 3. Perubahan dan penyusunan peta dasar; 4. Penyusunan perda pembagian wilayah perkotaan dan perdesaan; 5. Penyediaan data penunjang penyusunan RDTR;
		Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang terverfikasi	Belum tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi sehingga terjadi permasalahan dalam seleksi penyedia jasa konstruksi;	Pembuatan sistem informasi Jasa Konstruksi
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah tangga bersanitasi	1. Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat; 2. Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes); 3. Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal belum tersedia sehingga saat ini	1. Menyediakan sarpras sanitasi; 2. Menyediakan tanah untuk sanitasi komunal;

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			septitank masih dibuang ke sungai;	
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah pegawai Petugas Damkar masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk	Penambahan personil Petugas Damkar
6	Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penyandang cacat fisik dan mental dan Lansia, yang menerima bantuan (rumah sosial, bantuan sosial) masih minim.	1. Masih tingginya jumlah PMKS dan munculnya PMKS baru; 2. belum adanya regulasi daerah tentang penanganan PMKS (penangan ODGJ, orang terlantar, korban bencana, kaum minoritas); 3. Belum sinkronnya data penerima bantuan program pusat dengan data kabupaten/kota	1. Melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial; 2. Penyusunan perda/perbup; 3. verifikasi data secara rutin.
URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR				
7	Tenaga Kerja	Masih tingginya angkatan kerja pencari kerja	1. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan umlah pencari kerja; 2. kompetensi calon tenaga kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja; 3. pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan	1. kerjasama dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja Kab Sumedang dan sosialisasi Perpres No 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan dan meningkatkan pendataan perusahaan; 2. pelaksanaan jobfair serta

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			kartu kuning (yang sudah bekerja tidak melapor kembali ke disnaker); 4. Wajib lapor dari pihak perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan pekerja/buruh. 5. Laporan rutin tentang keadaan jumlah pekerja/buruh dari perusahaan belum dilaksanakan sepenuhnya.	meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan; 3. Peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan kartu kuning; 4. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesaui formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lemabaga lainnya.Wajib lapor baik data pekerja/buruh baik penerima pekerjaan dan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan 5. Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai upaya munculnya kemandirian dalam berwirausaha.

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di bidang sosial, dan ekonomi
		Rasio KDRT	masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; 2. pemenuhan hak anak 3. peningkatan pelayanan korban tindak kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi
		Persentase Perempuan sebagai Kepala Keluarga	Masih banyaknya perempuan sebagai kepala keluarga yang belum diberdayakan	Peningkatan pemberdayaan Perempuan Ketahanan Keluarga
9	Lingkungan Hidup	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Masih rendahnya cakupan ketersediaan TPS	1. Perluasan TPS (seiring kenaikan penduduk); 2. Penyerahan TPS dari KemenPUPR sehingga pada Tahun 2017 naik

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 2. Rasio bayi berakte kelahiran 3. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	1. Minimnya alat dan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP elektronik; 2. Ketersediaan blanko KTP El tidak kontinyu karena mengikuti blanko yang disediakan kementerian (Ditjen Adminduk); 3. Perlakuan masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan masih sangat rendah; 4. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan pencetakan akte kelahiran; 5. Program/kegiatan percepatan kepemilikan akte kelahiran baru membidik target 0-18 th (bayi dan usia sekolah); 6. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran bagi usia lebih dari 38 Tahun keatas masih rendah.	1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP elektronik; 2. Perlunya sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang pemahaman pentingnya dokumen kependudukan; 3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pencetakan akte kelahiran; 4. Percepatan kepemilikan akte kelahiran untuk usia lebih dari 18 Tahun; 5. Sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang pemahaman pentingnya dokumen kependudukan.
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	1. Belum optimalnya pembinaan terhadap seluruh LPM di Kabupaten	Perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		pemberdayaan masyarakat (LPM)	Sumedang oleh Dinas PMD setiap Tahunnya. Jumlah eksisting LPM sampai Tahun 2018 sebanyak 277 unit 2. Kurangnya koodinasi pembinaan pembinaan LPM antara yang dilaksanakan Desa dan Dinas PMD	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Lemahnya koordinasi dan mekanisme operasional pembinaan PKK antara Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dinas PMD	Perlu disusunnya standar operasional prosedur proses pembinaan PKK (Tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa) untuk pelaksanaan mekanisme kerja
		LPM Berprestasi	Belum adanya standar/kriteria penetuan LPM berprestasi	1. Konsultasi dan pengkajian standar LPM Berprestasi 2. Penyelenggaraan penilaian LPM Berprestasi tingkat Kabupaten
		Posyandu aktif	1. Masih perlu dioptimalkannya kelembagaan posyandu 2. Belum optimalnya koordinasi dengan stakholder terkait untuk lebih mengotimalkan fungsi posyandu	1. Tetap mempertahankan pembinaan terhadap kelembagaan posyandu 2. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberdayakan posyandu secara optimal
		Tingkat swadaya masyarakat terhadap	masih belum berperan aktifnya kader2 pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pembinaan terhadap kader-kader pemberdayaan masyarakat (agen

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		pembangunan	untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	baru)
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	masih kurangnya pemeliharaan dan pengawasan pasca pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat (PNPM Pedesaan dan PNPM generasi)	Perlu dipertahankannya keberlanjutan pemeliharaan dan pengawasan pasca pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat (PNPM Pedesaan dan PNPM generasi)
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan mekanisme operasional pembinaan PKK antara Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dinas PMD	Perlu disusunnya standar operasional prosedur proses pembinaan PKK (Tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa) untuk pelaksanaan mekanisme kerja
		Cakupan pembinaan lembaga Bumdes	Masih belum optimalnya potensi seluruh Bumdes yang sudah terbentuk untuk menggerakan perekonomian masyarakat desa Masih adanya desa yang belum memiliki Bumdes	1. Perlunya pembinaan Bumdes (lembaga, sarana, SDM, tata kelola, fasiltasi kemitraan) untuk menggerakan perekonomian desa 2. Memfasilitasi dan mengedukasi desa untuk membentuk Bumdes
		Cakupan pembinaan lembaga Adat	Belum optimalnya tata kelola lembaga adat untuk mempertahankan adat kebudayaan desa	Perlunya pembinaan tata kelola kelembagaan adat desa

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Jumlah pemasyarakatan TTG	Belum optimalnya penggunaan TTG oleh masyarakat Desa	1. Perlunya koordinasi dengan PD, Perguruan Tinggi, Perusahaan dan stakholder lainnya mengenai jenis TTG yang telah diberikan ke masyarakat 2. Pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan TTG yang telah diterima secara berkelanjutan Penyebarluasan informasi inovasi TTG
		Jumlah pengelola SDA desa	Belumnya optimalnya pemanfaatan potensi SDA desa	Perlunya penguatan kelembagaan masyarakat desa untuk mengelola SDA
		Jumlah desa yang memiliki administrasi Pemdes sesuai aturan	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan desa –desa di Kabupaten Sumedang dalam hal berikut : 1. Ketertiban administrasi dan manajemen pemerintahan desa 2. Dinamisasi regulasi-regulasi dan perubahan lingkungan strategis desa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa	Perlunya pembinaan dalam penataan desa
		Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dilatih		Kapasitas dan kapabilitas aparatur desa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi dinamisasi regulasi dan lingkungan strategis desa
		Jumlah Desa yang menerapkan Siskudes		Perlunya peningkatan peran kecamatan dalam sistem pengelolaan aset dan

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Jumlah desa yang menerapkan simbades	3. Masih lemahnya sistem pengelolaan aset Jumlah pengelola SDA desa	keuangan desa
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera I	1. Belum optimalnya koordinasi antar PD untuk menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I 2. Jumlah PKB/PLKB sebagai koordinator lapangan terbatas	Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor pengendalian penduduk
13	Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Belum adanya terminal yang memadai di wilayah Kabupaten Sumedang;	Pembangunan terminal tipe C
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1. Kesadaran masyarakat pemilik kendaraan umum wajib uji masih rendah dalam tertib KIR; 2. Belum adanya fasilitas uji KIR keliling, karena geografis daerah.	1. Menyediakan fasilitas uji KIR keliling dalam konteks jemput bola pelayanan kepada masyarakat; 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum.
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Keterbatasan alat yang memadai untuk pengujian kelaikan angkutan umum;	Revitalisasi peralatan pengujian kelaikan angkutan umum;
		Pemasangan Rambu-rambu (%)	Usia teknis rambu lalu lintas selama 2 Tahun, sedangkan laju	Peningkatan pengadaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			perbaikan/pemasangan lampu lalu lintas tidak sebanding dengan laju usia teknis rambu lalu lintas.	
14	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi aktif	1. Masih terdapat koperasi yang stagnan atau tidak berkembang karena unit usaha tidak produktif; 2. Masih lemahnya pembinaan terhadap pengembangan kapasitas koperasi	Melakukan pembinaan tata kelola dan penguatan kelembagaan perkoperasian;
		Persentase usaha mikro dan kecil	1. Pengelolaan data umk masih belum optimal; 2. Masih kurangnya pengetahuan kewirausahaan pada umk;	1. Megoptimalkan pengelolaan data (melakukan pendataan/updating data UMK); 2. Melakukan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif (proses hulu hingga hilir)

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
15	Penanaman Modal	1. Belum optimalnya jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang 2. Pelayanan perizinan yang belum optimal	1. Adanya aturan yang overlaping satu dengan lainnya, sehingga menghambat proses perizinan; 2. implementasi perda/perbup terkait insentif-disinsentif belum optimal; 3. Masih adanya oknum (internal-eksternal) yang menghambat proses perizinan; 4. Belum mendukung infrastruktur perkotaan dalam konteks peningkatan investasi (lintas sektor); 5. Belum efektifnya fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP;	1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah; 2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada; 3. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda; 4. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan; 5. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi; 6. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun;

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
16	Kepemudaan dan olahraga	1. Peningkatan jumlah atlet berprestasi 2. Masih kurangnya wirasuahawan muda	1. Masih terbatasnya pelaksanaan event olahraga; 2. Masih terbatasnya sarana prasarana di bidang olahraga 3. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi para pemuda	1. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi; 2. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlit disabilitas; 3. Meningkatkan penyelenggaraan event olahraga tingkat kabupaten maupun tingkat nasional; 4. Penyediaan sarpras olahraga 5. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda
17	Kebudayaan	1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah Group kesenian 3. Jumlah Gedung kesenian 4. Jumlah Museum 5. Koleksi buku yang 6. tersedia di perpustakaan daerah 7. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1. Pelaksanaan event seni budaya terbatas; 2. Belum optimal kontribusi budayawan lokal dalam pengembangan Kabupaten Sumedang sebagai daerah Puseur Budaya Sunda; 3. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara);	1. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta); 2. Merangkul/mengkoordinasikan budayawan lokal untuk berkontribusi menyumbangkan ide dan gagasan dalam menciptakan suatu produk budaya yang dapat mewujudkan sumedang puseur budaya sunda; 3. Melakukan pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
18	Perpustakaan		4. Terbatasnya bahan pustaka (eksemplar dan judul) sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang 5. Masih rendahnya pemeliharaan koleksi bahan pustaka	4. Penambahan dan pemeliharaan koleksi dan jumlah eksemplar bahan pustaka
19	Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap kearsipan 2. Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan 3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan 4. Belum tersedianya sistem elektornik kearsipan 5. Belum adanya regulasi daerah tentang kearsipan 6. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan di setiap PD 7. Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan	1. Pembinaan PD tentang pentingnya kearsipan 2. Peningkatan sarana dan prasaran kearsipan (gedung, depo) 3. Penyediaan sistem elektornik kearsipan 4. Penyusunan Perbup Kearsipan
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	- Masih terbatasnya tenaga fungsional arsiparis yang bersertifikat - Kurangnya minat ASN menjadi	Diklat Arsiparis (koordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi)

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			arsiparis	
FOKUS URUSAN PILIHAN				
20	Pertanian	1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 4. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 6. Cakupan bina kelompok petani	1. Penurunan luas baku lahan pertanian (banyak pergeseran fungsi lahan pertanian); 2. Masih kurangnya peralatan yang dapat mendukung sesuai kondisi geografis (dataran tinggi dan Bukit); 3. Ketersediaan sumber air masih minim; 4. Perlu adanya integrasi antara kewenangan pertanian (jaringan tersier) dalam hal jaringan irigasi pertanian dengan pupr dalam hal irigasi-pengairan (bendungan-jaringan primer, sekunder); 5. Minat pemuda tani untuk bertani berkurang; 6. Nilai tambah sektor pertanian komoditas strategis masih rendah; 7. Masih adanya daerah rentan pangan (produksi padi tidak stabil,	1. Perlu penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. Perlu penyediaan peralatan pertanian yang mendukung geografis wilayah; 3. Perlu penyediaan fasilitas sumber-sumber air dan jaringan irigasi pertanian serta jalan pertanian (infrastruktur pertanian); 4. Peningkatan koordinasi antar sektor (leading sektor Bappeda) 5. Penguatan pelaku usaha tani berbasis agrobisnis (pelatihan); 6. Perlu ditambah pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan); 7. Penguatan cadangan pangan masyarakat; 8. Tersedianya regulasi dalam mendukung diversifikasi pola

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			dampak relokasi jatigede); 8. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah (ketergantungan terhadap konsumsi beras masih tinggi); 9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan segar (penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian); 10. Masih lemahnya pengawasan terhadap pangan segar; 11. Belum memadai sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner, 12. Belum adanya rumah pemotongan hewan; 13. Belum adanya pasar hewan regional	konsumsi masyarakat; 9. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dalam memproduksi komoditas non beras; 10. Penyuluhan masyarakat untuk keamanan pangan segar; 11. Penindakan terhadap penggunaan bahan berbahaya untuk pangan segar. 12. Penyediaan sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner; 13. Pembangunan rumah pemotongan hewan; 14. Pembangunan pasar hewan regional
21	Kelautan dan Perikanan	1. Produksi perikanan 2. Konsumsi ikan	1. Sarana dan prasarana budidaya-tangkap perikanan; 2. Belum optimalnya unit pembenihan perikanan (Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan	1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap; 2. Penyediaan pakan ikan- induk ikan dan sarana pendukung lainnya; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			Rakyat); 3. Belum terintegrasinya kebijakan hulu dan hilir antar sektor (pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian); 4. Kesadaran masyarakat dalam konsumsi ikan masih kurang; 5. Belum terimplementasi regulasi terkait pelestarian perikanan dan penggunaan alat-alat perikanan yang ramah lingkungan.	pembenihan (Penyuluh); 4. Koordinasi antar sektor yang terkait ; 5. Menumbuhkan gerakan gemar makan ikan (diversifikasi produk pengolahan ikan, sosialisasi ke masyarakat); 6. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan
22	Pariwisata	1. Kunjungan wisata 2. Lama kunjungan Wisata 3. PAD sektor pariwisata	1. Infrastruktur/sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai (khususnya akses jalan menuju destinasi wisata); 2. Terbatasnya pelaksanaan event festival/pagelaran seni, budaya, olahraga; 3. Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya; 4. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan; 5. Masih lemahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan dan	1. Revitalisasi/penataan kawasan pariwisata; 2. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta); 3. Melakukan promosi pariwisata seni dan budaya; 4. Pembangunan galeri ekonomi kreatif sekaligus kepariwisataan; 5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penggerak ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan.

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	
23	Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1. Kurangnya jumlah SDM kemetrologian; 2. Kurangnya sarana dan prasarana kemetrologian; 3. Pasar masih belum memadai; 4. Pedagang kaki lima masih belum tertata; 5. Belum optimalnya penggunaan resi gudang untuk menampung hasil bumi; 6. Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalnya harga komoditas tersebut; 7. Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan; 8. Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi 9. Pembinaan para pelaku usaha gas LPG	1. melakukan pelatihan pada SDM kemetrologian; 2. Penyediaan sarana dan prasarana kemetrologian (alat tera-kendaraan-bangunan kantor); 3. Penataan pasar; 4. Relokasi pedagang kaki lima; 5. Sosialisasi kepada petani untuk menggunakan resi gudang; 6. Melakukan Operasi pasar; 7. Mengadakan bazzar/pasar murah; 8. Pembuatan aplikasi jaringan perdagangan-Perkembangan harga-Perkembangan data usaha perdagangan 9. Melakukan penertiban distribusi elpiji bersubsidi 10. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha gas LPG mulai dari agen, pangkalan sampai kepada penyalur

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			10. Revisi regulasi distribusi LPG	secara berkala dan berkesinambungan 11. Sosialisasi regulasi distribusi LPG kepada agen dan pangkalan
24	Perindustrian	Cakupan bina kelompok Indrustri Kecil Menengah (IKM)	1. Kurangnya jumlah pelatihan yang meningkatkan kualitas para pelaku IKM; 2. Minimnya teknologi dalam peningkatan kualitas IKM; Data para pelaku IKM yang belum update.	1. Pelatihan-pelatihan SDM yang meningkatkan kualitas para pelaku IKM; 2. Banyaknya bantuan fasilitasi mesin/Alat peningkatan teknologi produksi; 3. Pemutakhiran Data
25	Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	1. Terbatasnya kuota Transmigran dari Provinsi 2. Belum adanya legalitas hak kepemilikan tanah pada Transmigran lokal (Tanah tersebut masih milik kas Desa) 3. Pengalokasian dana pemberangkatan Transmigran yang dulu dibiayai dari Pusat sekarang diserahkan ke Kabupaten	1. Perlu adanya kesepakatan pemenuhan kuota transmigran antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang 2. Harus adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk kepemilikan Tanah (Tukar guling Tanah) 3. Perlunya adanya dana dari tingkat kabupaten untuk penangan Transmigran/ Pemberangkatan Transmigran
FOKUS FUNGSI PENUNJANG				

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
26	Perencanaan	Perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan daerah	1. Belum sinkronnya antara perencanaan daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah 2. Kualitas dokumen perencanaan yang masih lemah 3. Tingkat partisipasi masyarat/stakeholder masih rendah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah 4. Pendekatan perencanaan tidak mengambarkan holistic, integratif, thematic dan spasial (HITS)	1. Masih lemahnya kemampuan SDM Perencana 2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan Lintas Perangkat Daerah 3. Belum optimalnya system yang terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari bottom up sampai ke top down 4. Kurangnya jumlah fungsional perencana
27	Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase implementasi rencana kelitbangan. 2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 4. Persentase kebijakan	1. Tidak jelasnya arah rencana penelitian dan pengembangan 2. Lemahnya sinkronisasi kegiatan litbang daerah dengan kementerian/lembaga pusat terkait	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melakukan penelitian dan pengembangan 2. Koordinasi antar Perangkat Daerah yang membutuhkan dan memanfaatkan Litbang tidak jelas dan masih lemah

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		inovasi yang diterapkan di daerah.		
28	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1. Masih kurangnya PNS mendapat kesempatan pendidikan dan pelatihan 2. Masih kurang fokusnya antara kebutuhan diklat dengan unit organisasinya	1. Harus ditingkatkan kesempatan PNS dalam mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS
		2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Belum efektifnya koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan (setiap Perangkat Daerah yang mengirimkan pegawai atas undangan provinsi/K/L tidak menginformasikan kepada BKPSDM)	1. Meningkatkan koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lainnya (Kasubag Umum Kepegawaian) lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan.
		3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Masih banyak jumlah pejabat yang belum mendapatkan kesempatan diklat sebagai syarat menduduki jabatan;	Membuat skala prioritas pejabat yang sudah menduduki jabatan dalam mendapatkan kesempatan diklat untuk syarat menduduki jabatan
		4. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1. belum optimalnya identifikasi kebutuhan jabatan fungsional tertentu; 3. Belum adanya perhitungan beban	Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi setda dalam identifikasi jabatan fungsional tertentu;

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			kerja untuk kebutuhan jumlah jabatan fungsional tertentu.	
29	Pengawasan	1. Persentase tindak lanjut temuan 2. Persentase pelanggaran pegawai 3. Jumlah temuan BPK	1. Sarana prasarana yang menunjang kerja masih kurang; 2. Kuantitas SDM Masih kurang dibandingkan dengan objek pemeriksaan; 3. Kualitas SDM masih kurang, (tenaga auditor bidang sipil masih kurang); 4. Implementasi SPIP di sebagian besar Perangkat Daerah belum efektif; 5. Belum optimalnya evaluasi Sakip	1. Pembangunan gedung kantor yang baru; 2. Penambahan jumlah auditor fungsional; 3. Peningkatan kompetensi pemeriksaan bidang infrastruktur, PBJ, Perencanaan, dan Investigasi; 4. Peningkatan intensitas pendampingan SPIP kepada Perangkat Daerah; 5. Peningkatan intensitas pendampingan evaluasi Sakip kepada Perangkat Daerah
30	Urusan Administrasi Pemerintahan (Kesekretariatan Daerah	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	Masih sulitnya pemenuhan data dari seluruh Perangkat Daerah untuk penyusunan LPPD	1. Perlunya penggunaan sistem informasi data LPPD yang terintegrasi 2. Penguatan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Desa Sadar Hukum	Masih rendahnya cakupan desa yang masuk kategori wilayah sadar hukum	Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa
		Persentase perkara yang ditangani	Masih rendahnya SDM aparatur yang berkompeten di bidang hukum dan advokasi	Peningkatan jumlah SDM dan kualitas SDM hukum

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Peningkatan Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Masih rendahnya jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan per tahun	Peningkatan penyuluhan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait peningkatan jumlah regulasi daerah
		Meningkatnya nilai LAKIP daerah	Masih rendahnya kualitas SAKIP	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP
		Tersedianya dokumen perubahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Belum efisiennya kinerja organisasi di Pemda Sumedang	Evaluasi dan perubahan analisa jabatan dan beban kerja
		Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga	Masih adanya perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan lembaga eksternal tanpa melalui MoU Kepala Daerah	Peningkatan penyuluhan dan monitoring kegiatan kerjasama Perangkat Daerah dengan lembaga eksternal
		Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah	Masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap APBD	1. Ekstensifikasi dan intensifikasi bisnis BUMD 2. Audit kinerja dan keuangan BUMD
		Cakupan penerima Bantuan Sosial	Belum lengkapnya data base dan profil penerima Bantuan Sosial	Peningkatan data base dan profil penerima Bantuan Sosial
		Persentase peningkatan ASN bersertifikat PBJ	Masih kurangnya ASN yang bersertifikasi PBJ	Peningkatan jumlah ASN yang bersertifikasi PBJ
		Persentase aset bermasalah yang	Adanya fungsi pengelolaan aset daerah di Setda	Evaluasi dan Perubahan fungsi organisasi

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		terselesaikan	Masih banyaknya aset daerah yang bermasalah baik status dan legalitasnya	Penyelesaian aset daerah yang bermasalah
31	Urusan Kesatuan Bangsa Politik	Masih adanya potensi konflik Masih perlunya penguatan antar forum kemasyarakatan	1. Adanya potensi konflik antar suku agama dan Ras 2. Belum optimalnya koordinasi forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda) 3. Belum optimalnya pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat	1. Peningkatan sistem kewaspadaan daerah dalam menghadapi konflik, 2. Peningkatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat 3. Peningkatan koordinasi forum-forum strategis masyarakat

Sumber : FGD RPJMD

4.2. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Develoment Goals* (SDGs) sebagaimana gambar 4.1. dibawah ini. Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Gambar 4.1.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Dalam konteks KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, telah disusun rekomendasi hasil dari analisis KLHS terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan Upaya Tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
PILAR SOSIAL				
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*.	Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	1. Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru 2. Melakukan pemberdayaan pada PMKS 3. Mendorong produktifitas petani gurem 4. Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja 5. Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan 6. Menggerakan UMKM dan ekonomi kereatif	1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1 (a)	Belum terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan	Perlu ditingkatkan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan sampai dengan 98%	1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum Daerah
	1.3.1.(d)	Masih kurangnya rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Perlu dilakukan sinkronisasi data masyarakat miskin antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun BPS	1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Badan Pusat Statistik 4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (a)	Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tetang pentingnnya menggunakan fasilitas kesehatan	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Kesehatan
	1.4.1.(d)	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan penyediaan sarana air minum	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Masih adanya korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana saat ini mencapai 9 orang per 100.000 orang.	• Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana • Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1. (a)	Masih kurangnya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	• Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1. (e)	Masih tingginya risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	•Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana •Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
2.1.Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang Tahun.	2.1.1(a)	Masih adanya Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	• Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga kekurangan gizi • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Kesehatan
2.2. Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah	2.2.1*	Masih tingginya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	• Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga baduta stunting • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Kesehatan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
lima Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Masih adanya Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua Tahun/baduta.	• Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi stunting • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Kesehatan
	2.2.2*	Masih adanya Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 Tahun	• Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/ wasting • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(a)	Rendahnya Prevalensi anemia pada ibu hamil.	• Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
	2.2.2.(c)	Masih rendah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi	• Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/ wasting • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).	• Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil • Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan	Dinas Kesehatan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
	3.1.2.(a)	Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tetang pentingnnya menggunakan fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka	3.2.1*	Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil • Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan • Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita • Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
	3.2.2*	Masih adanya Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil • Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan • Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita • Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita • Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan	

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2. (a)	Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil • Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan • Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita • Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita • Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang	3.3.1.(a)	Masih adanya Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi HIV	Dinas Kesehatan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	masih tingginya resiko masyarakat terjangkit TB karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi TB	Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Masih adanya satu orang yang menderita malaria dari 1.000 penduduk yang beresiko	• Meningkatkan upaya pencegahan penyebarluasan malaria • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Kesehatan
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	• Meningkatkan upaya penyebarluasan (Filariasis dan Kusta). • Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat	Dinas Kesehatan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a)	Masih adanya penduduk merokok pada umur ≤18 Tahun.	• pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat terhadap anak kurang dari usia 18 Tahun dan • Penyusunan regulasi penjualan rokok kepada pembeli rokok pada usia anak kurang dari 18 Tahun.	Dinas Kesehatan
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang MKJP	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (JKD).	perlu sinkronnya data kependudukan masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Dukcapil; dan jangkauan luas wilayah yang yang sangat besar	- Dinas Kesehatan - Badan Pusat Statistik - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	• Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang dampak kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	• Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang dampak kekerasan seksual	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
PILAR EKONOMI				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita	• Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita • Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi • Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal • Meningkatkan kualitas SDM • Meningkatkan infrastruktur	1. Dinas UMKM dan Perdagangan dan PerindustrianKop 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Dinas Peternakan dan Perikanan 5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
			pengembangan wilayah ekonomi	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	8.1.1.(a)	Masih rendahnya PDB per kapita	• Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita • Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi • Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal • Meningkatkan kualitas SDM • Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi	1. Dinas UMKM dan Perdagangan dan PerindustrianKop 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Dinas Peternakan dan Perikanan 5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Menyamakan persepsi bahwa perempuan bekerja di sektor formal dianggap lebih prestisius daripada yang bekerja pada sektor non formal	1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Mengurangi pengaruh2 faktor lingkungan yang menyebabkan penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, adanya pengaruh faktor gaya hidup.	1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Peningkatan jumlah dan kemampuan pekerja yang ahli dan terampil dalam sektor pariwisata	1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a)	Belum tercapainya jalan dengan kondisi mantap.	• Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas jalan dan jembatan • Peningkatan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan • Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan jalan baru	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1.(a)	minimnya pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui industri manufaktur.	1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan	10.1.1*	Masih tingginya tingkat kesenjangan masyarakat.	• Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru	1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembeangan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			• Melakukan pemberdayaan pada PMKS • Mendorong produktifitas petani gurem • Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja • Mendorong peningkatan sector pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan • Mengerakan UMKM dan ekonomi kereatif	Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Perikanan dan Peternakan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	10.1.1. (a)	Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	• Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru • Melakukan pemberdayaan pada PMKS • Mendorong produktifitas petani gurem • Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari	1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembeangan Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Perikanan dan Peternakan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
			kerja • Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan • Menggerakan UMKM dan ekonomi kreatif	5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
PILAR LINGKUNGAN				
6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (a)	Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	• Meningkatkan penyediaan sarana air minum	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	• Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Kesehatan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	• Pengawasan hyginies terhadap sanitasi tempat umum	1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Kesehatan
	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	• Pengawasan hyginies terhadap sanitasi tempat umum • Penyuluhan pengunaan sanitas rumah tangga	Dinas Kesehatan
11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1. (a).	Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Sumedang.	• Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana • Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana) • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. • Perlu disusun kajian kebencanaan termasuk menyusun kontijensi plan, mitigasi dll	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a).	Masih tingginya sampah perkotaan yang belum tertangani.	• Peningkatan jangkauan pelayanan penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.7 Pada Tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.2. (a)	Masih adanya korban dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	• Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Masih rendahnya timbulan sampah yang yang diolah dengan sistem 3R.	• Peningkatan pengelolaan sampah 3R (recycle, reduce, reuse)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1. (a).	Berkurangnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	• Pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1. (d)	Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi	• Perlu penyempurnaan indikator kinerja utama sesuai dengan standar • Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

TUJUAN/TARGET	KODE	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	• Peningkatan kemampuan (kompetensi) masyarakat perempuan agar mempunyai kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	• Peningkatan kemampuan (kompetensi) ASN perempuan sehingga bisa berkompetisi dengan ASN laki - laki	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 Tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	• Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	• Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN/TARGET	KODE	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2019-2023	PERANGKAT DAERAH
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	• Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	• Meningkatkan jumlah PPID yang memiliki sertifikat .	Sekretariat Daerah

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 juga perlu memperhatikan indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi terhadap ketercapaian indikator pada empat pilar TPB maka dirumuskan alternatif dan rekomendasi skenario sebagai berikut:

Tabel 4.4
Alternatif dan Rekomendasi Skenario terhadap
Data Indikator TPB yang 'sudah tercapai, sudah dilaksanakan' dan 'tidak ada data'

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	TPB	Klasifikasi	Total Jumlah Indikator	Rekomendasi Tahun 2019-2023	Perangkat Daerah
1	PILAR SOSIAL	1. TPB1 : Tanpa Kemiskinan 2. TPB2 : Tanpa Kelaparan 3. TPB3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. TPB4 : Pendidikan Berkualitas 5. TPB5 : Kesetaraan Gender	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	31	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	21	1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB 2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi 3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik	1. Seluruh Perangkat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	PILAR LINGKUNGAN	1.TPB6 : Air Bersih & Sanitasi Layak 2.TPB11 : Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan 3.TPB12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 4.TPB15 : Kehidupan/ ekosisitem di	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	4	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	8	1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan	1. Seluruh Perangkat

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	TPB	Klasifikasi	Total Jumlah Indikator	Rekomendasi Tahun 2019-2023	Perangkat Daerah
		Daratan			evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB 2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi 3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik	Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	PILAR EKONOMI	1. TPB8 : Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi 2. TPB9 : Industri, Inovasi, & Infrastruktur 3. TPB10 : Berkurangnya Kesenjangan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	3	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	12	1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB 2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi 3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik	1. Seluruh Perangkat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	TPB	Klasifikasi	Total Jumlah Indikator	Rekomendasi Tahun 2019-2023	Perangkat Daerah
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	1. TPB16 : Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	4	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapa	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	3	1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB 2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi 3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen 4. pelaporan secara periodik	1. Seluruh Perangkat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

Indikator-indikator SDG's bersifat makro yang perlu difokuskan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 -2023 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator SDGs bersifat Makro

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN				
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	Badan Pusat Statistik (Susenas)
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA				
8.1.1		Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Badan Pusat Statistik
8.1.1. (a)		PDRB per kapita	PDRB per kapita	Badan Pusat Statistik
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA				
10.1.1.(a)		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	Badan Pusat Statistik
10.1.1		Koefisien Gini	Indeks Gini	Badan Pusat Statistik
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH				
16.6.1.(b)		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah (Bagian Oraganisasi)

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

Indikator-indikator SDG's bersifat *Outcomes* Program yang perlu difokuskan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 -2023 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator SDGs bersifat outcome Program

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN				
1.4.1 (d)		Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Prosentase penduduk berakses air minum	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Prosentase penduduk berakses air minum	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
6.2.1.(b)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI				
9.1.1. (a)		Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

Indikator-indikator SDG's yang perlu difokuskan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 -2023 antara lain sebagai berikut

Tabel 4.7
Indikator SDGs dalam RENSTRA

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN				
1.5.1 (e)		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Prosentas kelurahan/desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Jumlah Dokumen rencana penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				
2.2.2 (c)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi Ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.2.2 (a)		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

4.3. Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil telaahan identfikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mengunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Gambar 4.2.
Hasil Analisa Isu-isu Strategis Berdasarkan kriteria Permendagri No. 86 Tahun 2017



Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan diatas maka dapat dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana analisa isu-isu strategis daerah pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.10.

Perumusan dan Penetapan Isu-isu Strategis Daerah

NO	ISU STRATEGIS	ANALISIS (TARGET)
1	ISU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN	1. Tenaga Kesehatan Masih Kurang, Jika dibandingkan dengan target Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2025(kemenkes), maka idealnya Kab. Sumedang perlu menambah : • 91 dokter spesialis; • 521 dokter umum; • 113 dokter gigi; • 512 bidan; • 152 sanitarian; • 256 ahli gizi.
		2. Jumlah Puskesmas masih kurang, SPM Kemenkes 1:30.000, kondisi di Sumedang Tahun 2017 adalah 1:32.755, sehingga overload atau kelebihan beban 2.755 penduduk.
		3. Jumlah rumah sakit masih kurang, SPM Kemenkes 1:100.000, kondisi di Sumedang Tahun 2017 1:382.145 (overload atau kelebihan beban 282.145 penduduk) atau perlu tambahan 2 rumah sakit.
		4. Angka kematian Ibu meningkat (Tahun 2013-2017)
		5. Prevalensi balita stunting 32,2% (WHO <20%)
2	ISU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	1. Ketersediaan data pendidikan yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan masih terbatas.
		2. Rata-rata lama sekolah Tahun 2017 masih 7,98, artinya rata-rata lama sekolah baru mencapai jenjang SMP, jika dibandingkan dengan target nasional 12 Tahun, maka rata rata di Kab.Sumedang belum tercapai (Sumedang jaraknya tidak jauh dari ibukota negara)
		3. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD-SMP) masih sangat kurang. Pada Tahun 2017, Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah untuk jenjang SD adalah sebesar 54,62%, sedangkan untuk jenjang SMP sebesar 24,76%

NO	ISU STRATEGIS	ANALISIS (TARGET)
3	ISU PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK	1. Tahun 2017 hanya 54,83% jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)
		2. Persentase pemasangan lampu lalu lintas menurun
		3. Terminal angkutan kota dan angkutan antar daerah masih kurang (hanya satu)
		4. Jumlah tempat pembuangan sampah perlu penambahan seiring peningkatan produksi sampah
		5. Jaringan irigasi perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan keperluan lahan pertanian
4	ISU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI	1. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan;
		2. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan.
		3. Peningkatan ketimpangan pendapatan (Indeks gini meningkat 0,2 poin, Tahun 2015 sebesar 0,35 menjadi 0,42 di Tahun 2018).
		4. Dari 20.760 usaha mikro dan kecil/informal yang didalamnya terdapat pengrajin dan pedagang, pada Tahun 2017 hanya 321 kelompok pengrajin yang dibina serta 665 kelompok pedagang informal yang dibina. Selama dua Tahun (2016-2017) rata rata pembinaan hanya kepada 4,7% pedagang-pengrajin.
		5. Tahun 2016, 37% **angkatan kerja pengangguran terbuka** adalah lulusan SMP, 17,7% lulusan SD, 24% lulusan SMA dan 11,7% lulusan SMAK, sisa nya 9,27% lulusan diploma-universitas.
		6. Tahun 2016, 52,8% **angkatan kerja bekerja** adalah lulusan SD, 21,7% lulusan SMP, 11,5% lulusan SMA, 8,6% lulusan SMAK dan 5,1% lulusan diploma-universitas.
		7. Jumlah lulusan S1-S2-S3 menurun Tahun 2013 terdapat 220 orang lulusan S1-S2-S3, Tahun 2017 menurun menjadi 150 orang.
		8. Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian cenderung melambat.
		9. Jumlah penduduk miskin sebesar 112,14 jiwa atau 9,76% (masih tinggi jika dibandingkan target SDG's (0%)
5	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	1. Jumlah temuan BPK meningkat, pada Tahun 2015 sejumlah 28 temuan, meningkat menjadi 41 temuan di Tahun 2016.
		2. Selama Tahun 2013-2017 nilai lakip daerah dibawah 50 (kategori C yang berarti KURANG atau perlu banyak perbaikan atau perubahan yang mendasar).
		3. Rasio penduduk ber KTP dan Rasio bayi berakte kelahiran mengalami penurunan.

NO	ISU STRATEGIS	ANALISIS (TARGET)
6	ISU PENINGKATAN ANTISIPASI BENCANA	1. Indeks risiko bencana Kabupaten Sumedang memiliki skor 162 yang masuk dalam kategori tinggi**.**
		2. Seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam, antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi gempa bumi.
7	ISU PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Data Tahun 2013 menunjukkan masih terdapat 24,78% rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.
		2. Data Tahun 2015 menunjukkan bahwa rumah tangga ber-sanitasi masih dibawah 50%.
		3. Lingkungan permukiman kumuh Tahun 2017 mencapai 16,7%, kondisi ini belum mencapai target MDG's sebesar 6%.
		4. Tidak ada data jumlah rumah tangga pengguna air bersih sejak Tahun 2014-2017, namun secara faktual di lapangan masih teramati rumah tangga yang tidak menggunakan air bersih lebih dominan terutama yang berada di sekitar DAS.
		5. Sanitasi komunal perlu ditingkatkan.
8	ISU PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH	1. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor pariwisata perlu dikembangkan.
		2. Ragam dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan promosi budaya serta menghidupkan perekonomian daerah masih kurang.
		3. Benda, situs sejarah dan kawasan cagar budaya masih belum seluruhnya dilakukan pelestarian.
		4. Sarana prasarana pengembangan kesenian dan budaya tidak memadai (belum ada gedung kesenian, sarana penyelenggaraan festival budaya tidak ada).
		5. Pengembangan destinasi wisata masih kurang.
		6. Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (RIPDA) belum diimplementasikan.

Sumber : Hasil Analisis

Penjelasan data pada tabel 4.10 adalah sebagai berikut

1. Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih belum dikatakan merata mengacu pada kurangnya tenaga kesehatan (maka

idealnya Kab. Sumedang perlu menambah: 91 dokter spesialis; 521 dokter umum; 113 dokter gigi; 512 bidan; 152 sanitarian; dan 256 ahli gizi) dan kurangnya fasilitas kesehatan (idealnya perlu menambah puskesmas dan rumah sakit). Angka kematian ibu pada saat melahirkan pun mengalami peningkatan selama lima Tahun (2013-2017). Dalam konteks pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat, akan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu poros pertumbuhan di Jawa Barat yang berpotensi menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Sumedang. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah, sehingga potensi wabah penyakit dapat dihindari.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat, salah satunya adalah stunting. Kabupaten Sumedang termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki prevalensi balita yang mengalami stunting sebesar 32,2% pada Tahun 2017. Kasus stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat sesuai dengan batasan WHO yaitu kurang dari 20%. Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena penanggulangan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK.

Periode 1.000 HPK meliputi yang 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai "periode emas", "periode kritis", atau yang dikenal sebagai "*window of opportunity*". Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik,dangan gangguan metabolism dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi

belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Perlu ada langkah terobosan yang tidak hanya fokus pada upaya pengobatan, tetapi fokus pada upaya preventif (pencegahan) dan promotif berbasis siklus kehidupan manusia (*Continuum of Care*) melalui pendekatan keluarga.

2. Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan

Kebijakan yang dibuat pada sektor pendidikan sepenuhnya bergantung pada basis data yang ada. Jika basis data lemah, maka sulit diharapkan sektor pendidikan dapat maju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data pendidikan sehingga menghasilkan data dan informasi pendidikan yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya MEA serta dalam mempersiapkan *bonus* demografi (proporsi populasi penduduk usia muda lebih besar) perlu memperhatikan akses pendidikan yang berkualitas menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Karena jika pada saatnya *bonus* demografi terjadi sementara tingkat pendidikan penduduk masih rendah, maka ancaman yang berpotensi terjadi adalah *middle trap income,* dimana penduduk usia muda terjebak dalam penghasilan/upah rendah sehingga harapan adanya peluang penduduk usia muda dalam meningkatkan produktivitas dan kemajuan ekonomi khususnya di Kabupaten Sumedang sulit tercapai. Ancaman selanjutnya adalah posisi lapangan kerja strategis yang menghasilkan pendapatan tinggi berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing (Negara Asean).

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang adalah 8 Tahun atau hanya mencapai tingkat pendidikan menengah pertama (SMP). Selain itu ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah di Kabupaten Sumedang masih sangat minim, pada Tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD hanya 54,62 per 10.000 penduduk usia SD di Tahun 2017, adapun rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP di Tahun 2017 hanya 24,76 per 10.000 penduduk usia SMP.

Jika mengamati kondisi pendidikan dasar (SD-SMP) di Kabupaten Sumedang sebagaimana penjelasan paragraf di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu serius dalam mempertahankan angka kelulusan siswa-siswi SD-SMP dan perlu mendorong peningkatan angka melanjutkan siswa-siswi dari SD ke SMP serta SMP ke SMA/SMK harus optimal. Meskipun saat ini kewenangan pelayanan pendidikan jenjang menengah atas (SMA) berada di Provinsi, namun tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar pelayanan jenjang sekolah menengah atas harus dapat menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan kerja, sehingga pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah vokasional/SMK (kejuruan) dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian Kabupaten Sumedang menjadi hal utama. Lebih lanjut, dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang berstandar internasional menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan kompetitif yang perlu dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang untuk membantu pemecahan persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun untuk kondisi pendidikan pada jenjang pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 terdapat 61,28% anak usia dini yang mengikuti PAUD, kemudian pada Tahun 2016 meningkat menjadi 68,09%. Meskipun secara tren meningkat, namun angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77,02% di Tahun 2019. Kondisi tersebut dapat diakibatkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam sekolah PAUD

dan masih rendahnya jumlah sekolah PAUD sehingga tidak menjangkau seluruh anak usia dini di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas sekolah PAUD di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya untuk tenaga pengajar/ guru PAUD, terutama PAUD Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak, Status PAUD Sejenis (SPS), serta Taman Pendidikan Al Quran, juga perlu mendapat perhatian. Disamping itu Pembelajaran PAUD yang membangun sikap dan pembelajaran baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik perlu menjadi perhatian di masa mendatang.

3. Isu Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penunjang roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam sistem pelayanan masyarakat keberadaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang baik sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan data dan informasi terkait infrastruktur publik dan penataan ruang di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor infrastruktur publik dan penatan ruang sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 hanya 54,83% dalam kondisi baik (>40 Km/Jam). Hal ini berarti belum meratanya aksesibilitas masyarakat dalam penggunaan infrastruktur jalan yang baik. Selanjutnya jalan yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) mengalami pengurangan selama Tahun 2013-2017, untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas perlu penambahan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan. Lebih lanjut Kabupaten Sumedang belum

memiliki terminal yang memadai sehingga berdampak pada terhambatnya mobilitas warga. Untuk mendukung adanya sistem transportasi yang baik Kabupaten Sumedang perlu menyusun analisa tatanan transportasi lokal yang sesuai dengan kondisi saat ini, analisa tersebut mencakup manajemen rekayasa lalu lintas, kapasitas ruas jalan, dan analisa trayek angkutan umum. Untuk infrastruktur tempat pembuangan sampah selama periode 2013-2017 tidak mengalami penambahan, sementara itu produksi sampah terus meningkat setiap Tahunnya, sehingga perlu peninjauan kondisi pembuangan sampah lebih lanjut agar tempat pembuangan sampah dapat menampung sampah dengan baik. Hal ini menjadi penting karena dapat menjadi faktor yang menimbulkan permasalahan sistemik, yakni terganggunya kesehatan masyarakat dan keindahan dan kerapihan kota.

Selanjutnya untuk mendukung peningkatan sektor pertanian yang menjadi penyumbang PDRB 20,3% di Tahun 2017, maka infrastruktur jaringan irigasi perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan keperluan lahan pertanian.

4. Isu Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

Berdasarkan data BPS laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 6,23% di Tahun 2017, angka ini masih diatas rata-rata laju pertumbuhan nasional dan provinsi. Namun demikian pertumbuhan ini bersifat *diametral paradoksal*, karena ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan dibuktikan dari indeks gini Kabupaten Sumedang menunjukkan kenaikan 0,5 poin dari 0,37 di Tahun 2016 menjadi 0,42 di Tahun 2018. Kemudian tingkat

partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan, pada Tahun 2012 tercatat 63,13% kemudian menurun menjadi 62,06% di Tahun 2017, atau dengan kata lain dari 100 orang usia produktif (15-54 Tahun) hanya terdapat 62 orang memasuki pasar lapangan kerja di Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan *paradoks* bahwa pertumbuhan PDRB belum berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta menciptakan kemandirian masyarakat, idealnya dapat dengan cara mendorong masyarakat untuk berwiraswasta, Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan peran koperasi dan pembinaan usaha mikro dan kecil baik yang baru maupun yang sudah berjalan. Kedua hal tersebut menyimpan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Namun demikian, kondisi koperasi aktif di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan, dari 82% di Tahun 2014 menjadi 71% di Tahun 2017, untuk usaha mikro dan kecil/informal yang didalamnya terdapat pengrajin dan pedagang, dari 20.760 usaha mikro dan kecil/informal, pada Tahun 2017 hanya 321 kelompok pengrajin yang dibina serta 665 kelompok pedagang informal yang dibina. Selama dua Tahun (2016-2017) rata rata pembinaan hanya kepada 4,7% pedagang-pengrajin.

Dalam perspektif kedepan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menghidupkan wirausaha baru baik formal maupun informal. Karena jika hanya bertumpu pada lapangan pekerjaan formal yang disediakan perusahaan, lapangan kerja yang tersedia lebih didominasi level buruh. Hal ini dikarenakan 37% angkatan kerja pengangguran terbuka adalah lulusan SMP, 17,7% lulusan SD, 24% lulusan SMA dan 11,7% lulusan SMAK, sisa nya 9,27% lulusan diploma-universitas. Kondisi saat ini 52,8% angkatan kerja bekerja adalah lulusan SD, 21,7% lulusan SMP, 11,5% lulusan SMA, 8,6% lulusan SMAK dan 5,1% lulusan diploma-universitas, dengan kata lain 85% pekerja saat ini memiliki pendidikan SMA/K kebawah yang notabene bekerja sebagai buruh. Lebih lanjut, berdasarkan distribusi

PDRB per kecamatan pada publikasi Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang, dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi lebih tinggi untuk dikembangkan. Saat ini pada sektor pertanian terdapat 15% kecamatan yang berkategori sangat potensi untuk dikembangkan, sedangkan untuk sektor perdagangan hanya 3,8% yang berkategori sangat potensi untuk dikembangkan, adapun industri pengolahan hanya 7,6% yang berkategori sangat potensi untuk dikembangkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB 20,3% sangat potensial dikembangkan di 15% kecamatan dibandingkan sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian karena permintaan hasil pertanian dari pasar lokal dan regional cukup besar. Adapun hambatan dalam hal ini muncul dari penerapan teknologi produksi yang relatif rendah, keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja, sempitnya kepemilikan lahan, fluktuasi harga, sistem tata niaga hasil pertanian yang relatif panjang dan serangan organisme pengganggu tanaman. Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar negeri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian adalah mendorong agribisnis komoditas unggulan dengan meningkatan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk dan penetrasi pasar, kerjasama dengan lembaga keuangan, investor, dan sumber pembiayaan lainnya guna menunjang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang.

5. Isu Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Beberapa indikator untuk menilai kondisi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan capaian yang baik, antara lain opini BPK yang dalam tiga Tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan nilai LPPD Tahun 2017 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Namun demikian, masih terdapat indikator yang menunjukkan capaian yang belum baik, yakni peningkatan jumlah temuan BPK pada Tahun 2015 sejumlah 28 temuan, meningkat menjadi 41 temuan di Tahun 2016. Kemudian selama Tahun 2013-2017 skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dibawah 50 atau nilai C yang masuk dalam kategori kurang, sehingga perlu banyak perbaikan atau perubahan yang mendasar.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta komponen *stakeholder* eksternal. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan anggaran, profil aparat yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka pelayanan yang ideal kepada masyarakat

di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

6. Isu Peningkatan Antisipasi Bencana

Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Sumedang memiliki indeks risiko bencana dengan skor 162 yang masuk dalam kategori tinggi. Dapat dipetakan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi gempa bumi. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, tidak memberikan izin IMB pada daerah rawan bencana dan pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, serta kesiap-siagaan masyarakat.

7. Isu Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Namun keberadaan data dan informasi terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kondisi kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman yang telah menunjukkan capaian yang baik adalah rasio rumah layak huni yang pada Tahun 2017 telah mencapai 99,3%. Namun demikian indikator lainnya menunjukkan capaian yang belum mencapai target, antara lain luas permukiman kumuh

pada Tahun 2017 masih terdapat 16,7% kawasan pemukiman kumuh atau masih terdapat 55,04 Ha (target MDG's, 6%), rumah tangga yang belum memiliki akses listrik menurut data terakhir di Tahun 2013 mencapai 24,78, kemudian rumah tangga ber-sanitasi data terakhir Tahun 2015 masih dibawah 50%, namun secara faktual di lapangan masih teramati rumah tangga yang tidak menggunakan air bersih lebih dominan terutama yang berada di sekitar DAS, adapun untuk sanitasi komunal data spesifik tidak diketahui namun perlu ditingkatkan jika memang kondisi saat ini belum memadai.

8. Isu Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah

Sektor kebudayaan dan pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, serta Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor kebudayaan dan pariwisata perlu dikembangkan.

Adapun kondisi sektor kebudayaan dan pariwisata saat ini belum mampu secara optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Hal ini diketahui dari (1) masih kurangnya ragam dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan promosi budaya serta menghidupkan perekonomian daerah; (2) masih minimnya pelestarian terhadap situs sejarah dan kawasan cagar budaya; (3) sarana prasarana pengembangan kesenian dan budaya tidak memadai); (4) pengembangan destinasi wisata masih sangat kurang; dan (5) Belum diimplementasikannya Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (RIPDA). Dalam perspektif kedepan sektor pariwisata perlu diarahkan untuk pengembangan agrowisata, wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner yang bertemakan pariwisata halal.

Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan infrastruktur, penyiapan SDM kreatif, mengundang investor untuk berinvestasi dan promosi terkait pariwisata. Hal ini perlu mendapat dukungan baik secara politis maupun teknokratis dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Visi, misi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018 – 2023. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023"

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis : sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional : *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi.

Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

5.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.**

   Misi ini dimaksudkan untuk : perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini

pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. **Misi Kedua : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

   Misi ini dimaksudkan agar : setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

   Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

3. **Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

   Misi ini dimaksudkan untuk : Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah

pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai.

Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabakan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

4. **Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

   Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

   Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media komunikasi virtual.

   Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun

keluhannnya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. **Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

   Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut.

   Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses.

   Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

5.3 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Janji kerja merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan janji yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat saat kampanye. Janji kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Posisi penjabaran janji kerja dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkannya ke dalam Rencana Strategsi Perangkat daerah yang mengampu janji kerja tersebut. Adapun janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah :

1. Terbentuknya rumah besar penanganan fakir miskin/lansia serta peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan optimalisasi peran Pemerintahan Desa, RT/RW, DKM dan Pontren. Fokus pada janji kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini antara lain :
   a) Tersedianya tempat pemusatan pengelolaan dan pemberdayaan fakir miskin/lansia/anak terlantar/psikososial pada setiap desa;
   b) Peningkatan layanan kesehatan dengan penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat/Transkesmas (*SIMPATI HEALTHY TRANSPORT*) bagi masyarakat desa terpencil.
2. Terselenggaranya pendidikan gratis berbasis pengembangan pendidikan kreatif mencerdaskan dan optimalisasi kawasan pendidikan Jatinangor untuk mewujudkan Sumedang terdepan dalam IPTEK.
3. Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan. Salah satu fokus pada janji kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang Integrasi nilai-nilai norma Agama dalam tatanan aktivitas Institusi/Lembaga/Dinas/Badan/Kantor dan Masyarakat.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang aktivitas publik berbasis budaya dan kearifan lokal antara lain; alun-alun, taman kota dan pacuan kuda, menuju Sumedang kota BULUDRU. Harapan dari terwujudnya janji kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini adalah Mewujudkan Sumedang yang Hijau, Bersih, Indah dan Nyaman.
5. Mengkonsolidasi fiskal daerah, provinsi dan pusat dengan fokus perbaikan dan pengembangan infrastruktur koneksitas antara lain; pembangunan jalan lingkar selatan, poros sukasari-lembang,

lingkar palasari dan titik terluar/daerah perbatasan, serta membangun dan memperbaiki jaringan irigasi guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Fokus-fokus janji kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini antara lain :

a) Jalan Lingkar Selatan-Sumedang sepanjang 8,6 km dengan ruas Perempatan Rancapurut, Desa Rancamulya, Kec. Sumedang Utara- Kampung Toga, Desa Sukajaya- Desa Margalaksana-Ciguling Kelurahan Pasanggrahan Kec. Sumedang Selatan- jalan nasional Bandung-Cirebon
b) Jalan Lingkar Palasari sepanjang 3 km sebagai akses untuk meningkatkan pengembangan TAHURA Gunung Kunci - Gunung Palasari
c) Pembangunan Jalan Sukasari – Lembang sepanjang 18,3 km diharapkan memberikan dampak ekonomi terhadap wilayah Kabupaten Sumedang : • Perluasan jaringan distribusi hasil pertanian; • Mengurai kemacetan jalur Sumedang-Bandung, dan • Pengembangan jaringan destinasi wisata
d) Penataan Pacuan Kuda sebagai Ruang Publik. Ruang Aktivitas Publik (Olahraga ringan, Pertunjukan Seni, Rekreasi) di Kabupaten Sumedang dirasakan masih kurang. Penataan Pacuan Kuda merupakan upaya untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, dimana akan dibangun Arena Pertunjukan berbentuk Velodrome.
e) Peningkatan kualitas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang melalui hotmix dan beton
f) Peningkatan daerah irigasi. Panjang Daerah Irigasi Kabupaten Sumedang adalah 1.450,25 km dengan kondisi (dalam km) : kondisi baik 429,90; kondisi rusak ringan 644,75 dan kondisi rusak berat 375,60.

6. Terselenggaranya festival dan gelar seni budaya tercatat pada kalender tahunan Event Visit Wonderfull Indonesia dengan menjadikan SRIMANGANTI sebagai ikon kebudayaan dan daya tarik pariwisata Sumedang.
7. Fasilitasi sarana produksi pertanian untuk meningkatkan

kesejahteraan para petani/buruh tani dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja (BIJB, Tol CISUMDAWU, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jatigede, Kawasan Industri Buah dua, Ujungjaya, Tomo (BUTOM)).

8. Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja serta pemberian insentif guru ngaji, ta'mir mesjid, peningkatan tunjangan operasional RT/RW, guru honorer dan pegawai non PNS lainnya.
9. Membangun Sumedang Preneurship berbasis profesionalitas dan kreativitas Gerakan Wirausaha Muda (GARUDA) melalui rumah kreatif berkonsep komunikasi, informasi dan edupreneurship dengan fasilitasi wifi gratis dan pemberian modal bagi usaha kecil.

5.2.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah "***Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis Dan Demokratis Pada Tahun 2025 (Sumedang Sehati)"*** diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023".***

Misi 1 jangka panjang *"Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat"* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 2** *"Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan"*.

Misi 2 jangka panjang "*Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri"* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 *"Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan*

infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal" dan Misi 5 *"Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang".*

Misi 3 jangka panjang *"Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila"* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 1 *"Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat"* dan Misi 2 *"Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan".*

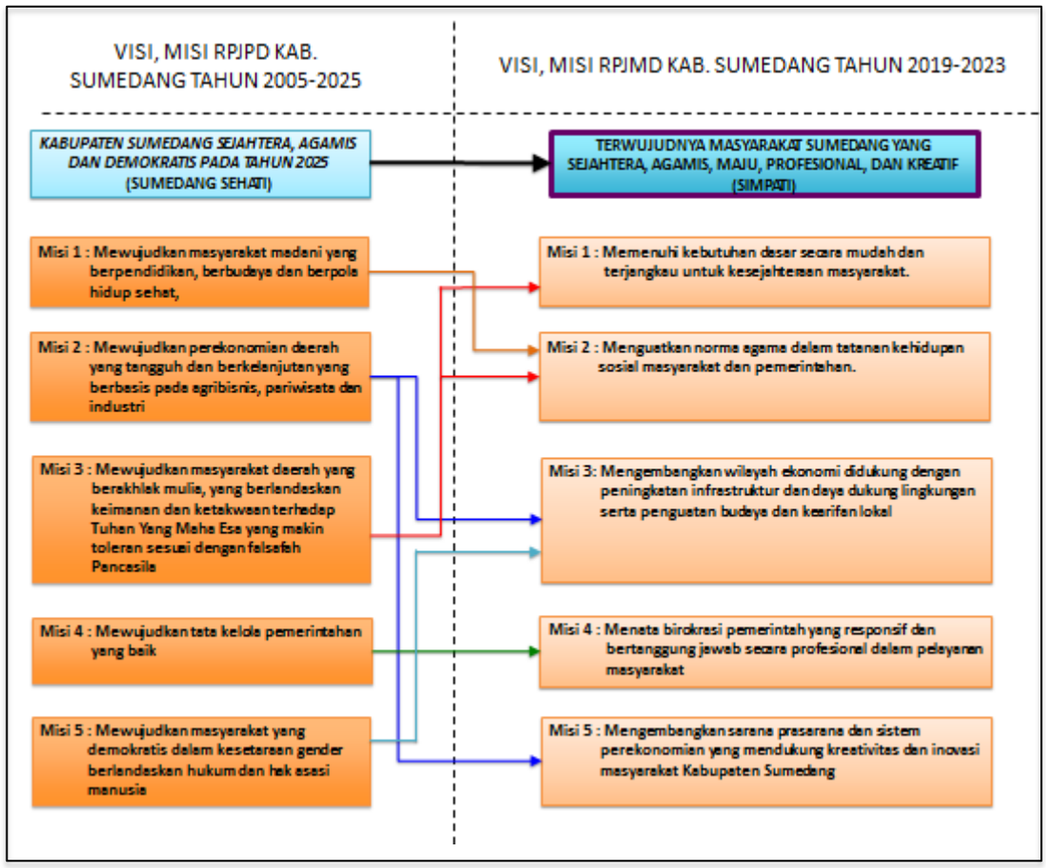
Misi 4 jangka menengah "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4 *"Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat".*

Misi 5 jangka menengah *"Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia"* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 "*Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal"*

Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar 5.1 di bawah ini.

Gambar 5.1

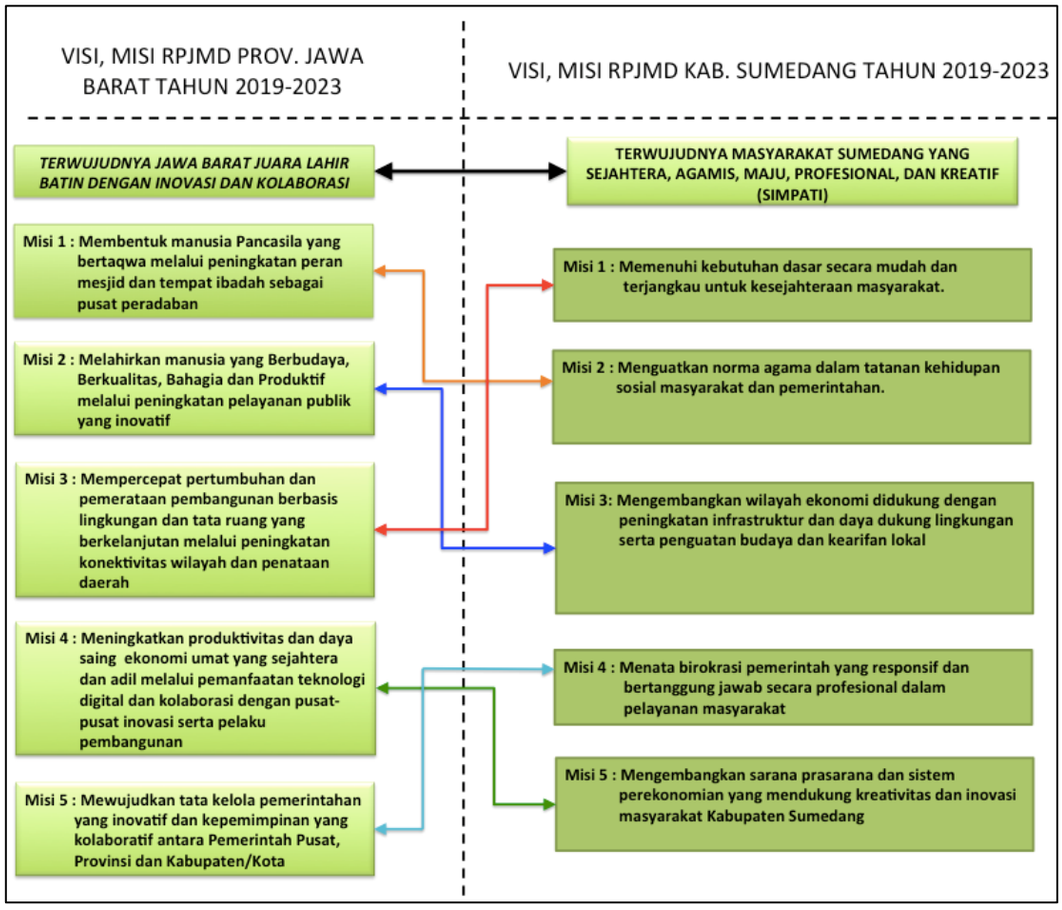
Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023



5.2.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi misi Provinsi dengan visi misi Kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.2
Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat 2018-2023



5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat DaerahBerdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau.**

Tujuan 1	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 1	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Tujuan 2	:	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata
Tujuan 3	:	Terwujudnya penanggulangulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak

2. **Misi Kedua : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

Tujuan 1	:	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang
Sasaran 1	:	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
Sasaran 2	:	Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar

3. **Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

Tujuan 1	:	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
Sasaran 2	:	Tersedianya sistem transportasi yang dapat

mendukung mobilitas masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis

Sasaran 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata

Sasaran 6 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang

Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif

dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif

Sasaran 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

Untuk menciptakan sinergitas tujuan dan sasaran antara RPJMD Kabupaten Sumedang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dirumuskan sinkronisasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau			**Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban**
Tujuan 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkait dengan Tujuan 2.1 Provinsi		Tujuan 1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial
Sasaran 1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan		Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
Tujuan 1.2 Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Terkait dengan Tujuan 2.1 Provinsi		
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata		Terkait dengan Sasaran 2.1.3 Provinsi	
Tujuan 1.3 Terwujudnya penanggulangan PMKS serta	Terkait dengan Tujuan 2.1 Provinsi		

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
Sasaran 1.3.1 Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi	
Sasaran 1.3.2 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak		Terkait dengan Sasaran 2.1.2 Provinsi	
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan			**Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif**
Tujuan 2.1 Terwujudnya kehidupan yang agamis dI Kabupaten Sumedang	Terkait dengan Tujuan 1.1 Provinsi		Tujuan 2.1. Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 2.1.1 Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama		Terkait dengan Sasaran 1.1.1 Provinsi	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar
Sasaran 2.1.2 Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar		Terkait dengan Sasaran 1.1.1 Provinsi	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
			Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
			Sasaran 2.1.4 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional
			Tujuan 2.2 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah
			Sasaran 2.2.1 Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
			Sasaran 2.2.2 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal			**Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah**
Tujuan 3.1 Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Terkait dengan Tujuan 3.1 Provinsi		Tujuan 3.1 Terwujudnya Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air		Terkait dengan Sasaran 3.1.3 Provinsi dan Terkait dengan Sasaran 3.3.2 Provinsi	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
Sasaran 3.1.2 Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat		Terkait dengan Sasaran 3.1.2 Provinsi	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah		Terkait dengan Sasaran 4.1.1-4.1.4 provinsi	Sasaran 3.1.3 Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Sasaran 3.1.4 Menjamin Ketahanan Pangan Daerah		Terkait dengan Sasaran 4.1.1 Provinsi	Sasaran 3.1.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Sasaran 3.1.5 Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata		Terkait dengan Sasaran 2.2.1 Provinsi	Sasaran 3.1.5 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
Sasaran 3.1.6 Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang		Terkait dengan sasaran 4.1.4 Provinsi	Tujuan 3.2 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Tujuan 3.2 Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi		Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
Sasaran 3.2.1 Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan		Terkait dengan Sasaran 3.2.1 Provinsi	Sasaran 3.2.2. Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik
Sasaran 3.2.2 Pengurangan indeks resiko bencana		Terkait dengan Sasaran 3.2.3 Provinsi	Sasaran 3.2.3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.			**Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan**
Tujuan 4.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Terkait dengan Tujuan 5.1 Provinsi		Tujuan 4.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi	Sasaran 4.1.1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
Ssaran 4.1.2 Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi	Sasaran 4.1.2 Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara		Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
Tujuan 4.2 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi	Sasaran 4.1.4 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi	
Sasaran 4.2.2. Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT		Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi	
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang			**Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**
Tujuan 5.1 Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi		Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif		Terkait dengan Sasaran 4.1.3 Provinsi	Sasaran 5.1.1 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
Sasaran 5.1.2 Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar		Terkait dengan sasaran 4.1.3 Provinsi	Sasaran 5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang menjabarkan kepada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Sumedang

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau												
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**72,07**	**72,26**	**72,44**	**72,63**	**72,81**	**73,00**	**73,00**
		1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	10	8	7	6	6
				Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	120	94	70	50	50
				Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	29	26	23	20	17	17
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85	87	90	91	92	92
				IKM Rumah Sakit	poin	83,70	90	91	92	93	95	95
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata			**Rata – rata lama sekolah**	**Tahun**	**8,10**	**8,29**	**8,48**	**8,67**	**8,86**	**9,07**	**9,07**
				Angka harapan lama sekolah	**Tahun**	**13,00**	**13,22**	**13,44**	**13,66**	**13,88**	**14,11**	**14,11**
		2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,93	107,03	107,13	107,23	107,23
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,62	103,72	103,82	103,92	104,02	104,02
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,44	105,55	105,65	105,76	105,76
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	103,19	103,40	103,60	103,81	103,81
				APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,62	89,71	89,8	89,89	89,89
				Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,9	2,1	2,4	2,7	2,7
3	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			**Persentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**9,76**	**8,96**	**8,16**	**7,36**	**6,56**	**5,76**	**5,76**
				Indeks Pembangunan Gender	**Poin**	**94,40**	**94,87**	**95,34**	**95,81**	**96,28**	**96,75**	**96,75**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
				Indeks Pemberdayaan Gender	**Poin**	**68,70**	**69,23**	**69,77**	**70,30**	**70,84**	**71,37**	**71,37**
		3.1	Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	6,85	6,05	6,05
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya	Persen	0,7	1,7	2,7	3,7	4,7	5,7	5,7
		3.2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
				Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701	750	801	801
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya	Persen	0,7	1,7	2,7	3,7	4,7	5,7	5,7
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan												
1	Terwujudnya kehidupan yang agamis dI Kabupaten Sumedang			**Indeks kerukunan umat beragama**	**Poin**	**72,2**	**72,5**	**73**	**73,5**	**74**	**74,5**	**74,5**
		1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5
		1.2	Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0	100	100	100	100	100
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal												
1	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**6,48**	**6,74**	**7,01**	**7,29**	**7,58**	**7,88**	**7,88**
		1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,8	74,8	78,8	82,8	82,8
				Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27	42,12	51,83	64,88	77,27	77,27

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
				Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	64	66	68	70	70
		1.2	Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	59,85	61,24	62,64	64,04	65,43	65,43
				Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/ hari	10.044	10.284	10.524	10.764	11.004	11.244	11.244
		1.3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :								
				Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14	10,24	10,34	10,45	10,55	10,55
				Tanaman Hortikultura	Persen	3,2	4	4,7	5,4	6,1	6,8	6,8
				Perkebunan	Persen	4,12	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	6,9
				Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	3,68	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7	6,7
				Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	3,15	4	4,6	5,2	5,8	6,4	6,4
		1.4	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	87,3	88,5	89,6	90,8	92,5	92,5
		1.5	Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498.472	598.166	717.800	861.360	1.033.632	1.240.358	4.451.316
		1.6	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp x1.000)	1.106.170.000	1.216.787.000	1.338.465.700	1.606.158.840	1.927.390.608	2.505.607.790	2.505.607.790
2	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**58,68**	**58,92**	**59,18**	**59,47**	**59,77**	**60,11**	**60,11**
				Indeks Resiko Bencana	**Poin**	**162**	**155**	**150**	**145**	**140**	**135**	**135**
		2.1	Meningkatknya pengelolaan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,89	48,09	48,29	48,49	48,69	48,89	48,89

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
			lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,29	80,49	80,69	80,89	81,09	81,29	81,29
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	50,57	50,86	51,22	51,63	52,10	52,63	52,63
				Persentase penanganan sampah	Persen	n/a	80	75	70	65	60	60
				Persentase pengurangan sampah	Persen	n/a	20	25	30	35	40	40
				Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04	11,07	11,11	11,14	11,17	11,17
				Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	80,67	81,33	82	82,67	83,33	83,33
				Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,30	0,27	0,15	0,09	0,06	0,06
				Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80	83	85	87	90	90
				Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	60	65	70	75	80	80
				Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		2.2	Pengurangan indeks resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	155	150	145	140	135	135
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.												
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi			**Opini BPK**	**Opini**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
				Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**	**56,05**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**85**
				Nilai SAKIP Kabupaten	**Kategori**	**B**	**B**	**BB**	**A**	**A**	**A**	**A**
		1.1	Meningkatnya kinerja keuangan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
			daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80	90	90	100	100	100
				Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8	7	6	5	4	4
		1.2	Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65	70	75	80	85	85
				Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
				Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,092	3,15	3,30	3,45	3,60	3,75	3,75
				Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	60	80	90	100	100	100
		1.3	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59	65	70	75	80	85	85
				Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,9	60,00	66,25	72,50	78,75	85,00	85,00
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas			**Indeks kepuasan masyarakat**	**Poin**	**80,74**	**81**	**83**	**86**	**89**	**92**	**92**
		2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80	83	85	87	90	90
				Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00	90,00
		2.2	Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	Nilai SPBE	Poin	2,46	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,2
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang												
1	Terwujudnya perekonomian			**Pengeluaran per kapita**	**Rp (juta)**	**9,67**	**10,06**	**10,38**	**10,70**	**11,04**	**11,35**	**11,35**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
	Sumedang yang kreatif dan berdaya saing			**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**7,04**	**6,55**	**6,35**	**6,15**	**5,96**	**5,68**	**5,68**
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4,59	4,89	5,19	5,49	5,79	6,09	6,09
				Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,29	5,32	5,35	5,38	5,41	5,44	5,44
				Cakupan Koperasi Aktif	Persen	72,93	75	78	81	84	85	85
		1.2	Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68
				Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.467	18.467	19.467	20.467	20.467

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sumedang, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-

program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2018-2023 sebagai periodesasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 juga harus selaras dengan periodesasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode keempat. Arah kebijakan yaitu pada RPJPD "Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada Tahun 2025 (SUMEDANG SEHATI)".

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam sumber dari isu-isu strategis tersebut apakah internal atau eksternal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan strategi adalah analisis SWOT, penggunaan metode ini karena cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Stretegi 1 : Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan

Strategi 2 : Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Strategi 3 : Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Strategi 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi

Strategi 5 : Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan

penataan lingkungan

Strategi 6 : Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata

Strategi 7 : Peningkatan kinerja aparatur pemerintah

Strategi 8 : Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil

Strategi 9 : Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan

Strategi 10 : Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang

Strategi 11 : Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

Strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansi nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif, dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Dalam konteks mewujudkan keselarasan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

Adapun Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 Pasal 4 yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian

secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan". Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah	a. pengembangan Kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang;	a. mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan; b. mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan; c. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan; d. meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan; e. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; f. meningkatkan produksi komoditas pertanian; g. meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan h. meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor.
	a. pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;	a. mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan; b. mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan; c. meningkatkan produktivitas, intesifikasi, ekstensivikasi dan diversifikasi lahan pertanian; d. meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan e. mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.
	b. pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten;	a. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya; b. mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; c. meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
		d. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan; e. mengembangkan Kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; f. mengembangkan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif; g. mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan h. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.
	c. penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata;	a. mengembangkan destinasi pariwisata unggulan b. mengembangkan obyek daya tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan; c. meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata; d. melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata; e. meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata; f. mendatangkan investasi dari dunia usaha; g. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal; h. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan i. melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
	d. penetapan dan	a. mengembangkan Kawasan

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
	pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;	Industri manufaktur di Wilayah timur; b. mengembangan sentra kerajinan dan industri rumah tangga; c. mengembangkan Kawasan Industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan d. mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
	e. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;	a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi Hutan lindung; b. meningkatkan dan mengendalikan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan perlindungan setempat; c. meningkatkan nilai ekonomi Kawasan Lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan d. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Lindung.
	f. peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;	a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di Wilayah timur; b. mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di Wilayah barat; c. mengembangkan Kawasan Perkotaan; dan d. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
	h. peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana	a. menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
	nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;	b. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian Wilayah dan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan–Perkotaan; c. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif; d. melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
	i. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;	a. meningkatkan sistem penyediaan energi; b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi; c. meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air; d. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; e. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan; f. mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan g. menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
	j. penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang;	a. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar; b. mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih Efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada Wilayah yang perkotaan cepat tumbuh; c. mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan,

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
		dan efisiensi energi di Kawasan Permukiman perkotaan; e. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; f. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan Wilayah di sekitar daerah; g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan Kawasan Permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
	k. pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;	a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan b. mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah PKW.
	l. pengembangan Kawasan `Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;	a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi; b. membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede; c. memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang; d. menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan; e. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional;dan f. Mengendalikan dampak pengembangan.
	m. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan	a. membangun konektivitas dan aksesibilitas Kawasan; b. meningkatkan status dan kualitas Jalan kabupaten; c. menyelaraskan pengembangan dengan Kawasan perbatasan;

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
		d. mengembangkan potensi Daerah Kabupaten; e. mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan; f. mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis Kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan g. mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
	n. pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.	a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Lebih lanjut, pada RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 telah ditetapkan pula Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Selanjutnya KSK tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang dan arahan penanganan yang disepakati oleh lintas sektor untuk mewujudkan penanganan kawasan secara terpadu. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2

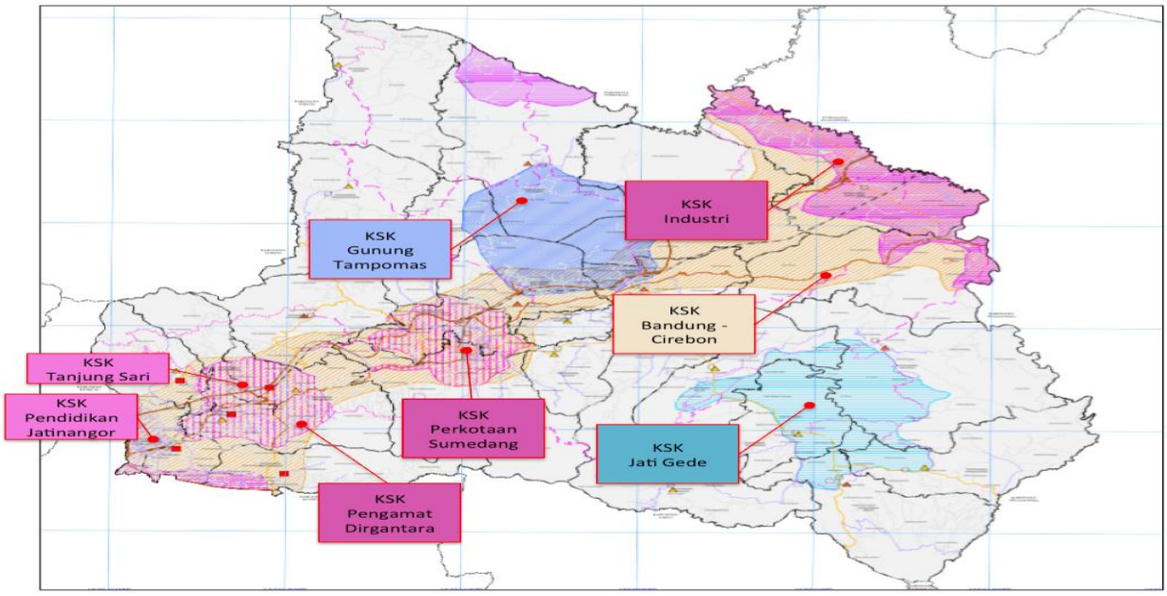
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang

No	Arahan Pengembangan	Kawasan
1	Pertumbuhan Ekonomi	a. Kawasan Industri Ujungjaya; b. Kawasan Waduk Jatigede; c. Kawasan Industri Buahdua; dan d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede.
2	Sosial Budaya	a. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan b. Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong.

3	Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi	Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya.
4	Ketahanan Pangan	Tersebar di seluruh wilayah kabupaten

Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Gambar 6.1
Kawasan Strategis Kabupaten



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumeadang Tahun 2018-2038, bahwa indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi Pembangunan strategis sebagaimana tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6.3
Rencana Proyek Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
I.	**Perwujudan Struktur Ruang**			
	1 Pengembangan Sistem perkotaan			
	1.1.1 Penyusunan Rencana rinci Tata Ruang untuk setiap PKL dan PPK (tambahkan)	1 PKL BUTOMGEDE, PKL Tanjungsari dan PKL Conggeang	APBD Prov	2020-2023
		2 PPK: Cimalaka, Rancakalong, Wado, Paseh, dan Tanjungkerta	APBD Kab/Prov	2020-2023
	1.1.2 Penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL),Pusat Pelayanan Kawasan(PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1 PKL BUTOMGEDE, PKL Tanjungsari dan PKL Conggeang	APBD Kab/Prov	2020-2023
		2 PPK: Cimalaka, Rancakalong, Wado, Paseh, dan Tanjungkerta	APBD Kab/Prov	2020-2023
		3 PPL: Sindangpakuan, Sukarapih, Pamulihan, Ganeas, Linggajaya, Situraja, Darmajaya, Tarikolot, Surian, Jingkang , Cisarua dan Cibugel.	APBD Kab.	2020-2023
	1.1.3 Peningkatan peran pusat kegiatan	1 Pusat Kegiatan Perkotaan Sumedang, BUTOM GEDE	APBD Kab/Prov	2020-2023
		2 PKL Tanjungsari, PKL Conggeang	APBD Kab/Prov	2020-2023
		3 PPK Cimalaka, PPK Rancakalong, dan PPK Paseh	APBD Kab.	2020-2023
	2 Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah			
	1.2.1 Prasarana Transportasi			
	1.2.1.1. Jaringan Jalan Raya dan Jembatan			
	a. PengembanganJalan Bebas Hambatan (Jalan Tol Cisumdawu)	Cileunyi – Sumedang - Dawuan (Cisundawu)	APBN/Swasta	2019-2023
	b. Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Arteri	1 Batas Kota Cileunyi–Nagreg (Rancaekek– Cileunyi–Cicalengka/ Parakanmuncang)	APBN	2021-2023
		2 Jalan Raya Cipacing (Cileunyi),	APBN	2020-2023
		3 Jalan Raya Rancaekek (Rancaekek)	APBN	2020-2023
		4 Jalan Raya Cileunyi (Cileunyi) /Cileunyi- Jatinangor	APBN	2021-2023
		5 Jalan Jatinangor-Batas Kota Sumedang	APBN	2020-2023
		6 Jalan Raya Jatinangor (Jatinangor)	APBN	2020-2023
		7 Jalan Raya Tanjungsari (Tanjungsari)	APBN	2020-2023
		8 Jalan Pangeran Kornel (Sumedang)	APBN	2020-2023
		9 Jalan Palasari (Sumedang)	APBN	2020-2023
		10 Batas Kota Sumedang-Cijelag	APBN	2021-2023
		11 Jalan Prabu Gajah Agung/Pang. Sugih (Sumedang)	APBN	2020-2023
		12 Cijelag-Kadipaten	APBN	2020-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan		Sumber Dana	Target
	c. Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer -3 (JKP-3)	1	Ruas jalan Sumedang-Batas Sumedang/ Subang (Cikaramas)	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		2	Ruas jalan Sumedang-Situraja	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		3	Ruas jalan Jalan Raya Situraja(situraja)	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		4	Ruas jalan Situraja-Darmaraja	APBN/APBD Provinsi	2020-2023
		5	Ruas jalan raya Prabu Tajimalela (Sumedang)	APBN/APBD Provinsi	2020-2023
		6	Ruas jalan Lebakjati-Rancakalong-Selaawi	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		7	Ruas jalan SP Kirisk (Wado)-BTS.Sumedang Garut	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		8	Ruas jalan Wado-Batas Kabupaten Sumedang/ Majalengka (Krisik)	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		9	Ruas jalan Cijelag-BTS Sumedang-Indramayu	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		10	Ruas jalan BTS Sumedang/Indramayu-Cikamurang	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		11	Ruas jalan Parakan Muncang-Warung Simpang	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
	d. Rencana pengembangan jalan kolektor Primer-3 (JKP-3)	Ruas Jalan Sukasari - Lembang		APBN/APBD Provinsi	2020-2023
	e Peningkatan status kewenangan lokal Primer menjadi jalan kolektor primer-3 (JKP-3)	1	Ruas jalan Legok-Conggeang	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		2	Ruas jalan Conggeang-Buahdua	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		3	Ruas jalan Buahdua-Burujul	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		4	Ruas jalan Burujul-Sanca	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		5	Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		6	Ruas jalan Ujungjaya-Palasah	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		7	Ruas jalan Cae- Lemahsugih (Batas majalengka)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		8	Ruas jalan Jalan Kolonel Ahmad Syam (Jatinangor-Dangdeur);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		9	Ruas jalan Jalan lingkar timur Jatigede (Wado Jatigede)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		10	Ruas jalan Lingkar Utara Jatigede	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		11	Ruas jalan lingkar selatan Jatigede (Situraja – Wado)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023

No.	Program Utama		Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
		12	Ruas jalan Alternatif Cadas Pangeran.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
	f Peningkatan kualitas jalan lokal primer	1	Cimalaka – Cipadung;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		2	Citengah - Cisoka;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		3	Cisoka – Cibubut;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		4	Cibubut – Cibugel;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		5	Cibugel – BTS. Garut;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		6	Warung Ketan – Cicau;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		7	Tanjungsari – Genteng;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		8	Gudang – Cijambu;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		9	Parakan muncang – Tegal manggung;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		10	Cicabe – Cisempur;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		11	Kadakajaya – Sukasari;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		12	Nanggerang – Genteng;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		13	Cilayung – Cinumbangan;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		14	Caringin – Lio;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		15	Lio – Jatiroke;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		16	Barukondang – Kiarapayung;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		17	Tegalmanggung – Sindulang;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		18	Cikuda – Nanggerang;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		19	Cikuda – Cisempur;	APBN/APBD	2020-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
			Prov/APBD Kab	
		20 Ciromed – Cikandang;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		21 Cikadu - Talun;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		22 Jayalaras – Cipacing;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		23 Nanggerang – Gunung lingga;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		24 Jalan Angkrek;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		25 Legok – Sukatali	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		26 Babakan bandung – Limus nunggal.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
	g Pembangunan baru jalan lokal primer	1 Jalan Lingkar Selatan (Dano – Samoja);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		2 Jalan Lingkar Utara (Samoja - Cimalaka);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		3 Jalan Poros Tengah (Tegal Kalong – Karapyak);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		4 Lingkar Kareumbi (Baginda - Mekarbakti);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		5 Pasir ringkik – Batudua Gn Lingga;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		6 Ujungjaya – Maudin.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
	h Rencana Pengembangan dan Relokasi jalan kolektor primer-1 (JKP-1)	1 Jalan Kolektor (K-2) Darmaraja -Wado	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		2 Jalan lingkar timur Jatigede (Wado Jatigede);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		3 Jalan Lingkar Barat Jatigede (Cisitu -Jatigede)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
	i Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jembatan pada Jalan Arteri dan Kolektor	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2019-2023
		Jembatan pada jalan lokal danl lokal primer	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2019-2023
	1.2.1.2. Jaringan Prasarana Angkutan Darat dan Angkutan Umum Masal			
	a Optimaliasai Terminal Type A	Terminal Ciakar (Perkotaan Sumedang)	APBN	2021-2022

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	b Terminal Type B	Terminal Tipe C di Kecamatan Wado dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2021-2022
	c Pembangunan baru Terminal Tipe C	Kecamatan Sumedang Utara, Tanjungkerta, Conggeang, Buahdua, Rancakalong, Sumedang Selatan, Situraja, Tanjungsari, Tomo, Cibugel, dan Jatigede	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
	d Pembangunan Terminal Barang	Kec. Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2022-2023
	1.2.1.3. Pembangunan Jaringan Angkutan Penyeberangan			
	a Pembangunan Dermaga / Sub Dermaga	Waduk Jatigede	APBD Kab/Prov, APBN	2022-2023
	1.2.1.4. Jaringan Jalan Kereta Api			
	Jalan Kereta Api			
	a Reaktivasi Jalur KA	Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
	b Pengembangan Jalan KA	Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
	c Pengembangan Stasiun KA	Perkotaan Jatinangor,Tanjungsari, Perkotaan Sumedang,Perkotaan Tomo dan kawasan industri Ujungjaya	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022
	d Pembangunan stasiun kereta api cepat (LRT)	Kecamatan Jatinangor	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022
	1.2.2. Prasarana Energi			
	1.2.2.1. Pengembangan jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas (PLT Panas Bumi/ *Geotermal*)	Gunung Tampomas	APBD Prov/kab, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
	1.2.2.2. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Wilayah perkotaan	Swasta/Publik	2020-2023
	1.2.2.3. Pengembangan Statsiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)	Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Wado dan Kecamatan Tomo	Swasta/Publik	2020-2023
	1.2.2.4. PLTA Waduk Jatigede	Waduk Jatigede		2020-2023
	1.2.2.5. Pengembangan Desa Mandiri Energi	Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan lainnya yang berpotensi menghasilkan biogas		2021-2022
	1.2.2.6. Pengembangan Jaringan dan kapasitas Listrik	Kabupaten Sumedang		2021-2023
	1.2.2.7. Pengembangan Mikrohidro/ energi lainnya	Kabupaten Sumedang	Swasta/Publik	2021-2023
	1.2.3. Prasarana Telekomunikasi			
	1.2.3.1. Peningkatan kapasitas sistem sambungan telepon	Kacantel Limbangan, Kadipaten, Rancaekek, Subang, Sumedang dan Tanjungsari	PT. Telkom/Swasta	2022-2023
	1.2.3.1. Pengembangan *Base Tranceiver Station* Bersama	Tersebar di Kabupaten Sumedang	PT. Telkom/Swasta	2022-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	1.2.4. Prasarana Sumber Daya Air			
	1.2.4.1. Prasarana Air Baku/Air Bersih			
	a Peningkatan prasarana dan per luasan air baku/bersih Perkotaan	Permukiman perkotaan di Kab. Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN	2020-2023
	b Peningkatan prasarana dan per luasan air baku/bersih perdesaan	Permukiman perdesaan di Kab. Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	1.2.4.2. Pengembangan waduk, situ dan embung			
	a Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS)	1 WS Cimanuk-Cisanggarung yang merupakan WS Lintas Provinsi; dan	APBN	2020-2023
	b Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Cimanuk, DAS Cipunagara, DAS Citarum; dan DAS Cipanas.	APBN/APBD Prov	2022-2023
	c Pengembangan prasarana waduk, bendung dan situ	1 Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		2 Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		3 Waduk Cipasang di Kecamatan Cibugel;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		4 Waduk Kadumalik di Kecamatan Jatinunggal;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		5 Waduk Cipanas Saat di Kecamatan Ujungaya;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		6 Waduk Citarik di Kecamatan Cimanggung;	APBN/APBD Prov	2019-2023
		7 Bendung Rengrang di Kecamatan Paseh;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		8 Bendungan Cipanas di Kecamatan Conggeang;	APBN/APBD Prov	2022-2023
		9 Situ Cilembang di Kecamatan Buahdua;	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
		10 Situ Lembang di Kec. Rancakalong;dan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
		11 Situ Pangeran di Kecamatan Tanjungkerta	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
	1.2.4.3. Prasarana Irigasi			
	a Pengembangan jaringan irigasi DI Kewenangan Provinsi	1 DI Sentig	APBD Prov	2022-2023
		2 DI Ujungjaya	APBD Prov	2023
	b Pengembangan jaringan irigasi DI lintas kabupaten	1 DI Depok	APBD Prov	2022-2023
		2 DI Cangkuang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
		3 DI Ciranjeng	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
	c Pengembangan jaringan irigasi DI kewenangan kabupaten	Seluruh DI yang ada di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	1.2.4.4. Prasarana Waduk/Bendungan			
	a Pembangunan Infrastruktur umum di sekitar Waduk Jatigede	Kecamatan Jatigede	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	b Pengembangan antisipasi Genangan Waduk Sadawarna	Kecamatan Surian	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022
	1.2.4.5. Sistem Pengendalian Banjir			
	a Pengembangan embung-embung dan sistem resapan air untuk menampung air hujan dan sekaligus sebagai pengendali banjir	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
			APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	
	b Pemasangan tembok penahan banjir pada sungai besar di kawasan perkotaan	Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tomo, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2023
	c Pengerukan dan pembesihan sampah pada sungai pada kawasan perkotaan	DAS Cimanuk, DAS Citarum, DAS Cipanas, dan DAS Cipunagara	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2023
	d Peningkatan normalisasi saluran drainase pada kawasan permukiman	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	1.2.5. Prasarana Pengelolaan Lingkungan			
	1.2.5.1. Sistem pengelolaan sampah			
	a Optimalisasi TPA Cibeureum Wetan menjadi sistem *Sanitary Landfill*	Kecamatan Cimalaka	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	b Pengembangan TPA	1 Cijeruk Kecamatan Pamulihan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
		2 Sukanyiru Kecamatan Wado	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	
	c Pengembangan TPA regional Cirebon Raya sebagai alternatif lokasi TPA	Perkotaan ujungjaya dan tomo	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2023
	d Pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit		APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	e Pengembangan TPA Ramah Lingkungan berbasis masyarakat	Masing-masing PPK	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2022
	f Pengembangan TPS	Masing-masing IKK	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2022
	g Pengembangan Proses Pemilahan sampah	Masing-masing PPL hingga tingkat di Bawahnya	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2022
	1.2.5.2. Limbah Cair dan B3			
	a Pengembangan sistem pembuangan limbah rumah tangga di permukiman perkotaan dan perdesaan	Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2022

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	b Pengembangan sistem IPAL terpadu industri	1 Kecamatan Ujungjaya	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
		2 Jatinangor-Cimanggung	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
		3 Kecamatan Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
	c Penampungan LimbahBatu Bara	Zona Industri Ujungjaya		2020-2022
	d Pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit	Kawasan Perkotaan Jatinangor - Cimanggung dan Perkotaan Sumedang	APBD /Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022
	e Pengembangan sistem Pengeloaan limbah pertanian	Seluruh kecamatan di Kab. Sumedang	APBD /Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022
	1.2.5.3. Drainase			
	a Pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman Perkotaan dan perdesaan	Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	b Pemeliharaan sistem drainase untuk mendukung permukiman Perkotaan dan perdesaan	Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	1.2.6. Sitem sistem jaringan prasarana lainnya			
	1.2.6.1. Penetapan jalur evakuasi bencana	Di seluruh desa/kampung yang ada di Kab. Sumedang yang diindikasi sebagai Daerah rawan bencana	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	a Pemetaan kawasan bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	b Jalur dan Ruang Evakuasi bencana alam	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	c Pemasangan tanda / Peringatan dini terhadap daerah rawan Bencana / mitigai bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	1.2.6.2. Rawan Banjir	Kec. Cimanggung, Sumedang Selatan, Ujungjaya, Tomo, Buahdua dan Surian	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	a Normalisasi Sungai	DAS Cimanuk, DAS Citarum, DAS Cipanas, dan DAS Cipunagara	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
	b Rehabilitasi drainase	Jatinangor, Cimanggung	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	c Pengembangan drainase	Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	d Sistem resapan buatan	Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	e Jalur dan Ruang Evakuasi bencana alam	Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
II.	**Perwujudan Pola Ruang**			
	1 Perwujudan Kawasan Lindung			
	2.1.1. Kawasan Hutan Lindung			
	2.1.1.1 Pemeliharaan kawasan hutan lindung;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.2. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.3. Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara kontinu dengan pemanfaatan secara lestari;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.4. Rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.5. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.6. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.7. Rehabilitasi hutan diselengggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah.	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.10. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.11. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka,	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
		Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua		
	2.1.1.11. Pengembangan hutan dan tanaman tahunan	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;			
	2.1.2.1. Pengendalian dan pelestarian terhadap daerah resapan air	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.2.2. Pembuatan sumur resapan pada kawasan permukiman, kawasan industri, dan area rawan banjir dan kekeringan	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	202023
	2.1.3. kawasan perlindungan setempat;			
	2.1.3.1. Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sempadan waduk, sempadan sungai, danau dan waduk	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	2.1.4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;			
	2.1.4.1. Penatanaan dan pelestarian Hutan Cagar Alam Gunung Jagat	Hutan Cagar Alam Gunung Jagat	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.1.4.2. Penataan dan Pelestarian Taman Hutan Raya (TAHURA) Gn. Kunci dan Gn. Palasari	Taman Hutan Raya (TAHURA) Gn. Kunci dan Gn. Palasari	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.4.3. Penataan dan Pelestarian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas	Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.1.5. kawasan rawan bencana alam;			
	2.1.5.1. Menurunkan bahaya lonsor dengan pembuatan terasering, penghijauan kawasan rawan bencana gerakan tanah	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.5.2. Peningkatan dan perbaikan saluran drainase pada kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Ujungjaya, Tomo, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.5.3. Peringatan bahaya pada kawasan rawan bencana angin puting beliung	Kecamatan Cimanggung, Cimalaka, Cisarua, Ujungjaya dan Wado	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.5.4. Antisipasi dan evakuasi terhadap kawasan rawan bencana Gempa Bumi	Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Buahdua, Cimalaka, Cimanggung, Cisarua, Cisitu, Conggeang, Darmaraja, Ganeas, Jatigede, Jatinangor, Jatinunggal, Pamulihan, Paseh, Rancakalong, Situraja, Sukasari, Surian, Tanjungekrta, Tanjungmedar, Tanjungsari, Tomo, Ujungjaya; dan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.1.5.5. Meningkatkan kapasitas direncanakan jalur dan tempat evakuasi bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.1.5.6. Pemasangan tanda / peringatan dini terhadap daerah rawan bencana / mitigasi bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.6. kawasan lindung geologi;			
	2.1.6.1. Pengendalian dan pengawassan terhadap kawasan Cekungan Air Tanah (CAT)	Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.6.2. Pembuatan delineasi zona kritis, zona rawan dan zona aman pada kawasan cenkungan air tanah	Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.6.3. Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sempadan mata air	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar dan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.7. kawasan lindung lainnya			
	2.1.7.1. Pelestarian terhadap kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	APBN/APBD Prov /Swasta/Publik	2021-2023
	2.1.7.2. Penyediaan dan penataan terhadap ruang terbuka hijau publik pada kawasan perkotaan	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.7.3. Pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau privat pada pada halana rumah / gedung	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2 Perwujudan Kawasan Budidaya			
	2.2.1. Kawasan Hutan Produksi			
	2.2.1.1. Penetapan tata batas kawasan Hutan produksi terbatas	Kecamatan Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatigede, Tomo, Conggeang, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.1.2. Pemanfaatan/Penguasaan Hutan produksi terbatas secara lestari	Kecamatan Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatigede, Tomo, Conggeang, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.1.3. Penetapan tata batas kawasan Hutan produksi tetap	Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan, Wado, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.1.4. Pemanfaatan/Penguasaan Hutan produksi	Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan, Wado, Jatigede, Tomo,	APBN/APBD Prov/	2020-2023

No.	Program Utama		Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	tetap secara lestari		Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	Swasta/Publik	
	2.2.2.	Kawasan Hutan rakyat			
	2.2.2.1.	Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat lestari	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.2.2.	Pemanfaatan/ Pengembangan Hutan dengan perlibatan masyarakat/ sebagai inti dalam pola PIR	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.2.3.	Pemanfaatan/Pengusahaan dan Pengembangan hutan rakyat dan plasma dalam pola PIR	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.3.	Kawasan Peruntukan Pertanian			
	2.2.3.1.	Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.2.	Pelestarian dan pemanfaatan sumber mata air dalam mendukung sektor pertanian (Pembuatan embung / kolam penampungan air)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.3.	Penyusunan kajian dan regulasi peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBD Kab	2019-2023
	2.2.3.4.	Pengembangan perkebunan rakyat dengan perlibatan masyarakat atau sebagai inti dalam pola Perkebunan inti Rakyat (PIR);	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	
	2.2.3.5.	Pengembangan kegiatan peternakan;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.6.	Optimalisasi budidaya peternakan;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.7.	Pengembangan budidaya peternakan;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.8.	Pengembangan peternakan besar dan kecil;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.9	Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.10.	Pengembangan kawasan peternakan yang	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov	2019-2023

No.	Program Utama			Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
			memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;		/APBD/Swasta/Publik	
		2.2.3.11.	Budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.3.12.	Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, serta berada di luar area rawan banjir dan longsor;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.3.13.	Dalam penetapan komoditas kopi, selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.3.14.	Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan permukiman dalam perkebunan masing-masing.	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.3.15.	Peningkatan dan pengembangan potensi unggulan serta penguatan kelembagaan terhadap para pelaku pertanian, industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Agrobisnis)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.3.16.	Penguatan industri pertanian dalam mendukung sektor pariwisata (Agrowisata)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.3.17.	Peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan petani/buruh tani serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan petani / buruh tani	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.4.	Kawasan Peruntukan perikanan				
		2.2.4.1.	Pengembangan budidaya perikanan kolam dan mina padi	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.4.2.	Pengembangan perikanan perairan umum	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.4.3.	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk mendukung Kawasan wisata Waduk Jatigede	Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
		2.2.4.4.	Pembangunan sarana dan prasarana	Kecamatan Cimalaka, Tanjungkerta, Paseh, Buahdua, conggeang, Jatigede,	APBN/APBD Prov	2019-2023

No.	Program Utama			Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
			minapolitan kawasan Tampomas dan Kawasan Waduk Jatigede	Jatinunggal, Wado, Darnaraja, Situraja dan Cisitu	/APBD/Swasta/Publik	
	2.2.5.	Kawasan Peruntukan Pertambangan				
		2.2.5.1.	Penataan dan penelitian zonasi potensi pertambangan;	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
		2.2.5.2.	Pendataan Ulang izin usaha pertambangan;	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
		2.2.5.3.	Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap aktivitas pertambangan	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
		2.2.5.4.	Reboisasi tanaman untuk menahan tanah;dan	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
		2.2.5.5.	Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya yang merupakan *enclave* dalam kawasan budidaya lainnya, dengan prosedur teknis dan legal yang berlaku.	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
	2.2.6.	Kawasan Peruntukan Industri				
		2.2.6.1.	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri Besar	Kecamatan Cimanggung, Jatinangor, Ujungjaya, Tomo dan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022
		2.2.6.2.	Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dalam rangka mendukung *Aerocity* Kertajati;	Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
				Kawasan Hutan Produksi Ujungjaya dan Tomo	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
		2.2.6.3.	Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dalam rangka mendukung *Aerocity* Kertajati;	Kecamatan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
		2.2.6.5.	Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan tol Cisumdawu di PKL, PPK, dan PPL serta desa dan kelurahan yang potensial;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
		2.2.6.6.	Membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada *rest area* Tol Cisumdawu;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
		2.2.6.7.	Menempatkan produk usaha mikro, kecil dan menengah pada rest-rest area dengan pola kemitraan;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
		2.2.6.8.	Pengembangan aneka produk olahan;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023

No.	Program Utama		Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.6.9.	Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.6.10.	Peningkatan kemampuan teknologi industri; dan	Kecamatan Ujungjaya, Tomo dan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.6.11.	Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer, sekunder, dan kolektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.7.	Kawasan Peruntukan Pariwisata			
	2.2.7.1.	Pengembangan satuan kawasan wisata;	1 SKW Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
			2 SKW Kampung Toga	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
			3 SKW Cibimbing	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
			4 SKW Gunung Lingga	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
			5 SKW Tamphomas	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
			6 SKW Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
			7 SKW Cadaspangeran	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	2.2.7.2.	Penataan benda cagar budaya yang tergenang Waduk Jatigede;	Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.7.3.	Pengembangan obyek wisata utama;	Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.7.4.	Pengembangan budaya, pariwisata dan cagar budaya;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.7.5.	Pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.7.6.	Penyusunan kalender wisata kabupaten; dan	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020
	2.2.7.7.	Penyelenggaraan kegiatan festival gelar seni budaya.	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.7.8.	Pengembangan Gedung Pusat Informasi dan Komunikasi Kawasan Wisata Jatigede	Kawasan Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.7.9.	Pengembangan Gedung Moseum Sejarah dan Benda Cagar Budaya Jatigede	Kecamatan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.7.10 Peningkatan dan Pengembangan Sarana / Prasarana Pariwisata dan Olahraga	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022
	2.2.7.11. Penyelenggaraan festival gelar seni budaya	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.7.12. Pengembangan terminal budaya pada kawasan wisata batudua	Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2022
	2.2.7.13. Pengembangan geotheater Rancakalong	Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2021
	2.2.8. Kawasan Peruntukan Permukiman			
	2.2.8.1. Permukiman Perkotaan			
	a Penataan ruang dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	b Penataan jalan lingkungan perkotaan	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	c Penataan pedestrian lingkungan perkotaan	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	d Penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	f Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/Lansia/Anak terlantar/psikososial pada setiap Kelurahan	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	g Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana keseharan di setiap kelurahan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	h Peningkatan dan pengembangan sarana ibadah di setiap kelurahan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	i Peningkatan pelayanan informasi dan telekomunokasi di setiap kelurahan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	j Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan di perkotaan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.8.2. Permukiman Perdesaan			
	a Penataan ruang dan pengembangan Kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari,	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
		Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.		
	b Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani	Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	c Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan pedesaan	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	d Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/Lansia/Anak terlantar/psikososial pada setiap Desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	e Peningkatan dan Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan petani dan buruh tani setiap Desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	f Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana keseharan di setiap desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong,	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
		Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.		
	g Peningkatan dan pengembangan sarana ibadah di setiap desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	h Peningkatan pelayanan informasi dan telekomunikasi di setiap desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	i Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan di pedesaan	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.9. Kawasan peruntukan Lainnya			
	2.2.9.1. Mengembangkan sarana dan prasarana instalasi pembangkit listri tenaga air parakan kondang di jatigede	Kecamatan Jatigede, Cibugel, Conggeang dan Surian	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.3. Meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang;	Kecamatan Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.4. Pengembangan Kawasan Pendidikan Jatinangor sebagai Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) berbasis teknologi informasi;	Kecamatan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.5. Mengembangkan pendidikan tinggi; dan	Kecamatan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.6. Menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan.	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.9.7. Peningkatan dan penataan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP)	Kecamatan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
III	**Perwujudan Kawasan Strategis**			
	1 KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi			
	3.2.1. Penyusunun dokumen study kelayakan	Kawasan Industri Ujungjaya, Kawasan Industri Buahdua, Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019
	3.2.2. Penyusunan Dokumen Rencana Induk	Kawasan Industri Ujungjaya, Kawasan Industri Buahdua, Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020
	3.2.3. Penyusunan Dokumen DED	Kawasan Industri Ujungjaya, Kawasan Industri Buahdua, Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021
	2 KSK Sudut kepentingan Sosial Budaya			
	3.2.1. Penyusunun dokumen study kelayakan	Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede dan Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020
	3.2.2. Penyusunan Dokumen Rencana Induk	Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede dan Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021
	3.2.3. Penyusunan Dokumen DED	Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede dan Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022
	3 KSK Sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi			
	3.3.1. Penyusunun dokumen study kelayakan	Kawasan Gn. Tampomas dan sekitarnya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021
	3.3.2. Penyusunan Dokumen Rencana Induk	Kawasan Gn. Tampomas dan sekitarnya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022
	3.3.3. Penyusunan Dokumen DED	Kawasan Gn. Tampomas dan sekitarnya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2023

Sumber Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2023

6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama 5 tahun yang terhubung dengan arah kebijakan dan dipayungi oleh tema/fokus tahunan. Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk rangkaian cerita yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Dalam penyusunan arah kebijakan perlu dipertimbangkan urgensi dari suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang dikorelasikan dengan sebelas strategi pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.4 di bawah ini.

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif

No	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik
2	Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia
		Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin
3	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan
		Mendorong pengembangan pendidikan karakter
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat
		Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi
		Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian
		Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah
5	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik
		Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
		Mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
6	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan

No	Strategi	Arah Kebijakan
		event visit wonderful Indonesia
7	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima
		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
		Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi
		Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja
		Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
8	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitaliasasi pasar tradisional
		Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat
9	Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis
		Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
10	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan
11	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan

No	Strategi	Arah Kebijakan
	kebutuhan pasar tenaga kerja	lapangan kerja
		Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda
		Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 6.5

Tema Tahunan dan Penjelasannya

No	Tema/Fokus	Penjelasan
1	**Tema/Fokus Tahun 2019 :** Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang.	**Tema tahun 2019 mengacu pada tema dalam RKPD tahun 2019 yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 ditetapkan.** Arah pembangunan di Tahun 2019 diarahkan pada pemberdayaan ekonomi sesuai kekhasan dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan itu fokus juga diarahkan pada upaya pengurangan kemiskinan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang menyandang masalah sosial.
2	**Tema/Fokus Tahun 2020 :** Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk menciptkan pelayanan dasar prima dengan orientasi pada peningkatan pembangunan SDM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.	**Kata Kunci 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur =** mencakup penyelenggaraan program dan kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki manajemen pemerintah dan profesionalisme aparatur, fokus dilaksanakan di tahun 2020.
		Kata Kunci 2 : menciptakan pelayanan dasar prima = mencakup penyelenggaraan program dan kegiatan yang ditujukan untuk pelayanan dasar (pendidikan-kesehatan-pengurangan kemiskinan-pemberdayaan masyarakat-pembangunan infrastruktur dasar), sudah mulai dilaksanakan di tahun 2020.
		Kata Kunci 3 : dengan orientasi pada peningkatan pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi = Program dan kegiatan dalam kata kunci di atas ditujukan untuk mempersiapkan pembangunan SDM-penguatan infrastruktur-dan pembangunan ekonomi yang inklusif merata dan berkelanjutan di tahun 2021.
3	**Tema/Fokus Tahun 2021 :** Penguatan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya	**Kata Kunci 1 : Penguatan infrastruktur untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar =** pada tahun 2021 fokus program-kegiatan pembangunan infrastruktur diiarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan-kesehatan-kegiatan ekonomi-pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan-dengan memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan.

No	Tema/Fokus	Penjelasan
	manusia yang agamis, produktif dan mandiri.	**Kata Kunci 2 : menunjang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata =** Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan dapat menstimulus pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan menjunjung asas pembangunan berkelanjutan.
		Kata Kunci 3 : serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri = Program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan SDM yang agamis dan mandiri setiap tahun dilaksanakan dengan proporsi berimbang.
4	**Tema/Fokus Tahun 2022 :** Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian daerah	**Kata Kunci 1 : Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian daerah =** pada tahun 2022 program-kegiatan penguatan infrastruktur (peningkatan dan pemeliharaan) untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah dilaksanakan tetap dilanjutkan sesuai target, sehingga dapat menunjang peningkatan pembangunan sumber daya manusia (kesehatan-pendidikan-akses terhadap sumberdaya ekonomi-pemberdayaan-internalisasi moral agama kepada masyarakat) agar tercipta kemudahan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pada tahun 2022 program dan kegiatan untuk pembangunan manusia (kesehatan-pendidikan-akses terhadap sumberdaya ekonomi-pemberdayaan-internalisasi moral agama kepada masyarakat) tetap dilaksanakan sesuai target.
5	**Tema/Fokus Tahun 2023 :** Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri untuk meningkatkan daya saing daerah.	**Kata Kunci 1 : Memantapkan pembangunan SDM yang agamis produktif dan mandiri untuk meningkatkan daya saing daerah =** Pada tahun 2023 program-kegiatan yang di tahun sebelumnya dilaksanakan, tetap dilaksanakan sesuai target dengan asumsi program-kegiatan tersebut relevan dengan goals yang ingin diwujudkan, yakni memantapkan sumber daya manusia untuk mewujudkan daya saing daerah. Sumber daya manusia dalam konteks ini mencakup masyarakat dan aparatur. Kemudian daya saing daerah menjadi muara pembangunan 2019-2023, asumsi dalam hal ini adalah daya saing daerah terwujud didalamnya sudah termasuk pertumbuhan ekonomi yang merata, kemudahan aksesibilitas pelayanan dasar, konektivitas daerah, pengurangan kemiskinan, masyarakat mandiri, dst.

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarakan tema diatas maka arah kebijakan dijabarkan dalam horison waktu sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Dengan adanya penentuan horison waktu maka susunan arah kebijakan secara logis akan dilaksanakan secara bertahap dimana suatu arah kebijakan dapat mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Fokus arah

kebijakan pada periode RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6.
Fokus Arah Kebijakan pada Tema Tahunan

No	Arah Kebijakan	Fokus pada Tema Tahunan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat			■		■
2	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif			■		■
3	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing		■	■		■
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik		■	■		■
5	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak			■		■
6	Meningkatkan Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia			■		■
7	Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin	■		■		■
8	Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan IkLIM		■	■		
8	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan			■		■
9	Mendorong pengembangan pendidikan karakter			■		■
10	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat	■		■	■	

No	Arah Kebijakan	Fokus pada Tema Tahunan				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi					
12	Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian					
13	Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah					
14	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang					
15	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik					
16	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara					
17	Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal					
18	Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan *event visit wonderful Indonesia*					
19	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima					
20	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika					
21	Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi					
22	Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja					

No	Arah Kebijakan	Fokus pada Tema Tahunan				
		2019	2020	2021	2022	2023
23	Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					
24	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah					
25	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitaliasasi pasar tradisional					
26	Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat					
27	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis					
28	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam					
29	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan					
30	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja					
31	Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda					
32	Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif					

Sumber : Hasil Analisis

Fokus arah kebijakan Selain program unggulan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program Dengan Indikator Program sebagaimana Tabel 6.7

Tabel 6.7
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023

No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	**PENDIDIKAN**			
	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Dinas pendidikan
	pendidikan dasar	Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Dinas pendidikan
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP	
			Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP	
	pendidikan kesetaraan.	Program Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni Paket A	Dinas pendidikan
			Angka Partisipasi Murni Paket B	
			Angka Partisipasi Murni Paket C	
2	**KESEHATAN**			
	pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan ibu bersalin			Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase BBLR	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan balita;		Persentase balita gizi lebih	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;		Persentase balita kurus	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan pada usia produktif;		Persentase anak kelas 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan pada usia lanjut;		Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Surveialns epidemiologi	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular sesuai standar	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;			Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;			Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan		Persentase Penanganan Penyakit Menular sesuai standar	Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan orang dengan risiko			Dinas Kesehatan

No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus			
3	**PEKERJAAN UMUM**			
	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sarana air minum yang terbangun	Dinas Perumahan dan Permukiman
	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	1. Prosentase Sanitasi yang terbangun 2. Jumlah SPALD yang terbangun	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	**PERUMAHAN RAKYAT**			
	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Luas Pengurungan Permukiman kumuh 2. Cakupan Ketersedinaan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman
	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota			Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT**			
	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamomg Praja
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	
		Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	
	pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Badan penanggulangan bencana daerah
	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan	Badan penanggulangan bencana daerah
	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; d		Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam	Badan penanggulangan bencana daerah
	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Satuan Polisi Pamomg Praja
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
6	**SOSIAL**			
	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;		Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;		Persentase Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Merujuk arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan di atas maka disampaikan keterkaitan tujuan – sasaran – strategi – arah kebijakan pada Tabel 6.8 di bawah ini.

Tabel 6.8.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023					
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau					
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat
					Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
					Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Terwujudnya penanggulangulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	3.1	Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		3.2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak		Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia
					Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan					
1	Terwujudnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan
		1.2	Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar		Mendorong pengembangan pendidikan karakter
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal					
1		1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat
		1.2	Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat		Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi
					Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian
					Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah
		1.3	Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah	Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis
		1.4	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah		Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
		1.5	Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata		Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan *event visit wonderful Indonesia*
		1.6	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan
2	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	2.1	Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
					Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik
					Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
		2.2	Pengurangan indeks resiko bencana		Mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.					
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	1.1	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima
		1.2	Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
		1.3	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara		Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi
		2.2	Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT		Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang					
1	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dari usaha mikro lokal	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah
		1.2	Tersedianya Fasilitas pendukung wirausaha		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitaliasasi pasar tradisional
					Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang produktif	2.1	Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja
					Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda
					Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sumedang

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau															
TUJUAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indikator Tujuan 1:** Angka Harapan Hidup	**Tahun**	**72,07**	**72,26**		**72,44**		**72,63**		**72,81**		**73,00**		**73,00**	
SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	**Indikator Sasaran 1:** Jumlah kematian Ibu	Jiwa	16	13		10		8		7		8		6	DINAS KESEHATAN
	Indikator Sasaran 2: Jumlah kematian bayi	Jiwa	155	140		120		94		70		50		50	
	Indikator Sasaran 3: Persentase Balita Stunting	Persen	32.2	29		26		23		20		17		17	
	Indikator Sasaran 4: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85		87		90		91		92		92	
	Indikator Sasaran 5: IKM Rumah Sakit	Poin	83,70	90		91		92		93		95		95	
Program 1: Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**Indikator Program 1:** Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik	Persen	100	100	90.050.000.000	100	160.600.000.000	100	181.625.000.000	100	209.675.000.000	100	161.675.000.000	100	DINAS KESEHATAN
	Indikator Program 2: Persentase capaian SDM Bidang Kesehatan	Persen	83	100		100		100		100		100		100	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17
Program 2: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi	**Indikator Program 1:** Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar	Persen	100	100	6.471.319.000	100	5.500.000.000	100	6.000.000.000	100	6.500.000.000	100	7.000.000.000	100		DINAS KESEHATAN
	Indikator Program 2: Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Indikator Program 3: Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Indikator Program 4: Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program 3: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	**Indikator Program 1:** Persentase ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan	Persen	100	100	22.900.000.000	100	47.650.000.000	100	61.700.000.000	100	81.700.000.000	100	101.700.000.000	100		DINAS KESEHATAN
	Indikator Program 2: Persentase ketersediaan alat kesehatan	Persen	60	70		80		90		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 4: Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	**Indikator Program 1:** Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Persen	8,07	7,67	5.604.999.000	7,27	7.200.000.000	6,87	4.500.000.000	6,47	4.500.000.000	6,07	4.500.000.000	6,07	DINAS KESEHATAN
	Indikator Program 2: Persentase BBLR	Persen	3,09	2,49		1,81		1,17		0,53		0,11		0,11	
	Indikator Program 3: Persentase balita gizi lebih	Persen	1,01	0,95		0,79		0,63		0,47		0,31		0,31	
	Indikator Program 4: Persentase balita gizi kurus	Persen	2,11	1,01		0,91		0,81		0,71		0,61		0,61	
	Indikator Program 5: Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan	Persen	54,20	100		100		100		100		100		100	
Program 5: Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Indikator Program 1:** Cakupan Desa siaga aktif	Persen	100	100	1.850.000.000	100	2.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.750.000.000	100	4.250.000.000	100	DINAS KESEHATAN
Program 6: Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	**Indikator Program 1:** Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis	Persen	86,21	90	203.700.000.000	91	207.800.000.000	92	212.000.000.000	93	216.700.000.000	95	221.000.000.000	95	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Indikator Program 2: Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan	Persen	88,64	90		91		92		93		95		95	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 3: Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis	Persen	87,96	90		91		92		93		95		95	
TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	**Indikator Tujuan 1 :** Rata-rata Lama Sekolah	**Tahun**	**8,10**	**8,29**		**8,48**		**8,67**		**8,86**		**9,07**		**9,07**	
	Indikator Tujuan 2 : Angka Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**13,00**	**13,22**		**13,44**		**13,66**		**13,88**		**14,11**		**14,11**	
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	**Indikator Sasaran 1:** APK PAUD	Persen	88,44	89,53		89,62		89,71		89,80		89,89		89,89	DINAS PENDIDIKAN
	Indikator Sasaran 2: APK SD	Persen	106,75	106,83		106,93		107,03		107,13		107,23		107,23	
	Indikator Sasaran 3: APK SMP	Persen	103,42	103,62		103,72		103,82		103,92		104,02		104,02	
	Indikator Sasaran 4: APM SD	Persen	105,23	105,34		105,44		105,55		105,65		105,76		105,76	
	Indikator Sasaran 5: APM SMP	Persen	102,78	102,99		103,19		103,40		103,60		103,81		103,81	
	Indikator Sasaran 6: Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	Persen	1,35	1,63		1,90		2,10		2,40		2,70		2,70	
Program 1: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Indikator Program 1:** Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	97,20	97,49	694.000.000	98,00	7.327.750.000	99,00	7.110.250.000	100,00	7.110.250.000	100,00	7.110.250.000	100,00	DINAS PENDIDIKAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 2: Rata rata peningkatan hasil UN	Persen	46,13	49,82		53,51		57,20		60,89		64,58		64,58	
Program 2: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**Indikator Program 1:** Cakupan Pelayanan Pendidikan	Persen	85,47	86,32	1.992.500.000	87,17	4.901.905.250	88,03	4.943.269.700	88,89	4.847.095.110	90,00	4.897.946.600	90,00	DINAS PENDIDIKAN
Program 3: Program Pendidikan Dasar	**Indikator Program 1:** Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Persen	119,01	119,13	253.112.182.000	119,25	105.571.400.000	119,37	111.139.195.000	119,49	116.960.665.000	119,61	123.044.960.000	119,61	DINAS PENDIDIKAN
	Indikator Program 2: Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	Persen	88,69	88,95		89,21		89,48		89,74		90,00		90,00	
	Indikator Program 3: Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	0,09	0,08		0,07		0,06		0,05		0,04		0,04	
	Indikator Program 4: Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	0,81	0,80		0,79		0,78		0,76		0,75		0,75	
	Indikator Program 5: Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik	Persen	13,45	21,51		29,50		37,40		45,59		53,48		53,48	
Program 4: Program Pendidikan Anak Usia Dini	**Indikator Program 1:** Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Persen	n/a	100	53.003.900.000	100	23.172.308.000	100	24.394.414.600	100	25.672.195.000	100	27.007.662.000	100	DINAS PENDIDIKAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 5: Program Kesetaraan	**Indikator Program 1:** Angka Partisipasi Kasar Paket A	Persen	0,01	0,05	1.956.818.000	0,04	4.954.558.500	0,03	4.968.432.000	0,02	4.982.936.000	0,01	5.118.095.000	0,01	DINAS PENDIDIKAN
	Indikator Program 2: Angka Partisipasi Kasar Paket B	Persen	0,71	0,60		0,50		0,40		0,30		0,20		0,20	
	Indikator Program 3: Angka Partisipasi Kasar Paket C	Persen	3,13	3,03		2,93		2,83		2,73		2,63		2,63	
TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	**Indikator Tujuan 1:** Persentase Penduduk Miskin	**Persen**	**9,76**	**8,96**		**8,16**		**7,36**		**6,56**		**5,76**		**5,76**	
	Indikator Tujuan 2: Indeks Pembangunan Gender	**Poin**	**94,40**	**94,87**		**95,34**		**95,81**		**96,28**		**96,75**		**96,75**	
	Indikator Tujuan 3: Indeks Pemberdayaan Gender	**Poin**	**68,70**	**69,23**		**69,77**		**70,30**		**70,84**		**71,37**		**71,37**	
SASARAN 1: Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**Indikator Sasaran 1:** Persentase Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25		8,45		7,65		6,85		6,05		6,05	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Sasaran 2: Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	Persen	0,70	1,70		2,70		3,70		4,70		5,70		5,70	
Program 1: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	**Indikator Program 1:** Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	1,71	2,86	2.250.000.000	4,01	2.300.000.000	5,18	2.330.000.000	6,33	2.250.000.000	7,49	2.340.000.000	7,49	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
Program 2: Program Jaminan Sosial	**Indikator Program 1:** Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Persen	52.14	53,24	2.850.000.000	53,24	4.600.000.000	53,24	4.600.000.000	53,24	4.600.000.000	53,24	4.600.000.000	53,24	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
Program 3: Program Perlindungan Sosial	**Indikator Program 1:** Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	200.000.000	100	550.000.000	100	580.000.000	100	633.795.297	100	650.000.000	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 4: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Indikator Program 1:** Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Persen	8,53	16,88	2.250.000.000	26,17	2.205.000.000	35,36	2.200.000.000	44,79	2.280.000.000	54,28	2.280.000.000	54,28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
	Indikator Program 2: Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	2,77	11,17		20,74		29,79		40,00		51,60		51,60	
	Indikator Program 3: Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	5,73	14,89		24,05		33,21		42,37		53,05		53,05	
	Indikator Program 4: Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0,68	10,61		20,54		30,47		40,41		50,34		50,34	
	Indikator Program 5: Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persen	n/a	10		20		30		40		50		50	
Program 5: Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Indikator Program 1:** Persentase Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	50	58,33	200.000.000	58,33	550.000.000	58,33	500.000.000	58,33	500.000.000	58,33	480.000.000	58,33	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 6: Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	**Indikator Program 1:** Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	12,84	13,96	1.290.000.000	15,07	720.000.000	16,19	774.879.411	17,31	750.000.000	18,42	750.000.000	18,42	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
Program 7: Program Ketahanan Keluarga	**Indikator Program 1:** Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS	Persen	49,62	50,07	140.000.000	51,93	147.434.000	53,79	155.209.700,00	55,65	163.339.600,00	57,51	171.836.500,00	57,51	DINAS PENGENDALI-AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SASARAN 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	**Indikator Sasaran 1 :** Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
	Indikator Sasaran 2 : Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601		650		701		750		801		801	
Program 1: Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	**Indikator Program 1:** Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	100	288.000.000	100	535.000.000	100	515.864.100	100	527.733.250	100	688.650.300	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
	Indikator Program 2: Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	3,85	19,23		30,77		42,31		53,85		73,08		73,08	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 2: Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	**Indikator Program 1:** Persentase OPD Responsif Gender	Persen	9,68	16,13	220.000.000	33,87	595.000.000	61,29	620.000.000	80,65	720.000.000	100	600.000.000	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
	Indikator Program 1: Jumlah Kebijakan Pengarustamaan Gender yang dihasilkan	Perda/ Perbup	1	3		4		5		6		7		7	
Program 3: Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	**Indikator Program 1:** Persentase Organisasi wanita yang aktif	Persen	9,52	14,29	40.000.000	33,33	127.543.800	54,76	150.000.000	76,19	150.000.000	100	150.000.000	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan															
TUJUAN 1: Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	**Indikator Tujuan 1:** Indeks Kerukunan Umat Beragama	**Poin**	**72,2**	**72,5**		**73,0**		**73,5**		**74,0**		**74,5**		**74,5**	
SASARAN 1: Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	**Indikator Sasaran 1:** Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,2	72,5		73,0		73,5		74,0		74,5		74,5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program 1: Program Kerukunan Umat Beragama	**Indikator Program 1:** Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan	Jumlah	0	0	0	0	500.000.000	0	526.370.000	0	553.941.260	0	582.757.284	0	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 2: Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	**Indikator Program 1:** Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih	Persen	60,00	100	-	100	1.860.000.000	100	1.958.096.400	100	2.060.661.500	100	2.167.857.100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Program 3: Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	**Indikator Program 1:** Cakupan penegakan peraturan daerah yang tertangani	Persen	100	100	1.150.000.000	100	1.211.065.000	100	1.274.936.568	100	1.341.717.746	100	1.411.513.903	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SASARAN 2: Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	**Indikator Sasaran 1 :** Persentase siswa bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0		100		100		100		100		100	DINAS PENDIDIKAN
Program 1: Program penyelenggaraan pendidikan wajib diniyah Kabupaten	**Indikator Program 1:** Persentase siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan diniyah	Persen	n/a	0	-	100	5.300.000.000	100	5.263.700.000	100	5.939.412.600	100	5.827.527.850	100	DINAS PENDIDIKAN
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan loka															
TUJUAN 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	**Indikator Tujuan 1 :** Laju Pertumbuhan Ekonomi	**Persen**	**6,48**	**6,74**		**7,01**		**7,29**		**7,58**		**7,88**		**7,88**	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	**Indikator Sasaran 1 :** Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	Persen	62,80	66,80		70,80		74,80		78,80		82,80		82,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Indikator Sasaran 2 : Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27		42,12		51,83		64,88		77,27		77,27	DINAS PERHUBUNG-AN
	Indikator Sasaran 3 : Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62		64		66		68		70		70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program 1: Program Penanganan Jalan dan Jembatan	**Indikator Program 1:** Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	62,80	66,80	142.455.015.000	70,80	371.400.135.151	74,80	349.631.704.224	78,80	294.739.571.883	82,80	302.263.572.175	82,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program 2: Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	**Indikator Program 1:** Persentase Kelengkapan Dokumen perhubungan	Persen	5,06	6,25	8.610.000.000	8,42	7.142.036.000	10,37	8.144.962.629	12,98	9.342.046.871	15,45	9.402.016.261	15,45	DINAS PERHUBUNG-AN
	Indikator Program 2: Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas	Persen	7,59	9,38		12,64		15,55		19,46		23,18		23,18	
	Indikator Program 3: Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	Persen	10,12	12,51		16,85		20,73		25,95		30,91		30,91	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 3: Persentase ketersedian Terminal/Dermaga	Persen	2,53	3,13		4,21		5,18		6,49		7,73		7,73	
Program 3: Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	**Indikator Program 1:** Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	42,00	43,40	32.624.497.000	44,80	32.397.703.291	46,20	34.422.380.857	47,60	34.958.192.612	49,00	33.053.356.006	49,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program 4 Program Pengendalian Banjir	**Indikator Program 1:** Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor	Persen	18,00	18,60	641.250.000	19,20	5.575.300.375	19,80	4.600.000.000	20,40	4.550.000.000	21,00	4.887.072.426	21,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SASARAN 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	**Indikator Sasaran 1:** Cakupan trayek angkutan umum	Persen	58,45	59,85		61,24		62,64		64,04		65,43		65,43	DINAS PERHUBUNG-AN
	Indikator Sasaran 2: Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	Orang/hari	10.044	10.284		10.524		10.764		11.004		11.244		11.244	
Program 1: Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	**Indikator Program 1:** Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	837	857	1.112.500.000	877	3.096.728.750	897	2.518.794.574	917	1.951.301.634	937	2.531.413.593	937	DINAS PERHUBUNG-AN
	Indikator Program 2: Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	Orang/ hari	10.044	10.284		10.524		10.764		11.004		11.244		11.244	
	Indikator Program 3: Jumlah KIR angkutan umum	Unit	9.000	9.357		9.714		10.071		10.428		10.787		10.787	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 4: Persentase Satuan Ruas Parkir	Persen	50	60		70		80		90		100		100	
SASARAN 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis	**Indikator Sasaran 1:** 1. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	a. Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14		10,24		10,34		10,45		10,55		10,55	
	b. Hortikultura	Persen	3,20	4,00		4,70		5,40		6,10		6,80		6,80	
	c. Perkebunan	Persen	4,12	4,20		4,80		5,50		6,20		6,90		6,90	
	Indikator Sasaran 2: laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	3,68	4,30		4,90		5,50		6,10		6,70		6,70	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Indikator Sasaran 3: Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Persen	3,15	4,00		4,60		5,20		5,80		6,40		6,40	
Program 1: Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	**Indikator Program 1:** Jumlah produksi Tanaman Pangan	Ton	740.732	815.842	2.650.000.000	899.384	2.790.715.000	992.381	2.937.897.400	1.096.085	3.091.784.400	1.211.722	3.252.700.000	1.211.722	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Indikator Program 2: Jumlah produksi Hortikultura	Ton	151.333	157.386		164.783		173.682		184.276		196.807		196.807	
	Indikator Program 3: Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	6.462	6.733		7.057		7.445		7.906		8.452		8.452	
Program 2: Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	**Indikator Program 1:** Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	5.752	6.052	38.592.724.000	6.352	23.659.127.900	6.652	24.906.910.250	6.952	26.211.550.000	7.252	27.575.058.300	7.252	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 2: Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	1,85	1,95		2,05		2,15		2,25		2,35		2,35	
	Indikator Program 3: Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	Km	62	77		92		107		122		137		137	
Program 3: Program Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian/perkebunan	**Indikator Program 1:** Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	120	1.300.000.000	138	1.369.030.000	157	1.441.232.650	179	1.516.724.500	206	1.595.624.500	206	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Indikator Program 2: Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	48	53		58		63		68		73		73	
Program 4: Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	**Indikator Program 1:** Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	Teknologi/ penyuluh pertanian	3	6	3.463.542.000	9	1.678.159.100	12	1.766.665.200	15	1.859.203.200	18	1.955.918.900	18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Indikator Program 2: Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2.835	275		550		825		1.100		1.375		1.375	
	Indikator Program 3: Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242		2.242		2.242		2.242		2.242		2.242	
	-Kelas Pemula (skor 0-250)	Kelompok	767	762		757		752		746		739		739	
	-Kelas Lanjut (skor251-500)	Kelompok	1.405	1.406		1.407		1.408		1.410		1.413		1.413	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	-Kelas Madya(skor 501-750)	Kelompok	68	71		74		77		80		83		83	
	-Kelas Utama(skor 751-1000)	Kelompok	2	3		4		5		6		7		7	
Program 5: Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	**Indikator Program 1:** Jumlah populasi ternak				2.949.150.000		6.237.300.000		6.340.215.000		6.663.025.750		7.001.177.400		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	1. Sapi potong	Ekor	29.783	31.064		32.586		34.378		36.475		38.919		38.919	
	2. Sapi perah	Ekor	4.149	4.327		4.539		4.789		5.081		5.422		5.422	
	3. Kambing	Ekor	27.957	29.159		30.588		32.270		34.239		36.533		36.533	
	4. Domba	Ekor	111.324	116.111		121.800		128.499		136.338		145.472		145.472	
	5. Ayam buras	Ekor	519.506	541.845		568.395		599.657		636.236		678.864		678.864	
	6. Ayam ras petelur	Ekor	111.883	116.694		122.412		129.145		137.022		146.203		146.203	
	7. Ayam ras pedaging	Ekor	2.866.495	2.989.754		3.136.252		3.308.746		3.510.580		3.745.788		3.745.788	
	8. Itik	Ekor	49.553	51.684		54.216		57.198		60.687		64.753		64.753	
	Jumlah Produksi														
	1. Daging	Ton	15.474	16.139		16.930		17.861		18.951		20.221		20.221	
	2. Telur	Ton	1.639	1.709		1.793		1.892		2.007		2.142		2.142	
	3. Susu	Ton	12.323	12.853		13.483		14.224		15.092		16.103		16.103	
Program 6: Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi peternakan	**Indikator Program 1:** Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Unit	75	84	182.500.000	100	477.500.000	124	696.375.000	156	1.491.193.750	196	5.437.003.450	196	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Program 7: Program Peningkatan Produksi Perikanan	**Indikator Program 1:** Jumlah produksi perikanan				4.625.000.000		5.618.750.000		3.861.977.500		6.093.586.375		4.257.917.069		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	1.Ikan Konsumsi	Ton	8.286	8.617		9.014		9.483		10.033		10.675		10.675	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	2. Ikan Hias	Ekor	612.470	636.969		666.269		700.915		741.568		789.029		789.029	
	3. Benih Ikan	Ribu Ekor	179.275	186.446		195.023		205.164		217.063		230.955		230.955	
Program 8: Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	**Indikator Program 1:** Jumlah unit pengolahan dan unit pemasaran perikanan yang tercatat	Unit	45	48	175.000.000	52	205.000.000	56	216.000.000	60	226.250.000	64	238.262.500	64	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
SASARAN 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	**Indikator Sasaran 1:** Skor Pola Pangan Harapan	Persen	85	87,30		88,50		89,60		90,80		92,50		92,50	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program 1: Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Indikator Program 1:** Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	7.645.000.000	100	1.732.349.500	100	1.823.713.650	100	1.919.239.750	100	2.019.078.600	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Indikator Program 2: Persentase Ketersediaan energi dan protein per kapita	Persen	91,50	92,50		93,50		94,50		95,00		95,50		95,50	
	Indikator Program 3: Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Program 2: Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Indikator Program 1:** Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	100	100	100.000.000	100	405.000.000	100	460.250.000	100	315.762.500	100	321.550.625	100	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
SASARAN 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	**Indikator Sasaran 1 :** Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498.472	598.166		717.800		861.360		1.033.632		1.240.358		4.451.316	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Indikator Sasaran 2 : Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Program 1: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	**Indikator Program 1:** Jumlah objek pemajuan kebudayaan Daerah yang di lindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Objek	11	11	650.000.000	11	850.000.000	11	950.000.000	11	1.050.000.000	11	1.060.000.000	11	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program 2: Program Pengembangan Kepariwisataan	**Indikator Program 1:** Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Kali	2	4	5.194.231.000	5	5.720.044.700	6	5.758.534.900	7	6.060.166.900	8	6.375.416.800	8	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Indikator Program 2: Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	1	5		10		15		20		25		25	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
SASARAN 6 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	**Indikator Sasaran 1** : Jumlah nilai investasi di Sumedang	(Rp x 1.000)	1.106.170.000	1.216.787.000		1.338.465.700		1.606.158.840		1.927.390.608.000		2.505.607.790,40		2.505.607.790,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program 1: Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	**Indikator Program 1 :** Persentase peningkatan jumlah investor	Persen	10	20	770.000.000	30	845.000.000	40	631.860.000	60	700.026.650	90	736.442.036	90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program 2: Program peningkatan promosi dan kemitraan penanaman modal	**Indikator Program 1:** Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	0	100	1.900.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUJUAN 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	**Indikator Tujuan 1:** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Poin**	**58,68**	**58,92**		**59,18**		**59,47**		**59,77**		**60,11**		**60,11**	
	Indikator Tujuan 2: Indeks Risiko Bencana	**Poin**	**162**	**155**		**150**		**145**		**140**		**135**		**135**	
SASARAN 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan	**Indikator Sasaran 1:** Persentase penanganan sampah	Persen	n/a	80		75		70		65		60		60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
berkelanjutan	**Indikator Sasaran 2:** Indeks kualitas air	Poin	47,89	48,09		48,29		48,49		48,69		48,89		48,89	
	Indikator Sasaran 3: Indeks kualitas udara	Poin	80,29	80,49		80,69		80,89		81,09		81,29		81,29	
	Indikator Sasaran 4: Indeks Tutupan Lahan	Poin	50,57	50,86		51,22		51,63		52,10		52,63		52,63	
	Indikator Sasaran 5: Persentase pengurangan sampah	Persen	n/a	20		25		30		35		40		40	
	Indikator Sasaran 6: Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04		11,07		11,11		11,14		11,17		11,17	
	Indikator Sasaran 7: Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100		100		100		100		100		100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Indikator Sasaran 8: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	60		65		70		75		80		80	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Indikator Sasaran 9: Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80		83		85		87		90		90	
	Indikator Sasaran 10: Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	80,67		81,33		82,00		82,67		83,33		83,33	
	Indikator Sasaran 11: Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,31	0,30		0,27		0,15		0,09		0,06		0,06	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	**Indikator Program 1:** Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Persen	26,90	30,90	860.000.000	36,56	905.666.000	43,81	953.430.825	52,78	1.003.371.531	63,79	1.055.566.919	63,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Indikator Program 2: Persentase penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 3: Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup;	Persen	15	30		50		70		80		100		100	
	Indikator Program 4: Persentase pengujian kualitas air sungai	Persen	40,74	48,15		55,56		62,96		70,37		81,48		81,48	
	Indikator Program 5: Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan	Persen	98,91	99,53		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 6: Persentase masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan	Persen	3,16	3,39		4,08		5,24		6,87		8,95		8,95	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 7: Persentase Pemantuan Kualitas Udara	Persen	66,.67	68,89		73,33		77,78		82,22		86,67		86,67	
Program 2: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Indikator Program 1:** Timbulan sampah yang ditangani	Persen	n/a	80	7.028.925.000	75	6.222.688.918	70	6.550.873.531	65	6.894.008.287	60	7.252.634.598,00	60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Indikator Program 2: Indeks kepuasan masyarakat	Persen	71,31	77		78		79		80		81		81	
	Indikator Program 3: Persentase cakupan area pelayanan	Persen	5,38	5,52		5,68		5,87		6,08		6,33		6,33	
	Indikator Program 4: Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/kota	Persen	68,53	69,00		69,33		69,67		70,00		70,67		70,67	
	Indikator Program 5: Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal	Persen	18,65	20		25		30		35		40		40	
Program 3: Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Indikator Program 1:** Persentase luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati	Persen	29,86	30,55	385.002.600	31,37	400.133.500	32,33	415.962.541	33,42	432.512.659	34,65	449.809.967	34,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 2: Persentase mata air yang dilindungi	Persen	12,12	13,42		15,15		19,48		21,65		27,27		27,27	
Program 4: Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Indikator Program 1:** Persentase Luas RTH terkelola	Persen	11,04	11,04	150.000.000	11,07	157.965.000	11,11	166.296.074	11,14	175.006.662	11,17	184.110.509	11,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program 5: Program pengembangan dan penataan wilayah	**Indikator Program 1:** Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen	20	28,75	32.129.300.000	48,75	9.614.065.830	58,75	10.121.111.700	68,75	10.651.255.500	75,00	11.205.333.900	75,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Indikator Program 2: Persentase Bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	Persen	n/a	4,54		12,04		19,54		27,04		33,04		33,04	
Program 6: Program Penataan Ruang	**Indikator Program 1:** Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan rencana tata ruang wilayah	Persen	100	100	2.820.000.000	100	2.969.742.000	100	3.126.366.200	100	3.290.125.300	100	3.461.277.570	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program 7: Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	**Indikator Program 1:** Persentase Sarana Air Minum yang terbangun	Persen	70	80	7.387.377.000	83	6.766.634.200	85	7.178.883.500	87	7.609.912.400	90	7.829.912.400	90	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 8: Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	**Indikator Program 1:** Persentase Sanitasi yang terbangun	Persen	55	65	7.122.499.442	70	6.766.634.200	75	7.178.883.500	80	7.609.912.400	85	7.829.912.400	85	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program 9: Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Indikator Program 1:** Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional	Persen	50	52,61	4.424.000.000	55,22	4.848.249.900	57,83	5.077.576.600	60,44	5.317.350.100	63,05	5.567.948.700	63,05	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Indikator Program 2: Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	80	80,13		80,30		80,48		80,67		80,87		80.87	
	Indikator Program 3: Persentase PSU di Lingkungan Kompleks Perumahan/Permukiman (Pengembang)	Persen	0	1,5		4,5		7,5		10,5		13,5		13,5	
SASARAN 2 : Pengurangan indeks resiko bencana	**Indikator Sasaran 1 :** Penurunan Indeks Risiko bencana	Poin	162	155		150		145		140		135		135	BADAN PENANGGU-LANGAN BENCANA DAERAH

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 1: Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	**Indikator Program 1:** Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Desa/ kelurahan	277	277	7.605.002.000	277	7.656.828.950	277	8.060.650.100	277	8.482.866.950	277	8.924.145.700	277	BADAN PENANGGU-LANGAN BENCANA DAERAH
	Indikator Program 2: Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/ Kelurahan	0	5		10		15		20		25		25	
	Indikator Program 3: Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 4: Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 5: Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direaliasikan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.															
TUJUAN 1: Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	**Indikator Tujuan 1:** Opini BPK	**Opini**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**	
	Indikator Tujuan 2: Nilai SAKIP Kabupaten	**Kategori**	**B**	**B**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Tujuan 3: Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**	**56.05**	**65**		**70**		**75**		**80.00**		**85**		**85**	
SASARAN 1: Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	**Indikator Sasaran 1:** Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	Indikator Sasaran 2: APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
	Indikator Sasaran 3: Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD	Persen	8.79	8		7		6		5		4		4	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Indikator Sasaran 4: Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80		90		90		100		100		100	
Program 1: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Indikator Program 1:** Tingkat akurasi dokumen penganggaran	Persen	90	92	6.367.500.000	93	6.705.614.250	94	7.059.268.346	95	7.429.032.821	97	7.815.491.109	97	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	Indikator Program 2: Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 3: Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	90	91		92		93		95		97		97	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 4: Tingkat ketepatan waktu penyampaian LK OPD dan LKPD	Persen	80	85		90		92		95		97		97	
	Indikator Program 6: Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Persen	86	87		88		89		90		91		91	
Program 2: Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Indikator Program 1:** Jumlah penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	400	380	5.100.000.000	371	6.614.633.000	360	7.492.000.000,00	353	8.615.800.000,00	340	9.908.170.000,00	340	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Indikator Program 2: Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	545	500		475		450		425		400		400	
Program 3: Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Indikator Program 1:** Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan	Persen	25	33,33	519.000.000	41,67	851.000.000	50,00	978.650.000	58,33	1.125.000.000	66,67	1.294.000.000	66,67	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Indikator Program 2: Persentase elemen IACM yang terpenuhi	Persen	66,67	100		100		100		100		100		100	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17
Program 4: Program Penegakan Integritas	**Indikator Program 1:** Persentase Penilaian Zona integritas	Persen	n/a	100	499.800.000	100	789.000.000	100	907.350.000	100	1.043.000.000	100	1.199.450.000	100		INSPEKTORAT KABUPATEN
SASARAN 2: Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**Indikator Sasaran 1:** Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,06	65,00		59,63		61,42		63,21		65,05		65,05		SEKRETARIAT DAERAH
	Indikator Sasaran 2: Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Indikator Sasaran 3: Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,09	3,15		3,30		3,45		3,60		3,75		3,75		
	Indikator Sasaran 4: Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	80		80		90		100		100		100		INSPEKTORAT KABUPATEN, SEKRETARIAT DAERAH
Program 1: Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	**Indikator Program 1:** persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik"	Persen	n/a	100	-	100	2.525.000.000	100	2.658.168.500	100	2.525.000.000	100	2.525.000.000	100		SEKRETARIAT DAERAH

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 2: persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 3: Nilai LPPD	Persen	3,09	3,15		3,30		3,45		3,60		3,75		3,75	
	Indikator Program 4: Persentase tertib administrasi kewilayahan	Persen	60	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 5: Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B"	Persen	0	60		69,23		88,46		100		100		100	
	Indikator Program 6: Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B		BB		A		A		A		A	
	Indikator Program 7: Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65		70		75		80		85		85	
Program 2 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Indikator Program 1:** Persentase keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	Persen	85	100	5.242.500.000	100	1.722.000.000	100	2.146.237.500	100	2.579.799.000	100	3.050.394.250	100	BADAN PERENCANA-AN PEMBANGUN-AN PENELITIAN DAN PENGEM-BANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 3 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	**Indikator Program 2:** Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik";	Persen	95	100		100	3.208.000.000	100	3.488.400.000	100	2.884.000.000	100	1.930.775.000	100	DAERAH
Program 4 : Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA	**Indikator Program 3:** Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori "Baik";	Persen	96,5	100		100	869.250.000	100	603.962.500	100	1.165.762.500	100	774.688.000	100	
Program 5 : Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	**Indikator Program 4:** Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik".	Persen	98	100		100	2.274.800.000	100	2.388.540.000	100	2.507.966.750	100	2.633.352.600	100	
Program 6; Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Indikator Program 1:** Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persen	100	100	5.100.000.000	100	6.614.633.000	100	7.492.000.000	100	8.615.800.000	100	9.908.170.000	100	INSPEKTORAT KABUPATEN
SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	**Indikator Sasaran 1 :** Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM-BANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Sasaran 2: Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,9	60,00		66,25		72,50		78,75		85,00		85,00	SUMBER DAYA MANUSIA
Program 1: Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur	**Indikator Program 1:** Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik	Persen	99,74	100	1.905.000.000	100		100		100		100	1.905.000.000	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indikator Program 2: Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi	Persen	56,31	65,00		73,79		82,53		91,26		100		100	
	Indikator Program 3: Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	0,020	0,018		0,016		0,014		0,012		0,010		0,010	
	Indikator Program 4: Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan	Persen	7,56	26,05		44,53		63,02		81,51		100		100	
Program 2: Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	**Indikator Program 1:** Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	17,77	30	2.633.100.500	50	1.881.205.185	70	1.980.419.950	85	2.084.154.350	100	2.192.572.100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indikator Program 2: Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	Persen	27,74	42,19		56,65		71,10		85,55		100		100	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
TUJUAN 2: Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	**Indikator Tujuan 1:** Indeks kepuasan masyarakat	**Poin**	**80,74**	**81,00**		**83,00**		**86,00**		**89,00**		**90,00**		**90,00**	
SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**Indikator Sasaran 1:** Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80		83		85		87		90		90	SEKRETARIAT DAERAH, SERTA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI FUNGSI PELAYANAN
	Indikator Sasaran 2: Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95		86,25		87,23		88,31		90,00		90,00	
Program 1: Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	**Indikator Program 1**: Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang	Persen	30	75	-	80	2.525.000.000	85	2.658.168.500	90	2.797.403.400	95	2.942.924.300	95	
Program 2: Program Peningkatan pelayanan perizinan	**Indikator Program 1:** Persentase izin yang terbit tepat waktu	Persen	60	75	555.984.000	76	485.506.750	77	516.386.376	80	548.672.695	85	582.416.648	85	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 3: Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Indikator Program 1:** Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu	Persen	100	100	5.210.093.000	100	5.731.102.300	100	6.304.212.600	100	6.304.212.600	100	6.934.633.800	100	DINAS KEPENDU-DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program 4: Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	**Indikator Program 1:** Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	81	94	259.500.000	94	399.831.000	97	527.007.887	97	581.800.360	97	620.000.000	97	DINAS KEPENDU-DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Indikator Program 2: Cakupan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	Persen	74	86		86		86		88		88		88	
	Indikator Program 3: Jumlah instansi yang menggunakan database kependudukan	Instansi	0	10		15		20		25		31		31	
SASARAN 2: Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	**Indikator Sasaran 1 :** Nilai SPBE	Poin	2,46	3,00		3,30		3,60		3,90		4,20		4,20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Program 1: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	**Indikator Program 1:** Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	26,92	50	3.040.950.000	100	2.949.564.000	100	3.105.125.000	100	3.267.771.000	100	3.437.759.900	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Indikator Program 2: Cakupan Media Masa yang dikembangkan	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 3: Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Persen	25,45	50		100		100		100		100		100	
	Indikator Program 4: Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan	Persen	93,86	96,39		100		100		100		100		100	
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang															
TUJUAN 1: Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	**Indikator Tujuan 1:** Pengeluaran Per Kapita	**Rp (juta)**	**9,67**	**10,06**		**10,38**		**10,70**		**11,04**		**11,35**		**11,35**	
	Indikator Tujuan 2: Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**	**7,04**	**6,55**		**6,35**		**6,15**		**5,96**		**5,68**		**5,68**	
SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	**Indikator Sasaran 1:** Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4,59	4,89		5,19		5,49		5,79		6,09		6,09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANG-AN
	Indikator Sasaran 2: Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,29	5,32		5,35		5,38		5,41		5,44		5,44	
	Indikator Sasaran 3: Cakupan Koperasi Aktif	Persen	72,93	75		78		81		84		85		85	

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 1: Program pengembangan industri kecil dan menengah	**Indikator Program 1:** Peningkatan kualitas IKM	IKM	1.771	3.478	1.200.000.000	3.746	1.400.000.000	4.013	1.400.000.000	4.281	1.400.000.000	4.602	1.400.000.000	4.602	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANG-AN
Program 2: Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	**Indikator Program 1:** Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	Orang	1.503	5.043	2.525.000.000	5.884	2.525.000.000	6.724	2.525.000.000	7.565	2.525.000.000	8.405	2.525.000.000	8.405	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANG-AN
	Indikator Program 2: Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk	Wilayah	0	1		2		3		4		5		5	
Program 3: Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	**Indikator Program 1:** Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	423	449	897.000.000	458	797.000.000	467	797000000	476	797000000	485	797000000	485	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANG-AN
Program 4: Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	**Indikator Program 1:** Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	Persen	35	50	385.546.400	95	750.000.000	100	1.250.000.000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	DINAS PEMBERDA-YAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program 5: Program pemberdayaan, penataan dan perlindungan pasar rakyat	**Indikator Program 1:** Jumlah pasar yang di revitalisasi	Pasar	10	10	3.650.000.000	10	3.650.000.000	10	3.650.000.000	10	3.650.000.000	10	3.650.000.000	10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANG-AN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
SASARAN 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	**Indikator Sasaran 1:** Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55		6,35		6,15		5,96		5,68		5,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Indikator Sasaran 2: Jumlah Peningkatan UMKM	UMKM	15.467	16.467		17.467		18.467		19.467		20.467		20.467	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program 1: Program peningkatan kesempatan kerja	**Indikator Program 1:** cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	20	20	895.000.000	20	1.200.000.000	20	1.320.000.000	20	1.452.000.000	20	1.597.200.000	20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program 2: Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	**Indikator Program 1:** Cakupan tenaga kerja yang bersertifikasi	Persen	60	100	3.580.046.000	100	3.971.600.000	100	4.368.760.000	100	4.805.636.000	100	5.286.199.600	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program 3: Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	**Indikator Program 1:** Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	1.823.550.000	17.467	1.200.000.000	18.467	1.425.000.000	19.467	1.650.000.000	20.467	1.925.000.000	20.467	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/*outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Program 4: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	**Indikator Program 1:** Jumlah UMKM yang mendapat Sapras	UMKM	2.566	3.530	3.140.000.000	4.561	3.540.000.000	5.659	4.040.000.000	6.824	4.390.000.000	8.056	4.790.000.000	8.056	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRI-AN DAN PERDAGANG-AN
Program 4: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	**Indikator Program 1:** Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	7	10	695.000.000	12	700.000.000	16	750.000.000	16	800.000.000	16	850.000.000	16	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat, kedua program perangkat daerah yang terkait dengan perwujudan misi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib Pelayanan dasar serta yang ketiga program – program penyelenggaraan urusan lainnya sebagai penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah

Program – Program untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintah daerah sebagaimana pada Tabel 7.2 yang terdiri dari program urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan dalam berdasarkan urusan dan fungsi penunjang serta program yang bersifat rutin (generik) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kinerja para aparatur dalam proses penyelenggaraan pemeritahan Daerah.

Pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2023

Kode			Kapasitas Rill/Belanja	Proyeksi (dalam Rupiah)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1			2	3	4	5	6	7
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**1.393.348.028.992,00**	**1.590.884.036.513,00**	**1.626.127.263.324,00**	**1.662.733.487.113,00**	**1.682.150.231.622,00**
			BELANJA					
5	1		**Total Belanja Tidak Langsung**	**1.755.219.631.997,40**	**1.794.447.312.510,65**	**1.828.190.263.405,00**	**1.954.296.314.565,14**	**2.138.459.160.211,42**
			Belanja Pegawai	1.338.422.488.394,40	1.347.657.603.564,32	1.356.956.441.028,92	1.417.154.267.194,59	1.530.345.764.244,24
			Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Belanja Hibah	33.398.800.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	60.000.000.000,00
			Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
			Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	355.359.689.603,00	389.083.324.146,33	412.926.160.616,08	452.112.853.258,55	495.018.363.032,78
			Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	23.338.654.000,00	28.006.384.800,00	33.607.661.760,00	40.329.194.112,00	48.395.032.934,40
			Belanja Tidak Terduga	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
5	2		**Total Belanja Langsung**	**1.393.348.028.992,00**	**1.590.884.036.513,00**	**1.626.127.263.324,00**	**1.662.733.487.113,00**	**1.682.150.231.622,00**
			JUMLAH BELANJA	**3.148.567.660.989,40**	**3.385.331.349.023,65**	**3.454.317.526.729,00**	**3.617.029.801.678,14**	**3.820.609.391.833,42**

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
URUSAN WAJIB					1.100.938.034.192,00		1.283.721.277.265,00		1.307.328.176.727,00		1.324.789.044.417,00		1.325.882.499.703,00			
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					1.017.532.746.342,00		1.181.481.971.315,00		1.199.711.849.034,00		1.213.204.060.067,00		1.212.594.211.059,00			
URUSAN PENDIDIKAN					310.759.400.000,00		151.227.921.750,00		157.819.261.300,00		165.512.553.710,00		173.006.441.450,00			
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Persen	n/a	100	53.003.900.000,00	100	23.172.308.000,00	100	24.394.414.600,00	100	25.672.195.000,00	100	27.007.662.000,00	100	Dinas Pendidikan	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Persen	119,01	119,13	253.112.182.000,00									119,13	Dinas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pada Tahun 2020 smapai dengan Tahun 2023 menjadi Program Pendidikan Dasar
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	Persen	88,69	88,95										88,78		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	0,09	0,08										0,08		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	0,81	0,80										0,80		
	Prosentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik	Persen	13,52	21,51										21,51		
Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Persen	119,01	119,13		119,25	105.571.400.000,00	119,37	111.139.195.000,00	119,49	116.960.665.000,00	119,61	123.044.960.000,00	119,61	Dinas Pendidikan	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	Persen	88,69	88,95		89,21		89,48		89,74		90,00		90,00		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	0,09	0,08		0,07		0,06		0,05		0,04		0,04		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	0,81	0,80		0,79		0,78		0,76		0,75		0,75		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik	Persen	13,45	21,51		29,5		37,4		45,59		53,48		53,48		
Program Pelayanan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Paket A	Persen	0,06	0,05	1.956.818.000,00									0,01	Dinas Pendidikan	Program Pelayanan Pendidikan Non Formal pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 menjadi pada Program Kesetaraan
	Angka Partisipasi Kasar Paket B	Persen	0,71	0,60										0,22		
	Angka Partisipasi Kasar Paket C	Persen	3,13	3,03										1,00		
Program Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Paket A	Persen	0,01	0,05		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01	Dinas Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar Paket B	Persen	0,71	0,60		0,50	4.954.558.500,00	0,40	4.968.432.000,00	0,30	4.982.936.000,00	0,20	5.118.095.000,00	0,20		
	Angka Partisipasi Kasar Paket C	Persen	3,13	3,03		2,93		2,83		2,73		2,63		2,63		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	97,20	97,49	694.000.000,00	98,00	7.327.750.000,00	99,00	7.110.250.000,00	100,00	7.110.250.000,00	100,00	7.110.250.000,00	100,00	Dinas Pendidikan	
	Rata rata peningkatan hasil UN	Persen	46,13	49,82		53,51		57,20		60,89		64,58		64,58		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pelayanan Pendidikan	Persen	85,47	86,32	1.992.500.000,00	87,17	4.901.905.250,00	88,03	4.943.269.700,00	88,89	4.847.095.110,00	90,00	4.897.946.600,00	90,00	Dinas Pendidikan	

Program penyelenggaraan pendidikan wajib diniyah kabupaten	Persentase siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan diniyah	Persen	n/a	0	-	100	5.300.000.000,00	100	5.263.700.000,00	100	5.939.412.600,00	100	5.827.527.850,00	100	Dinas Pendidikan	
URUSAN KESEHATAN					448.793.980.900,00		560.247.634.400,00		589.899.765.450,00		647.227.731.600,00		630.591.581.500,00			
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan	Persen	100	100	22.900.000.000,00	100	47.650.000.000,00	100	61.700.000.000,00	100	81.700.000.000,00	100	101.700.000.000,00	100	Dinas Kesehatan	
	Persentase Ketersediaan alat kesehatan	Persen	60	70		80		90		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik	Persen	100	100	90.050.000.000,00	100	160.600.000.000,00	100	181.625.000.000,00	100	209.675.000.000,00	100	161.675.000.000,00	100	Dinas Kesehatan	
	Persentase capaian SDM Bidang Kesehatan	Persen	83	100		100		100		100		100		100		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa siaga aktif	Persen	100	100	1.850.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	3.250.000.000,00	100	3.750.000.000,00	100	4.250.000.000,00	100	Dinas Kesehatan	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Lingkungan Bersih Sehat	Persen	72	80	11.600.000.000,00	85	4.800.000.000,00	90	6.100.000.000,00	95	4.200.000.000,00	100	4.700.000.000,00	100	Dinas Kesehatan	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar	Persen	100	100	6.471.319.000,00	100	5.500.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	Dinas Kesehatan	
	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi	Persen	77.78	100	4.340.262.600,00	100	1.800.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	4.300.000.000,00	100	5.100.000.000,00	100	Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi	Persen	48	52		60		71		82		85		85		
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Persen	8,07	7,67	5.604.999.000,00	7,27	7.200.000.000,00	6,87	4.500.000.000,00	6,47	4.500.000.000,00	6,07	4.500.000.000,00	6,07	Dinas Kesehatan	
	Persentase BBLR	Persen	3,09	2,49		1,81		1,17		0,53		0,11		0,11		
	Persentase balita gizi lebih	Persen	1,01	0,95		0,79		0,63		0,47		0,31		0,31		
	Persentase balita gizi kurus	Persen	2,11	1,01		0,91		0,81		0,71		0,61		0,61		
	Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan	Persen	54,20	100,0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang	Persen	73.13	95	35.324.532.000,00	96	52.011.744.000,00	97	36.724.532.000,00	98	37.324.532.000,00	100	37.824.532.000,00	100	Dinas Kesehatan	
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar	Persen	100	100	51.952.868.300,00	100	55.335.890.400,00	100	58.900.233.450,00	100	62.678.199.600,00	100	66.542.049.500,00	100	Dinas Kesehatan	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pengadaan kelengkapan Alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	98	98	15.000.000.000,00	98	15.300.000.000,00	100	15.600.000.000,00	100	15.900.000.000,00	100	16.300.000.000,00	100	Rumas Sakit Umum Daerah	
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis	Persen	86,21	90	203.700.000.000,00	91	207.800.000.000,00	92	212.000.000.000,00	93	216.700.000.000,00	95	221.000.000.000,00	95	Rumas Sakit Umum Daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan	Persen	88,64	90		91		92		93		95		95		
	Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis	Persen	87,96	90		91		92		93		95		95		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran	Persen	89,08	90		91		92		93		95		95		
	Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan	Persen	87,64	90		91		92		93		95		95		
	Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian	Persen	90	91		92		93		94		95		95		
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					225.726.364.000,00		435.804.234.765,00		416.497.616.086,00		363.568.072.644,00		370.837.269.584,00			
Program Penanganan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	62,80	66,80	142.455.015.000,00	70,80	371.400.135.151,00	74,80	349.631.704.224,00	78,80	294.739.571.883,00	82,80	302.263.572.175,00	82,80	Dinas PUPR	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	42,00	43,40	32.624.497.000,00	44,80	32.397.703.291,00	46,20	34.422.380.857,00	47,60	34.958.192.612,00	49,00	33.053.356.006,00	49,00	Dinas PUPR	
Program Peningkatan Pelayanan ke-PU-an	Jumlah Pelayanan Publik ke-PU-an	UPTD	2	2	190.000.000,00									2	Dinas PUPR	
Program Pengendalian Banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor	Persen	18,00	18,60	641.250.000,00	19,20	5.575.300.375,00	19,80	4.600.000.000,00	20,40	4.550.000.000,00	21,00	4.887.072.426,00	21,00	Dinas PUPR	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang terverfikasi	Persen	0	20	300.000.000,00	40	700.000.000,00	60	700.000.000,00	80	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	Dinas PUPR	
Program Penataan Ruang	Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	100	100	2.820.000.000,00	100	2.969.742.000,00	100	3.126.366.200,00	100	3.290.125.300,00	100	3.461.277.570,00	100	Dinas PUPR	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Sarana Air Minum yang terbangun	Persen	70	80	7.387.377.000,00	83	6.766.634.200,00	85	7.178.883.500,00	87	7.609.912.400,00	90	7.829.912.400,00	90	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	
Program Pengembangan dan Penataan Wilayah	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen	20	28,75	32.129.300.000,00	48,75	9.614.065.830,00	58,75	10.121.111.700,00	68,75	10.651.255.500,00	75	11.205.333.900,00	75	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	
	Persentase Bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	Persen	n/a	4,54		12,04		19,54		27,04		33,04		33,04		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	n/a	80	7.028.925.000,00	75	6.222.688.918,00	70	6.550.873.531,00	65	6.894.008.287,00	60	7.252.634.598,00	60	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan	
	Indek kepuasan masyarakat;	Persen	71,31	77		78		79		80		81		81		
	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	5,38	5,52		5,68		5,87		6,08		6,33		6,33		
	Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Persen	68,53	69,00		69,33		69,67		70,00		70,67		70,67		
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal	Persen	18,65	20		25		30		35		40		40		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH terkelola	Persen	11,04	11,04	150.000.000,00	11,07	157.965.000,00	11,11	166.296.074,00	11,14	175.006.662,00	11,17	184.110.509,00	11,17	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					11.546.499.442,00		11.614.884.100,00		12.256.460.100,00		12.927.262.500,00		13.397.861.100,00			
Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional	Persen	50	52,61	4.424.000.000,00	55,22	4.848.249.900,00	57,83	5.077.576.600,00	60,44	5.317.350.100,00	63,05	5.567.948.700,00	63,05	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	80	80,13		80,30		80,48		80,67		80,87		80.87		
	Persentase PSU di Lingkungan Kompleks Perumahan/Permukiman (Pengembang)	Persen	0	1,5		4,50		7,5		10,50		13,50		13,50		
Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	Persentase Sanitasi yang terbangun	Persen	55	65	7.122.499.442,00	70,00	6.766.634.200,00	75,00	7.178.883.500,00	80	7.609.912.400,00	85	7.829.912.400,00	85		
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.846.502.000,00		12.257.296.300,00		12.903.746.098,00		13.579.644.316,00		14.286.057.425,00			
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	2.991.500.000,00	100	2.230.992.350,00	100	2.348.654.887,00	100	2.471.677.429,00	100	2.600.254.089,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	60,55	65		70		75		85		90		90		
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100	100	1.150.000.000,00	100	1.211.065.000,00	100	1.274.936.568,00	100	1.341.717.746,00	100	1.411.513.903,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	60	1.100.000.000,00	70	1.158.410.000,00	80	1.219.504.543,00	80	1.283.382.191,00	80	1.350.143.733,00	80	Satuan Polisi Pamong Praja	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87.50	87.50		87.50		90		90		90		90		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Desa/ kelurahan	277	277	7.605.002.000,00	277	7.656.828.950,00	277	8.060.650.100,00	277	8.482.866.950,00	277	8.924.145.700,00	277	Badan penanggulangan bencana daerah	
	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/ Kelurahan	0	5		10		15		20		25		25		
	Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisikan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
URUSAN SOSIAL					7.860.000.000,00		10.330.000.000,00		10.335.000.000,00		10.388.795.297,00		10.475.000.000,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	1,71	2,86	2.250.000.000,00	4,01	2.300.000.000,00	5,18	2.330.000.000,00	6,33	2.250.000.000,00	7,49	2.340.000.000,00	7,49	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	8,53	16,88	2.250.000.000,00	26,17	2.205.000.000,00	35,36	2.200.000.000,00	44,79	2.280.000.000,00	54,28	2.280.000.000,00	54,28	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	2,77	11,17		20,74		29,79		40		51,60		51,60		
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	5,73	14,89		24,05		33,21		42,37		53,05		53,05		
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0,68	10,61		20,54		30,47		40,41		50,34		50,34		

	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persen	n/a	10		20		30		40		50		50		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	50	58,33	200.000.000,00	58,33	550.000.000,00	58,33	500.000.000,00	58,33	500.000.000,00	58,33	480.000.000,00	58,33	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	200.000.000,00	100	550.000.000,00	100	580.000.000,00	100	633.795.297,00	100	650.000.000,00	100	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Persen	52.14	53,24	2.850.000.000,00	53,24	4.600.000.000,00	53,24	4.600.000.000,00	53,24	4.600.000.000,00	53,24	4.600.000.000,00	53,24	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional	Persen	100	100	110.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					83.405.287.850,00		102.239.305.950,00		107.616.327.693,00		111.584.984.350,00		113.288.288.644,00			
URUSAN TENAGA KERJA					5.072.546.000,00		5.717.862.250,00		6.289.648.200,00		6.859.889.750,00		7.544.376.620,00			
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat	Persen	60	100	3.580.046.000,00	100	3.971.600.000,00	100	4.368.760.000,00	100	4.805.636.000,00	100	5.286.199.600,00	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	20	20	895.000.000,00	20	1.200.000.000,00	20	1.320.000.000,00	20	1.452.000.000,00	20	1.597.200.000,00	20	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	
Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen	100	100	597.500.000,00	100	546.262.250,00	100	600.888.200,00	100	602.253.750,00	100	660.977.020,00	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.838.000.000,00		1.977.543.800,00		2.060.743.511,00		2.147.733.250,00		2.188.650.300,00			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD Responsif Gender	Persen	9,68	16,13	220.000.000,00	33,87	595.000.000,00	61,29	620.000.000,00	80,65	720.000.000,00	100	600.000.000,00	100	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Jumlah Kebijakan Pengarustamaan Gender yang dihasilkan	Perda/ Perbup	1	3		4		5		6		7		7	perlindungan anak	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	100	288.000.000,00	100	535.000.000,00	100	515.864.100,00	100	527.733.250,00	100	688.650.300,00	100	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	3,85	19,23		30,77		42,31		53,85		73,08		73,08		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi wanita yang aktif	Persen	9,52	14,29	40.000.000,00	33,33	127.543.800,00	54,76	150.000.000,00	76,19	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	12,84	13,96	1.290.000.000,00	15,07	720.000.000,00	16,19	774.879.411,00	17,31	750.000.000,00	18,42	750.000.000,00	18,42	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
URUSAN PANGAN					7.645.000.000,00		1.732.349.500,00		1.823.713.650,00		1.919.239.750,00		2.019.078.600,00			
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	7.645.000.000,00	100	1.732.349.500,00	100	1.823.713.650,00	100	1.919.239.750,00	100	2.019.078.600,00	100	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	

	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	91,50	92,50		93,50		94,50		95,00		95,50		95,50		
	Persentase Pembinaan dan Pengasawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
URUSAN PERTANAHAN					21.760.050.000,00		23.155.508.700,00		24.624.072.600,00		25.387.691.600,00		26.708.359.300,00			
Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	21.760.050.000,00	100	23.155.508.700,00	100	24.624.072.600,00	100	25.387.691.600,00	100	26.708.359.300,00	100	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	
	Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					1.245.002.600,00		1.305.799.500,00		1.369.393.366,00		1.435.884.190,00		1.505.376.886,00			
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Persen	26,90	30,90	860.000.000,00	36,56	905.666.000,00	43,81	953.430.825,00	52,78	1.003.371.531,00	63,79	1.055.566.919,00	63,79	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan	
	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup;	Persen	15	30		50		70		80		100		100		
	Persentase pengujian kualitas air sungai;	Persen	40,74	48,15		55,56		62,96		70,37		81,48		81,48		
	Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan	Persen	98,91	99,53		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan	Persen	3,16	3,39		4,08		5,24		6,87		8,95		8,95		
	Persentase Pemantuan Kualitas Udara	Persen	66,.67	68,89		73,33		77,78		82,22		86,67		86,67		
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati	Persen	29,86	30,55	385.002.600,00	31,37	400.133.500,00	32,33	415.962.541,00	33,42	432.512.659,00	34,65	449.809.967,00	34,65	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan	
	Persentase mata air yang dilindungi	Persen	12,12	13,42		15,15		19,48		21,65		27,27		27,27		
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.469.593.000,00		6.130.933.300,00		6.831.220.487,00		6.886.012.960,00		7.554.633.800,00			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu	Persen	100	100	5.210.093.000,00	100	5.731.102.300,00	100	6.304.212.600,00	100	6.304.212.600,00	100	6.934.633.800,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	81	94	259.500.000,00	94	399.831.000,00	97	527.007.887,00	97	581.800.360,00	97	620.000.000,00	97		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	74	86		86		86		88		88		88		
	Jumlah Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan	Instansi	0	10		15		20		25		31		31		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.172.546.400,00		5.175.000.000,00		6.550.000.000,00		6.300.000.000,00		7.300.000.000,00			
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan	Persen	30	33	1.050.000.000,00	36	1.250.000.000,00	39	1.500.000.000,00	42	1.750.000.000,00	45	2.000.000.000,00	45	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	Persen	35	50	385.546.400,00	95	750.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.750.000.000,00	100		
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	Persen	0	10	737.000.000,00	40	3.175.000.000,00	90	3.800.000.000,00	100	3.050.000.000,00	100	3.550.000.000,00	100		
	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	Persen	32.2	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Desa yang Pengelolaan aset Desa yang akurat	Persen	0	5		40		90		100		100		100		
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.034.904.000,00		13.226.200.400,00		14.535.880.600,00		15.975.743.100,00		10.702.939.500,00			
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,28	74,47	11.774.904.000,00	74,77	12.952.394.400,00	75,07	14.247.634.000,00	75,37	15.672.398.000,00	75,67	10.383.814.500,00	75,67	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	8,37	9,08		9,07		9,06		9,05		9,04		9,04		
Program Ketahanan Keluarga	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif	Persen	68,94	70	140.000.000,00	72	147.434.000,00	72,51	155.209.700,00	72,81	163.339.600,00	73,11	171.836.500,00	73,11		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif	Persen	64,37	65		65,62		65,8		66		66,32		66,32		
	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	Persen	62,81	63		63,41		63,6		63,82		64,1		64,1		
	Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS	Persen	49,62	50,07		51,93		53,79		55,65		57,51		57,51		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	19.5	19.6	120.000.000,00	19.7	126.372.000,00	19.7	133.036.900,00	19.8	140.005.500,00	19.8	147.288.500,00	19,8		
URUSAN PERHUBUNGAN					9.722.500.000,00		10.238.764.750,00		10.663.757.203,00		11.293.348.505,00		11.933.429.854,00			
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Kelengkapan Dokumen perhubungan	Persen	5,06	6,25	8.610.000.000,00	8,42	7.142.036.000,00	10,37	8.144.962.629,00	12,98	9.342.046.871,00	15,45	9.402.016.261,00	15,45	Dinas Perhubungan	
	Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas	Persen	7,59	9,38		12,64		15,55		19,46		23,18		23,18		
	Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	Persen	10,12	12,51		16,85		20,73		25,95		30,91		30,91		
	Persentase ketersedian Terminal/Dermaga	Persen	2,53	3,13		4,21		5,18		6,49		7,73		7,73		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Trayek Angkutan Umum	trayek	837	857	1.112.500.000,00	877	3.096.728.750,00	897	2.518.794.574,00	917	1.951.301.634,00	937	2.531.413.593,00	937		
	Jumlah KIR Angkutan Umum	unit	9.000	9.357		9.714		10.071		10.428		10.787		10.787		
	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/hari	orang/ hari	10.044	10.284		10.524		10.764		11.004		11.244		11.244		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Satuan Ruas Parkir	Persen	50	60		70		80		90		100		100		
	Jumlah Operasi Lalu Lintas	Kali	6	2		17		17		17		17		17		
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					3.040.950.000,00		2.949.564.000,00		3.105.125.000,00		3.267.771.000,00		3.437.759.900,00			
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	27	50	3.040.950.000,00	100	2.949.564.000,00	100	3.105.125.000,00	100	3.267.771.000,00	100	3.437.759.900,00	100	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik	
	Cakupan Media Masa yang dikembangkan	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Persen	25,45	50		100		100		100		100		100		
	Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan	Persen	93,86	96,39		100		100		100		100		100		
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					7.406.600.000,00		7.083.050.000,00		7.808.050.000,00		8.383.050.000,00		9.058.050.000,00			
Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	423	449	897.000.000,00	458	797.000.000,00	467	797.000.000,00	476	797.000.000,00	485	797.000.000,00	485	Dinas koperasi, usaha kecil menengah,	

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	Koperasi	362	72	1.040.000.000,00	72	1.040.000.000,00	72	1.040.000.000,00	73	1.040.000.000,00	73	1.040.000.000,00	362	perindustrian dan perdagangan	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi besar	Koperasi	8	10	506.050.000,00	12	506.050.000,00	14	506.050.000,00	16	506.050.000,00	18	506.050.000,00	18		
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	1.823.550.000,00	17.467	1.200.000.000,00	18.467	1.425.000.000,00	19.467	1.650.000.000,00	20.467	1.925.000.000,00	20.467		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapat Sapras	UMKM	2.566	3.530	3.140.000.000,00	4.561	3.540.000.000,00	5.659	4.040.000.000,00	6.824	4.390.000.000,00	8.056	4.790.000.000,00	8.056		
URUSAN PENANAMAN MODAL					1.325.984.000,00		3.730.506.750,00		3.148.246.376,00		3.248.699.345,00		3.318.858.684,00			
Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan jumlah investor	Persen	10	20	770.000.000,00	30	845.000.000,00	40	631.860.000,00	60	700.026.650,00	90	736.442.036,00	90	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase izin yang terbit tepat waktu	Persen	60	75	555.984.000,00	76	485.506.750,00	77	516.386.376,00	80	548.672.695,00	85	582.416.648,00	85		
Program peningkatan promosi dan kemitraan penanaman modal	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100	1.900.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100		
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTS	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	50	50	-	60	500.000.000,00	70	500.000.000,00	80	500.000.000,00	85	500.000.000,00	85		
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.390.000.000,00		2.727.529.000,00		2.871.419.500,00		3.021.800.000,00		3.179.000.000,00			
Program Peningkatan peranserta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang di bina	Organisasi	n/a	270	1.110.000.000,00	304	1.379.561.000,00	338	1.452.319.500,00	338	1.528.400.000,00	338	1.607.900.000,00	338	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	
	Jumlah Pemuda yang dibina	Orang	1.010	2.387		2.542		2.697		2.853		3.000		3.000		
Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan	Jumlah atlet pemula yang dibina	orang	14	20	1.280.000.000,00	20	1.347.968.000,00	20	1.419.100.000,00	20	1.493.400.000,00	20	1.571.100.000,00	20		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Olahraga	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan	Kali	6	10		15		20		25		30		30		
URUSAN STATISTIK					211.750.000,00		270.950.000,00		295.545.000,00		320.849.000,00		349.434.000,00			
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45,5	70	211.750.000,00	85	270.950.000,00	95	295.545.000,00	100	320.849.000,00	100	349.434.000,00	100	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik	
URUSAN PERSANDIAN					240.000.000,00		412.744.000,00		434.512.200,00		457.271.900,00		481.059.200,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	33,33	240.000.000,00	50,00	412.744.000,00	66,67	434.512.200,00	83,33	457.271.900,00	100	481.059.200,00	100	Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik	
URUSAN KEBUDAYAAN					650.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		1.050.000.000,00		1.060.000.000,00			
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan Daerah yang di lindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Objek	11	11	650.000.000,00	11	850.000.000,00	11	950.000.000,00	11	1.050.000.000,00	11	1.060.000.000,00	11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	
URUSAN PERPUSTAKAAN					522.874.150,00		6.051.000.000,00		8.410.000.000,00		3.600.000.000,00		3.730.000.000,00			
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	70.235	73.511	522.874.150,00	75.716	6.051.000.000,00	77.988	8.410.000.000,00	80.327	3.600.000.000,00	82.737	3.730.000.000,00	82.737	Dinas arsip dan perpustakaan	
	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,4	76		80		84		86		90		90		
	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	22.22	31		48		64		85		100		100		
URUSAN KEARSIPAN					656.987.700,00		9.504.000.000,00		5.845.000.000,00		10.030.000.000,00		11.217.282.000,00			
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang berstandar Arispnya	Persen	3,64	21,82	656.987.700,00	40,00	9.504.000.000,00	58,18	5.845.000.000,00	76,36	10.030.000.000,00	100	11.217.282.000,00	100	Dinas arsip dan perpustakaan	
URUSAN PILIHAN					72.464.290.000,00		64.114.774.320,00		65.205.078.600,00		70.887.329.888,00		75.571.619.606,00			
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.080.000.000,00		6.860.250.000,00		5.173.977.500,00		7.478.086.375,00		5.720.042.069,00			
Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan				4.625.000.000,00		5.618.750.000,00		3.861.977.500,00		6.093.586.375,00		4.257.917.069,00		Dinas perikanan dan peternakan	
	1.Ikan Konsumsi	Ton	8.286	8.617		9.014		9.483		10.033		10.675		10.675		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	2. Ikan Hias	Ekor	612.470	636.969		666.269		700.915		741.568		789.029		789.029		
	3. Benih Ikan	Ribu Ekor	179.275	186.446		195.023		205.164		217.063		230.955		230.955		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Unit	45	48	175.000.000,00	52	205.000.000,00	56	216.000.000,00	60	226.250.000,00	64	238.262.500,00	64		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan	Persen	100	100	280.000.000,00	100	1.036.500.000,00	100	1.096.000.000,00	100	1.158.250.000,00	100	1.223.862.500,00	100		
URUSAN PARIWISATA					5.889.231.000,00		6.420.044.700,00		6.508.534.900,00		6.860.166.900,00		7.225.416.800,00			
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Kali	2	4	1.250.000.000,00		-							4	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 menjadi Program Pengembangan Kepariwisataan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	1	5	3.944.231.000,00									5		
Program Pengembangan Kepariwisataan	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Kali	2	4		5	5.720.044.700,00	6	5.758.534.900,00	7	6.060.166.900,00	8	6.375.416.800,00	8		
	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	1	5		10		15		20		25		25		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	7	10	695.000.000,00	12	700.000.000,00	16	750.000.000,00	16	800.000.000,00	16	850.000.000,00	16		
URUSAN PERTANIAN					49.337.916.000,00		36.721.832.000,00		39.159.795.500,00		41.790.006.600,00		47.811.833.800,00			
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi Tanaman Pangan	Ton	740.732	815.842	2.650.000.000,00	899.384	2.790.715.000,00	992.381	2.937.897.400,00	1.096.085	3.091.784.400,00	1.211.722	3.252.700.000,00	1.211.722	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	
	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.333	157.386		164.783		173.682		184.276		196.807		196.807		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6.462	6.733		7.057		7.445		7.906		8.452		8.452		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	5.752	6.052	38.592.724.000,00	6.352	23.659.127.900,00	6.652	24.906.910.250,00	6.952	26.211.550.000,00	7.252	27.575.058.300,00	7.252		
	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	1,85	1,95		2,05		2,15		2,25		2,35		2,35		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	Km	62	77,0		92		107		122		137		137		
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	120	1.300.000.000,00	138	1.369.030.000,00	157	1.441.232.650,00	179	1.516.724.500,00	206	1.595.624.500,00	206		
	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	48	53		58		63		68		73		73		
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	teknologi / penyuluh pertanian	3	6	3.463.542.000,00	9	1.678.159.100,00	12	1.766.665.200,00	15	1.859.203.200,00	18	1.955.918.900,00	18		
	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2.835	275		550		825		1.100		1.375		1.375		
	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242		2.242		2.242		2.242		2.242		2.242		
	-Kelas Pemula (skor 0-250)	Kelompok	767	762		757		752		746		739		739		
	-Kelas Lanjut (skor251-500)	Kelompok	1.405	1.406		1.407		1.408		1.410		1.413		1.413		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	-Kelas Madya(skor 501-750)	Kelompok	68	71		74		77		80		83		83		
	-Kelas Utama(skor 751-1000)	Kelompok	2	3		4		5		6		7		7		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase pengendalian penyakit hewan	Persen	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	610.250.000,00	100	640.762.500,00	100	672.800.625,00	100	Dinas perikanan dan peternakan	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak:				2.949.150.000,00		6.237.300.000,00		6.340.215.000,00		6.663.025.750,00		7.001.177.400,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	1. Sapi potong	Ekor	29.783	31.064		32.586		34.378		36.475		38.919		38.919		
	2. Sapi perah	Ekor	4.149	4.327		4.539		4.789		5.081		5.422		5.422		
	3. Kambing	Ekor	27.957	29.159		30.588		32.270		34.239		36.533		36.533		
	4. Domba	Ekor	111.324	116.111		121.800		128.499		136.338		145.472		145.472		
	5. Ayam buras	Ekor	519.506	541.845		568.395		599.657		636.236		678.864		678.864		
	6. Ayam ras petelur	Ekor	111.883	116.694		122.412		129.145		137.022		146.203		146.203		
	7. Ayam ras pedaging	Ekor	########	2.989.754		3.136.252		3.308.746		3.510.580		3.745.788		########		
	8. Itik	Ekor	49.553	51.684		54.216		57.198		60.687		64.753		64.753		
	Jumlah Produksi															
	1. Daging	Ton	15.474	16.139		16.930		17.861		18.951		20.221		20.221		
	2. Telur	Ton	1.639	1.709		1.793		1.892		2.007		2.142		2.142		
	3. Susu	Ton	12.323	12.853		13.483		14.224		15.092		16.103		16.103		
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Unit	75	84	182.500.000,00	100	477.500.000,00	124	696.375.000,00	156	1.491.193.750,00	196	5.437.003.450,00	196		
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	100	100	100.000.000,00	100	405.000.000,00	100	460.250.000,00	100	315.762.500,00	100	321.550.625,00	100		
URUSAN KEHUTANAN					730.200.000,00		853.310.620,00		1.020.000.000,00		1.074.472.213,00		1.128.824.437,00			
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi	Persen	60	63	610.200.000,00	64	703.310.620,00	66	850.000.000,00	69	884.472.213,00	71	918.824.437,00	71	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Nilai Pengelolaan Hutan Kota	Nilai	83	83	120.000.000,00	83	150.000.000,00	83	170.000.000,00	83	190.000.000,00	83	210.000.000,00	83		
URUSAN PERDAGANGAN					8.725.000.000,00		8.725.000.000,00		8.725.000.000,00		8.725.000.000,00		8.725.000.000,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan	jenis	4	4	2.550.000.000,00	4	2.550.000.000,00	4	2.550.000.000,00	4	2.550.000.000,00	4	2.550.000.000,00	4	Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	
	Jumlah UTTP yang di tera	UTTP	28.502	28.502		28.502		28.502		28.502		28.502		28.502		
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	orang	1.503	5.043	2.525.000.000,00	5.884	2.525.000.000,00	6.724	2.525.000.000,00	7.565	2.525.000.000,00	8.405	2.525.000.000,00	8.405		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk	wilayah	0	1		2		3		4		5		5		
Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang di revitalisasi	Pasar	10	10	3.650.000.000,00	10	3.650.000.000,00	10	3.650.000.000,00	10	3.650.000.000,00	10	3.650.000.000,00	10		
URUSAN PERINDUSTRIAN					2.150.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.950.000.000,00		3.850.000.000,00			
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan Jumlah IKM	IKM	1.771	3.478	1.200.000.000,00	3.746	1.400.000.000,00	4.013	1.400.000.000,00	4.281	1.400.000.000,00	4.602	1.400.000.000,00	4.602	Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kelompok	160	169	700.000.000,00	178	1.400.000.000,00	187	1.400.000.000,00	196	1.700.000.000,00	205	1.700.000.000,00	205		
Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Peningkatan Jumlah Sentra IndustrI	Sentra	5	0	250.000.000,00	7	900.000.000,00	9	900.000.000,00	11	850.000.000,00	12	750.000.000,00	12		
URUSAN TRANSMIGRASI					551.943.000,00		834.337.000,00		917.770.700,00		1.009.597.800,00		1.110.502.500,00			
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah transmigran yang telah dilatih dan ditempatkan	KK	51	56	251.943.000,00	61	450.000.000,00	66	495.000.000,00	71	544.550.000,00	76	598.950.000,00	76	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi	
Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran lokal yang terlatih	KK	30	60	300.000.000,00	90	384.337.000,00	120	422.770.700,00	150	465.047.800,00	180	511.552.500,00	180		
URUSAN PENUNJANG					36.196.013.250,00		39.497.436.935,00		41.771.048.496,00		44.510.248.021,00		46.666.907.559,00			
URUSAN INSPEKTORAT					6.118.800.000,00		8.254.633.000,00		9.378.000.000,00		10.783.800.000,00		12.401.620.000,00			

Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pemenuhan unsur SPIP	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat	
	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	400	380	5.100.000.000,00	371	6.614.633.000,00	360	7.492.000.000,00	353	8.615.800.000,00	340	9.908.170.000,00	340		
	Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	545	500		475		450		425		400		400		
	persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	Persen	15,63	23,44		31,25		39,06		46,88		54,69		54,69		
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan	Persen	25	33,33	519.000.000,00	41,67	851.000.000,00	50	978.650.000,00	58,33	1.125.000.000,00	66,67	1.294.000.000,00	66,67	Inspektorat	
	Persentase elemen IACM yang terpenuhi	Persen	66,67	100		100		100		100		100		100	Inspektorat	
Program Penegakan Integritas	Persentase Penilaian Zona Integritas	Persen	n/a	100	499.800.000,00	100	789.000.000,00	100	907.350.000,00	100	1.043.000.000,00	100	1.199.450.000,00	100	Inspektorat	
URUSAN PERENCANAAN					5.242.500.000,00		8.074.050.000,00		8.627.140.000,00		9.137.528.250,00		8.389.209.850,00			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	Persen	85	100	5.242.500.000,00	100	1.722.000.000,00	100	2.146.237.500,00	100	2.579.799.000,00	100	3.050.394.250,00	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembanga	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik";	Persen	95	100										100	n daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori "Baik";	Persen	96,5	100										100		
	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik".	Persen	98	100										100		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik";	Persen	95	100		100	3.208.000.000,00	100	3.488.400.000,00	100	2.884.000.000,00	100	1.930.775.000,00	100		
Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori "Baik";	Persen	96,5	100		100	869.250.000,00	100	603.962.500,00	100	1.165.762.500,00	100	774.688.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik".	Persen	98	100		100	2.274.800.000,00	100	2.388.540.000,00	100	2.507.966.750,00	100	2.633.352.600,00	100		
URUSAN KEUANGAN					18.381.612.750,00		17.951.893.250,00		18.898.678.346,00		19.888.588.721,00		20.923.193.109,00			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat akurasi dokumen penganggaran	Persen	90	92	6.367.500.000,00	93	6.705.614.250,00	94	7.059.268.346,00	95	7.429.032.821,00	97	7.815.491.109,00	97	Badan pengelolaan keuangan dan aset	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Badan pengelolaan keuangan dan aset	
	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	90	91		92		93		95		97		97	Badan pengelolaan keuangan dan aset	
	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD	Persen	80	85		90		92		95		97		97	Badan pengelolaan keuangan dan aset	
	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)	Persen	86	87		88		89		90		91		91	Badan pengelolaan keuangan dan aset	
Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak	poin	77.34	85	12.014.112.750,00	87	11.246.279.000,00	90	11.839.410.000,00	91	12.459.555.900,00	91	13.107.702.000,00	91	Badan pengelolaan pendapatan	
	Persentase Potensi Pajak Daerah	Persen	60	75		80		85		85		90		90	Badan pengelolaan pendapatan	
	Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar	Persen	70	80		85		90		90		95		95	Badan pengelolaan pendapatan	
	Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan	Persen	80	90		100		100		100		100		100	Badan pengelolaan pendapatan	
URUSAN KEPEGAWAIAN					1.905.000.000,00		2.006.155.500,00		2.111.960.200,00		2.222.584.700,00		2.338.203.500,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik	Persen	99,74	100	1.905.000.000,00	100	2.006.155.500,00	100	2.111.960.200,00	100	2.222.584.700,00	100	2.338.203.500,00	100	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	
	Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi	Persen	56,31	65,00		73,79		82,53		91,26		100		100		
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	0,020	0,018		0,016		0,014		0,012		0,010		0,010		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan	Persen	7,56	26,05		44,53		63,02		81,51		100		100		
	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian	Persen	90,17	95		96		97		98		100		100		
	Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.633.100.500,00		1.881.205.185,00		1.980.419.950,00		2.084.154.350,00		2.192.572.100,00			
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	17,77	30	2.633.100.500,00	50	1.881.205.185,00	70	1.980.419.950,00	85	2.084.154.350,00	100	2.192.572.100,00	100	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	
	Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	Persen	27,74	42,19		56,65		71,10		85,55		100		100		
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.915.000.000,00		1.329.500.000,00		774.850.000,00		393.592.000,00		422.109.000,00			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	80	100	1.915.000.000,00	100	1.329.500.000,00	100	774.850.000,00	100	393.592.000,00	100	422.109.000,00	100	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	
	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
URUSAN PENDUKUNG					30.337.131.750,00		42.914.350.000,00		45.128.324.500,00		47.427.964.600,00		51.276.899.100,00			

SEKRETARIAT DAERAH					14.113.456.750,00		17.246.000.000,00		18.155.556.000,00		19.106.557.500,00		20.100.466.700,00			
Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah	persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik"	Persen	n/a	100	2.536.645.000,00		-		-		-		-	70	Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100										100		
	Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan	Persen	60	100										100		
	Nilai LPPD	Persen	3,09	3,15										3,15		
	Persentase tertib administrasi kewilayahan	Persen	60	100										100%		
	Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B"	Persen	0	60										60%		
	Persentase data tanah HGU yang terferivikasi dan tervalidasi	Persen	n/a	100										100%		
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B										B		
	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	56,05	65										57,64		
	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang	persen	60	70										70		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih	persen	60	100										100		
	Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti	Persen	100	100										100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan	Persen	70	100										100		
	Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama	Persen	46,67	100										100,00		
	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur	Persen	85	100										100,00		
Program Pengendalian Manajemen Pembangunan Daerah	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capian target kinerja tahunannya berkategori“baik"	Persen	80	100	4.319.720.000,00		-		-		-		-	100	Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	80	100										100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian target kinerja tahunannya berkategori“baik”	Persen	80	100										100		
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulannya berkategori“baik”	Persen	80	100										100		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kategori	level 1	level 3										level 3		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan	Persen	80	100										100		
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	7.257.091.750,00		-		-		-		-	100	Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Sekretariat Daerah	Persen	60	70										70		
	Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah	Persen	0	80										80		
	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100										100		
	Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien	Persen	80	100										100		
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100										100		
	Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100										100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	Persen	80	85										85		
	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati	Persen	30	75										75		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik"	Persen	n/a	100	-	100	2.525.000.000,00	100	2.658.168.500,00	100	2.797.403.400,00	100	2.942.924.300,00	100	Sekretariat Daerah	
	persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100		100		100		100		100		100		
	Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan	Persen	60	100		100		100		100		100		100		
	Nilai LPPD	Persen	3,09	3,15		3,30		3,45		3,60		3,75		3,75		
	Persentase tertib administrasi kewilayahan	Persen	60	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B"	Persen	0	60		69,23		88,46		100		100		100		
	Persentase data tanah HGU yang terferivikasi dan tervalidasi	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B		BB		A		A		A		A		
	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	56,05	65		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang	Persen	60	70		80,00		80,00		90,00		90,00		90,00		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih	Persen	60	100	-	100	1.860.000.000,00	100	1.958.096.400,00	100	2.060.661.500,00	100	2.167.857.100,00	100	Sekretariat Daerah	
	Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan	Persen	70	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama	Persen	46,67	100	-	100	725.000.000,00	100	763.236.500,00	100	803.215.000,00	100	845.000.000,00	100	Sekretariat Daerah	
	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur	Persen	85	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capian target kinerja tahunannya “baik"	Persen	80	100	-	100	5.596.000.000,00	100	5.891.135.000,00	100	6.199.710.600,00	100	6.522.219.600,00	100	Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	80	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian target kinerja tahunannya berkategori“baik”	Persen	80	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori "baik"	Persen	80	100		100		100		100		100		100		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kategori	level 1	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 5		Level 5		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan	Persen	80	100		100		100		100		100		100		
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	-	100	5.225.000.000,00	100	5.500.566.500,00	100	5.788.700.000,00	100	6.089.814.000,00	100	Sekretariat Daerah	
	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Sekretariat Daerah	Persen	60	70		100		100		100		100		100		
	Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah	Persen	0	80		100		100		100		100		100		
	Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	Persen	80	85		85		90		90		95		95		
	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati	Persen	30	75		80		85		90		95		95		
Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100	-	100	1.315.000.000,00	100	1.384.353.100,00	100	1.456.867.000,00	100	1.532.651.700,00	100	Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien	Persen	80	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
SEKRETARIAT DPRD					16.223.675.000,00		25.668.350.000,00		26.972.768.500,00		28.321.407.100,00		31.176.432.400,00			
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan	Persen	85	86	16.223.675.000,00	87	25.668.350.000,00	88	26.972.768.500,00	89	28.321.407.100,00	90	31.176.432.400,00	90	Sekretariat DPRD	
	Persetujuan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Fungsi Pegawasan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi	Persen	95	95		95		95		95		95		95		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Prosentase Aktifitas Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.500.000.000,00		3.659.300.000,00		3.852.291.482,00		4.054.084.510,00		4.264.967.463,00			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.500.000.000,00		3.659.300.000,00		3.852.291.482,00		4.054.084.510,00		4.264.967.463,00			
Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Persen	100	100	900.000.000,00	100	579.205.000,00	100	609.752.272,00	100	641.691.095,00	100	675.071.866,00	100	Kantor kesatuan bangsa dan politik	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politk	Orang	1.050	1.575	950.000.000,00	2.100	842.480.000,00	2.700	886.912.395,00	3.350	933.378.868,00	4.050	981.922.714,00	4.050		
	Persentase Ormas yang dibina	Persen	35.42	46.19		47.14		48.09		49.05		50		50		
Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	Persen	100	100	0	100	110.115.000,00	100	117.256.815,00	100	123.000.000,00	100	135.000.000,00	100		
Program Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	Persen	100	100	1.650.000.000,00	100	1.627.500.000,00	100	1.712.000.000,00	100	1.802.073.287,00	100	1.890.215.599,00	100		
Program Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan	Jumlah	0	0	0	0	500.000.000,00	0	526.370.000,00	0	553.941.260,00	0	582.757.284,00	0		
URUSAN KEWILAYAHAN					20.874.660.500,00		25.364.655.415,00		26.535.903.085,00		27.839.258.715,00		29.005.398.707,00			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,42	83,14	2.923.840.000,00	84,85	3.996.500.000,00	86,57	4.291.000.000,00	88,28	4.613.000.000,00	90,00	4.613.000.000,00	90,00	Kecamatan Sumedang Selatan	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	25.000.000,00	100	42.000.000,00	100	44.000.000,00	100	46.000.000,00	100	48.000.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	84.500.000,00	100	88.000.000,00	100	92.000.000,00	100	95.000.000,00	100	98.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	70,13	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	110.000.000,00	100	82.000.000,00	100	86.000.000,00	100	92.000.000,00	100	96.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	150.000.000,00	100	218.000.000,00	100	201.000.000,00	100	211.000.000,00	100	251.500.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88,83	89,06	2.117.500.000,00	89,30	3.637.500.000,00	89,53	3.778.200.000,00	89,77	3.926.000.000,00	90,00	4.174.200.000,00	90,00	Kecamatan Sumedang Utara	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	48.000.000,00	100	51.000.000,00	100	54.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	87.500.000,00	100	88.500.000,00	100	93.000.000,00	100	94.000.000,00	100	98.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	70,41	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	124.250.000,00	100	171.750.000,00	100	174.250.000,00	100	185.000.000,00	100	190.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	75.000.000,00	100	196.000.000,00	100	205.500.000,00	100	189.000.000,00	100	226.000.000,00	100		
Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	99.250.000,00									100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81.40	83,12	400.000.000,00	84,84	421.200.000,00	86,56	442.400.000,00	88,28	468.082.672,00	90,00	493.814.200,00	90,00	Kecamatan Tanjungkerta	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	30.000.000,00	100	31.590.000,00	100	33.180.000,00	100	34.770.000,00	100	36.360.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	80.000.000,00	100	84.240.000,00	100	88.480.000,00	100	92.720.000,00	100	96.960.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	81,02	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	23.000.000,00	100	24.248.300,00	100	28.756.000,00	100	26.657.000,00	100	27.876.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	60.000.000,00	100	63.210.000,00	100	67.925.813,00	100	69.630.000,00	100	72.840.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	77,83	80,26	300.000.000,00	82,70	300.298.000,00	85,13	306.948.987,00	87,57	300.000.000,00	90,00	346.893.968,00	90,00	Kecamatan Cimalaka	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	40.000.000,00	100	25.000.000,00	100	26.150.000,00	100	61.928.678,00	100	25.000.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	46.200.000,00	100	48.510.000,00	100	55.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	79,75	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	46.200.000,00	100	48.510.000,00	100	55.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	145.000.000,00	100	152.250.000,00	100	170.000.000,00	100	167.855.625,00	100	185.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,45	82,36	350.050.000,00	84,27	403.205.035,00	86,18	388.305.800,00	88,09	399.154.650,00	90.00	380.459.300,00	90.00	Kecamatan Tanjungsari	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	51.800.000,00	100	51.800.000,00	100	57.109.500,00	100	45.378.900,00	100	110.611.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	96.000.000,00	100	100.800.000,00	100	105.840.000,00	100	111.132.000,00	100	116.688.600,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	65,76	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	49.000.000,00	100	51.450.000,00	100	54.022.500,00	100	56.723.625,00	100	59.559.900,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	183.000.000,00	100	213.150.000,00	100	203.863.478,00	100	239.134.900,00	100	228.501.600,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,40	83,12	255.163.500,00	84,84	252.500.000,00	86,56	234.500.000,00	88,28	252.500.000,00	90,00	257.881.250,00	90,00	Kecamatan Rancakalong	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	22.600.000,00	100	85.000.000,00	100	105.000.000,00	100	115.000.000,00	100	136.750.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	68,64	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	60.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	83.265.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	109.191.100,00	100	115.440.650,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79,90	81,92	330.000.000,00	83,94	392.000.000,00	85,96	402.000.000,00	87,98	402.000.000,00	90,00	399.000.000,00	90,00	Kecamatan Jatinangor	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	93.000.000,00	100	93.000.000,00	100	93.000.000,00	100	103.000.000,00	100	105.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	77.000.000,00	100	85.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	95.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	80,95	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	42.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	65.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	181.000.000,00	100	228.000.000,00	100	233.000.000,00	100	263.000.000,00	100	280.500.000,00	100		
Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Penegakan Perda	Persen	100	100	20.000.000,00											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,05	83,64	352.000.000,00	85,23	372.000.000,00	86,82	394.000.000,00	88,41	416.000.000,00	90,00	438.000.000,00	90,00	Kecamatan Paseh	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	55.000.000,00	100	57.750.000,00	100	60.500.000,00	100	63.250.000,00	100	65.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	80.000.000,00	100	83.000.000,00	100	86.000.000,00	100	89.000.000,00	100	92.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	76,26	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	40.000.000,00	100	42.000.000,00	100	44.000.000,00	100	46.000.000,00	100	48.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	172.700.000,00	100	182.750.000,00	100	191.500.000,00	100	200.250.000,00	100	209.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,01	82,81	242.000.000,00	84,61	272.638.700,00	86,40	304.685.565,00	88,20	338.192.295,00	90,00	373.283.758,00	90,00	Kecamatan Conggeang	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	99,53	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,71	87,37	310.000.000,00	88,03	375.000.000,00	88,68	367.500.000,00	89,34	410.000.000,00	90,00	412.500.000,00	90,00	Kecamatan Tomo	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	127.500.000,00	100	130.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	112.000.000,00	100	115.000.000,00	100	119.500.000,00	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	74,75	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	110.000.000,00	100	95.000.000,00	100	102.500.000,00	100	107.500.000,00	100	110.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	75.000.000,00	100	182.500.000,00	100	202.500.000,00	100	222.500.000,00	100	242.500.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,00	83,60	456.649.000,00	85,20	415.408.802,00	86,80	414.000.000,00	88,40	429.688.450,00	90,00	456.108.950,00	90,00	Kecamatan Buahdua	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	26.000.000,00	100	28.000.000,00	100	29.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	93.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	86,39	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	45.000.000,00	100	52.000.000,00	100	57.000.000,00	100	58.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	138.771.000,00	100	186.000.000,00	100	203.143.582,00	100	219.000.000,00	100	233.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,08	87,66	313.000.000,00	88,25	242.250.000,00	88,83	258.991.788,00	89,42	285.000.000,00	90,00	295.000.000,00	90,00	Kecamatan Darmaraja	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	25.000.000,00	100	65.083.300,00	100	70.000.000,00	100	30.000.000,00	100	70.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	68,49	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	40.000.000,00	100	22.000.000,00	100	45.000.000,00	100	40.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	115.000.000,00	100	190.000.000,00	100	168.000.000,00	100	213.524.150,00	100	171.480.100,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,00	80,40	282.500.000,00	82,80	282.500.000,00	85,20	282.500.000,00	87,60	282.500.000,00	90,00	282.500.000,00	90,00	Kecamatan Situraja	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	24.750.000,00	100	24.750.000,00	100	24.750.000,00	100	24.750.000,00	100	24.750.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	70.400.000,00	100	70.400.000,00	100	70.400.000,00	100	70.400.000,00	100	70.400.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	86,97	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	65,49	70,39	360.000.000,00	75,29	403.000.000,00	80,20	425.000.000,00	85,10	445.000.000,00	90,00	467.000.000,00	90,00	Kecamatan Jatigede	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	47.500.000,00	100	49.500.000,00	100	52.500.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	52.000.000,00	100	73.500.000,00	100	77.175.000,00	100	81.975.000,00	100	86.475.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	92,01	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	55.000.000,00	100	69.750.000,00	100	73.250.000,00	100	77.000.000,00	100	80.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	115.875.000,00	100	121.875.000,00	100	127.875.000,00	100	135.375.000,00	100	145.500.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,71	87,37	326.550.000,00	88,03	326.625.000,00	88,68	343.925.000,00	89,34	394.831.200,00	90,00	412.580.900,00	90,00	Kecamatan Wado	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	25.000.000,00	100	45.000.000,00	100	65.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	52.000.000,00	100	65.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	65,11	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	70.000.000,00	100	182.500.000,00	100	192.711.019,00	100	195.330.550,00	100	200.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	76,82	79,46	413.177.000,00	82,09	518.000.000,00	84,73	518.000.000,00	87,36	518.000.000,00	90,00	518.000.000,00	90,00	Kecamatan Ujungjaya	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	39.714.700,00	100	131.000.000,00	100	131.000.000,00	100	131.000.000,00	100	131.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	113.832.650,00	100	191.000.000,00	100	191.000.000,00	100	191.000.000,00	100	191.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	76,38	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	78.892.650,00	100	302.000.000,00	100	302.000.000,00	100	302.000.000,00	100	302.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,02	82,02	398.000.000,00	84,01	421.011.000,00	86,01	460.998.800,00	88,00	453.036.000,00	90,00	477.196.800,00	90,00	Kecamatan Cimanggung	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	71.500.000,00	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	115.000.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	90.000.000,00	100	117.000.000,00	100	117.000.000,00	100	117.000.000,00	100	117.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	84,8	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	110.000.000,00	100	120.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	160.000.000,00	100	165.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,79	84,23	355.550.000,00	85,67	392.000.000,00	87,12	417.206.532,00	88,56	446.526.250,00	90,00	479.395.400,00	90,00	Kecamatan Cibugel	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	25.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00	100	29.000.000,00	100	30.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	73.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	86,71	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	50.000.000,00	100	52.382.100,00	100	54.000.000,00	100	56.000.000,00	100	56.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	75.450.000,00	100	80.000.000,00	100	83.000.000,00	100	83.000.000,00	100	85.000.000,00	100		
Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Penegakan Perda	Persen	100	100	20.000.000,00									100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,84	83,47	275.000.000,00	85,10	280.311.500,00	86,74	307.311.500,00	88,37	335.311.500,00	90,00	376.223.300,00	90,00	Kecamatan Tanjungmedar	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	95.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	98,01	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	56.750.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	115.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	75,51	78,41	411.000.000,00	81,31	433.630.100,00	84,20	457.247.771,00	87,10	481.860.700,00	90,00	507.556.100,00	90,00	Kecamatan Pamulihan	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	30.000.000,00	100	31.500.000,00	100	33.075.000,00	100	34.728.750,00	100	36.465.200,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	80.000.000,00	100	84.000.000,00	100	88.200.000,00	100	92.610.000,00	100	97.240.500,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	76,16	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	60.000.000,00	100	63.000.000,00	100	66.150.000,00	100	69.457.500,00	100	72.930.400,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	90.000.000,00	100	94.500.000,00	100	99.225.000,00	100	104.186.250,00	100	109.395.600,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,02	82,02	321.800.000,00	84,01	291.800.000,00	86,01	304.800.000,00	88,00	304.800.000,00	90,00	317.756.500,00	90,00	Kecamatan Sukasari	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	75.424.500,00	100	69.326.300,00	100	74.901.700,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	71,96	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	75.000.000,00	100	30.000.000,00	100	75.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	137.000.000,00	100	182.999.780,00	100	192.000.000,00	100	214.000.000,00	100	243.900.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,15	80,52	252.000.000,00	82,89	291.500.000,00	85,26	249.000.000,00	87,63	248.425.250,00	90,00	294.368.800,00	90,00	Kecamatan Cisitu	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	38.000.000,00	100	46.000.000,00	100	44.000.000,00	100	60.512.200,00	100	46.512.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	35.000.000,00	100	70.557.200,00	100	72.557.200,00	100	73.557.200,00	100	78.557.200,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	77,78	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	70.000.000,00	100	55.057.200,00	100	53.057.200,00	100	54.057.200,00	100	60.057.200,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	135.000.000,00	100	95.028.600,00	100	100.528.600,00	100	110.528.600,00	100	171.028.600,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	76,17	78,94	255.000.000,00	81,70	246.750.000,00	84,47	260.662.500,00	87,23	283.311.700,00	90,00	290.168.500,00	90,00	Kecamatan Ganeas	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	70.000.000,00	100	26.250.000,00	100	73.714.100,00	100	28.837.300,00	100	78.841.600,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	71.000.000,00	100	74.550.000,00	100	78.277.500,00	100	82.191.375,00	100	86.300.944,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	91,56	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	62.000.000,00	100	45.100.000,00	100	44.100.000,00	100	44.660.167,00	100	48.620.250,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	72.000.000,00	100	124.431.000,00	100	130.652.550,00	100	157.185.178,00	100	165.044.437,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79,00	81,20	360.000.000,00	83,40	380.177.998,00	85,60	411.328.700,00	87,80	414.627.900,00	90,00	432.224.100,00	90,00	Kecamatan Jatinunggal	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	20.000.000,00	100	21.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	75.000.000,00	100	78.750.000,00	100	60.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	79,09	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	40.000.000,00	100	42.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	207.580.000,00	100	217.959.000,00	100	232.580.000,00	100	237.580.000,00	100	260.000.000,00	100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,23	82,18	330.000.000,00	84,14	350.000.000,00	86,09	353.000.000,00	88,05	368.000.000,00	90,00	389.000.000,00	90,00	Kecamatan Surian	
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	90.000.000,00	100		
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	100.500.000,00	100	125.500.000,00	100	125.500.000,00	100	135.500.000,00	100	143.500.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	93,76	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	55.000.000,00	100	81.139.000,00	100	101.139.000,00	100	106.139.000,00	100	109.139.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	115.000.000,00	100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,22	82,98	232.000.000,00	84,73	229.824.400,00	86,49	243.850.000,00	88,24	255.356.600,00	90,00	128.659.400,00	90,00	Kecamatan Cisarua	
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	40.000.000,00	100	55.974.400,00	100	65.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	87.000.000,00	100	85.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100		
	Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	89,27	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	25.000.000,00	100	22.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100		
	Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	140.000.000,00	100	170.000.000,00	100	172.077.600,00	100	181.000.000,00	100	200.000.000,00	100		
NON URUSAN					129.037.899.300,00		131.612.242.578,00		136.306.440.434,00		143.225.556.962,00		149.481.939.484,00			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persen	100	100	71.085.457.831,00	100	73.903.765.745,00	100	79.388.510.035,00	100	84.090.526.616,00	100	87.507.103.805,00	100	Perangkat daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persen	100	100	45.924.199.700,00	100	41.210.853.502,00	100	40.410.465.508,00	100	41.239.548.740,00	100	43.420.652.316,00	100	Perangkat daerah	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	2.011.750.000,00	100	3.609.513.645,00	100	2.532.546.908,00	100	2.517.068.950,00	100	3.184.148.863,00	100	Perangkat daerah	
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas	Persen	100	100	20.000.000,00	100	10.250.000,00	100	10.512.500,00	100	10.800.000,00	100	11.100.000,00	100	Perangkat daerah	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	2.531.016.500,00	100	4.673.954.617,00	100	4.638.335.455,00	100	5.023.070.994,00	100	5.278.909.332,00	100	Perangkat daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja deangan standar pelaporan kinerja	Persen	100	100	4.200.074.769,00	100	4.476.062.374,00	100	4.840.228.186,00	100	5.115.117.150,00	100	5.397.435.530,00	100	Perangkat daerah	
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja deangan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Persen													Perangkat daerah	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	KET
				2019		2020		2021		2022		2023				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	Persen	100	100	2.304.432.000,00	100	2.558.067.415,00	100	2.783.944.334,00	100	3.424.732.012,00	100	3.161.855.288,00	100	Perangkat daerah	
	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persen													Perangkat daerah	
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100	100	960.968.500,00	100	1.169.775.280,00	100	1.701.897.508,00	100	1.804.692.500,00	100	1.520.734.350,00	100	Perangkat daerah	
				JUMLAH	1.393.348.028.992,00		1.590.884.036.513,00		1.626.127.263.324,00		1.662.733.487.113,00		1.682.150.231.622,00			

- - -

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah (indikator tujuan) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagaimana tersajikan dalam Tabel 8.1 serta untuk menggunakan indikator tujuan atau sasaran penetapan Indikator Utama Daerah tersajikan dalam Tabel 8.2. Lebih lanjut, sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) disajikan pada Tabel 8.3. dan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 8.4.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Makro
Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,07	70,53	71,39	72,25	73,11	73,97	74,83	74,83
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,53	9,76	8,96	8,16	7,36	6,56	5,76	5,76
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,15	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,23	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88
5	Indeks Gini	Poin	0,39	0,42	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupatan Sumedang
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kodisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Angka harapan hidup	Tahun	72,07	72,26	72,44	72,63	72,81	73,00	73,00
2	Rata – rata lama sekolah	Tahun	8,10	8,29	8,48	8,67	8,86	9,07	9,07
3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,00	13,22	13,44	13,66	13,88	14,11	14,11
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	8,96	8,16	7,36	6,56	5,76	5,76
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,4	94,87	95,34	95,81	96,28	96,75	96,75
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,7	69,23	69,77	70,3	70,84	71,37	71,37
7	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88
9	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,8	74,8	78,8	82,8	82,8
10	Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	64	66	68	70	70
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,68	58,92	59,18	59,47	59,77	60,11	60,11
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	155	150	145	140	135	135
13	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	BB	A	A	A	A
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65	70	75	80	85	85
16	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	80,74	81	83	86	89	90	90
17	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9,67	10,06	10,38	10,70	11,04	11,35	11,35
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68
19	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.467	18.467	19.467	20.467	20.467

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,53	71,39	72,25	73,11	73,97	74,83	74,83	
1.2	Rata – rata lama sekolah	Tahun	8,10	8,29	8,48	8,67	8,86	9,07	9,07	
1.3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,00	13,22	13,44	13,66	13,88	14,11	14,11	
1.4	Angka harapan hidup	Tahun	72,07	72,26	72,44	72,63	72,81	73,00	73,00	
1.5	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9,67	10,06	10,38	10,70	11,04	11,35	11,35	
1.6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	8,96	8,16	7,36	6,56	5,76	5,76	
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68	
1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88	
1.9	Indeks Gini	Poin	0,42	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	
1.10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,40	94,87	95,34	95,81	96,28	96,75	96,75	
1.11	Indeks Pemberdayaan	Poin	68,70	69,23	69,77	70,30	70,84	71,37	71,37	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	Gender									
1.12	Nilai tukar petani (NTP)	Poin	108,39	109,50	110,00	110,50	111,00	111,50	111,50	
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
A	**URUSAN WAJIB**									
1.1	**URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR**									Dinas Pendidikan
1.1.1	**PENDIDIKAN**									
1.1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,93	107,03	107,13	107,23	107,23	
1.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,62	103,72	103,82	103,92	104,02	104,02	
1.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,44	105,55	105,65	105,76	105,76	
1.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	103,19	103,40	103,60	103,81	103,81	
1.1.1.5	Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	65,03	66,09	73,77	82,52	91,26	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
1.1.1.6	Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	13,45	21,51	29,50	37,49	45,49	53,48	53,48	
1.1.1.7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)	-	1 : 27	1 : 27	1 : 27	1 : 27	1 : 26	1 : 26	1 : 26	
1.1.1.8	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)	-	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 31	1 : 31	1 : 31	
1.1.1.9	APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,62	89,71	89,80	89,89	89,89	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.1.1.10	Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	31,08	52,89	74,70	96,51	100,00	100,00	100,00	
1.1.1.11	Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,9	2,1	2,4	2,7	2,7	
1.1.1.12	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0	100	100	100	100	100	
1.1.2	**KESEHATAN**									Dinas Kesehatan
1.1.2.1	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	10	8	7	6	6	
1.1.2.2	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	120	94	70	50	50	
1.1.2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85	87	90	91	92	92	
1.1.2.4	Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	29	26	23	20	17	17	Dinas Kesehatan
1.1.2.5	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	Rumah Sakit Umum Daerah
1.1.2.6	Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	113/ 100.000	111/ 100.000	109/ 100.000	107/ 100.000	105/ 100.000	100/ 100.000	100/ 100.000	
1.1.2.7	Universal Health Coverage	Persen	73,17	96	97	98	99	100	100	
1.1.2.8	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,12	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60	
1.1.2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	98	98	98	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
1.1.2.10	IKM Rumah Sakit	Poin	83,70	90	91	92	93	95	95	
1.1.2.11	Persentase Pencapaian Indikator Mutu	Persen	88,25	90	91	92	93	95	95	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	Pelayanan di Rumah Sakit									
1.1.3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3.1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,80	66,80	70,80	74,80	78,80	82,80	82,80	
1.1.3.2	Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	64	66	68	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3.3	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.3.4	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	0	20	40	60	80	100	100	
1.1.3.5	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	Persen	20	28,75	48,75	58,75	68,75	75,00	75,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.1.3.6	Persentase penanganan sampah	Persen	n/a	80	75	70	65	60	60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.3.7	Persentase pengurangan sampah	Persen	n/a	20	25	30	35	40	40	
1.1.3.8	Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04	11,07	11,11	11,14	11,17	11,17	
1.1.4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
										Pertanahan
1.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	80,67	81,33	82,00	82,67	83,33	83,33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.1.4.2	Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,30	0,27	0,15	0,09	0,06	0,06	
1.1.4.3	Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80	83	85	87	90	90	
1.1.4.4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	60	65	70	75	80	80	
1.1.5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.5.1	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	60,55	65	70	75	85	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.5.2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.5.3	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	60	70	80	80	80	80	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.1.5.5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87,50	87,50	90	90	90	90	90	
1.1.5.6	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	155	150	145	140	135	135	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.1.6	**SOSIAL**									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.6.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	6,85	6,05	6,05	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**									
1.2.1	**TENAGA KERJA**									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.1.2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	Industrial									
1.2.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.2.1	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.2.2	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701	750	801	801	
1.2.2.3	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya	Persen	0,70	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	5,70	
1.2.3	**PANGAN**									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	87,30	88,50	89,60	90,80	92,50	92,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.4	**PERTANAHAN**									Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.2.4.1	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.2.4.2	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Pertanahan
1.2.5	**LINGKUNGAN HIDUP**									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.2.5.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,89	48,09	48,29	48,49	48,69	48,89	48,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.2.5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,29	80,49	80,69	80,89	81,09	81,29	81,29	
1.2.5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	50,57	50,86	51,22	51,63	52,10	52,63	52,63	
1.2.6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80	83	85	87	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.6.2	Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	89	97	97	98	98	98	98	
1.2.6.3	Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	81	91	91	93	93	93	93	
1.2.6.4	Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	17	9	3	3	3	3	3	
1.2.7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.2.7.1	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	56,30	74,80	92,60	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.2.7.2	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	24,80	50	81,50	100	100	100	100	
1.2.7.3	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	32,20	100	100	100	100	100	100	
1.2.8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.8.1	TFR	Angka	2,09	2,07	2,05	2,03	2,01	2,00	2,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.8.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	4,12	3,71	3,30	2,88	2,47	2,06	2,06	
1.2.8.3	Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	67,03	58,22	49,42	40,61	31,81	23,00	23,00	
1.2.9	**PERHUBUNGAN**									Dinas Perhubungan
1.2.9.1	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27	42,12	51,83	64,88	77,27	77,27	Dinas Perhubungan
1.2.9.2	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	59,85	61,24	62,64	64,04	65,43	65,43	
1.2.9.3	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	Orang/ hari	10.044	10.284	10.524	10.764	11.004	11.244	11.244	
1.2.9.4	Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	83,40	86,70	90,00	93,30	96,60	100	100	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.2.9.5	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jum-lah Pe-lang-garan	1.787	1.490	1.133	984	419	62	62	
1.2.9.6	Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	50	60	70	80	90	100	100	
1.2.10	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**									Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1.2.10.1	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1.2.10.2	Nilai SPBE	Poin	2,46	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,20	
1.2.11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.2.11.1	Cakupan Koperasi Aktif	Persen	72,93	75	78	81	84	85	85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.2.11.2	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.467	18.467	19.467	20.467	20.467	
1.2.12	**PENANAMAN MODAL**									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.2.12.1	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.106.170.000.000	1.216.787.000.000	1.338.465.700.000	1.606.158.840.000	1.927.390.608.000	2.505.607.790.400	2.505.607.790.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.12.2	Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90	90	
1.2.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
1.2.13.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	n/a	80	90	100	100	100	100	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
1.2.13.2	Jumlah Atlet yang berprestrasi tingkat Nasional	Atlet	14	20	20	20	20	20	20	
1.2.14	**STATISTIK**									Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1.2.14.1	Presentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45,5	70	85	95	100	100	100	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1.2.15	**PERSANDIAN**									Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1.2.15.1	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1.2.16	**KEBUDAYAAN**									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
1.2.17	**PERPUSTAKAAN**									Dinas Arsip dan Perpustakaan
1.2.17.1	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	70.235	73.511	75.716	77.988	80.327	82.737	82.737	Dinas Arsip dan Perpustakaan
1.2.17.2	Cakupan lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	22,22	31	48	64	85	100	100	
1.2.17.3	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,4	76	80	84	58	67	67	
1.2.18	**KEARSIPAN**									Dinas Arsip dan Perpustakaan
1.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan	Persen	3,64	21,82	40,00	58,18	76,36	100	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	standar									
B	**URUSAN PILIHAN**									
2.1	**KELAUTAAN DAN PERIKANAN**									Dinas Perikanan dan Peternakan
2.1.1	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	3,15	4,00	4,60	5,20	5,80	6,40	6,40	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.2	**PARIWISATA**									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498.472	598.166	717.800	861.360	1.033.632	1.240.358	4.451.316	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.2.2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	44	63	75	100	100	100	100	
2.3	**PERTANIAN**									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14	10,24	10,34	10,45	10,55	10,55	
	Tanaman Hortikultura	Persen	3,20	4,00	4,70	5,40	6,10	6,80	6,80	
	Perkebunan	Persen	4,12	4,20	4,80	5,50	6,20	6,90	6,90	
2.3.2	Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	3,68	4,30	4,90	5,50	6,10	6,70	6,70	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.4	**KEHUTANAN**									Dinas Lingkungan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
										Hidup dan Kehutanan
2.4.1	Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi	Persen	60	63	64	66	69	71	71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.2	Nilai Pengelolaan Hutan Kota	Nilai	83	83	83	83	83	83	83	
2.5	**PERDAGANGAN**									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.5.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4,59	4,89	5,19	5,49	5,79	6,09	6,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.6	**PERINDUSTRIAN**									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
2.6.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,29	5,32	5,35	5,38	5,41	5,44	5,44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.7	**TRANMIGRASI**									Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2.7.1	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	51	56	61	66	71	76	76	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
C	**URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG**									
3.1	**INSPEKTORAT**									Inspektorat
3.1.1	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	20	80	80	90	100	100	100	Inspektorat
3.1.2	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	80	80	90	100	100	100	
3.1.3	Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kate-gori	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	
3.1.4	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Persen	n/a	20	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	dan WBBM									
3.1.5	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80	90	90	100	100	100	
3.1.6	Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8	7	6	5	4	4	
3.2	**PERENCANAAN**									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.2.1	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.2.2	Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
3.2.3	Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
3.2.4	Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	96,5	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
3.3	**KEUANGAN**									Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3.3.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3.3.2	APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3.3.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	16,47	17,03	17,77	18,99	20,29	21,67	21,67	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	77,34	85	87	90	91	91	91	
3.4	**KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.2	Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,90	60,00	66,25	72,50	78,75	85,00	85,00	
3.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
3.5.1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	80	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.6	**SEKRETARIAT DAERAH**									Sekretariat Daerah
3.6.1	Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
3.6.2	Persentase Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
3.6.3	Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
3.6.4	Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
3.6.5	Persentase Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum Yang Capaian Target Kinerja Tahunannya Berkategori "Baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.6	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,09	3,15	3,30	3,45	3,60	3,75	3,75	
3.6.7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,06	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	
3.6.8	Nilai SAKIP Kabupaten	Kate-gori	B	B	BB	A	A	A	A	
3.6.9	Cakupan Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3.6.10	Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	Persen	46,67	100	100	100	100	100	100	
3.6.11	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik”	Persen	60	100	100	100	100	100	100	
3.6.12	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kate-gori	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
3.6.13	Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3.6.14	Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Program Sumedang Simpati	Persen	30	65	70	75	80	85	85	
3.6.15	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
3.6.16	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	80	100	100	100	100	100	100	
3.7	**SEKRETARIAT DPRD**									Sekretariat DPRD
3.8.1	Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	93,40	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
4.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
4.1.1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.1.2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.1.3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	80,60	80,65	80,65	80,65	80,65	80,65	80,65	
4.1.4	Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
III	**ASPEK DAYA SAING**									

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,68	58,92	59,18	59,47	59,77	60,11	60,11	
3.2	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	80,74	81	83	86	89	92	92	
3.3	Pertumbuhan PDRB ADHK	Persen	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88	
3.4	Pertumbuhan PDRB ADHB	Persen	10,00	10,26	10,53	10,81	11,10	11,40	11,40	
3.5	PDRB per Kapita	Juta	27,00	28,25	29,54	30,85	32,19	33,58	33,58	
3.6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	

Sumber Hasil Analisis

Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	**URUSAN WAJIB**								
1.1.1	**PENDIDIKAN**								
1.1.1.1	Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Persen	119,01	119,13	119,25	119,37	119,49	119,61	119,61
1.1.1.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	Persen	88,69	88,95	89,21	89,48	89,74	90,00	90,00
1.1.1.4	Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
1.1.1.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	0,81	0,80	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75
1.1.1.6	Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik	Persen	13,45	21,51	29,50	37,40	45,59	53,48	53,48
1.1.1.7	Angka Partisipasi Kasar Paket A	Persen	0,01	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
1.1.1.8	Angka Partisipasi Kasar Paket B	Persen	0,71	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,20
1.1.1.9	Angka Partisipasi Kasar Paket C	Persen	3,13	3,03	2,93	2,83	2,73	2,63	2,63
1.1.1.10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	97,20	97,49	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.11	Rata rata peningkatan hasil UN	Persen	46,13	49,82	53,51	57,20	60,89	64,58	64,58
1.1.1.12	Cakupan Pelayanan Pendidikan	Persen	85,47	86,32	87,17	88,03	88,89	90,00	90,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.1.1.13	Persentase siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan diniyah	Persen	n/a	0	100	100	100	100	100
1.1.2	**KESEHATAN**								
1.1.2.1	Persentase Ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.2	Persentase Ketersediaan alat kesehatan	Persen	60	70	80	90	100	100	100
1.1.2.3	Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.4	Persentase capaian SDM Bidang Kesehatan	Persen	83	100	100	100	100	100	100
1.1.2.5	Cakupan Desa siaga aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.6	Persentase Lingkungan Bersih Sehat	Persen	72	80	85	90	95	100	100
1.1.2.7	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.8	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.10	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.11	Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi	Persen	77,78	100	100	100	100	100	100
1.1.2.12	Persentase Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi	Persen	48	52	60	71	82	85	85
1.1.2.13	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Persen	8,07	7,67	7,27	6,87	6,47	6,07	6,07
1.1.2.14	Persentase BBLR	Persen	3,09	2,49	1,81	1,17	0,53	0,11	0,11
1.1.2.15	Persentase balita gizi lebih	Persen	1,01	0,95	0,79	0,63	0,47	0,31	0,31
1.1.2.16	Persentase balita gizi kurus	Persen	2,11	1,01	0,91	0,81	0,71	0,61	0,61

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.1.2.17	Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan	Persen	54,2	100	100	100	100	100	100
1.1.2.18	Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang	Persen	73,13	95	96	97	98	100	100
1.1.2.19	Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.20	Persentase Pengadaan kelengkapan Alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	98	98	98	100	100	100	100
1.1.2.21	Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis	Persen	86,21	90	91	92	93	95	95
1.1.2.22	Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan	Persen	88,64	90	91	92	93	95	95
1.1.2.23	Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis	Persen	87,96	90	91	92	93	95	95
1.1.2.24	Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran	Persen	89,08	90	91	92	93	95	95
1.1.2.25	Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan	Persen	87,64	90	91	92	93	95	95
1.1.2.26	Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian	Persen	90	91	92	93	94	95	95
1.1.3	**PEKERJAAN UMUM**								
1.1.3.1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	62,8	66,8	70,80	74,80	78,80	82,80	82,80
1.1.3.2	Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	42	43,4	44,80	46,20	47,60	49,00	49,00
1.1.3.3	Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor	Persen	18	18,6	19,20	19,80	20,40	21,00	21,00
1.1.3.4	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang terverfikasi	Persen	0	20	40	60	80	100	100
1.1.3.5	Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.1.3.6	Persentase Sarana Air Minum yang terbangun	Persen	70	80	83	85	87	90	90
1.1.3.7	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen	20	28,75	48,75	58,75	68,75	75,00	75,00
1.1.3.8	Persentase Bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	Persen	n/a	4,54	12,04	19,54	27,04	33,04	33,04
1.1.3.9	Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	n/a	80	75,00	70,00	65,00	60,00	60,00
1.1.3.10	Indek kepuasan masyarakat;	Persen	71,31	77	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
1.1.3.11	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	5,38	5,52	5,68	5,87	6,08	6,33	6,33
1.1.3.12	Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Persen	68,53	69,00	69,33	69,67	70,00	70,67	70,67
1.1.3.13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal	Persen	19	20	25	30	35	40	40
1.1.3.14	Persentase Luas RTH terkelola	Persen	11,04	11,04	11,07	11,11	11,14	11,17	11,17
1.1.4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1.1.4.1	Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional	Persen	50	52,61	55,22	57,83	60,44	63,05	63,05
1.1.4.2	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	80	80,13	80,30	80,48	80,67	80,87	80.87
1.1.4.3	Persentase PSU di Lingkungan Kompleks Perumahan/Permukiman (Pengembang)	Persen	0	1,5	4,50	7,50	10,50	13,50	13,50
1.1.4.4	Persentase Sanitasi yang terbangun	Persen	55	65	70	75	80	85	85
1.1.5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1.1.5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.2	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	60,55	65	70	75	85	90	90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.1.5.3	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	60	70	80	80	80	80
1.1.5.5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87,5	87,5	88	90	90	90	90
1.1.5.6	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Desa/kelurahan	277	277	277	277	277	277	277
1.1.5.7	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/ Kelurahan	0	5	10	15	20	25	25
1.1.5.8	Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.9	Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.10	Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direaliasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6	**SOSIAL**								
1.1.6.1	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	1,71	2,86	4,01	5,18	6,33	7,49	7,49
1.1.6.2	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	8,53	16,88	26,17	35,36	44,79	54,28	54,28
1.1.6.3	Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	2,77	11,17	20,74	29,79	40,00	51,60	51,60
1.1.6.4	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	5,73	14,89	24,05	33,21	42,37	53,05	53,05
1.1.6.5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0,68	10,61	20,54	30,47	40,41	50,34	50,34
1.1.6.6	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persen	n/a	10	20	30	40	50	50
1.1.6.7	Persentase Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	50,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.1.6.8	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6.9	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Persen	52,14	53,24	53,24	53,24	53,24	53,24	53,24
1.1.6.10	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**								
1.2.1	**TENAGA KERJA**								
1.2.1.1	Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat	Persen	60	100	100	100	100	100	100
1.2.1.2	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	20	20	20	20	20	20	20
1.2.1.3	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
1.2.2.1	Persentase OPD Responsif Gender	Persen	9,68	16,13	33,87	61,29	80,65	100	100
1.2.2.2	Jumlah Kebijakan Pengarustamaan Gender yang dihasilkan	Perda/ Perbup	1	3	4	5	6	7	7
1.2.2.3	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2.4	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	3,85	19,23	30,77	42,31	53,85	73,08	73,08
1.2.2.5	Persentase Organisasi wanita yang aktif	Persen	9,52	14,29	33,33	54,76	76,19	100	100
1.2.2.6	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	12,84	13,96	15,07	16,19	17,31	18,42	18,42

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.2.3	**PANGAN**								
1.2.3.1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3.2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	91,50	92,50	93,50	94,50	95,00	95,50	95,50
1.2.3.3	Persentase Pembinaan dan Pengasawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4	**PERTANAHAN**								
1.2.4.1	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4.2	Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	**LINGKUNGAN HIDUP**								
1.2.5.1	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Persen	26,90	30,90	36,6	43,8	52,8	63,8	63,8
1.2.5.2	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5.3	Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup;	Persen	15	30	50	70	80	100	100
1.2.5.4	Persentase pengujian kualitas air sungai;	Persen	40,74	48,15	55,56	62,96	70,37	81,48	81,48
1.2.5.5	Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan	Persen	98,91	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.5.6	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan	Persen	3,16	3,39	4,08	5,24	6,87	8,95	8,95
1.2.5.7	Persentase Pemantuan Kualitas Udara	Persen	66,67	68,89	73,33	77,78	82,22	86,67	86,67
1.2.5.8	Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati	Persen	29,86	30,55	31,37	32,33	33,42	34,65	34,65
1.2.5.9	Persentase mata air yang dilindungi	Persen	12,12	13,42	15,15	19,48	21,65	27,27	27,27

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.2.7	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								
1.2.7.1	Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.7.2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	81	94	94	97	97	97	97
1.2.7.3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	74	86	86	86	88	88	88
1.2.7.4	Jumlah Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan	Instansi	0	10	15	20	25	31	31
1.2.8	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1.2.8.1	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan	Persen	30	33	36	39	42	45	45
1.2.8.2	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	Persen	35	50	95	100	100	100	100
1.2.8.3	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	Persen	0	10	40	90	100	100	100
1.2.8.4	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	Persen	32,2	100	100	100	100	100	100
1.2.8.5	Persentase Desa yang Pengelolaan aset Desa yang akurat	Persen	0	5	40	90	100	100	100
1.2.9	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
1.2.9.1	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,28	74,47	74,77	75,07	75,37	75,67	75,67
1.2.9.2	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	8,37	9,08	9,07	9,06	9,05	9,04	9,04
1.2.9.3	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif	Persen	68,94	70	72	72,51	72,81	73,11	73,11
1.2.9.4	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif	Persen	64,37	65	65,62	65,8	66	66,32	66,32
1.2.9.5	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	Persen	62,81	63	63,41	63,6	63,82	64,1	64,1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.2.9.6	Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS	Persen	49,62	50,07	51,93	53,79	55,65	57,51	57,51
1.2.9.7	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	19,50	19,60	19,70	19,70	19,80	19,80	19,80
1.2.10	**PERHUBUNGAN**								
1.2.10.1	Persentase Kelengkapan Dokumen perhubungan	Persen	5,06	6,25	8,42	10,37	12,98	15,45	15,45
1.2.10.2	Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas	Persen	7,59	9,38	12,64	15,55	19,46	23,18	23,18
1.2.10.3	Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	Persen	10,12	12,51	16,85	20,73	25,95	30,91	30,91
1.2.10.4	Persentase ketersedian Terminal/Dermaga	Persen	2,53	3,13	4,21	5,18	6,49	7,73	7,73
1.2.10.5	Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	837	857	877	897	917	937	937
1.2.10.6	Jumlah KIR Angkutan Umum	Unit	9.000	9.357	9.714	10.071	10.428	10.787	10.787
1.2.10.7	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/hari	Orang/ hari	10.044	10.284	10.524	10.764	11.004	11.244	11.244
1.2.10.8	Persentase Satuan Ruas Parkir	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.2.10.9	Jumlah Operasi Lalu Lintas	Kali	6	2	17	17	17	17	17
1.2.11	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**								
1.2.11.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	27	50	100	100	100	100	100
1.2.11.2	Cakupan Media Masa yang dikembangkan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
1.2.11.3	Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Persen	25,45	50	100	100	100	100	100
1.2.11.4	Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan	Persen	93,86	96,39	100	100	100	100	100
1.2.12	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
1.2.12.1	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	423	449	458	467	476	485	485
1.2.12.2	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	Koperasi	362	72	72	72	73	73	362
1.2.12.3	Peningkatan jumlah koperasi besar	Koperasi	8	10	12	14	16	18	18

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.2.12.4	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.467	18.467	19.467	20.467	20.467
1.2.12.5	Jumlah UMKM yang mendapat Sapras	UMKM	2.566	3.530	4.561	5.659	6.824	8.056	8.056
1.2.13	**PENANAMAN MODAL**								
1.2.13.1	Persentase peningkatan jumlah investor	Persen	10	20	30	40	60	90	90
1.2.13.2	Persentase izin yang terbit tepat waktu	Persen	60	75	76	77	80	85	85
1.2.13.3	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.13.4	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	50	50	60	70	80	85	85
1.2.14	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
1.2.14.1	Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang di bina	Organisasi	n/a	270	304	338	338	338	338
1.2.14.2	Jumlah Pemuda yang dibina	Orang	1.010	2.387	2.542	2.697	2.853	3.000	3.000
1.2.14.3	Jumlah atlet pemula yang dibina	orang	14	20	20	20	20	20	20
1.2.14.4	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan	Kali	6	10	15	20	25	30	30
1.2.15	**STATISTIK**								
1.2.15.1	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45,5	70	85	95	100	100	100
1.2.16	**PERSANDIAN**								
1.2.16.1	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	33	50	67	83	100	100
1.2.17	**KEBUDAYAAN**								
1.2.17.1	Jumlah objek pemajuan kebudayaan Daerah yang di	Objek	11	11	11	11	11	11	11

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	lindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina								
1.2.18	**PERPUSTAKAAN**								
1.2.18.1	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	70.235	73.511	75.716	77.988	80.327	82.737	82.737
1.2.18.2	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,4	76	80	84	86	90	90
1.2.18.3	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	22,22	31	48	64	85	100	100
1.2.19	**KEARSIPAN**								
1.2.19.1	Persentase Perangkat Daerah yang berstandar Arispnya	Persen	3,64	21,82	40,00	58,18	76,36	100	100
2	**URUSAN PILIHAN**								
2.2	**PARIWISATA**								
2.2.1	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Kali	2	4	5	6	7	8	8
2.2.2	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	1	5	10	15	20	25	25
2.2.3	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	7	10	12	16	16	16	16
2.3	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
2.3.1	Jumlah produksi perikanan								
	1.Ikan Konsumsi	Ton	8.286	8.617	9.014	9.483	10.033	10.675	10.675
	2. Ikan Hias	Ekor	612.470	636.969	666.269	700.915	741.568	789.029	789.029
	3. Benih Ikan	Ribu Ekor	179.275	186.446	195.023	205.164	217.063	230.955	230.955
2.3.2	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Unit	45	48	52	56	60	64	64
2.3.3	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.4	**PERTANIAN**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
2.4.1	Jumlah produksi Tanaman Pangan	Ton	740.732	815.842	899.384	992.381	1.096.085	1.211.722	1.211.722
2.4.2	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.333	157.386	164.783	173.682	184.276	196.807	196.807
2.4.3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6.462	6.733	7.057	7.445	7.906	8.452	8.452
2.4.4	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	5.752	6.052	6.352	6.652	6.952	7.252	7.252
2.4.5	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,35
2.4.6	Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	Km	62	77	92	107	122	137	137
2.4.7	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	120	138	157	179	206	206
2.4.8	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	48	53	58	63	68	73	73
2.4.9	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	Teknologi/ penyuluh pertanian	3	6	9	12	15	18	18
2.4.10	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2835	275	550	825	1.100	1.375	1.375
2.4.11	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
2.4.12	-Kelas Pemula (skor 0-250)	Kelompok	767	762	757	752	746	739	739
2.4.13	-Kelas Lanjut (skor251-500)	Kelompok	1.405	1.406	1.407	1.408	1.410	1.413	1.413
2.4.14	-Kelas Madya(skor 501-750)	Kelompok	68	71	74	77	80	83	83
2.4.15	-Kelas Utama(skor 751-1000)	Kelompok	2	3	4	5	6	7	7
2.4.16	Persentase pengendalian penyakit hewan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.4.17	Jumlah populasi ternak:								
	1. Sapi potong	Ekor	29.783	31.064	32.586	34.378	36.475	38.919	38.919
	2. Sapi perah	Ekor	4.149	4.327	4.539	4.789	5.081	5.422	5.422
	3. Kambing	Ekor	27.957	29.159	30.588	32.270	34.239	36.533	36.533
	4. Domba	Ekor	111.324	116.111	121.800	128.499	136.338	145.472	145.472
	5. Ayam buras	Ekor	519.506	541.845	568.395	599.657	636.236	678.864	678.864
	6. Ayam ras petelur	Ekor	111.883	116.694	122.412	129.145	137.022	146.203	146.203
	7. Ayam ras pedaging	Ekor	2.866.495	2.989.754	3.136.252	3.308.746	3.510.580	3.745.788	3.745.788
	8. Itik	Ekor	49.553	51.684	54.216	57.198	60.687	64.753	64.753

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
2.4.18	Jumlah Produksi								
	1. Daging	Ton	15.474	16.139	16.930	17.861	18.951	20.221	20.221
	2. Telur	Ton	1.639	1.709	1.793	1.892	2.007	2.142	2.142
	3. Susu	Ton	12.323	12.853	13.483	14.224	15.092	16.103	16.103
2.4.19	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Unit	75	84	100	124	156	196	196
2.4.20	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.6	**URUSAN KEHUTANAN**								
2.6.1	Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi	Persen	60	63	64	66	69	71	71
2.6.2	Nilai Pengelolaan Hutan Kota	Nilai	83	83	83	83	83	83	83
2.7	**URUSAN PERDAGANGAN**								
2.7.1	Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4
2.7.2	Jumlah UTTP yang di tera	UTTP	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502
2.7.2	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	Orang	1.503	5.043	5.884	6.724	7.565	8.405	8.405
2.7.3	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk	Wilayah	0	1	2	3	4	5	5
2.7.3	Jumlah pasar yang di revitalisasi	Pasar	10	10	10	10	10	10	10
2.8	**URUSAN PERINDUSTRIAN**								
2.8.1	Peningkatan Jumlah IKM	IKM	1.771	3.478	3.746	4.013	4.281	4.602	4.602
2.8.2	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kelompok	160	169	178	187	196	205	205
2.8.3	Peningkatan Jumlah Sentra IndustrI	Sentra	5	0	7	9	11	12	12
2.9	**TRANMIGRASI**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
2.9.1	Jumlah transmigran yang telah dilatih dan ditempatkan	KK	51	56	61	66	71	76	76
2.9.2	Jumlah Transmigran lokal yang terlatih	KK	30	60	90	120	150	180	180
3	**URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG**								
3.1	**INSPEKTORAT**								
3.1.1	Persentase pemenuhan unsur SPIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.1.3	Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	400	380	371	360	353	340	340
3.1.4	Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	Buah	545	500	475	450	425	400	400
3.1.5	persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	Persen	15,63	23,44	31,25	39,06	46,88	54,69	54,69
3.1.6	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan	Persen	25	33,33	41,67	50	58,33	66,67	66,67
3.1.7	Persentase elemen IACM yang terpenuhi	Persen	66,67	100	100	100	100	100	100
3.1.8	Persentase Penilaian Zona Integritas	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
3.2	**PERENCANAAN**								
3.2.1	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	85	100	100	100	100	100	100
3.2.2	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik";	Persen	95	100	100	100	100	100	100
3.2.3	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori "Baik"	Persen	96,5	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
3.2.4	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik"	Persen	98	100	100	100	100	100	100
3.3.	**KEUANGAN**								
3.3.1	Tingkat akurasi dokumen penganggaran	Persen	90	92	93	94	95	97	97
3.3.2	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.3.3	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	90	91	92	93	95	97	97
3.3.4	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD	Persen	80	85	90	92	95	97	97
3.3.5	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)	Persen	86	87	88	89	90	91	91
3.3.6	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak	Poin	77,34	85	87	90	91	91	91
3.3.7	Persentase Potensi Pajak Daerah	Persen	60	75	80	85	85	90	90
3.3.8	Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar	Persen	70	80	85	90	90	95	95
3.3.9	Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan	Persen	80	90	100	100	100	100	100
3.4	**KEPEGAWAIAN**								
3.4.1	Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik	Persen	99,74	100	100	100	100	100	100
3.4.2	Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi	Persen	56,31	65	74	83	91	100	100
3.4.3	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	0,020	0,018	0,016	0,014	0,012	0,010	0,010
3.4.4	Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan	Persen	7,56	26,05	45	63	82	100	100
3.4.5	Persentase pegawai yang terlayani administrasi	Persen	90,17	95	96	97	98	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	kepegawaian								
3.4.6	Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.5	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
3.5.1	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	17,77	30	50	70	85	100	100
3.5.2	Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	Persen	27,74	42,19	57	71	85,55	100	100
3.6	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
3.6.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.6.2	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
3.7	**SEKRETARIAT DAERAH**								
3.7.1	ersentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
3.7.2	persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.7.3	Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan	Persen	60	100	100	100	100	100	100
3.7.4	Nilai LPPD	Persen	3,09	3,15	3,3	3,45	3,6	3,75	3,75
3.7.5	Persentase tertib administrasi kewilayahan	Persen	60	100	100	100	100	100	100
3.7.6	Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B"	Persen	0	60	69,23	88,46	100	100	100
3.7.7	Persentase data tanah HGU yang terferivikasi dan tervalidasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
3.7.8	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	BB	A	A	A	A
3.7.9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65	70	75	80	85	85
3.7.10	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang	Persen	60	70	80	80	90	90	90
3.7.11	Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih	Persen	60	100	100	100	100	100	100
3.7.12	Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.7.13	Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan	Persen	70	100	100	100	100	100	100
3.7.14	Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama	Persen	46,67	100	100	100	100	100	100
3.7.15	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur	Persen	85	100	100	100	100	100	100
3.7.16	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capian target kinerja tahunannya “baik"	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.7.17	Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.7.18	Persentase Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian target kinerja tahunannya berkategori“baik”	Persen	80	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
3.7.19	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik”	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.7.20	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kategori	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
3.7.21	Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.7.22	Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.7.23	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Sekretariat Daerah	Persen	60	70	100	100	100	100	100
3.7.24	Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah	Persen	0	80	100	100	100	100	100
3.7.25	Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.7.26	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	Persen	80	85	85	90	90	95	95
3.7.27	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati	Persen	30	75	80	85	90	95	95
3.7.28	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Persen	90	100	100	100	100	100	100
3.7.29	Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3.7.30	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.8	**SEKRETARIAT DPRD**								
3.8.1	Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan	Persen	85	86	87	88	89	90	90
3.8.2	Persetujuan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.8.3	Persentase Fungsi Pegawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
3.8.4	Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi	Persen	95	95	95	95	95	95	95
3.8.5	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.8.6	Prosentase Aktifitas Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
4.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
4.1.1.1	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.2	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politk	Orang	1.050	1.575	2.100	2.700	3.350	4.050	4.050
4.1.1.3	Persentase Ormas yang dibina	Persen	35,42	46,19	47,14	48,09	49,05	50	50
4.1.1.4	Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.5	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.6	Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Hasil Analis

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Adapun KUA/PPAS berpedoman pada RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

A. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
B. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
C. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah;

E. Bupati Sumedang selaku kepala daerah menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang. Mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik, sehingga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 371 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan menteri.

Demikian, penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang menjadi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan diharapkan dapat “mewujudkan Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

RPJMD

KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019

